SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2023-2028;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2023-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang disusun oleh kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Daerah yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
6. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
10. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
11. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk:

a. mengkaji kondisi faktual Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;

b. merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
c. merumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
d. merumuskan rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 3

Target penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu:
a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tidak bertambah; dan
b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ada dapat berkurang.

Pasal 4

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi sebagai landasan kebijakan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

BAB II
PENYUSUNAN DOKUMEN RP2KPKPK

Pasal 5

RP2KPKPK merupakan dokumen yang memberikan arahan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 6

Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun melalui tahapan:
a. persiapan;
b. survei;
c. penyusunan data dan fakta;
d. analisis;
e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
f. penyusunan RP2KPKPK.

Pasal 7

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
   a. mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsolidasi penyusunan RP2KPKPK;
   b. melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja;
   c. menyiapkan data profil Permukiman Kumuh yang terdiri dari baseline data kumuh atau data statistik terkait;
   d. melakukan penyiapan readiness kriteria penyusunan RP2KPKPK;
   e. overview kebijakan Daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang Daerah dan status tanah permukiman;
   f. melakukan konsolidasi dengan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah; dan
   g. melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat di tingkat kabupaten.

(2) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
   a. bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder;
   b. menyusun desain survei; dan
   c. melaksanakan survei dan mengolah data permukiman kumuh bersama dengan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.

(3) Penyusunan data dan fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi kegiatan verifikasi dan indikasi justifikasi lokasi serta penyusunan profil Permukiman Kumuh.

(4) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi kegiatan melakukan proses pemutakhiran profil Permukiman Kumuh yang dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* untuk verifikasi data.

(5) Penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
   a. merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan Permukiman Kumuh;
   b. bersama dengan pemangku kepentingan mengoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan permukiman;
   c. merumuskan kebutuhan penanganan kawasan Permukiman Kumuh;
   d. merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas Permukiman Kumuh; dan

e. melaksanakan *Focus Group Discussion* untuk menyepakati konsep dan strategi sesuai dengan pembangunan Daerah yang berkelanjutan, dengan adanya *added value.*

(6) Penyusunan RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
   a. merumuskan skenario pentahapan pencapaian kota bebas kumuh, desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian;
   b. merumuskan rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala Daerah, skala kawasan dan skala lingkungan;
   c. menentukan skala prioritas penanganan Permukiman Kumuh berdasarkan readiness criteria, penanganan pembangunan yang berkelanjutan dan pertimbangan lain;
   d. merumuskan konsep tematik dan skenario pencegahan serta peningkatan kualitas kawasan prioritas;
   e. menyusun rencana penyediaan tanah;
   f. menyusun rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas; dan
   g. bersama pemangku kepentingan melakukan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas.

Pasal 8

Penyusunan dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, swasta dan masyarakat.

BAB III
LINGKUP DOKUMEN RP2KPKPK

Pasal 9

RP2KPKPK disusun terhadap lokasi kumuh sebanyak 17 (tujuh belas) desa/kelurahan dengan luas 153,71 ha (seratus lima puluh tiga koma tujuh satu hektar).

BAB IV
LINGKUP MATERI RP2KPKPK

Pasal 10

(1) Sistematika penyusunan dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
   a. BAB I Pendahuluan;
   b. BAB II Kajian Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman;

c. BAB III Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan;
d. BAB IV Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
e. BAB V Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
f. BAB VI Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
g. BAB VII Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
h. BAB VIII Rencana Penyediaan Tanah;
i. BAB IX Rencana Investasi dan Pembiayaan; dan
j. BAB X Rumusan Peran Pemangku Kepentingan.

(2) Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

MOHAMAD SUMARSONO

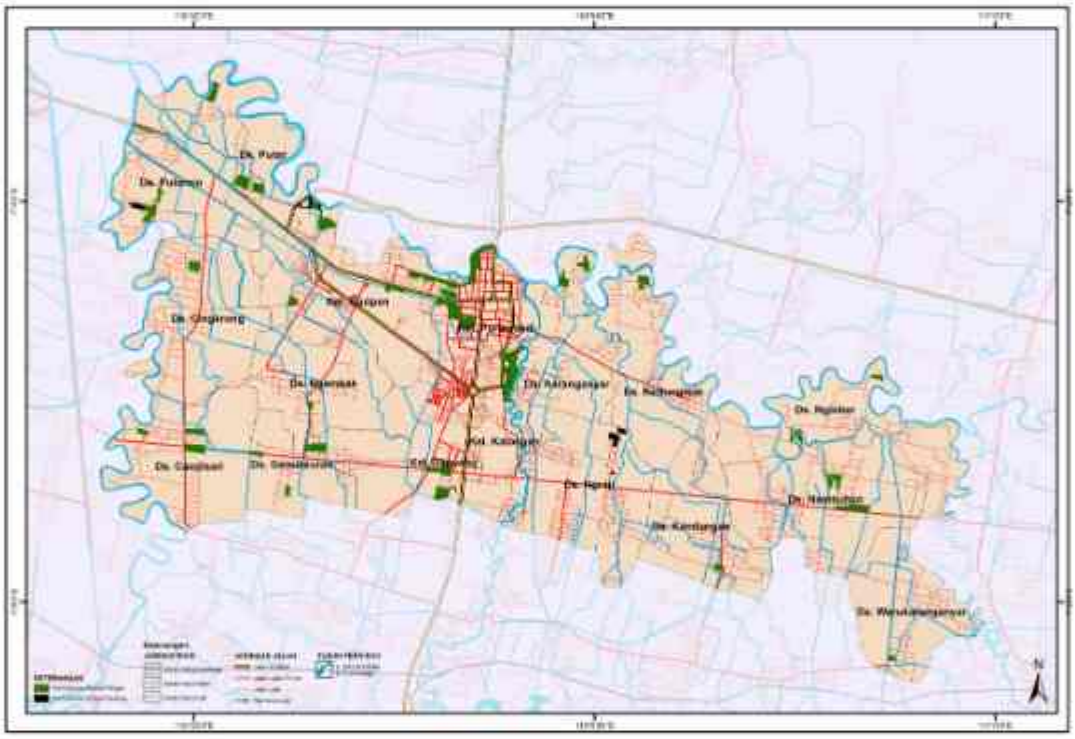
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2023-2028

RP2KPKPK
KABUPATEN GROBOGAN





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Buku Laporan Akhir Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Grobogan akhirnya dapat diselesaikan. Dokumen ini memuat kebijakan pembangunan dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh beserta kebutuhan penanganannya.

Berlandaskan profil perumahan kumuh dan permukiman kmuh serta permasalahan dan kebutuhan penanganan, kemudian disusunlah konsep dan strategi penanganan kumuh di Kabupaten Grobogan. Kemudian, sebagai panduan pelaksanaan penanganna kekumuhan di Kabupaten Grobogan, disusun program dan kegiatan, rencana aksi, hingga memorandum program. Dalam rencana aksi dan memorandum program, tergambar program dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan, lokasi, estimasi pembiayaan, sumber pembiayaan, tahun pelaksanaan, hingga pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan, atas dukungan dan kerjasama seluruh pihak kami ucapkan terima kasih.

Purwodadi, 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vii

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud, Tujuan, Sasaran 4
1.2.1 Maksud 4
1.2.2 Tujuan 4
1.2.3 Sasaran 4
1.3 Ruang Lingkup 5
1.3.1 Ruang Lingkup Substansi 5
1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah 5
1.4 Kedudukan Dokumen RP2KPKPK Dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten Grobogan 8
1.5 Sistematika Penyajian 9

BAB 2 KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 11
2.1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan Dan Permukiman 11
2.2. Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman 11
2.2.1 Amanat Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 11
2.2.2 Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 13
2.2.3 RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2019 19
2.2.4 RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041 20
2.2.5 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 23
2.3. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 27
2.3.1 SSK Kabupaten Grobogan Tahun 2016 27

2.3.2 RP2KPKPK Kabupaten Grobogan Tahun 2020 30

BAB 3 PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN 35
3.1. Sebaran Permukiman Kumuh, Peta Deliniasi Kawasan Kumuh, Lokasi Beserta Luasan 35
3.2. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi 39
3.2.1 Profil Desa/Kelurahan 39
3.2.2 Profil Kawasan 60
3.3. Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Sesuai Cakupan Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan Dan Skala Lingkungan 62

BAB 4 PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 65
4.1 Isu dan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 65
4.2 Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan 68
4.3 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu Dan Permasalahan Permukiman Kumuh 81

BAB 5 KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 90
5.1 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Sampai Dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh Dalam Skala Kota 90
5.2 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan 97

BAB 6 RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 107
6.1 Program Dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 107
6.2 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 126
6.3 Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 137

BAB 7 RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 152
7.1 Program Dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 152
7.2 Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas 156

7.3 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 163
7.4 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 172
7.5 Indikasi Program Dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas 183
7.6 Rencana Aksi Masyarakat/ Community action plan(CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 216
7.7 Rencana Detail Konsep Desain Kawasan Penanganan Prioritas (DED dan RAB) 225

BAB 8 RENCANA PENYEDIAAN TANAH 251

BAB 9 RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN 254

BAB 10 RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN 267

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Persebaran Lokasi Permukiman Kumuh Kawasan Purwodadi Kabupaten Grobogan 7
Gambar 1. 2 Kedudukan RP2KPKPK terhadap Dokumen Rencana Lain 8
Gambar 1. 3 Konsep Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 9

Gambar 2. 1 Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat 13
Gambar 2. 2 Peran Antar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 14

Gambar 3. 1 Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Grobogan 36
Gambar 3. 2 Profil Desa Candisari 40
Gambar 3. 3 Profil Desa Cingkrong 41
Gambar 3. 4 Profil Desa Danyang 42
Gambar 3. 5 Profil Desa Genuksuran 43
Gambar 3. 6 Profil Desa Kalongan 44
Gambar 3. 7 Profil Desa Kandangan 45
Gambar 3. 8 Profil Desa Karanganyar 46
Gambar 3. 9 Profil Desa Kedungrejo 47
Gambar 3. 10 Profil Kelurahan Kuripan 48
Gambar 3. 11 Profil Desa Nambuhan 49
Gambar 3. 12 Profil Desa Ngembak 50
Gambar 3. 13 Profil Desa Nglobar 51
Gambar 3. 14 Profil Desa Ngraji 52
Gambar 3. 15 Profil Desa Pulorejo 53
Gambar 3. 16 Profil Kelurahan Purwodadi 54
Gambar 3. 17 Profil Desa Putat 55
Gambar 3. 18 Profil Desa Warukaranganyar 56
Gambar 3. 19 Profil Kawasan 1 (Purwodadi – Kuripan) 61
Gambar 3. 20 Profil Kawasan 2 (Purwodadi – Kalongan) 62

Gambar 3. 21 Kegiatan KOTAKU Desa Kalongan (kiri) dan Desa Nglobar (kanan) 64

Gambar 7. 1 Lokasi Penanganan RT. 02/ RW. 07 Kuripan 183
Gambar 7. 2 Lokasi Penanganan RT. 01/ RW. 04 Kuripan 184
Gambar 7. 3 Lokasi Penanganan RT. 01/ RW. 05 Kuripan 184
Gambar 7. 4 Lokasi Penanganan RT. 01/ RW. 07 Kuripan 185
Gambar 7. 5 Lokasi Penanganan RT. 03/ RW. 07 Kuripan 185
Gambar 7. 6 Lokasi Penanganan RT. 05/ RW. 13 Kuripan 186
Gambar 7. 7 Lokasi Penanganan RT. 03/ RW. 18 Kuripan 186
Gambar 7. 8 Lokasi Penanganan RT. 04/ RW. 02 Kuripan 187
Gambar 7. 9 Lokasi Penanganan RT. 05/ RW. 02 Kuripan 187
Gambar 7. 10 Lokasi Penanganan RT. 02/ RW. 05 Kuripan 188
Gambar 7. 11 Lokasi Penanganan RT. 04/ RW. 07 Kuripan 188
Gambar 7. 12 Lokasi Penanganan RT. 01/ RW. 12 Kuripan 189
Gambar 7. 13 Lokasi Penanganan RT. 04/ RW. 12 Kuripan 190
Gambar 7. 14 Lokasi Penanganan RT. 02/ RW. 13 Kuripan 190
Gambar 7. 15 Lokasi Penanganan RT. 02/ RW. 13 Kuripan 191
Gambar 7. 16 Lokasi Penanganan RT. 04/ RW. 13 Kuripan 191
Gambar 7. 17 Lokasi Penanganan RT. 01/ RW. 15 Kuripan 192
Gambar 7. 18 Lokasi Penanganan RT. 04/ RW. 16 Kuripan 192
Gambar 7. 19 Lokasi Penanganan RT. 03/ RW. 17 Kuripan 193
Gambar 7. 20 Lokasi Penanganan RT. 02/ RW. 18 Kuripan 193

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Muatan RP2KPKPK	5
Tabel I. 2	Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Grobogan	5
Tabel II. 1	Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi, Dan Kabupaten/ Kota Terkait Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	14
Tabel II. 2	Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Panjang dengan Jangka Menengah	25
Tabel II. 3	Keterkaitan Unsur Visi dengan Rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026	26
Tabel II. 4	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan	28
Tabel II. 5	Konsep dan Strategi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Grobogan	31
Tabel II. 6	Konsep dan Strategi Penanganan Kumuh Skala Kawasan	33
Tabel III. 1	Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Grobogan	36
Tabel III. 2	Riwayat Penanganan Kumuh Kabupaten Grobogan	57
Tabel III. 3	Pola Kontribusi Penanganan Kumuh Kabupaten Grobogan	63
Tabel IV. 1	Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kawasan 1 (Purwodadi – Kuripan)	67
Tabel IV. 2	Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kawasan 2 (Purwodadi – Kalongan)	67
Tabel IV. 3	Kriteria dan Indikator Penentuan Prioritas	68
Tabel IV. 4	Formulasi Penentuan Skala Prioritas Penanganan	76
Tabel IV. 5	Perhitungan Prioritas Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Grobogan	77
Tabel IV. 6	Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Grobogan dalam Skala Kota	82

Tabel IV. 7 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan) 84
Tabel IV. 8 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kalongan) 87

Tabel V. 1 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kota Kab. Grobogan 93
Tabel V. 2 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi-Kuripan) 97
Tabel V. 3 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi-Kalongan) .. 101

Tabel VI. 1 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota di Kabupaten Grobogan 108
Tabel VI. 2 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan) 113
Tabel VI. 3 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kawasan Purwodadi 2 (Purwodadi – Kalongan) 119
Tabel VI. 4 Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota Kabupaten Grobogan 126
Tabel VI. 5 Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan) 130
Tabel VI. 6 Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kawasan Purwodadi 2 (Purwodadi – Kalongan) 133
Tabel VI. 7 Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Perkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 137

Tabel VII. 1 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kota Kabupaten Grobogan 153
Tabel VII. 2 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan di Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan) 156
Tabel VII. 3 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan di Kawasan Purwodadi 2 (Purwodadi – Kalongan) 160
Tabel VII. 4 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kota Kabupaten Grobogan 164

Tabel VII. 5 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan di Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan) 168
Tabel VII. 6 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan di Kawasan Purwodadi 2 (Purwodadi – Kalongan) 170
Tabel VII. 7 Memorandum Progam Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Grobogan 173
Tabel VII. 8 Rencana Kegiatan di Kelurahan Kuripan 194

Tabel IX. 1 Rencana Investasi dan Pembiayaan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Grobogan 206

Tabel X. 1 Peran Para Pelaku dalam Pembangunan yang Berkelanjutan sesuai Prinsip 216

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, kawasan perkotaan dirumuskan dengan mengacu pada isu-isu utama pembangunan perkotaan dengan harapan memunculkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Namun dalam perkembangannya, kawasan perkotaan memiliki berbagai tantangan seperti perlu adanya efisiensi sumber daya perkotaan, belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM), belum dilakukannya konservasi lingkungan hidup, kurangnya keterlibatan multi-*stakeholder* (inklusivitas), penyediaan perumahan yang tidak sebanding dengan kebutuhan (*backlog*), tidak jelasnya identitas/karakter perkotaan, dan tidak dipertimbangkannya daya dukung dan daya tampung (*carrying capacity*) dalam perencanaan kawasan perkotaan), serta tidak terbentuknya keterkaitan fungsi yang kuat dengan kawasan perdesaan (perkotaan dalam fungsinya sebagai *market*/pusat distribusi dan pemasaran).

Di sisi lain faktor urbanisasi turut berpengaruh dalam hal perkembangan suatu kota. Berbagai kondisi tersebut mengakibatkan pembangunan perkotaan perlu didukung untuk dapat mendorong dan mengakomodir urbanisasi sebagai *engine of growth,* untuk dapat mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tidak hanya itu, urbanisasi sebagai *engine of growth* juga diharapkan dapat mewujudkan keterkaitan perkotaan dan perdesaan, dapat mewujudkan keterpaduan infrastruktur (PSU), dan mampu mendorong koordinasi lintas sektor.

Paradigma Pembangunan Kota Berkelanjutan (*Sustainable Development*) memberikan pemahaman bahwa kota yang didesain, dibangun, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alami, lingkungan

terbangun, serta lingkungan sosial *(European Sustainable Cities Report*, 1996). Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu pola pemanfaatan sumber daya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersamaan dengan tetap melestarikan lingkungan sehingga kebutuhan tersebut tidak hanya untuk kebutuhan saat ini, tapi juga untuk kebuhan generasi yang akan dating. Untuk mencapai kota yang berkelanjutan terseut perlu diiringi dengan adanya perubahan paradigma pembangunan terhadap beberapa hal berikut:

1. manusia sebagai fokus pembangunan;
2. kesetaraan peran seluruh pihak dalam pembangunan pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat dan swasta;
3. pembangunan perkotaan dan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan; dan
4. penanganan kumuh yang telah diamanatkan dalam berbagai dokumen kebijakan, bahkan menjadi salah satu target SDGs.

Kedepannya kebijakan pembangunan perkotaan diharapkan menjadi sebuah komitmen untuk mewujudkan kota untuk semua dengan mengubah cara pandang dan paradigma dalam membangun dan mengelola suatu kota.

New Urban Agenda (NUA) merupakan komitmen global yang dideklarasikan di Quito saat Konferensi Habitat 3 yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan (Sustainable Urbanization). NUA berupaya untuk mendorong aksi-aksi di tingkat lokal dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya tantangan yang muncul seiring dengan semakin meningkatnya urbanisasi. Komitmen global ini dapat dijadikan sebagai agenda bagi para pemangku kepentingan dan aktor-aktor pembangunan perkotaan agar kemudian dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan lokal.

Dalam mengimplementasikan NUA di Indonesia, perlu diperhatikan bahwa kondisi perkotaan di Indonesia sangat beragam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disebutkan bahwa terdapat lima kategori kawasan perkotaan: kecil, sedang, besar, metropolitan dan megapolitan.

Selain NUA, terdapat beberapa komitmen pembangunan global yang ikut disepakati oleh Indonesia. Salah satunya adalah komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) yang juga diprakarsai oleh PBB. SDGs diresmikan pada tahun 2015, menggantikan Millenium Development Goals (MDGs). SDGs memiliki 17 tujuan universal yang harus dicapai di tahun 2030 oleh setiap negara yang berkomitmen. Dengan mengusung prinsip utama Leave No One Behind, SDGs bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dan berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh sesuai prinsip dan pergeseran paradigma yang dikembangkan sebagai prasyarat pembangunan perkotaan ke depan. Penanganan kumuh tidaklah terbatas pada peningkatan kualitas fisik semata, melainkan berorientasi pada perbaikan penghidupan dan peri-kehidupan penghuninya, serta tidak terlepas dari dimensi perkotaan lainnya.

Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman telah diamanatkan dalam Pasal 94 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penjelaskan mengenai berbagai hal tentang pencegahan dan peningkatan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara detail terdapat di Bab VII dan VIII. Selain itu penanganan permukiman kumuh menjadi target capaian RPJMN 2020-2024. Target peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh seluas 10.000 ha dan pemugaran 10 kawasan permukiman.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam urusan kawasan permukiman, kewenangan penanganan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam Penetapan system kawasan permukiman serta Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha. Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

Amanat mengenai penanganan kawasan kumuh juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43. Peraturan Menteri ini diatur tentang Perencanaan Penanganan, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Grobogan berupaya untuk menangani urusan perumahan dan permukiman. Urusan perumahan dan permukiman menjadi salah satu fokus utama dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026. Hal ini dapat terlihat dalam Strategi Pembangunan Misi 2 "Membangun Infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan resiko bencana".

Salah satu agenda dalam penanganan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kabupaten Grobogan sudah memiliki dasar penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam SK Bupati Grobogan Nomor : 050/921/2020 tanggal 22 Desember 2020. Dalam penetapan lokasi kumuh tersebut, terdapat 17 desa/kelurahan yang termasuk dalam lokasi kumuh dengan luas 153,71 Ha.

Untuk melakukan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dibutuhkan sebuah rencana aksi berupa Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). RP2KPKPK yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai upaya pencapaian kota bebas kumuh pada tahun 2025.

Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Grobogan disusun berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sudah ditetapkan oleh Bupati. Sehingga rekomendasi rencana aksi yang disusun juga sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan. Dokumen RP2KPKPK inidiharapkan digunakan sebagai pedoman dalam penanganan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan.

1.2 Maksud, Tujuan, Sasaran

1.2.1 Maksud

Maksud dari penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Grobogan adalah untuk mendapatkan rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan dengan lingkup kabupaten, kawasan, dan lingkungan yang bersifat menyeluruh (komprehensif), holistik dan terpadu. Muatan dalam dokumen RP2KPKPK Kabpaten Grobogan bukan hanya berupa rencana kegiatan penanganan fisik, namun juga mencakup kegiatan non fisik seperti peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial, dan ekonomi.

1.2.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Grobogan adalah sebagai acuan teknis penanganan kekumuhan di Kabupaten Grobogan agar efektif dan efisien dalam tindak lanjut implementasinya.

1.2.3 Sasaran

Sasaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Grobogan adalah :

1. Identifikasi profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh
2. Merumuskan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
3. Mewujudkan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh secara menyeluruh di Kabupaten Grobogan
4. Menciptakan keterpaduan program untuk menuntaskan permasalahan permukiman kumuh berdasarkan parameter kekumuhan
5. Menciptakan rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui skenario, konsep, dan strategi penanganan
6. Menyajikan rekomendasi perencanaan penyediaan tanah
7. Menyajikan rencana investasi dan pembiayaan dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
8. Merumuskan peran pemangku kepentingan

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi kegiatan penyusunan RP2KPKPK dilakukan pada lingkup wilayah Kabupaten Grobogan mengacu pada SEDJCK Nomor 30 tahun 2020 tentang panduan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

Tabel I. 1 Muatan RP2KPKPK

No	MUATAN RP2KPKPK
1.	Pendahuluan (latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan kabupaten/kota, dan sistematika penyajian);
2.	Kajian kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
3.	Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
4.	Rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
5.	Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
6.	Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukimsn kumuh;
7.	Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
8.	Rumusan perencanaan penyediaan tanah;
9.	Rumusan rencana investasi dan pembiayaan
10.	Rumusan peran pemangku kepentingan

Sumber : Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020

Muatan di atas merupakan bagian dari dokumen RP2KPKPK sehingga akan lebih mudah untuk proses penyusunan peraturan kepala daerah

1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Grobogan adalah kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Grobogan berdasarkan SK Bupati Grobogan Nomor : 050/921/2020 tanggal 22 Desember 2020 dengan luas 153,71 Ha yang tersebar di 17 Desa/Kelurahan di 1 Kecamatan, yang teridri dari :

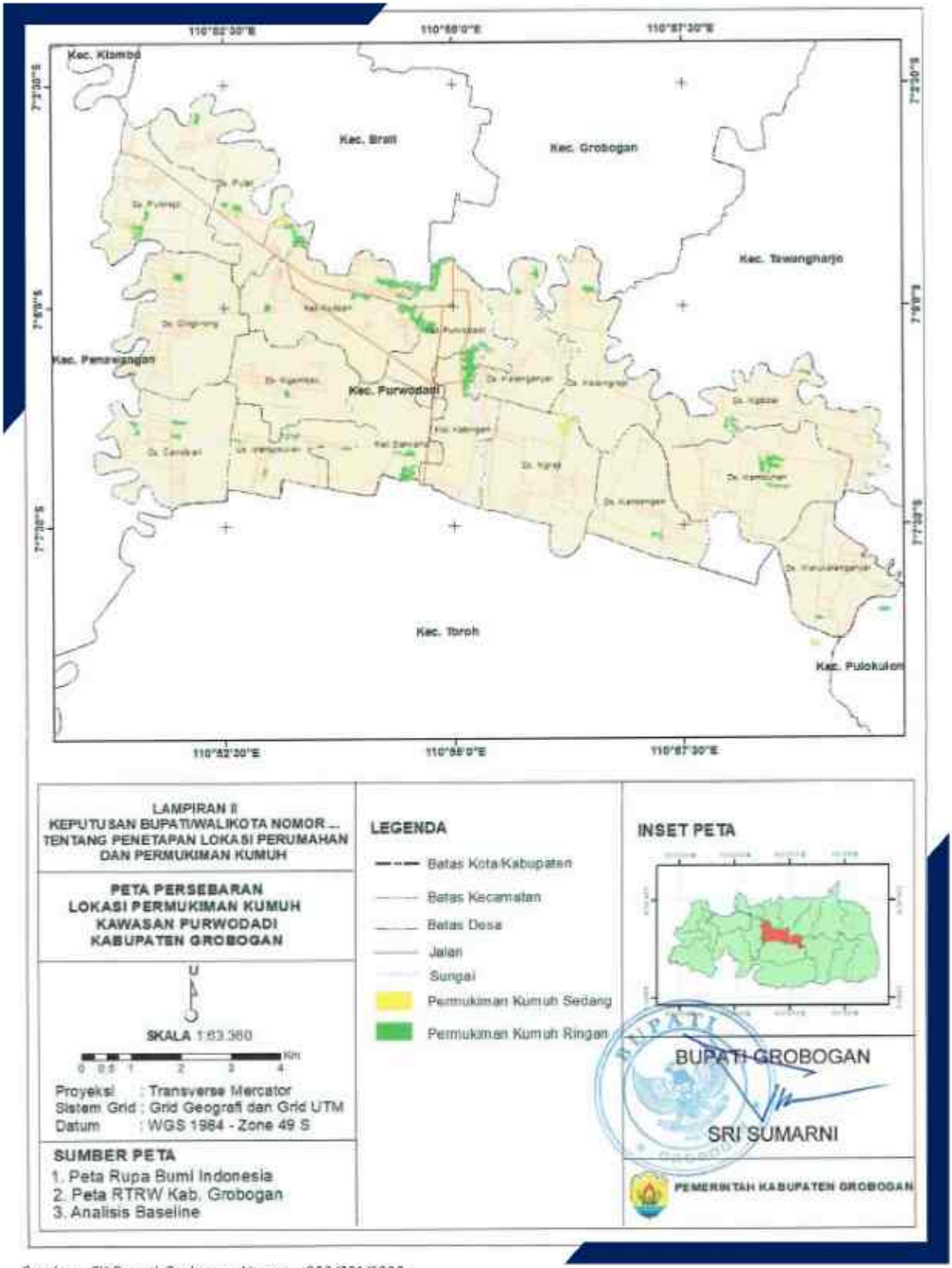
Tabel I. 2 Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Grobogan

NO	KECAMATAN	DESA/KEL	LUAS KUMUH (HA)	JUMLAH KUMUH	TINGKAT KEKUMUHAN AWAL
1.	Purwodadi	Candisari	6,59	4	Ringan
2.	Purwodadi	Cingkrong	2,86	1	Ringan
3.	Purwodadi	Danyang	9,38	5	Ringan
4.	Purwodadi	Genuksuran	6,36	5	Ringan
5.	Purwodadi	Kalongan	18,95	10	Ringan
6.	Purwodadi	Kandangan	2,08	1	Ringan

NO.	KECAMATAN	DESA/KEL	LUAS KUMUH (HA)	JUMLAH KUMUH	TINGKAT KEKUMUHAN AWAL
7.	Purwodadi	Karanganyar	3,72	2	Ringan
8.	Purwodadi	Kedungrejo	2,95	1	Ringan
9.	Purwodadi	Kuripan	22,68	16	Ringan
10.	Purwodadi	Nambuhan	15,47	4	Ringan
11.	Purwodadi	Ngembak	1,31	1	Ringan
12.	Purwodadi	Nglobar	1,74	1	Ringan
13.	Purwodadi	Ngraji	5,58	4	Sedang
14.	Purwodadi	Pulorejo	8,25	5	Ringan
15.	Purwodadi	Purwodadi	24,2	21	Ringan
16.	Purwodadi	Putat	17,58	8	Ringan
17.	Purwodadi	Warukaranganyar	4,01	3	Ringan
JUMLAH		17 DESA/KEL	83,71	92	

Sumber : SK Bupati Grobogan Nomor : 050/921/2020

Persebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada peta di bawah ini

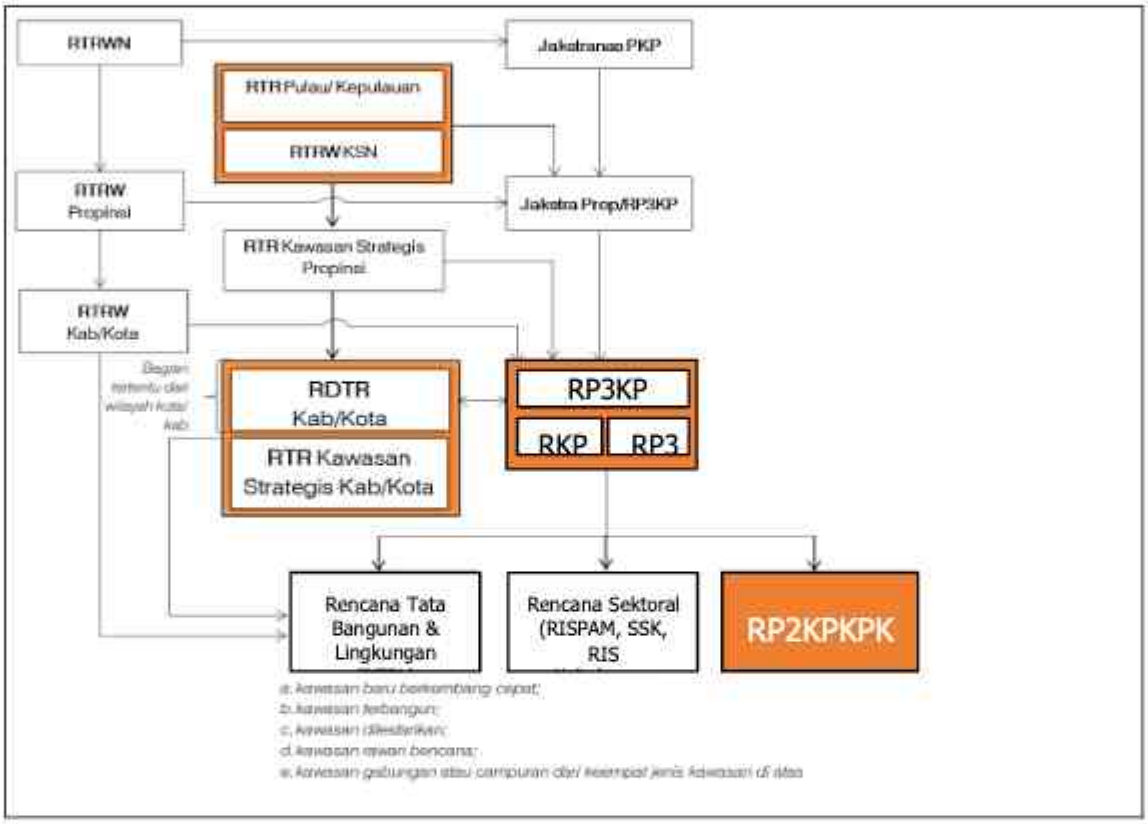


Sumber : SK Bupati Grobogan Nomor : 050/921/2020

Gambar 1. 1 Peta Persebaran Lokasi Permukiman Kumuh Kawasan Purwodadi Kabupaten Grobogan

1.4 Kedudukan Dokumen RP2KPKPK Dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten Grobogan

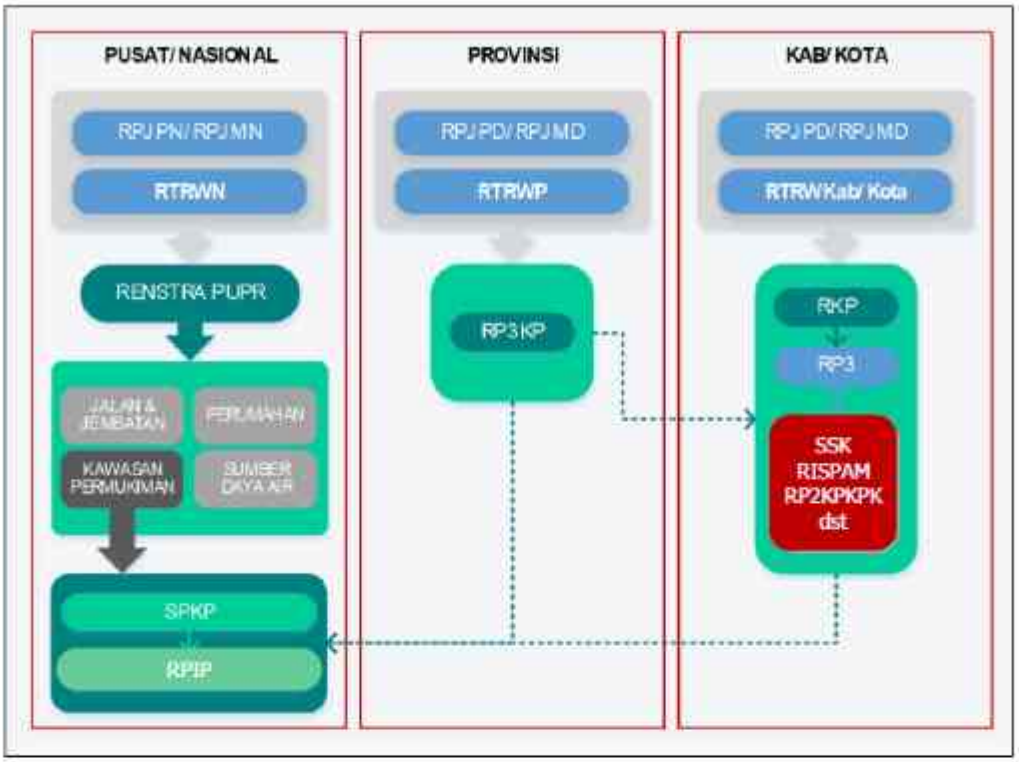
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) telah diamanatkan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020 Tentang Panduan Penyusunan RP2KPKPK. Dokumen RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan.



Sumber : Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020

Gambar 1. 2 Kedudukan RP2KPKPK terhadap Dokumen Rencana Lain

Berdasarkan gambar di atas, dokumen RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman. Secara umum konsep penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman akan dijabarkan seperti gambar berikut ini:



Sumber : Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/SE/DC/2020

Gambar 1. 3 Konsep Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan kota serta sistematika penyusunan laporan.

BAB 2 KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN KABUPATEN GROBOGAN

Bab ini berisi isu strategis pembangunan perumahan dan permukiman; kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman meliputi RTRW Provinsi Jawa Tengah, RPJPD Kabupaten Grobogan, RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021, RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031; serta kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang merupakan matriks komparasi dari dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan dan dokumen sektoral seperti SSK dan RP2KPKPK.

BAB 3 PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sebaran permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan beserta peta deliniasi dan luasannya, Profil kawasan permukiman kumuh, serta pola pola kontribusi program penanganan permukiman kumuh perkotaan sesuai cakukan skala kabupaten/kota, skala kawasan, dan skala lingkungan.

BAB 4 PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bab ini berisi isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Kriteria dan indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan serta perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isi permasalahan permukiman kumuh.

BAB 5 KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan.

BAB 6 RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bab ini menjelaskan mengenai rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan yang didalamnya terdapat program dan kegiatan pencegahan, rencana aksi, dan memorandum program.

BAB 7 RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Dalam bagian ini, akan dijabarkan penjelasan mengenai program dan kegiatan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, program peningkatan kawasan prioritas, rencana aksi, dan memorandum program.

BAB 8 RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai program dan kegiatan yang memerlukan kesiapan lahan dalam pelaksanaannya.

BAB 9 RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Bab ini memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh yang bersumber dari berbagai pihak sesuai kewenangannya.

BAB 10 RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Merupakan bagian yang akan memuat matriks peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB 2

KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2.1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan Dan Permukiman

Isu strategi pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Grobogan adalah:

1. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kalangan masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten grobogan yang memerlukan pembenahan
2. Masih adanya kawasan permukiman kumuh yang belum mendapat penanganan
3. Belum optimalnya pelayanan dasar kebutuhan air minum
4. Belum optimalnya cakupan dari pelayanan dasar sektor sanitasi
5. Belum optimalnya pemenuhan prasarana dan sarana umum di lingkungan kabupaten Grobogan

2.2. Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Permukiman

2.2.1 Amanat Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks penanganan permukiman kumuh, dalam Pasal 94 diamanatkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni. Pencegahan dan peningkatan kualitas dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Lingkup kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. *Pencegahan*

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU	a. ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi; b. ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum; c. penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan d. pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
PELAKSANAAN PENCEGAHAN	a. pengawasan dan pengendalian; dan b. pemberdayaan masyarakat
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

b. *Peningkatan Kualitas*

PEMUGARAN	merupakan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni.
PEREMAJAAN	a. merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan, keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat inggal bagi masyarakat yang terkena dampak. b. Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan, dan permukiman dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya
PEMUKIMAN KEMBALI	dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi kawasan permukiman menurut RTRW atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan/ lokasi tersebut. Pemukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi

	eksisting yang dilakukan oleh dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah yang juga menetapkan lokasi untuk pemukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat

UU No.1/2011 juga mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Terkait hal ini masing-masing stakeholder memiliki peran, tugas dan fungsi sesuai dengan, termasuk di dalamnya terkait upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seperti dijelaskan pada gambar berikut :



Gambar 2. 1 Struktur Pembagian Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

2.2.2 Amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

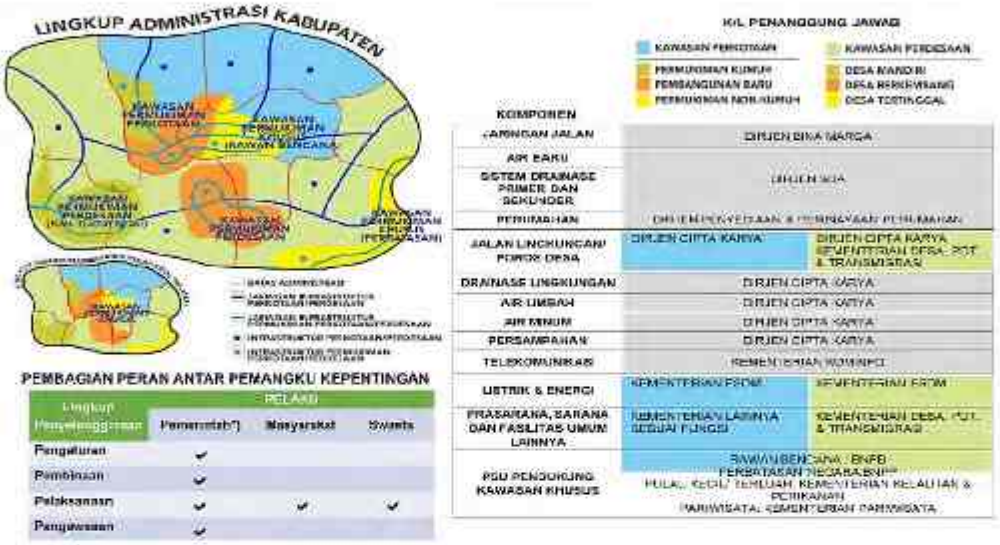
a. Pembagian Sub Urusan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman bersifat multisektoral dan melibatkan banyak pihak. Direktorat Jenderal Cipta Karya merupakan leading sektor dalam pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, namun bukan sebagai pelaku tunggal. Perlu dipahami bahwa pencapaian target pembangunan merupakan upaya terpadu dan sinkron dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Dalam penyelenggaraannya, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dilakukan secara terdesentralisasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pemerintah (baik pusat maupun daerah) akan lebih berperan sebagai pembina, pengarah, dan pengatur, agar terus dapat tercipta suasana yang semakin kondusif. Antara pemerintah dengan pemerintah daerah,

juga terdapat pembagian peran dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Disamping itu agar terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (baik sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) dan dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku. Pembagian peran dan kewenangan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara luas, dapat dilihat dalam ilustrasi pada gambar berikut ini :



Gambar 2. 2 Peran Antar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Terkait penanganan permukiman kumuh, undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dapat turun langsung dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dengan beberapa prasyarat, antara lain:

1. Kawasan permukiman kumuh berada pada lingkup Kawasan Strategis Nasional (KSN);
2. Kawasan permukiman kumuh memiliki luas minimal 15 Ha.

Secara rinci pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan kawasan permukiman serta perumahan dan kawasan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II. 1 Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi, Dan Kabupaten/ Kota Terkait Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
1.	Kawasan Permukiman	a. Penetapan system kawasan permukiman.	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KAB/KOTA
		b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.	(sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 ha.	b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
2.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran UU No.23/2014

b. Agenda Pembangunan Nasional terkait Permukiman Kumuh

Agenda Pembangunan Nasional yang berkaitan dengan Permukiman Kumuh termasuk ke dalam agenda keenam yaitu Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional dengan sub agenda Membangun Infrastruktur/ Prasarana Dasar. Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar meliputi air minum, sanitasi, perumahan dan ketenagalistrikan dengan sasaran sebagai berikut :

1) Terfasilitasinya penyediaan hunian layak untuk 18,6 juta rumah tangga berpenghasilan rendah yakni pembangunan baru untuk 9 juta rumah tangga melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk 5,5 juta rumah tangga dan pembangunan Rusunawa untuk 514.976 rumah tangga, serta peningkatan kualitas hunian sebanyak 9,6 juta rumah tangga dalam pencapaian pengentasan kumuh 0 persen (pengurangan luasan permukiman kumuh sebanyak 38431 Ha).
2) Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia melalui :
   a. pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 3.099 kawasan MBR, 2.144 Ibukota Kecamatan, 16.983 desa, 7.557 kawasan khusus, dan 28 regional;
   b. Pembangunan Penampung Air Hujan (PAH) sebanyak 381.740 unit;
   c. Fasilitasi optimasi bauran sumber daya air domestik di 27 kota metropolitan dan kota besar;
   d. Fasilitasi 38 PDAM sehat di kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil;
   e. Fasilitasi business to business di 315 PDAM;
   f. Fasilitasi restrukturisasi utang 394 PDAM;
   g. Peningkatan jumlah PDAM Sehat menjadi 253 PDAM, penurunan jumlah PDAM kurang sehat menjadi 80 PDAM, dan penurunan jumlah PDAM sakit menjadi 14 PDAM.
3) Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar yaitu :

a. untuk sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat di 430 kota/kab (melayani 33,9 juta jiwa), penambahan pengolahan air limbah komunal di 227 kota/kab (melayani 2,99 juta jiwa), serta peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan melalui pembangunan IPLT di 409 kota/kab;
b. untuk sarana prasarana pengelolaan persampahan dengan pembangunan TPA sanitary landfill di 341 kota/kab, penyediaan fasilitas 3R komunal di 334 kota/kab, fasilitas 3R terpusat di 112 kota/kab;
c. untuk sarana prasarana drainase permukiman dalam pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman; serta
d. kegiatan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi di 507 kota/kab seluruh Indonesia.

4) Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan melalui fasilitasi peningkatan kualitas bangunan gedung dan fasilitasnya di 9 kabupaten/kota, fasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana di 1.600 lingkungan permukiman, serta peningkatan keswadayaan masyarakat di 55.365 kelurahan.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Dasar

Arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur dan sarana dasar meliputi :

1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai melalui strategi :
   a. Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/ milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/ milik) dilakukan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang efektif dan efisien termasuk pengembangan subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, bantuan stimulan, memperluas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta integrasi tabungan perumahan dalam sistem jaminan sosial nasional. Sementara peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, pembangunan kampung deret, serta bantuan stimulant dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman kumuh yang berbasis komunitas.
   b. Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan melalui :
      (1) penguatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar;
      (2) penguatan peran lembaga keuangan (bank/non-bank); serta
      (3) revitalisasi Perum Perumnas menjadi badan pelaksana pembangunan perumahan sekaligus pengelola Bank Tanah untuk perumahan.
   c. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR melalui:

(1) peningkatan ekuitas Bank Tabungan Negara (BTN), Perum Perumnas, dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN);
(2) mendorong BTN menjadi bank khusus perumahan, serta iii) melakukan perpanjangan Peraturan Presiden tentang SMF terkait penyaluran pinjaman kepada penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan sumber pendanaan dari pasar modal dengan dukungan pemerintah.

d. Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun sewa dan rumah susun milik serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan *(land consolidation),* bank tanah *(land banking),* serta pemanfaatan lahan milik BUMN, tanah terlantar, dan tanah wakaf.
e. Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing).
f. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan. Sarana air minum dan sanitasi menjadi infrastruktur bingkai bagi terciptanya hunian yang layak.

2. Menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi bauran sumber daya air domestik melalui strategi:
   a. Jaga Air, yakni strategi untuk mengarusutamakan pem-bangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan) serta mening - katkan kesadaran masyarakat akan hygiene dan sanitasi.
   b. Simpan Air, yakni strategi untuk menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rain water harvesting) sebagai sumber air baku air minum maupun secondary uses pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi), serta pengelolaan drainase berwawasan lingkungan.
   c. Hemat Air, yakni strategi untuk mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada melalui pengurangan kebocoran air hingga 20 persen, pemanfaatan idle capacity; dan pengelolaan kebutuhan air di tingkat penyelenggara dan skala kota.
   d. Daur Ulang Air, yakni strategi untuk memanfaatkan air yang telah terpakai melalui pemakaiaan air tingkat kedua (secondary water uses) dan daur ulang air yang telah dipergunakan (water reclaiming).

3. Penyediaan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah terbangun melalui strategi :
   a. Penerapan tarif atau iuran bagi seluruh sarana dan prasarana air minum dan sanitasi terbangun yang menuju prinsip tarif pemulihan biaya penuh (full cost recovery)/memenuhi kebutuhan untuk Biaya Pokok Produksi (BPP). Pemberian subsidi dari pemerintah bagi penyelenggara air minum dan sanitasi juga dilakukan sebagai langkah jika terjadi kekurangan pendapatan dalam rangka pemenuhan full cost recovery.

b. Pengaturan kontrak berbasis kinerja baik perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset infrastruktur.
c. Rehabilitasi dan optimalisasi sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang ada saat ini dan peningkatan pemenuhan pelayanan sarana sanitasi komunal.

4. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat melalui strategi:
   a. Peningkatan kualitas Rencana Induk-Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) yang didasari dengan neraca keseimbangan air domestik kota/kabupaten dan telah mengintegrasikan pengelolaan sanitasi sebagai upaya pengamanan air minum;
   b. Upaya peningkatan promosi hygiene dan sanitasi yang terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
   c. Implementasi Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) yang berkualitas melalui pengarusutamaan SSK dalam proses perencanaan dan penganggaran formal;
   d. Peningkatan peran, kapasitas, serta kualitas kinerja Pemerintah Daerah di sektor air minum dan sanitasi.
   e. Advokasi kepada para pemangku kepentingan di sektor air minum dan sanitasi, baik eksekutif maupun legislatif serta media.
5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi melalui sinergi dan koordinasi antar pelaku program dan kegiatan mulai tahap perencanaan sampai implementasi baik secara vertikal maupun horizontal melalui strategi:
   Pelaksanaan sanitasi sekolah dan pesantren, sinergi pengembangan air minum dan sanitasi dengan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta integrasi pembangunan perumahan dan penyediaan kawasan permukiman dengan pembangunan air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan pelayanan dasar berbasis regional dalam rangka mengatasi kendala ketersediaan sumber air baku air minum dan lahan serta dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Sinergi pendanaan air minum dan sanitasi dilaksanakan melalui:

1. pemanfaatan alokasi dana pendidikan untuk penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi di sekolah;
2. pemanfaatan alokasi dana kesehatan baik untuk upaya preventif penyakit dan promosi hygiene dan sanitasi serta pemanfaatan jaminan kesehatan masyarakat;
3. penyediaan air minum dan sanitasi melalui Anggaran Dasar Desa (ADD) serta
4. sinergi penyediaan air minum dan sanitasi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) untuk bidang kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, dan pembangunan desa tertinggal.

2.2.3 RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2019

Kebijakan terkait pengembangan kawasan permukiman dapat dilihat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2029, dimana pada kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya di Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

1. Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi
    a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
    b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
    c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
    d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan/atau nasional;
    e. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya hutan produksi, perkebunan, peternakan untuk mewujudkan nilai tambah daerah dan/atau nasional;
    f. mengembangkan industri berbahan baku lokal dan kawasan industry untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah dan/atau nasional;
    g. memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang memperhatikan dampak lingkungan;
    h. mengembangkan destinasi wisata untuk mendorong peningkatan pengelolaan kawasan dan kesejahteraan masyarakat;
    i. mengembalikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi padasektor perikanan dan pariwisata; dan
    j. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman
2. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi :
    a. Mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budidaya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
    b. mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan budi daya yang terdapat potensi bencana berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
    c. Mengembangkan kawasan tanah nonproduktif untuk kegiatan pembangunan non pertanian guna mempertahankan lahan pangan berkelanjutan;
    d. Membatasi alih fungsi lahan sawah melalui penataan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara

vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;

e. mengendalikan kegiatan permukiman yang berada di kawasan budi daya yang memiliki potensi bencana alam;
f. mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak untuk menghindari perkembangan secara horizontal (*citywide*); dan
g. mengarahkan perkembangan industri ke kawasan peruntukan industri.

Dalam Tabel Indikasi Program Utama Lima Tahunan, bagian Perwujudan Kawasan Budidaya disebutkan bahwa Program Utama Perwujudan Kawasan Permukiman terdiri dari :

1. Pengendalian dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan
   a. Identifikasi dan inventarisasi perumahan dan permukiman kumuh
   b. Penataan bangunan dan lingkungan
   c. Relokasi permukiman di kawasan bencana
2. Pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan
   a. Peremajaan permukiman kumuh
   b. Penyediaan perumahan dan permukiman layah huni
   c. Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perdesaan
   d. Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perkotaan
   e. Pengembangan rumah susun di kawasan perkotaan

2.2.4 RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041

Kebijakan penataan ruang kabutapen Grobogan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 – 2032.

a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang

1) Tujuan

Penataan Ruang Wilayah Daerah bertujuan mewujudkan Ruang Daerah yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan Wilayah di bagian timur Jawa Tengah dengan berbasis sektor pertanian dan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan pariwisata.

2) Kebijakan

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:

a) pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh Wilayah Daerah terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur;
b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana Wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Daerah di bagian timur Jawa Tengah;

c) pengembangan Wilayah dengan optimalisasi sektor industri, pertambangan, dan pariwisata, serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan;
d) pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Daerah yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya;
e) pengelolaan fungsi Kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung Kawasan, dan konservasi sumberdaya alam berwawasan lingkungan;
f) pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional; dan;
g) peningkatan fungsi Kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

3) Strategi
a) Strategi untuk mewujudkan pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh Wilayah Daerah terutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur, meliputi:
(1) meningkatkan peran dan fungsi Kawasan Perkotaan Purwodadi sebagai simpul strategis pengembangan Wilayah koridor Kedungsepur;
(2) memantapkan dan mengendalikan perkembangan PKL;
(3) mengembangkan PPK di Wilayah Daerah
(4) meningkatkan peran dan fungsi Kawasan Perdesaan
(5) meningkatkan dan mengembangkan jangkauan pelayanan PPL; dan
(6) mengembangkan prasarana dan sarana dasar permukiman yang berwawasan lingkungan
b) Strategi untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana Wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis Daerah di bagian timur Jawa Tengah, meliputi:
(1) meningkatkan aksesibilitas antar pusat perkotaan, antar pusat desa, antar pusat perkotaan dan pusat desa;
(2) mengembangkan sistem jaringan prasarana Wilayah secara menyeluruh dengan memprioritaskan dan mengintegrasikan sistem prasarana transportasi, sumber daya air, energi, telekomunikasi dan sarana prasarana lainnya; dan
(3) meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran
c) Strategi untuk mewujudkan pengembangan Wilayah dengan optimalisasi sektor industri, pertambangan, dan pariwisata, serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan, meliputi:
(1) mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian Daerah yang berdaya saing;
(2) mempersiapkan dan mengembangkan Kawasan industri yang mampu mendukung pengembangan Wilayah Kedungsepur:
(3) mengembangkan kegiatan industri yang berbahan baku komoditas unggulan lokal Daerah berbasis pertanian (agroindustri) ;

(4) mengembangkan Kawasan Pertambangan dan Energi yang berkelanjutan; dan
(5) mengembangkan destinasi wisata unggulan Daerah untuk mendorong pertumbuhan Kawasan

d) Strategi untuk mewujudkan pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan Daerah yang didukung peningkatan produktifitas hasil komoditasnya, meliputi:
(1) meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pemasaran hasil komoditas unggulan Daerah;
(2) membangun sentra pemasaran baru
(3) meningkatkan peran PKL sebagai pengumpul dan distribusi hasil komoditas unggulan; dan
(4) memantapkan Kawasan sentra produksi dan Kawasan pemasaran

e) Strategi untuk mewujudkan pengelolaan fungsi Kawasan sesuai daya dukung lahan, daya tampung Kawasan, dan konservasi sumberdaya alam berwawasan lingkungan, meliputi:
(1) menetapkan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung;
(2) mewujudkan Kawasan Hutan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai;
(3) melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan di Kawasan sekitar perlindungan setempat;
(4) mengarahkan sebagian Kawasan rawan bencana sebagai Kawasan Lindung
(5) melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan di Kawasan karst
(6) menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan dengan minimal seluas 30 % (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
(7) melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau
(8) memelihara Kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata; dan
(9) mengoptimalkan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Perkebunan Rakyat

f) Strategi untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, meliputi::
(1) menetapkan dan mengembangkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara optimal untuk meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat Daerah;
(2) mengoptimalkan Kawasan Pertanian untuk pengembangan budidaya pertanian dalam arti luas; dan
(3) meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pertanian

g) Strategi untuk mewujudkan peningkatan fungsi Kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara meliputi:
(1) menetapkan dan mengembangkan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

(2) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan;
(3) mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan tersebut dengan Kawasan Budidaya terbangun.

b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana Struktur Ruang dari Sitem Pusat Permukiman terdiri atas:

1) PKL meliputi kawasan perkotaan Purwodadi, kawasan perkotaan Gubug, kawasan perkotaan Godong.
2) Pusat pusat lain yang terdiri dari PPK meliputi:
   a) Kawasan Perkotaan Tegowanu;
   b) Kawasan Perkotaan Tanggungharjo;
   c) Kawasan Perkotaan Ngaringan;
   d) Kawasan Perkotaan Grobogan;
   e) Kawasan Perkotaan Toroh;
   f) Kawasan Perkotaan Kradenan; dan
   g) Kawasan Perkotaan Wirosari
3) Pusat pusat lain yang terdiri dari PPL meliputi ;
   a) Kecamatan Kedungjati;
   b) Kecamatan Klambu;
   c) Kecamatan Brati;
   d) Kecamatan Penawangan;
   e) Kecamatan Karangrayung;
   f) Kecamatan Gabus;
   g) Kecamatan Tawangharjo;
   h) Kecamatan Geyer; dan
   i) Kecamatan Pulokulon
4) PKL, PPK dan PPL sebagaimana di maksud pada ayat (1), (2) dan (3) merupakan Kawasan Perkotaan yang terdapat di 19 (sembilan belas) ibukota kecamatan.

2.2.5 RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan yang akan ditangani selama lima tahun dalam RPJMD Kabupaten Grobogan dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-

faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Kabupaten Grobogan memiliki beberapa permasalahan dan isu strategis Daerah yang menjadi fokus dalam penyusunan Dokumen RPJMDnya. Permasalahan-permasalahan pembangunan Pemerintah daerah yang dihadapi saat ini diprediksikan akan dihadapi pada masa datang. Salah satu permasalahan dan isu yang dihadapi adalah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan ke depan yaitu:

1) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
   Berdasarkan data kondisi capaian 5 tahun kebelakang, setidaknya terdapat permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu:

   a. Belum optimalnya pengelolaan sistem irigasi. Tahun 2020 rasio Jaringan Irigasi sebesar 0,018 km/ha.
   b. Masih rendahnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Cakupan drainase lingkungan dalam kondisi baik di Kabupaten Grobogan baru mencapai 65,4% di tahun 2020 dan cakupan pelayanan sistem drainase baru mencapai 50% tahun 2020.
   c. Belum optimalnya penyelenggaraan jalan di Kabupaten Grobogan. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik baru mencapai 78,91% tahun 2020.
   d. Belum optimalnya penyediaan air minum dan air limbah. Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman tahun 2020 sebesar 84,40%, sementara itu untuk Cakupan pelayanan air limbah domestik tahun 2020 sebesar 73,79%.
   e. Belum optimalnya pengelolaan persampahan. Persentase pengangkutan sampah tahun 2020 sebesar 40%.
   f. Pengelolaan bangunan pemerintah masih perlu ditingkatkan.
   g. Kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi masih perlu ditingkatkan.
   h. Masih perlunya peningkatan penataan bangunan dan lingkungannya.
   i. Belum semua wilayah bebas banjir, masih terdapat 15% wilayah yang tergenang banjir di tahun 2020.
   j. Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang, tahun 2020 baru mencapai 91,5%

2) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
   Berdasarkan data kondisi capaian 5 tahun kebelakang, setidaknya terdapat permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu:

   a. Cakupan pelayanan air minum yang belum optimal, tahun 2020 sebesar 84,04%, hal ini berarti masih terdapat 19,96% masyarakat Kabupaten Grobogan yang memperoleh layanan air minum;
   b. Cakupan pelayanan sanitasi yang belum optimal, tahun 2020 sebesar 76,54%, hal ini berarti masih ada 23,46% masyarakat Kabupaten Grobogan yang memperoleh layanan sanitasi;

c. Belum optimalnya pemenuhan PSU, baru 16,67% ditahun 2020, Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum
d. Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni, di tahun 2020 baru 62,54% dan cakupan rumah layak huni yang terjangkau baru sebesar 16,66%.
e. Belum terdataya capaian kinerja standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Berangkat dari isu dan permasalahan di Kabupaten Grobogan, maka terciptalah visi dan misi RPJMD yang merupakan gambaran Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan lima tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2021-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Grobogan 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya *Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya*"

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang terurai di atas jika dikaitkan dengan visi jangka panjang daerah (RPJPD) dapat dilihat kesesuaiannya, sebagaimana diperlihatkan oleh tabel berikut:

Tabel II. 2 Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Panjang dengan Jangka Menengah

Visi Jangka Menengah 2021-2026	Visi Jangka Panjang 2005-2025
Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan Sejahtera Lahir dan Batin yang Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berbudaya, Maju dan Mandiri

Sumber: RPJMD Kabupaten Grobogan 2021 – 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan sudah selaras dengan visi jangka panjang Kabupaten Grobogan. Keselasaran tersebut khususnya terletak pada frasa SEJAHTERA, BERIMAN dan BERBUDAYA. Artinya adalah apa yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah akan mampu menyumbang pencapaian cita-cita jangka panjang Kabupaten Grobogan.

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Grobogan tersebut maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Grobogan Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana.
3. Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Misi tersebut merupakan upaya upaya yang dilakukan guna mencapai visi Pemerintah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya perlu ditinjau keterkaitan antara unsur-unsur visi dengan rumusan misi yang telah ditetapkan.

Tabel II. 3 Keterkaitan Unsur Visi dengan Rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Unsur Visi	Unsur Misi
Sejahtera	3. Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing
Berdaya Saing	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. 2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana
Beriman	4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
Berbudaya	5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Sumber: RPJMD Kabupaten Grobogan 2021 – 2026

Urusan perumahan dan permukiman menjadi salah satu fokus utama dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026. Hal ini dapat terlihat dalam Strategi Pembangunan Misi 2 "Membangun Infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan resiko bencana".

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, strategi yang diambil yaitu:
   (1) Meningkatkan kondisi infrastruktur yang mantap melalui pengembangan sistem jalan terintegrasi dengan drainase yang baik, dan pembangunan infrastruktur lainnya dengan mempertimbangkan ketaatan terhadap pengaturan tata ruang yang ada;
   (2) Pemenuhan kebutuhan permukiman dan perumahan melalui penyediaan rumah layak huni yang sehat didukung dengan Prasarana Sarana Umum (PSU) yang tertata;
   (3) Pemenuhan kebutuhan transportasi yang aman melalui penyediaan fasilitas transportasi penghubung kawasan strategis termasuk jaringan trasportasi Kedungsepur yang didukung dengan penyediaan manajemen transportasi dan perhubungan yang baik.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan, diwujudkan dengan strategi Meningkatkan kualitas lingkungan melalui penerapan manajemen pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan masyarakat dan dunia industri. Selain itu juga dilakukan dengan peningkatan manajemen pengelolaan sampah.
3. Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana, strategi pembangunannya adalah Meningkatkan daya dan kapasitas ketahanan bencana melalui penyediaan informasi

kebencanaan yang efektif, penguatan kapasitas stakeholder dan masyarakat luas akan risiko bencana, dan pemberian layanan yang sesuai standar kepada korban bencana.

2.3. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

2.3.1 SSK Kabupaten Grobogan Tahun 2016

Pembangunan sanitasi di Kabupaten Grobogan juga harus diupayakan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan dari semua pihak baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, sektor swasta maupun sumber pembiayaan dari donor, agar lebih efisien, efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat serta sinkron dengan program nasional, maka perlu dilakukan pemutakhiran dokumen SSK yang bersifat terpadu dan berkelanjutan. Dalam bidang pembangunan sanitasi, Kabupaten Grobogan telah merumuskan visi dan misi sanitasi yang merupakan hasil dari kolaborasi pemikiran dari berbagai stakeholder terkait. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Grobogan adalah:

Terwujudnya Sanitasi yang Mandiri, Berkeadilan & Berkelanjutan Menuju Masyarakat Grobogan Sehat dan Sejahtera Tahun 2017

Adapun misi untuk masing – masing subsektor adalah sebagai berikut:

Misi Air Limbah Domestik

1. Memantapkan pengelolaan air limbah domestik yang aman dan berkelanjutan
2. Mengembangkan cakupan pelayanan air limbah domestik
3. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik

Misi Persampahan

1. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan persampahan yang terpadu, handal serta berorientasi lingkungan
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta sebagai mitra pengelolaan persampahan didukung pengembangan kelembagaan

Misi Drainase Lingkungan

Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase secara menyeluruh dan terpadu dalam penanganan banjir dan genangan

Penajaman dari visi dan misi tersebut dituangkan menjadi sebuah tujuan, sasaran serta strategi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disusun. Berikut adalah uraian Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Sanitasi Kabupaten Grobogan:

Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Sanitasi Kabupaten Grobogan

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Air Limbah		
Mengoptimalkan pengelolaan air limbah di perkotaan dan perdesaan yang bersih, sehat dan berwawasan lingkungan untuk perbaikan kesehatan masyarakat	Optimalisasi dan efektifitas pelayanan penyedotan lumpur tinja ke IPLT Ngembak dengan menambah cakupan pelayanan dari 30% menjadi 45% pada Tahun 2021.	Kondisi eksisting 11,4 % RT yang melakukan penyedotan tinja tetapi yang dikirim ke IPLT hanya 2 %. Selebihnya diindikasikan dibuang di pekarangan/sungai). Indikator sasaran menambah cakupan pelayan menjadi 45 % RT melakukan penyedotan tangki septic maksimal 5 tahun sekali pada tahun 2021.
	Hilangnya BABS (ODF) di wilayah Kabupaten Grobogan pada tahun 2017	Data BABS di Kab Grobogan sudah 0% (ODF) pada tahun 2016
	Meningkatkan cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan tangki septik dari 68% menjadi 80% pada akhir tahun 2017.	80 % masyarakat Grobogan memiliki jamban pribadi dengan septic tank
	Meningkatnya jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah secara komunal dari 20 unit menjadi 100 unit di wilayah padat kumuh miskin di akhir tahun 2017	20 unit IPAL Komunal Kawasan Kumuh/padat penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2016.
Pengembangan perangkat peraturan perundangan dan perencanaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman	Tersedianya perencanaan pengelolaan air limbah domestik dan industri rumah tangga skala perkotaan pada akhir tahun 2017	tersusunnya dokumen masterplan dan DED Pengelolaan Air Limbah skala Kota
Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman.	Meningkatkan anggaran Anggaran APBD/APBD-Desa untuk air limbah sebesar 3% pada tiap tahunnya	Jumlah dana pengelolaan air limbah domestik.
	Meningkatkan jumlah dana sektor swasta baik dengan dana CSR maupun penanaman modal investasi	Jumlah dana pengelolaan air limbah domestik.

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
meningkatkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan air limbah	Peningkatan Jumlah Jamban yang dibangun secara swadaya/non-subsidi oleh masyarakat sebesar 10 Milyar selama lima tahun sampai Tahun 2017	Jumlah dana swadaya dalam penyediaan jamban keluarga.
Persampahan		
Peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan perkotaan	Peningkatan sampah wilayah perkotaan yang dapat terangkut/dikelola di TPA menjadi 80% di tahun 2017	Jumlah penduduk yang dilayani pengelolaan persampahan di Perkotaan dari 57% menjadi 80%.
	Penyediaan sarana prasarana TPST (tempat pengolahan sampah terpadu) di 6 (enam) ibu kota kecamatan pada tahun 2017	Jumlah TPST di Kabupaten Grobogan
Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan	Penetapan Perda dan Perbup yang mengatur pedoman teknis tentang pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana persampahan pada Tahun 2016.	Tersusunnya Perda
	Meningkatkan Status dan kapasitas institusi pengelola dalam penerapan Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat	Jumlah personil yang terampil dalam pengelolaan persampahan.
Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan sistem 3R skala rumah tangga dari 1,7 % menjadi 5% pada tahun 2017	masyarakat melakukan pengolahan sampah menjadi 5%.
	Terbentuknya dan terbinanya kelompok pengelola sarana prasarana persampahan di lingkungan permukiman dan sekolah.	19 kelompok pengelola persampahan di 19 Ibu Kota Kecamatan (IKK).
Pengembangan alternatif sumber pendanaan	Meningkatnya jumlah dana dari APBD Propinsi dan APBN sebesar 10 Milyar dalam peningkatan pengelolaan Persampahan di	Jumlah Dana dari APBD-Propinsi/APBN

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
	Kabupaten Grobogan pada Tahun 2017.	
	Meningkatnya dana CSR dan investasi sektor swasta dalam pengelolaan persampahan	Jumlah dana baik in cash/in kind dalam pengelolaan persampahan.
Drainase		
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraaturan perundanga-undangan mengenai Drainase Lingkungan	Tersedianya Regulasi drainase lingkungan pada tahun 2015.	Perda maupun Perbup terkait pengelolaan drainase lingkungan.
Meningkatkan perencanaan pengelolaan sistem drainase secara menyeluruh dan terpadu dalam penanganan banjir dan genangan.	Tersedianya dokumen perencanaan sistem drainase kota yang terintegrasi di akhir tahun 2017	Tersusunya Masterplan dan DED Drainase di 8 IKK Rawan Banjir/Genangan Kabupaten Grobogan di Tahun 2017
Berkurangnya luas genangan di Kabupaten Grobogan memprioritaskan penanganan di wilayah permukiman di akhir Tahun 2017	Berkurangnya luas genangan di Kabupaten Grobogan sebesar 15% dengan memprioritaskan penanganan di wilayah permukiman di akhir Tahun 2017	Pengurangan Luas Genangan di Permukiman dari 26 % menjadi 15 %
Meningkatnya intensitas upaya penyadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara terus menerus di sub drainase lingkungan.	Meningkatnya peran media dan masyarakat dalam penyadaran perilaku hidup bersih dan sehat di 30 desa/kelurahan rawan banjir pada akhir tahun 2017.	Jumlah masyarakat yang menerima informasi pengelolaan drainase lingkungan.
Pengembangan alternatif sumber pendanaan	Meningkatnya jumlah dana dari APBD Propinsi dan APBN sebesar 5 Milyar dalam peningkatan pengelolaan Persampahan di Kabupaten Grobogan pada Tahun 2017.	Jumlah Dana dari APBD-Propinsi/APBN

Sumber: SSK Kabupaten Grobogan, 2016

2.3.2 RP2KPKPK Kabupaten Grobogan Tahun 2020

Maksud dari penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah mewujudkan upaya penanganan permukiman kumuh secara holistik dan terintegrasi yang didukung dengan perencanaan penanganan yang terpadu.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah sebagai acuan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh agar tepat sasaran dan efisien serta mampu mendorong kolaborasi multisektor yang sinergis dan akuntabel.

Sasaran dari pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) adalah:

1. Identifikasi kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Identifikasi profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Merumuskan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
4. Merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
5. Merumuskan rencana pencegahan dan rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan sudah dilakukan pendataan dan verifikasi terhadap lokasi dan luasannya berbasis lingkungan RT. Dari hasil verifikasi, ada 92 lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tersebar di 17 Kelurahan/Desa yang berada di wilayah Kecamatan Purwodadi. Untuk lebih jelasnya, luasan, koordinat, dan tingkat kekumuhan dari lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Konsep penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dibagi menjadi konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam skala kabupaten dan skala kawasan. Strategi skala kabupaten diperlukan dalam hal menangani kondisi-kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Rumusan strategi diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya. Strategi skala kabupaten dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis lainnya yang terkait dengan bidang permukiman. Selain itu, strategi skala kabupaten dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana (relokasi/*resettlement*).

Konsep penanganan pencegahan skala Kabupaten dilakukan dengan Pengawasan dan Pengendalian serta Pemberdayaan Masyarakat. Sementara konsep penanganan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan pemugaran. Untuk lebih jelasnya, konsep dan strategi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 5 Konsep dan Strategi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Grobogan

No	Permasalahan	Pencegahan		Peningkatan	
		Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
1	Masih adanya bangunan permukiman yang	Pengawasan dan Pengendalian serta	Meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuaian perizinan,	Pemugaran	Meningkatkan kualitas bangunan

No	Permasalahan	Pencegahan		Peningkatan	
		Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
	tidak layak huni	pemberdayaan masyarakat	kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis, serta pendampingan dan pelayanan informasi kepada masyarakat		Permukiman sesuai dengan SPM
2	Kualitas jalan lingkungan permukiman yang belum memadai	Pengawasan dan Pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis, serta pendampingan dan pelayanan informasi kepada masyarakat	Pemugaran	Meningkatkan kualitas jalan lingkungan permukiman sesuai dengan SPM
3	Terdapat genangan air di lingkungan permukiman	Pengawasan dan Pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis, serta pendampingan dan pelayanan informasi kepada masyarakat	Pemugaran	Meningkatkan penyediaan sistem jaringan drainase lingkungan permukiman sesuai dengan SPM
4	Peningkatan timbulan sampah domestic	Pemberdayaan masyarakat	Pendampingan dan pelayanan informasi kepada masyarakat	Pemugaran	Meningkatkan pelayanan sistem pengelolaan persampahan permukiman sesuai dengan SPM
5	Adanya kejadian kebakaran di permukiman	Pengawasan dan Pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis, serta pendampingan dan pelayanan informasi kepada masyarakat	Pemugaran	Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM
6	Keterbatasan pelayanan air minum bagi masyarakat	Pengawasan dan Pengendalian serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis,	Pemugaran	Meningkatkan sistem penyediaan air minum bagi permukiman

No	Permasalahan	Pencegahan		Peningkatan	
		Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
			serta pendampingan dan pelayanan informasi kepada masyarakat		sesuai dengan SPM

Sumber: RP2KPKPK Kab. Grobogan, 2020

Sementara untuk Konsep dan Strategi Penanganan Kumuh Skala Kawasan di Kawasan Prioritas Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 6 Konsep dan Strategi Penanganan Kumuh Skala Kawasan

Kawasan	Permasalahan	Pencegahan		Peningkatan	
		Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
Kawasan Purwodadi - Kuripan	Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah 3R	Pemugaran	Meningkatkan pelayanan sistem pengelolaan persampahan permukiman sesuai dengan SPM
	Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pencegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	Pemugaran	Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM
Kawasan Purwodadi - Kalongan	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah 3R	Pemugaran	Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan permukiman sesuai dengan SPM
	Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pencegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	Pemugaran	Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM
Kawasan Godong	Sistem pengelolaan	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kegiatan sosialisasi	Pemugaran	Meningkatkan pelayanan

Kawasan	Permasalahan	Pencegahan		Penanggulangan	
		Konsep	Strategi	Konsep	Strategi
	persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis		dan edukasi pengelolaan sampah 3R		sistem pengelolaan persampahan permukiman sesuai dengan SPM
	Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pencegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	Pemugaran	Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM
Kawasan Gubug	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah 3R	Pemugaran	Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan permukiman sesuai dengan SPM
	Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan edukasi pencegahan dan penanganan dini kejadian kebakaran	Pemugaran	Meningkatkan pelayanan sistem proteksi kebakaran di permukiman sesuai dengan SPM

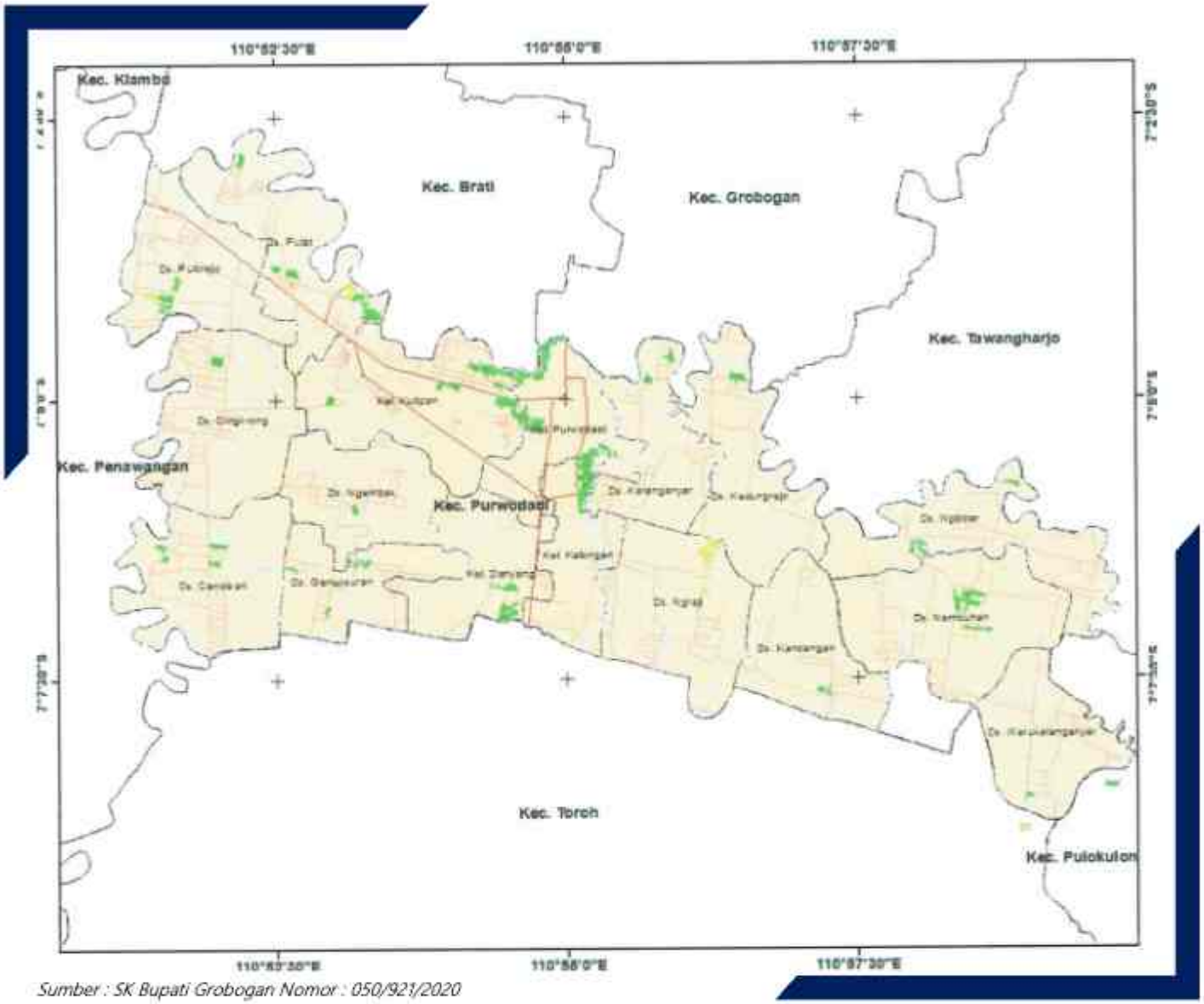
Sumber: RP2KPKPK Kab. Grobogan, 2020

BAB 3

PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

3.1. Sebaran Permukiman Kumuh, Peta Deliniasi Kawasan Kumuh, Lokasi Beserta Luasan

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan ditetapkan dalam SK Bupati Grobogan Nomor: 050/921/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Grobogan. Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Grobogan tersebar di 92 lokasi yang terdapat di 17 desa/kelurahan di 1 kecamatan, dengan luas total 153,71 Hektar.



Sumber : SK Bupati Grobogan Nomor : 050/921/2020

Gambar 3. 1 Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Grobogan

Untuk lebih jelasnya, persebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III. 1 Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Grobogan

No	KECAMATAN/DISTRIK	KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)
1	PURWODADI	CANDISARI	RT002-RW001	1.22
2	PURWODADI	CANDISARI	RT002-RW002	1.70
3	PURWODADI	CANDISARI	RT003-RW006	2.25
4	PURWODADI	CANDISARI	RT004-RW003	1.42
5	PURWODADI	CINGKRONG	RT002-RW007	2.86
6	PURWODADI	DANYANG	RT001-RW001	0.57
7	PURWODADI	DANYANG	RT002-RW001	1.87
8	PURWODADI	DANYANG	RT003-RW001	1.64
9	PURWODADI	DANYANG	RT006-RW001	3.12

No	KECAMATAN/DISTRIK	KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)
10	PURWODADI	DANYANG	RT007-RW001	2.18
11	PURWODADI	GENUKSURAN	RT004-RW004	0.93
12	PURWODADI	GENUKSURAN	RT004-RW005	1.06
13	PURWODADI	GENUKSURAN	RT004-RW006	1.14
14	PURWODADI	GENUKSURAN	RT005-RW001	2.19
15	PURWODADI	GENUKSURAN	RT006-RW001	1.04
16	PURWODADI	KALONGAN	RT001-RW008	1.96
17	PURWODADI	KALONGAN	RT002-RW006	2.98
18	PURWODADI	KALONGAN	RT002-RW008	2.00
19	PURWODADI	KALONGAN	RT003-RW004	0.98
20	PURWODADI	KALONGAN	RT003-RW006	1.68
21	PURWODADI	KALONGAN	RT004-RW004	0.35
22	PURWODADI	KALONGAN	RT004-RW006	2.30
23	PURWODADI	KALONGAN	RT005-RW006	3.02
24	PURWODADI	KALONGAN	RT007-RW006	1.97
25	PURWODADI	KALONGAN	RT007-RW008	1.71
26	PURWODADI	KANDANGAN	RT002-RW007	2.08
27	PURWODADI	KARANGANYAR	RT002-RW007	1.59
28	PURWODADI	KARANGANYAR	RT006-RW007	2.13
29	PURWODADI	KEDUNGREJO	RT005-RW006	2.95
30	PURWODADI	KURIPAN	RT001-RW003	1.76
31	PURWODADI	KURIPAN	RT001-RW004	0.86
32	PURWODADI	KURIPAN	RT001-RW005	2.02
33	PURWODADI	KURIPAN	RT001-RW007	1.08
34	PURWODADI	KURIPAN	RT001-RW009	1.35
35	PURWODADI	KURIPAN	RT002-RW004	0.58
36	PURWODADI	KURIPAN	RT002-RW006	0.55
37	PURWODADI	KURIPAN	RT002-RW007	2.39
38	PURWODADI	KURIPAN	RT003-RW003	0.99
39	PURWODADI	KURIPAN	RT003-RW004	1.01
40	PURWODADI	KURIPAN	RT003-RW005	0.90
41	PURWODADI	KURIPAN	RT003-RW007	2.44
42	PURWODADI	KURIPAN	RT003-RW018	1.83
43	PURWODADI	KURIPAN	RT004-RW003	0.60
44	PURWODADI	KURIPAN	RT005-RW003	1.00
45	PURWODADI	KURIPAN	RT005-RW013	3.32
46	PURWODADI	NAMBUHAN	RT003-RW004	3.77
47	PURWODADI	NAMBUHAN	RT003-RW005	2.42
48	PURWODADI	NAMBUHAN	RT004-RW004	6.00
49	PURWODADI	NAMBUHAN	RT005-RW002	3.28
50	PURWODADI	NGEMBAK	RT003-RW004	1.31
51	PURWODADI	NGLOBAR	RT006-RW002	1.74

No	KECAMATAN/DISTRIK	KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)
52	PURWODADI	NGRAJI	RT005-RW004	1.20
53	PURWODADI	NGRAJI	RT007-RW004	1.82
54	PURWODADI	NGRAJI	RT009-RW004	1.69
55	PURWODADI	NGRAJI	RT013-RW004	0.87
56	PURWODADI	PULOREJO	RT004-RW004	1.43
57	PURWODADI	PULOREJO	RT005-RW004	1.39
58	PURWODADI	PULOREJO	RT006-RW004	2.84
59	PURWODADI	PULOREJO	RT007-RW004	0.63
60	PURWODADI	PULOREJO	RT009-RW004	1.96
61	PURWODADI	PURWODADI	RT001-RW001	0.46
62	PURWODADI	PURWODADI	RT001-RW017	2.43
63	PURWODADI	PURWODADI	RT002-RW006	1.76
64	PURWODADI	PURWODADI	RT002-RW017	1.28
65	PURWODADI	PURWODADI	RT004-RW016	1.90
66	PURWODADI	PURWODADI	RT004-RW022	0.72
67	PURWODADI	PURWODADI	RT005-RW001	0.69
68	PURWODADI	PURWODADI	RT005-RW003	1.73
69	PURWODADI	PURWODADI	RT005-RW006	1.79
70	PURWODADI	PURWODADI	RT005-RW016	0.98
71	PURWODADI	PURWODADI	RT005-RW022	1.12
72	PURWODADI	PURWODADI	RT006-RW001	0.41
73	PURWODADI	PURWODADI	RT006-RW003	0.69
74	PURWODADI	PURWODADI	RT006-RW022	1.36
75	PURWODADI	PURWODADI	RT007-RW003	0.56
76	PURWODADI	PURWODADI	RT007-RW017	2.10
77	PURWODADI	PURWODADI	RT008-RW003	0.43
78	PURWODADI	PURWODADI	RT008-RW007	1.49
79	PURWODADI	PURWODADI	RT009-RW003	0.54
80	PURWODADI	PURWODADI	RT009-RW007	1.17
81	PURWODADI	PURWODADI	RT011-RW016	0.59
82	PURWODADI	PUTAT	RT001-RW003	2.50
83	PURWODADI	PUTAT	RT001-RW004	1.08
84	PURWODADI	PUTAT	RT002-RW001	1.38
85	PURWODADI	PUTAT	RT002-RW003	3.15
86	PURWODADI	PUTAT	RT002-RW004	1.91
87	PURWODADI	PUTAT	RT002-RW008	2.12
88	PURWODADI	PUTAT	RT003-RW004	3.20
89	PURWODADI	PUTAT	RT005-RW001	2.24
90	PURWODADI	WARUKARANGANYAR	RT005-RW003	1.63
91	PURWODADI	WARUKARANGANYAR	RT005-RW004	1.05
92	PURWODADI	WARUKARANGANYAR	RT006-RW005	1.33

Sumber : SK Bupati Grobogan Nomor : 050/921/2020

3.2. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Hasil Verifikasi

Profil kawasan permukiman kumuh disusun berdasarkan SK Bupati Grobogan Nomor : 050/921/2020. Dalam profil ini, akan dijelaskan mengenai kondisi eksisting kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Tegal meliputi kondisi kekumuhan, tipologi kumuh, karakteristik, permasalahan utama, pertimbangan lain, kondisi 7 aspek kekumuhan, peta dan persebaran lokasi kumuh, riwayat penanganan kumuh, serta gambaran kelembagaan lokal.

3.2.1 Profil Desa/Kelurahan

Profil Desa/Kelurahan merupakan profil untuk masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Grobogan sesuai dengan jumlah lokasi kumuh dalam SK Bupati Grobogan Nomor: 050/921/2020 yang terdiri dari:

1. Candisari dengan luas 6.59 Ha
2. Cingkrong dengan luas 2.86 Ha
3. Danyang dengan luas 9.38 Ha
4. Genuksuran dengan luas 6.36 Ha
5. Kalongan dengan luas 18.95 Ha
6. Kandangan dengan luas 2.08 Ha
7. Karanganyar dengan luas 3.72 Ha
8. Kedungrejo dengan luas 2.95 Ha
9. Kuripan dengan luas 22.68 Ha
10. Nambuhan dengan luas 15.47 Ha
11. Ngembak dengan luas 1.31 Ha
12. Nglobar dengan luas 1.74 Ha
13. Ngraji dengan luas 5.58 Ha
14. Pulorejo dengan luas 8.25 Ha
15. Purwodadi dengan luas 24.20 Ha
16. Putat dengan luas 17.58 Ha
17. Warukaranganyar dengan luas 4.01 Ha

DESA CANDISARI



Luas Kumuh	GEOGRAFIS	
6.95 Ha	Koordinat	:
	Latitude	: -7,0020405
	Longitude	: 110,4875

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (HA)	KEKUMUHAN	
DESA	RT/RW		NILAI	TINGKAT
CANDISARI	RT002-RW001	1.22	25	Ringan
	RT002-RW002	1.7	26	Ringan
	RT003-RW006	2.25	25	Ringan
	RT004-RW003	1.42	29	Ringan

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

SK 2014			SK 2020	
KELURAHAN/ DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
CANDISARI	Belum Masuk SK		RT002-RW001	1.22
			RT002-RW002	1.70
			RT003-RW006	2.25
			RT004-RW003	1.42

Gambaran Kelembagaan Lokal

Nama BKM	:	BKM SIDO MAKMUR
Alamat BKM	:	Desa Candisari, Kec. Purwodadi.
Status Kebendayaan BKM	:	Mandiri
Legalitas BKM	:	AHU-0008177.AH.01.07.TAHUN 2017, Tanggal 15 Mei 2017, Notaris Hadi Suwignyo,SH,M.Kn

Kategori Kumuh, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : **KUMUH RINGAN**

Tipologi Kumuh : Dataran Rendah

Karakteristik :

- Letak Desa Candisari berada pada lokasi permukiman perkotaan yang padat dengan keterbatasan lahan
- Perdagangan menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat yang paling dominan di sana serta banyaknya industri rumahan yang masih kecil maupun yang sudah besar

PERMASALAHAN UTAMA

Permasalah yang ada adalah jalan yang rusak yang disebabkan usia bangunan yang sudah lama, sehingga sudah banyak jalan yang sudah berlubang. Selain usia bangungan yang sudah lama, Desa candisari merupakan tanah labil, dimana tanah tersebut mudah bergerak dan bergeser, sehingga kontur tanah tidak stabil. Selain itu, seringkali air menggenang di saat musim hujan, sehingga memperpendek usia bangunan. Untuk drainase, usia bangunan dan posisi sungai panjang sebagai pembuangan akhir yang sering meluap untuk menampung limpasan air hujan sehingga air menggenang membuat saluran lebih cepat rusak serta saluran kurang berfungsi dengan baik. Masyarakat pun masih membuang limbah rumah tangga dari mencuci maupun mandi ke saluran drainase, sehingga membuat lingkungan semakin kumuh







KONDISI EKSISTING

Bangunan

- Ketidakteraturan Bangunan : 128 Unit
- Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis : 14 Unit

Jalan Lingkungan

- Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan : 400 meter
- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 300 meter

Air Minum

- Ketersediaan Akses aman Air Minum : 32 KK

Drainase Lingkungan

- Ketidaktersediaan Drainase : 900 meter
- Kualitas Konstruksi Drainase : 1.350 meter

Air Limbah

- Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 75 KK

Persampahan

- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 140 KK
- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar teknis : 78 KK

Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran : 62 Unit
- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 100 Unit

Gambar 3. 2 Profil Desa Candisari

DESA CINGKRONG



KONDISI EKSISTING



Luas Kumuh	GEOGRAFIS	
2.86 Ha	Koordinat	:
	Latitude	: -7.51359
	Longitude	: 110.544829

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (HA)	KEKUMUHAN	
DESA	RT/RW		NILAI	TINGKAT
CINGKRONG	RT002-RW007	2.86	31	Ringan

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

SK 2014			SK 2020	
KELURAHAN/ DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
CINGKRONG	*Belum Masuk SK*		RT002-RW007	2.86

Gambaran Kelembagaan Lokal

Nama BKM	:	BKM PURWO MANUNGGAL
Alamat BKM	:	Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi
Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
Legalitas BKM	:	AHU-0008193.AH.01.07.TAHUN 2017, Tanggal 15 Mei 2017, Notaris Hadi Suseignyo,SH,M.KN

Kategori Kumuh, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh	:	**KUMUH RINGAN**
Tipologi Kumuh	:	Dataran rendah
Karakteristik	:	

Letak Desa Cingkrong berada pada lokasi permukiman perkotaan yang padat dengan keterbatasan lahan, karena berada pada lokasi pusat perkotaan dan pusat perdagangan

PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang ada adalah jalan yang rusak yang disebabkan usia bangunan yang sudah lama, sehingga sudah banyak jalan yang sudah berlubang. Kontur tanah Desa Cingkrong merupakan tanah labil, dimana tanah tersebut mudah bergerak dan bergeser. Selain itu, seringkali air menggenang di saat musim hujan, sehingga memperpendek usia bangunan. Selain jalan, hal yang perlu diperhatikan adalah drainase. Usia bangunan dan posisi sungai panjang sebagai pembuangan akhir yang sering meluap untuk menampung limpasan air hujan sehingga air menggenang membuat saluran lebih cepat rusak serta saluran kurang berfungsi dengan baik. Kondisi perkotaan yang ketersediaan lahan sangat terbatas sehingga ada beberapa yang membuang sampah di sekitar rumah masing-masing dan sungai. Namun ada sebagian yang telah memanfaatkan pengelolaan sampah yang diambil seminggu dua kali. Hal ini yang menyebabkan desa menjadi kumuh serta kesadaran masyarakat dan pola hidup yang kurang sehat

Bangunan

- Ketidakteraturan Bangunan : 6 Unit
- Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis : 16 Unit

Jalan Lingkungan

- Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan : 498 meter
- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 500 meter

Air Minum

- Ketersediaan Akses aman Air Minum : KK

Drainase Lingkungan

- Ketidaktersediaan Drainase : 500 meter

Persampahan

- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 27 KK
- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar teknis : 27 KK

Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 22 Unit

Gambar 3. 3 Profil Desa Cingkrong

DESA DANYANG

Luas Kumuh	GEOGRAFIS	
9.38 Ha	Koordinat	:
	Latitude	: -7,1119
	Longitude	: 110,9093



SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (HA)	KEKUMUHAN	
DESA	RT/RW		NILAI	TINGKAT
DANYANG	RT001-RW001	0.57	22	Ringan
DANYANG	RT002-RW001	1.87	27	Ringan
DANYANG	RT003-RW001	1.64	16	Ringan
DANYANG	RT006-RW001	3.12	21	Ringan
DANYANG	RT007-RW001	2.18	18	Ringan

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

	SK 2014		SK 2020	
KELURAHAN/ DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
DANYANG	RT001-RW001	12.73	RT001-RW001	0.57
	RT002-RW001		RT002-RW001	1.87
	RT003-RW001		RT003-RW001	1.64
	RT004-RW001		-	-
	RT005-RW001		-	-
	RT006-RW001		RT006-RW001	3.12
	RT007-RW001		RT007-RW001	2.18

Gambaran Kelembagaan Lokal

Nama BKM	:	BKM BERKAH
Alamat BKM	:	Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi
Status Kelembagaan BKM	:	Mandiri
Legalitas BKM	:	AHU-0009189.AH.01.07.TAHUN 2017, Tanggal 15 Mei 2017, Notaris Hadi Suwignyo,SH,M.KN

Kategori Kumuh, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : **KUMUH RINGAN**

Tipologi Kumuh : Dataran rendah

Karakteristik :

Desa Danyang berada pada lokasi permukiman perkotaan yang padat dengan keterbatasan lahan. Perdagangan menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat yang paling dominan di sana serta banyaknya industri rumahan yang masih kecil maupun yang sudah besar

PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan jalan yang rusak yang disebabkan usia bangunan yang sudah lama, sehingga sudah banyak jalan y ang sudah berlubang. Dan seringkali air menggenang di saat musim hujan, sehingga memperpendek usia bangunan. Permasalsahan drainase karena usia bangunan dan posisi sungai panjang sebagai pembuangan akhir yang sering meluap untuk menampung limpasan air hujan sehingga air menggenang membuat saluran lebih cepat rusak serta saluran kurang berfungsi dengan baik. Kondisi perkotaan yang ketersediaan lahan sangat teratas sehingga ada beberapa yang membuang sampah di sekitar rumah masing-masing dan sungai. Namun ada sebagian yang telah memanfaatkan pengelolaan sampah yang diambil seminggu dua kali. Hal ini yang menyebabkan desa menjadi kumuh serta kesadaran masyarakat dan pola hidup yang kurang sehat.

KONDISI EKSISTING



Bangunan

- Ketidakteraturan Bangunan : 208 Unit
- Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis : 72 Unit

Jalan Lingkungan

- Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan : 394 meter
- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 1.846 meter

Air Minum

- Ketersediaan Akses aman Air Minum : 21 KK
- Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum : 97 KK

Drainase Lingkungan

- Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air : 3 Ha
- Ketidaktersediaan Drainase : 246 meter
- Kualitas Konstruksi Drainase : 722 meter

Air Limbah

- Sistem Pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis : 1 KK
- Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 2 KK

Persampahan

- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 45 KK
- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar teknis : 116 KK

Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran : 44 Unit
- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 248 Unit

Gambar 3. 4 Profil Desa Danyang

DESA GENUKSURAN



Luas Kumuh
6.36 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat	:	
Latitude	:	-7.922
Longitude	:	106.468

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (HA)	KEKUMUHAN	
DESA	RT/RW		NILAI	TINGKAT
GENUKSURAN	RT004-RW004	0.93	25	Ringan
GENUKSURAN	RT004-RW005	1.06	24	Ringan
GENUKSURAN	RT004-RW006	1.14	32	Ringan
GENUKSURAN	RT005-RW001	2.19	18	Ringan
GENUKSURAN	RT006-RW001	1.04	21	Ringan

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

SK 2014			SK 2020	
KELURAHAN/ DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
GENUKSURAN	*Belum Masuk SK*		RT004-RW004	0.93
			RT004-RW005	1.06
			RT004-RW006	1.14
			RT005-RW001	2.19
			RT006-RW001	1.04

Gambaran Kelembagaan Lokal

Nama BKM	:	BKM RUKUN SENTOSA
Alamat BKM	:	Desa Genuksuran, Kec. Purwodadi
Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
Legalitas BKM	:	AHU-0000194.AH.01.07.TAHUN 2017, Tanggal 12 Mei 2017, Notaris Hadi Suwignyo,SH.M.KN

Kategori Kumuh, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh	:	**KUMUH RINGAN**
Tipologi Kumuh	:	Dataran Rendah
Karakteristik	:	

Desa Genuksuran berada pada lokasi permukiman perkotaan yang padat dengan keterbatasan lahan, dilintasi jalan raya antar kota yang sangat ramai merupakan suatu desa yang sibuk dan aktivitas perdagangan.

PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan jalan yang rusak yang disebabkan usia bangunan yang sudah lama, sehingga sudah banyak jalan y ang sudah berlubang. Dan seringkali air menggenang di saat musim hujan, sehingga memperpendek usia bangunan. Permasalsahan drainase karena usia bangunan dan posisi sungai panjang sebagai pembuangan akhir yang sering meluap untuk menampung limpasan air hujan sehingga air menggenang membuat saluran lebih cepat rusak serta saluran kurang berfungsi dengan baik. Kondisi perkotaan yang ketersediaan lahan sangat teratas sehingga ada beberapa yang membuang sampah di sekitar rumah masing-masing dan sungai. Namun ada sebagian yang telah memanfaatkan pengelolaan sampah yang diambil seminggu dua kali. Hal ini yang menyebabkan desa menjadi kumuh serta kesadaran masyarakat dan pola hidup yang kurang sehat.

KONDISI EKSISTING



Bangunan

- Ketidakteraturan Bangunan : 200 Unit
- Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis : 36 Unit

Jalan Lingkungan

- Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan : 859 meter
- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 605 meter

Air Minum

- Ketersediaan Akses aman Air Minum : 154 KK

Drainase Lingkungan

- Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air : 1 Ha
- Ketidaktersediaan Drainase : 1.270 meter
- Kualitas Konstruksi Drainase : 540 meter

Air Limbah

- Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 3 KK

Persampahan

- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 208 KK
- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar teknis : 40 KK

Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran : 40 Unit
- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 200 Unit

Gambar 3. 5 Profil Desa Genuksuran

DESA KALONGAN



Luas Kumuh

18.95 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : -7,1119
Longitude : 110,9093

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (HA)	KEKUMUHAN	
DESA	RT/RW		NILAI	TINGKAT
KALONGAN	RT001-RW008	1.96	32	Ringan
KALONGAN	RT002-RW006	2.98	27	Ringan
KALONGAN	RT002-RW008	2.00	17	Ringan
KALONGAN	RT003-RW004	0.98	17	Ringan
KALONGAN	RT003-RW006	1.68	26	Ringan
KALONGAN	RT004-RW004	0.35	28	Ringan
KALONGAN	RT004-RW006	2.3	22	Ringan
KALONGAN	RT005-RW006	3.02	20	Ringan
KALONGAN	RT007-RW006	1.97	23	Ringan
KALONGAN	RT007-RW008	1.71	25	Ringan

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

SK 2014			SK 2020	
KELURAHAN/ DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
KALONGAN	RT003-RW001	3.45	-	-
	RT004-RW001		-	-
	Belum Masuk SK		RT001-RW008	1.96
	Belum Masuk SK		RT002-RW006	2.98
	Belum Masuk SK		RT002-RW008	2.00
	Belum Masuk SK		RT003-RW004	0.98
	Belum Masuk SK		RT003-RW006	1.68
	Belum Masuk SK		RT004-RW004	0.35
	Belum Masuk SK		RT004-RW006	2.30
	Belum Masuk SK		RT005-RW006	3.02
	Belum Masuk SK		RT007-RW006	1.97
	Belum Masuk SK		RT007-RW008	1.71

Kategori Kumuh, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : **KUMUH RINGAN**
Tipologi Kumuh : Dataran rendah
Karakteristik :
Berada pada lokasi permukiman perkotaan yang padat dengan keterbatasan lahan, dilintasi jalan raya antar kota yang sangat ramai merupakan suatu desa yang sibuk dan aktivitas perdagangan

Gambaran Kelembagaan Lokal

Nama BKM	:	BKM MAJU MAKMUR
Alamat BKM	:	Kelurahan Kalongan, Kec. Purwodadi
Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
Legalitas BKM	:	AHU-0008188.AH.01.07.TAHUN 2017, Tanggal 12 Mei 2017, Notaris Hadi Suwignyo,SH.M.KN

PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan jalan yang rusak yang disebabkan usia bangunan yang sudah lama, sehingga sudah banyak jalan yang sudah berlubang. Dan seringkali air menggenang di saat musim hujan, sehingga memperpendek usia bangunan. Permasalahan drainase karena usia bangunan dan posisi sungai panjang sebagai pembuangan akhir yang sering meluap untuk menampung limpasan air hujan sehingga air menggenang membuat saluran lebih cepat rusak serta saluran kurang berfungsi dengan baik. Kondisi perkotaan yang ketersediaan lahan sangat teratas sehingga ada beberapa yang membuang sampah di sekitar rumah masing-masing dan sungai. Namun ada sebagian yang telah memanfaatkan pengelolaan sampah yang diambil seminggu dua kali. Hal ini yang menyebabkan desa menjadi kumuh serta kesadaran masyarakat dan pola hidup yang kurang sehat.

KONDISI EKSISTING



Bangunan

- Ketidakteraturan Bangunan : 95 Unit
- Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis : 121 Unit

Jalan Lingkungan

- Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan : 2.640 meter
- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 2.240 meter

Air Minum

- Ketersediaan Akses aman Air Minum : 15 KK
- Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum : 48 KK

Drainase Lingkungan

- Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air : 7 Ha
- Ketidaktersediaan Drainase : 900 meter
- Kualitas Konstruksi Drainase : 2.526 meter

Air Limbah

- Sistem Pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis : 6 KK
- Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 54 KK

Persampahan

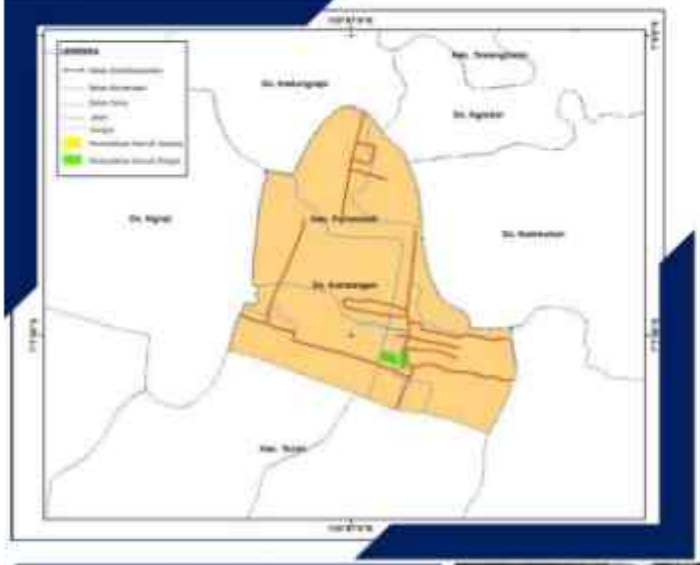
- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 603 KK
- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar teknis : 245 KK

Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran : 195 Unit
- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 441 Unit

Gambar 3. 6 Profil Desa Kalongan

DESA KANDANGAN



Luas Kumuh	GEOGRAFIS	
2.08 Ha	Koordinat	:
	Latitude	: 7.513594
	Longitude	: 110.544829

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (HA)	KEKUMUHAN	
DESA	RT/RW		NILAI	TINGKAT
KANDANGAN	RT002-RW007	2.08	35	Ringan

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

SK 2014			SK 2020	
KELURAHAN/ DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
KANDIANGAN	Belum Masuk SK		RT002-RW007	2.08

Gambaran Kelembagaan Lokal

Nama BKM	:	BKM SIDO MAKMUR
Alamat BKM	:	Desa Kandangan, Kecamatan Purwodadi
Status Kebendayaan BKM	:	Mandiri
Legalitas BKM	:	AHU-0010171.AH.01.07.TAHUN2017, Tanggal 31 Mei 2017, Notaris Hadi Suwignyo,SH.M.KN

Kategori Kumuh, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh	:	**KUMUH RINGAN**
Tipologi Kumuh	:	Dataran rendah
Karakteristik	:	

Letak Desa Kandangan berada pada lokasi permukiman pedesaan yang padat dengan keterbatasan lahan, masih banyak lahan persawahan dan ladang yang difungsikan sebagai penopang kehidupan

PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan jalan yang rusak yang disebabkan usia bangunan yang sudah lama, sehingga sudah banyak jalan yang sudah berlubang. Dan seringkali air menggenang di saat musim hujan, sehingga memperpendek usia bangunan. Permasalsahan drainase karena usia bangunan dan posisi sungai panjang sebagai pembuangan akhir yang sering meluap untuk menampung limpasan air hujan sehingga air menggenang membuat saluran lebih cepat rusak serta saluran kurang berfungsi dengan baik. Kondisi perkotaan yang ketersediaan lahan sangat teratas sehingga ada beberapa yang membuang sampah di sekitar rumah masing-masing dan sungai. Namun ada sebagian yang telah memanfaatkan pengelolaan sampah yang diambil seminggu dua kali. Hal ini yang menyebabkan desa menjadi kumuh serta kesadaran masyarakat dan pola hidup yang kurang sehat.

KONDISI EKSISTING







Jalan Lingkungan

- Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan : 505 meter
- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 645 meter

Air Minum

- Ketersediaan Akses aman Air Minum : 39 KK

Drainase Lingkungan

- Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air : 1 Ha
- Ketidaktersediaan Drainase : 1.290 meter
- Kualitas Konstruksi Drainase : 200 meter

Persampahan

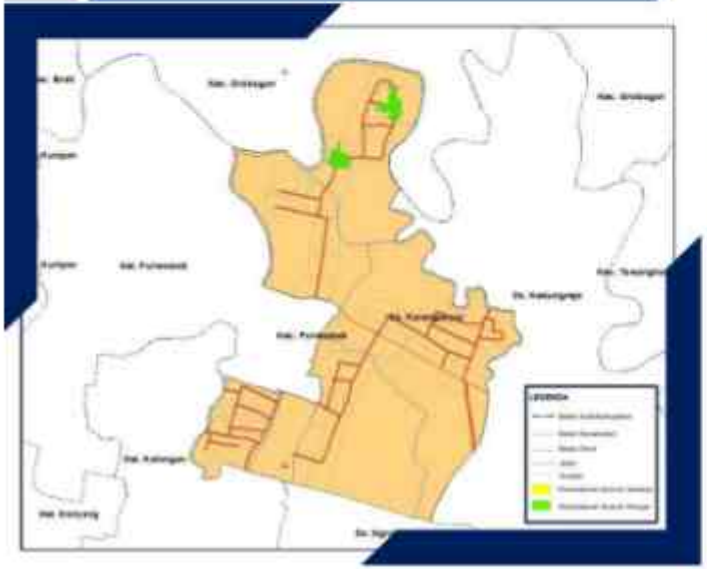
- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 39 KK
- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar teknis : 39 KK

Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran : 39 Unit
- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 39 Unit

Gambar 3. 7 Profil Desa Kandangan

DESA KARANGANYAR



KONDISI EKSISTING



Luas Kumuh	GEOGRAFIS
3.72 Ha	Koordinat : Latitude : -7.0020405 Longitude : 110.4875

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (HA)	KEKUMUHAN	
DESA	RT/RW		NILAI	TINGKAT
KARANGANYAR	RT002-RW007	1.59	31	Ringan
KARANGANYAR	RT006-RW007	2.13	29	Ringan

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

SK 2014			SK 2020	
KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
KARANGANYAR	Seriteng Mati	18.72	-	-
KARANGANYAR	Belum Masuk SK		RT002-RW007	1.59
KARANGANYAR	Belum Masuk SK		RT006-RW007	2.13

Gambaran Kelembagaan Lokal

Nama BKM	:	BKM Budi Luhur
Alamat BKM	:	Desa Karanganyar, Kec. Purwodadi
Status Kelembagaan BKM	:	Mandiri
Legalitas BKM	:	AHU-0008182.AH.01.07.TAHUN 2017, Tanggal 12 Mei 2017, Notaris Hadi Suwignyo,SH,M.KN

Kategori Kumuh, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh	: **KUMUH RINGAN**
Tipologi Kumuh	: Dataran Rendah
Karakteristik	:

Desa Karanganyar bersebelahan persis dengan kota purwodadi sebagai pusat kota yang sangat ramaiakan aktivitas perdagangan

PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan jalan yang rusak yang disebabkan usia bangunan yang sudah lama, sehingga sudah banyak jalan yang sudah berlubang. Dan seringkali air menggenang di saat musim hujan, sehingga memperpendek usia bangunan. Permasalsahan drainase karena usia bangunan dan posisi sungai panjang sebagai pembuangan akhir yang sering meluap untuk menampung limpasan air hujan sehingga air menggenang membuat saluran lebih cepat rusak serta saluran kurang berfungsi dengan baik. Kondisi perkotaan yang ketersediaan lahan sangat teratas sehingga ada beberapa yang membuang sampah di sekitar rumah masing-masing dan sungai. Namun ada sebagian yang telah memanfaatkan pengelolaan sampah yang diambil seminggu dua kali. Hal ini yang menyebabkan desa menjadi kumuh serta kesadaran masyarakat dan pola hidup yang kurang sehat

Bangunan

- Ketidakteraturan Bangunan : 21 Unit
- Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis : 18 Unit

Jalan Lingkungan

- Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan : 785 meter
- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 804 meter

Air Minum

- Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum : 74 KK

Drainase Lingkungan

- Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air : 2 Ha
- Ketidaktersediaan Drainase : 2.580 meter
- Kualitas Konstruksi Drainase : 400 meter

Air Limbah

- Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 75 KK

Persampahan

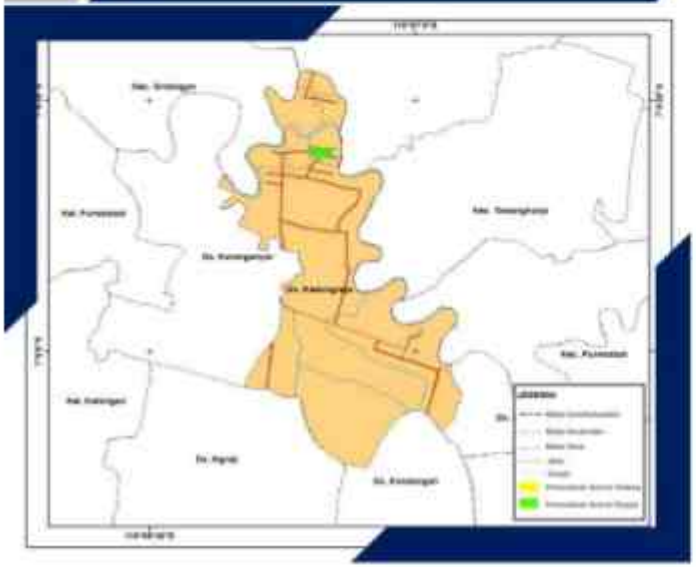
- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 140 KK
- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar teknis : 78 KK

Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran : 62 Unit
- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 100 Unit

Gambar 3. 8 Profil Desa Karanganyar

DESA KEDUNGREJO



KONDISI EKSISTING



Luas Kumuh	GEOGRAFIS	
2.95 Ha	Koordinat	:
	Latitude	: -7.51359
	Longitude	: 110.544829

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (HA)	KEKUMUHAN	
DESA	RT/RW		NILAI	TINGKAT
KEDUNGREJO	RT005-RW006	2.95	24	Ringan

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

SK 2014			SK 2020	
KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
KEDUNGREJO	Belum Masuk SK		RT005-RW006	2.95

Gambaran Kelembagaan Lokal

Nama BKM	:	BKM Sido Mulyo
Alamat BKM	:	Desa Kedungrejo, Kec. Purwodadi
Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
Legalitas BKM	:	AHU-00120.AH.02.01.TAHUN 2017, Tanggal 08 Juni 2017, Notaris Hadi Suwignyo,SH,M.KN MKn

Kategori Kumuh, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh	:	**KUMUH RINGAN**
Tipologi Kumuh	:	Dataran rendah
Karakteristik	:	

Sebagian besar penduduk di sana bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang

PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan jalan yang rusak yang disebabkan usia bangunan yang sudah lama, sehingga sudah banyak jalan yang sudah berlubang. Dan seringkali air menggenang di saat musim hujan, sehingga memperpendek usia bangunan. Permasalsahan drainase karena usia bangunan dan posisi sungai panjang sebagai pembuangan akhir yang sering meluap untuk menampung limpasan air hujan sehingga air menggenang membuat saluran lebih cepat rusak serta saluran kurang berfungsi dengan baik. Kondisi perkotaan yang ketersediaan lahan sangat teratas sehingga ada beberapa yang membuang sampah di sekitar rumah masing-masing dan sungai. Namun ada sebagian yang telah memanfaatkan pengelolaan sampah yang diambil seminggu dua kali. Hal ini yang menyebabkan desa menjadi kumuh serta kesadaran masyarakat dan pola hidup yang kurang sehat

Bangunan

- Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis : 13 Unit

Jalan Lingkungan

- Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan : 150 meter
- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 500 meter

Air Minum

- Ketersediaan Akses aman Air Minum : 19 KK

Drainase Lingkungan

- Ketidaktersediaan Drainase : 215 meter
- Kualitas Konstruksi Drainase : 50 meter

Air Limbah

- Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 2 KK

Persampahan

- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar teknis : 71 KK

Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran : 71 Unit
- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 71 Unit

Gambar 3. 9 Profil Desa Kedungrejo

KEL. KURIPAN

Luas Kumuh	GEOGRAFIS
22.68 Ha	Koordinat : Latitude : -7,51359 Longitude : 110,544829



KONDISI EKSISTING



Kategori Kumuh, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : **KUMUH RINGAN**
Tipologi Kumuh : Dataran Rendah
Karakteristik :
Kelurahan Kuripan berada pada lokasi permukiman perkotaan dan pusat perdagangan

PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan jalan yang rusak yang disebabkan usia bangunan yang sudah lama, sehingga sudah banyak jalan yang sudah berlubang. Dan seringkali air menggenang di saat musim hujan, sehingga memperpendek usia bangunan. Permasalahan drainase karena usia bangunan dan posisi sungai panjang sebagai pembuangan akhir yang sering meluap untuk menampung limpasan air hujan sehingga air menggenang membuat saluran lebih cepat rusak serta saluran kurang berfungsi dengan baik. Kondisi perkotaan yang ketersediaan lahan sangat terbatas sehingga ada beberapa yang membuang sampah di sekitar rumah masing-masing dan sungai. Namun ada sebagian yang telah memanfaatkan pengelolaan sampah yang diambil seminggu dua kali. Hal ini yang menyebabkan desa menjadi kumuh serta kesadaran masyarakat dan pola hidup yang kurang sehat

Gambaran Kelembagaan Lokal

Nama BKM	: BKM Bima Sakti
Alamat BKM	: Kel. Kuripan, Kec. Purwodadi
Status Keberdayaan BKM	: Mandiri
Legalitas BKM	: AHU-0008185.AH.01.07.tahun 2017, Tanggal 08 Juni 2017, Notaris Hadi Sowignyo,SH.M.KN Mkn

Bangunan

- Ketidakteraturan Bangunan : 192 Unit
- Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis : 117 Unit

Jalan Lingkungan

- Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan : 2.600 meter
- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 6.560 meter

Air Minum

- Ketersediaan Akses aman Air Minum : 189 KK
- Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum : 91 KK

Drainase Lingkungan

- Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air : 4 Ha
- Ketidaktersediaan Drainase : 3.480 meter
- Kualitas Konstruksi Drainase : 2.495 meter

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (HA)	KEKUMUHAN	
KELURAHAN	RT/RW		NILAI	TINGKAT
KURIPAN	RT001-RW003	1.76	23	Ringan
KURIPAN	RT001-RW004	0.86	29	Ringan
KURIPAN	RT001-RW005	2.02	16	Ringan
KURIPAN	RT001-RW007	1.08	17	Ringan
KURIPAN	RT001-RW009	1.35	16	Ringan
KURIPAN	RT002-RW004	0.58	23	Ringan
KURIPAN	RT002-RW006	0.55	24	Ringan
KURIPAN	RT002-RW007	2.39	16	Ringan
KURIPAN	RT003-RW003	0.99	33	Ringan
KURIPAN	RT003-RW004	1.01	23	Ringan
KURIPAN	RT003-RW005	0.9	20	Ringan
KURIPAN	RT003-RW007	2.44	16	Ringan
KURIPAN	RT003-RW018	1.83	25	Ringan
KURIPAN	RT004-RW003	0.6	18	Ringan
KURIPAN	RT005-RW003	1	24	Ringan
KURIPAN	RT005-RW013	3.32	17	Ringan

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

	tahun 2014		tahun 2020	
KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
KURIPAN	Belum Masuk SK		RT001-RW005	2.02
KURIPAN	Belum Masuk SK		RT001-RW007	1.08
KURIPAN	RT001-RW009	0.67	RT001-RW009	1.35
KURIPAN	Belum Masuk SK		RT002-RW006	0.55
KURIPAN	RT002-RW007	1.12	RT002-RW007	2.39
KURIPAN	RW 3 & 4	3.86	RT001-RW003	1.76
			RT003-RW003	0.99
			RT004-RW003	0.60
			RT005-RW003	1.00
			RT001-RW004	0.86
			RT002-RW004	0.58
			RT003-RW004	1.01
KURIPAN	Belum Masuk SK		RT003-RW005	0.90
KURIPAN	Belum Masuk SK		RT003-RW007	2.44
KURIPAN	Belum Masuk SK		RT003-RW018	1.83
KURIPAN	Belum Masuk SK		RT005-RW013	3.32

Air Limbah

- Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 194 KK

Persampahan

- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 230 KK
- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar teknis : 509 KK

Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran : 263 Unit
- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 357 Unit

Gambar 3. 10 Profil Kelurahan Kuripan

DESA NAMBUHAN



KONDISI EKSISTING





Luas Kumuh	GEOGRAFIS	
15.47 Ha	Koordinat	:
	Latitude	: -7,2744
	Longitude	: 111,4134

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (HA)	KEKUMUHAN	
DESA	RT/RW		NILAI	TINGKAT
NAMBUHAN	RT003-RW004	3.77	30	Ringan
NAMBUHAN	RT003-RW005	2.42	30	Ringan
NAMBUHAN	RT004-RW004	6	35	Ringan
NAMBUHAN	RT005-RW002	3.28	31	Ringan

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

SK 2014			SK 2020	
KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
NAMBUHAN	Belum Masuk SK		RT003-RW004	3.77
NAMBUHAN	Belum Masuk SK		RT003-RW005	2.42
NAMBUHAN	Belum Masuk SK		RT004-RW004	6.00
NAMBUHAN	Belum Masuk SK		RT005-RW002	3.28

Gambaran Kelembagaan Lokal

Nama BKM	:	BKM MUKTI RAHARJO
Alamat BKM	:	Nambuhan, Kec. Purwodadi
Status Kebentayaan BKM	:	Mandiri
Legalitas BKM	:	AHU-0010174.AH.01.07.TAHUN 2017, Tanggal 09 Juni 2017, Notaris Hadi Suwignyo,SH.M.KN MKn

Kategori Kumuh, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh	:	**KUMUH RINGAN**
Tipologi Kumuh	:	Dataran rendah
Karakteristik	:	

Letak Desa Nambuhan berada pada lokasi permukiman pedesaan, banyak lahan persawahan dan lading dan perdagangan sebagai salah satu sumber pendapatan

PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan jalan yang rusak yang disebabkan usia bangunan yang sudah lama, sehingga sudah banyak jalan yang sudah berlubang. Dan seringkali air menggenang di saat musim hujan, sehingga memperpendek usia bangunan. Permasalsahan drainase karena usia bangunan dan posisi sungai panjang sebagai pembuangan akhir yang sering meluap untuk menampung limpasan air hujan sehingga air menggenang membuat saluran lebih cepat rusak serta saluran kurang berfungsi dengan baik. Kondisi perkotaan yang ketersediaan lahan sangat teratas sehingga ada beberapa yang membuang sampah di sekitar rumah masing-masing dan sungai. Namun ada sebagian yang telah memanfaatkan pengelolaan sampah yang diambil seminggu dua kali. Hal ini yang menyebabkan desa menjadi kumuh serta kesadaran masyarakat dan pola hidup yang kurang sehat

Bangunan

- Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis : 148 Unit

Jalan Lingkungan

- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 200 meter

Air Minum

- Ketersediaan Akses aman Air Minum : 39 KK
- Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum : 159 KK

Drainase Lingkungan

- Ketidaktersediaan Drainase : 1.600 meter
- Kualitas Konstruksi Drainase : 960 meter

Air Limbah

- Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 8 KK

Persampahan

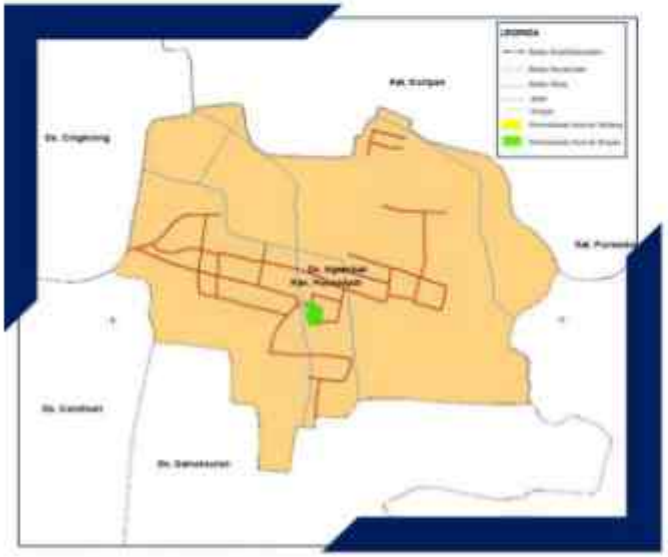
- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 159 KK
- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar teknis : 159 KK

Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 159 KK

Gambar 3. 11 Profil Desa Nambuhan

DESA NGEMBAK



KONDISI EKSISTING



Luas Kumuh	GEOGRAFIS	
1.31 Ha	Koordinat	:
	Latitude	: -7.51359
	Longitude	: 110.544829

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (HA)	KEKUMUHAN	
DESA	RT/RW		NILAI	TINGKAT
NGEMBAK	RT003-RW004	1.31	29	Ringan

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

SK 2014			SK 2020	
KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
NGEMBAK	Belum Masuk SK		RT003-RW004	1.31

Gambaran Kelembagaan Lokal

Nama BKM	:	BKM KARYA SEJAHTERA
Alamat BKM	:	Desa Ngembak, Kec. Purwodadi
Status Kebendayaan BKM	:	Mandiri
Legalitas BKM	:	AHU-0008184.AH.01.07.TAHUN 2017, Tanggal 12 Mei 2017, Notaris Hadi Suwignyo,SH.M.Kn MKn

Kategori Kumuh, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh	: **KUMUH RINGAN**
Tipologi Kumuh	: dataran rendah
Karakteristik	:

Letak Desa Ngembak berada pada lokasi permukiman perkotaan dan pusat perdagangan

PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan jalan yang rusak yang disebabkan usia bangunan yang sudah lama, sehingga sudah banyak jalan yang sudah berlubang. Dan seringkali air menggenang di saat musim hujan, sehingga memperpendek usia bangunan. Permasalsahan drainase karena usia bangunan dan posisi sungai panjang sebagai pembuangan akhir yang sering meluap untuk menampung limpasan air hujan sehingga air menggenang membuat saluran lebih cepat rusak serta saluran kurang berfungsi dengan baik. Kondisi perkotaan yang ketersediaan lahan sangat teratas sehingga ada beberapa yang membuang sampah di sekitar rumah masing-masing dan sungai. Namun ada sebagian yang telah memanfaatkan pengelolaan sampah yang diambil seminggu dua kali. Hal ini yang menyebabkan desa menjadi kumuh serta kesadaran masyarakat dan pola hidup yang kurang sehat

Bangunan

- Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis : 4 Unit

Jalan Lingkungan

- Cakupan pelayanan Jalan Lingkungan : 505 meter
- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 645 meter

Air Minum

- Ketersediaan Akses aman Air Minum : 34 KK

Drainase Lingkungan

- Ketidaktersediaan Drainase : 1.290 meter
- Kualitas Konstruksi Drainase : 200 meter

Persampahan

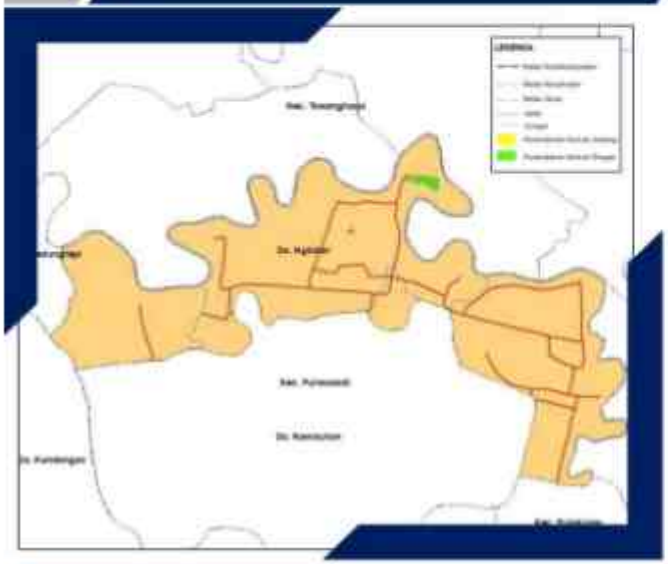
- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 34 KK
- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar teknis : 34 KK

Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 34 Unit

Gambar 3. 12 Profil Desa Ngembak

DESA NGLOBAR



KONDISI EKSISTING



Luas Kumuh	GEOGRAFIS	
1.74 Ha	Koordinat	:
	Latitude	: -7,2744
	Longitude	: 110,4134

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (HA)	KEKUMUHAN	
DESA	RT/RW		NILAI	TINGKAT
NGLOBAR	RT006-RW002	1.74	34	Ringan

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

	SK 2014		SK 2020	
KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
NGLOBAR	Belum Masuk SK		RT006-RW002	1.74

Gambaran Kelembagaan Lokal

Nama BKM	:	BKM MARGO UTAMA
Alamat BKM	:	Desa Ngloba, Kec. Purwodadi
Status Keberdayaan BKM	:	Mandiri
Legalitas BKM	:	AHU-0010172.AH.01.07.TAHUN 2017, Tanggal 08 Juni 2017, Notaris Hadi Suwignyo,SH,M.KN MKn

Kategori Kumuh, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh	:	**KUMUH RINGAN**
Tipologi Kumuh	:	Dataran Rendah
Karakteristik	:	

Letak Desa Nglobar berada pada lokasi permukiman pedesaan, banyak lahan persawahan dan lading dan perdagangan

PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan jalan yang rusak yang disebabkan usia bangunan yang sudah lama, sehingga sudah banyak jalan yang sudah berlubang. Dan seringkali air menggenang di saat musim hujan, sehingga memperpendek usia bangunan. Permasalahan drainase karena usia bangunan dan posisi sungai panjang sebagai pembuangan akhir yang sering meluap untuk menampung limpasan air hujan sehingga air menggenang membuat saluran lebih cepat rusak serta saluran kurang berfungsi dengan baik. Kondisi perdesaan yang ketersediaan lahan sangat teratas sehingga ada beberapa yang membuang sampah di sekitar rumah masing-masing dan sungai. Namun ada sebagian yang telah memanfaatkan pengelolaan sampah yang diambil seminggu dua kali. Hal ini yang menyebabkan desa menjadi kumuh serta kesadaran masyarakat dan pola hidup yang kurang sehat

Bangunan

- Ketidakteraturan Bangunan : 18 Unit
- Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis : 38 Unit

Drainase Lingkungan

- Ketidaktersediaan Drainase : 215 meter
- Kualitas Konstruksi Drainase : 50 meter

Jalan Lingkungan

- Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan : 150 meter
- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 500 meter

Persampahan

- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar teknis : 47 KK

Air Minum

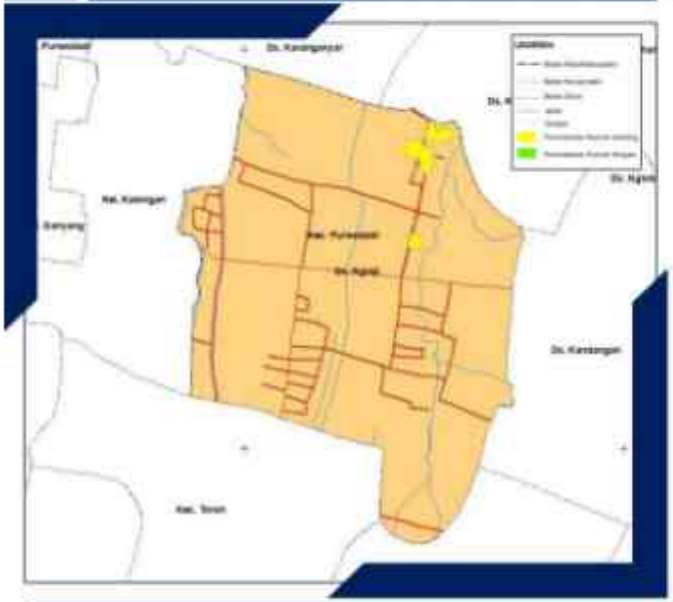
- Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum : 47 KK

Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran : 47 Unit
- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 47 Unit

Gambar 3. 13 Profil Desa Nglobar

DESA NGRAJI



KONDISI EKSISTING



Luas Kumuh	GEOGRAFIS	
5.58 Ha	Koordinat	:
	Latitude	: -7.51359
	Longitude	: 110.544829

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (HA)	KEKUMUHAN	
DESA	RT/RW		NILAI	TINGKAT
NGRAJI	RT005-RW004	1.2	42	Sedang
NGRAJI	RT007-RW004	1.82	54	Sedang
NGRAJI	RT009-RW004	1.69	51	Sedang
NGRAJI	RT013-RW004	0.87	52	Sedang

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

SK 2014			SK 2020	
KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
NGRAJI	Belum Masuk SK		RT005-RW004	1.20
NGRAJI	Belum Masuk SK		RT007-RW004	1.82
NGRAJI	Belum Masuk SK		RT009-RW004	1.69
NGRAJI	Belum Masuk SK		RT013-RW004	0.87

Gambaran Kelembagaan Lokal

Nama BKM	:	BKM BINA PEMBANGUNAN
Alamat BKM	:	Desa Ngraji, Kec. Purwodadi
Status Kebendayaan BKM	:	Mandiri
Legalitas BKM	:	AHU-0008180.AH.01.07.TAHUN 2017, Tanggal 11 Mei 2017, Notaris Hadi Suwignyo,SH.M.KN MKn

Kategori Kumuh, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh	:	KUMUH RINGAN
Tipologi Kumuh	:	Dataran Rendah
Karakteristik	:	

Letak Desa Ngraji berada pada lokasi permukiman pedesaan, banyak lahan persawahan dan lading dan Perdagangan juga menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat

PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan jalan yang rusak yang disebabkan usia bangunan yang sudah lama, sehingga sudah banyak jalan yang sudah berlubang, tanah labil, dimana tanah tersebut mudah bergerak dan bergeser, sehingga kontur tanah tidak stabil. Seringkali air menggenang di saat musim hujan, sehingga memperpendek usia bangunan. Selain jalan, hal yang perlu diperhatikan adalah drainase. Usia bangunan dan posisi sungai panjang sebagai pembuangan akhir yang sering meluap untuk menampung limpasan air hujan sehingga air menggenang membuat saluran lebih cepat rusak serta saluran kurang berfungsi dengan baik. Masyarakat pun masih membuang limbah rumah tangga dari mencuci maupun mandi ke saluran drainase, sehingga membuat lingkungan semakin kumuh.

Untuk air minum, penduduk Desa Ngraji menggunakan air Sumur bor dan membeli air isi ulang, karena air yang ada kurang pada waktu-waktu tertentu, karena kekeringan. Kondisi pedesaan yang ketersediaan lahan yang ada di sekitar rumah masing-masing membuat mereka para penduduk di desa tersebut membuang sampah di sekitar rumah dengan membuat lubang atau membuang sampah di belakang rumah dan sungai

Bangunan

- Ketidakteraturan Bangunan : 146 Unit
- Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis : 132 Unit

Jalan Lingkungan

- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 1.016 meter

Air Minum

- Ketersediaan Akses aman Air Minum : 133 KK
- Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum : 167 KK

Drainase Lingkungan

- Ketidakmampuan Mengalirkan limpasan air : 3 Ha
- Kualitas Konstruksi Drainase : 709 meter

Air Limbah

- Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai Standar Teknis : 1 KK
- Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 65 KK

Persampahan

- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 170 KK
- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar teknis : 170 KK

Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran : 148 Unit
- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 148 Unit

Gambar 3. 14 Profil Desa Ngraji

DESA PULOREJO



Luas Kumuh

8.75 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat :
Latitude : 7,513594
Longitude : 110.544829

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (HA)	KEKUMUHAN	
DESA	RT/RW		NILAI	TINGKAT
PULOREJO	RT004-RW004	1.43	33	Ringan
PULOREJO	RT005-RW004	1.39	40	Sedang
PULOREJO	RT006-RW004	2.84	37	Ringan
PULOREJO	RT007-RW004	0.63	28	Ringan
PULOREJO	RT009-RW004	1.96	32	Ringan

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

SK 2014			SK 2020	
KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
PULOREJO	Belum Masuk SK		RT004-RW004	1.43
PULOREJO	Belum Masuk SK		RT005-RW004	1.39
PULOREJO	Belum Masuk SK		RT006-RW004	2.84
PULOREJO	Belum Masuk SK		RT007-RW004	0.63
PULOREJO	Belum Masuk SK		RT009-RW004	1.96

Gambaran Kelembagaan Lokal

Nama BKM	: BKM REJO MULYO
Alamat BKM	: Desa Pulorejo, Kec. Purwodadi
Status Kelembagaan BKM	: Mandiri
Legalitas BKM	: -

Kategori Kumuh, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : **KUMUH RINGAN**

Tipologi Kumuh : Dataran Rendah

Karakteristik :

Letak Desa Pulorejo berada pada lokasi permukiman pedesaan, banyak lahan persawahan dan lading dan Perdagangan juga menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat

PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan jalan yang rusak yang disebabkan usia bangunan yang sudah lama, sehingga sudah banyak jalan yang sudah berlubang, tanah labil, dimana tanah tersebut mudah bergerak dan bergeser, sehingga kontur tanah tidak stabil. Seringkali air menggenang di saat musim hujan, sehingga memperpendek usia bangunan. Selain jalan, hal yang perlu diperhatikan adalah drainase. Usia bangunan dan posisi sungai panjang sebagai pembuangan akhir yang sering meluap untuk menampung limpasan air hujan sehingga air menggenang membuat saluran lebih cepat rusak serta saluran kurang berfungsi dengan baik. Masyarakat pun masih membuang limbah rumah tangga dari mencuci maupun mandi ke saluran drainase, sehingga membuat lingkungan semakin kumuh.

Untuk air minum, penduduk Desa Pulorejo menggunakan air Sumur bor dan membeli air isi ulang, karena air yang ada kurang pada waktu-waktu tertentu, karena kekeringan. Kondisi pedesaan yang ketersediaan lahan yang ada di sekitar rumah masing-masing membuat mereka para penduduk di desa tersebut membuang sampah di sekitar rumah dengan membuat lubang atau membuang sampah di belakang rumah dan sungai

KONDISI EKSISTING









Bangunan

- Ketidakteraturan Bangunan : 107 Unit
- Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis : 169 Unit

Jalan Lingkungan

- Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan : 700 meter
- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 340 meter

Air Minum

- Ketersediaan Akses aman Air Minum : 104 KK
- Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum : 169 KK

Drainase Lingkungan

- Ketidaktersediaan Drainase : 1.700 meter
- Kualitas Konstruksi Drainase : 300 meter

Air Limbah

- Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 38 KK

Persampahan

- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 169 KK
- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar teknis : 169 KK

Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 169 Unit

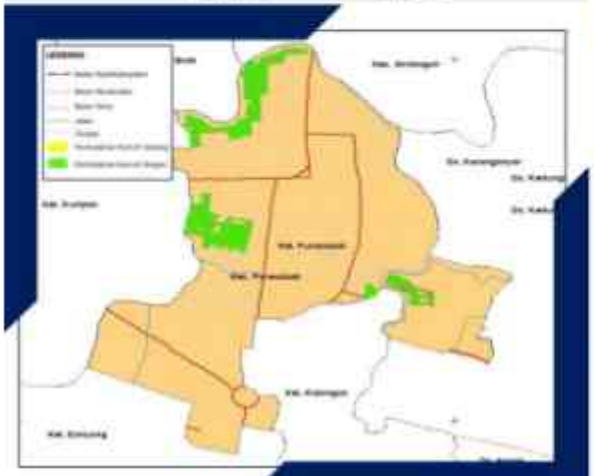
Gambar 3. 15 Profil Desa Pulorejo

KEL. PURWODADI

Luas Kumuh
24.20 Ha

GEOGRAFIS

Koordinat	
Latitude	: -7,51359
Longitude	: 110,544829



Kategori Kumuh, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh	: **KUMUH RINGAN**
Tipologi Kumuh	: Dataran Rendah
Karakteristik	:

Letak Kelurahan Purwodadi berada pada lokasi permukiman perkotaan sebagai pusat perdagangan

PERMASALAHAN UTAMA

permasalahan yang ada adalah jalan yang rusak yang disebabkan usia bangunan yang sudah lama, sehingga sudah banyak jalan yang sudah berlubang. Selain usia bangunan yang sudah lama, Kelurahan Purwodadi merupakan tanah labil, dimana tanah tersebut mudah bergerak dan bergeser, sehingga kontur tanah tidak stabil. Selain itu, seringkali air menggenang di saat musim hujan, sehingga memperpendek usia bangunan. Selain jalan, hal yang perlu diperhatikan adalah drainase. Usia bangunan dan posisi sungai panjang sebagai pembuangan akhir yang sering meluap untuk menampung limpasan air hujan sehingga air menggenang membuat saluran lebih cepat rusak serta saluran kurang berfungsi dengan baik. Masyarakat pun masih membuang limbah rumah tangga dari mencuci maupun mandi ke saluran drainase, sehingga membuat lingkungan semakin kumuh. Untuk air minum, penduduk Kelurahan Purwodadi menggunakan air dari PDAM dan sebagian kecil menggunakan Sumur bor serta membeli air isi ulang, karena air yang ada kurang pada waktu-waktu tertentu, karena kekeringan dan tidak memenuhi sarat kesehatan. Kondisi perkotaan yang ketersediaan lahan sangat terbatas sehingga ada beberapa yang membuang sampah di sekitar rumah masing-masing dan sungai.

Gambaran Kelembagaan Lokal

Nama BKM	:	BKM PURWO MANUNGGAL
Alamat BKM	:	Kel. Purwodadi, Kec. Purwodadi
Status Kelembagaan BKM	:	Mandiri
Legalitas BKM	:	AHU-0010901.AH.01.07.TAHUN 2017, Tanggal 17 Juli 2017, Notaris Hadi Suwignyo,SH.M.KN MKn

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (HA)	KEKUMUHAN	
KELURAHAN	RT/RW		NILAI	TINGKAT
PURWODADI	RT001-RW001	0.46	20	Ringan
PURWODADI	RT001-RW017	2.43	22	Ringan
PURWODADI	RT002-RW006	1.76	23	Ringan
PURWODADI	RT002-RW017	1.28	19	Ringan
PURWODADI	RT004-RW016	1.9	18	Ringan
PURWODADI	RT004-RW022	0.72	20	Ringan
PURWODADI	RT005-RW001	0.69	30	Ringan
PURWODADI	RT005-RW003	1.73	19	Ringan
PURWODADI	RT005-RW006	1.79	25	Ringan
PURWODADI	RT005-RW016	0.98	22	Ringan
PURWODADI	RT005-RW022	1.12	21	Ringan
PURWODADI	RT006-RW001	0.41	21	Ringan
PURWODADI	RT006-RW003	0.69	18	Ringan
PURWODADI	RT006-RW022	1.36	25	Ringan
PURWODADI	RT007-RW003	0.56	18	Ringan
PURWODADI	RT007-RW017	2.1	16	Ringan
PURWODADI	RT008-RW003	0.43	16	Ringan
PURWODADI	RT008-RW007	1.49	20	Ringan
PURWODADI	RT009-RW003	0.54	19	Ringan
PURWODADI	RT009-RW007	1.17	18	Ringan
PURWODADI	RT011-RW016	0.59	17	Ringan

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

SK 2014			SK 2020	
KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT001-RW017	2.43
PURWODADI	RT002-RW017	5.83	RT002-RW017	1.28
PURWODADI	RT003-RW017		-	-
PURWODADI	RT005-RW017		-	-
PURWODADI	RT006-RW017		-	-
PURWODADI	RT007-RW017		RT007-RW017	2.10
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT001-RW003	0.46
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT002-RW006	1.76
PURWODADI	RT004-RW016	1.27	RT004-RW016	1.90
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT005-RW016	0.98
PURWODADI	RT006-RW016	3.04	-	-
PURWODADI	RT007-RW016		-	-
PURWODADI	RT008-RW016		-	-
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT011-RW016	0.59
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT004-RW022	0.72
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT005-RW001	0.69
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT005-RW003	1.73
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT005-RW006	1.79
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT005-RW022	1.12
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT006-RW001	0.41
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT006-RW003	0.69
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT006-RW022	1.36
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT007-RW003	0.56
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT008-RW003	0.43
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT008-RW007	1.49
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT009-RW003	0.54
PURWODADI	Belum Masuk SK		RT009-RW007	1.17

KONDISI EKSISTING



Bangunan

- Ketidakteraturan Bangunan : 595 Unit

Jalan Lingkungan

- Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan : 2.702 m
- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 8.135 m

Air Minum

- Ketersediaan Akses aman Air Minum : 102 KK
- Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum : 24 KK

Drainase Lingkungan

- Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air : 2 Ha
- Ketidaktersediaan Drainase : 4.626 meter
- Kualitas Konstruksi Drainase : 1.430 meter

Air Limbah

- Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis : 35 KK
- Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 40 KK

Persampahan

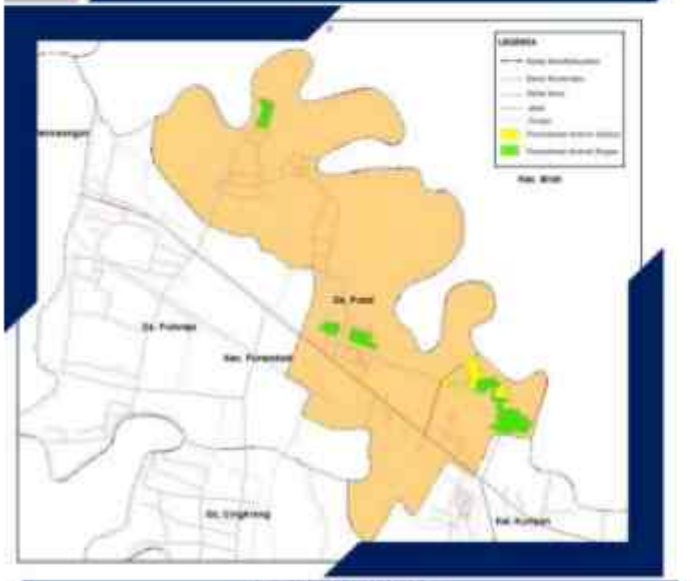
- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 189 KK
- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar teknis : 219 KK

Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran : 575 Unit
- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 846 KK

Gambar 3. 16 Profil Kelurahan Purwodadi

DESA PUTAT



KONDISI EKSISTING



Luas Kumuh	GEOGRAFIS
17.58 Ha	Koordinat : Latitude : - 7,513594 Longitude : 110,544829

Kategori Kumuh, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh : **KUMUH RINGAN**

Tipologi Kumuh : Dataran Rendah

Karakteristik :

Letak Desa Putat berada pada lokasi permukiman pedesaan, banyak lahan persawahan dan lading, Jasa kontruksi, Perdagangan juga menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat

PERMASALAHAN UTAMA

permasalahan jalan yang rusak yang disebabkan usia bangunan yang sudah lama, sehingga sudah banyak jalan yang sudah berlubang, usa bangungan yang sudah lama. Desa Putat merupakan tanah labil, dimana tanah tersebut mudah bergerak dan bergeser, sehingga kontur tanah tidak stabil. Seringkali air menggenang di saat musim hujan, sehingga memperpendek usia bangunan. Hal yang perlu diperhatikan adalah drainase. Usia bangunan dan posisi sungai panjang sebagai pembuangan akhir yang sering meluap untuk menampung limpasan air hujan sehingga air menggenang membuat saluran lebih cepat rusak serta saluran kurang berfungsi dengan baik. Masyarakat pun masih membuang limbah rumah tangga dari mencuci maupun mandi ke saluran drainase, sehingga membuat lingkungan semakin kumuh. Kondisi pedesaan yang ketersediaan lahan yang ada di sekitar rumah masing-masing membuat mereka para penduduk di desa tersebut membuang sampah di sekitar rumah dengan membuat lubang atau membuang sampah di belakang rumah dan sungai.

Gambaran Kelembagaan Lokal

Nama BKM	:	BKM MAJU LESTARI
Alamat BKM	:	Desa Putat, Kec. Purwodadi
Status Keberadaan BKM	:	Mandiri
Legalitas BKM	:	AHU-0015178.AH.01.07.TAHUN 2017, Tanggal 17 Oktober 2017, Notaris Hadi Sawignyo,SH,M.Kn, MKn

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS	KEKUMUHAN	
DESA	RT/RW	(HA)	NILAI	TINGKAT
PUTAT	RT001-RW003	2.5	32	Ringan
PUTAT	RT001-RW004	1.08	39	Sedang
PUTAT	RT002-RW001	1.38	25	Ringan
PUTAT	RT002-RW003	3.15	32	Ringan
PUTAT	RT002-RW004	1.91	34	Ringan
PUTAT	RT002-RW008	2.12	28	Ringan
PUTAT	RT003-RW004	3.2	40	Sedang
PUTAT	RT005-RW001	2.24	25	Ringan

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

SK 2014			SK 2023	
KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
PUTAT	Belum Masuk SK		RT001-RW003	2.50
PUTAT	Belum Masuk SK		RT001-RW004	1.08
PUTAT	Belum Masuk SK		RT002-RW001	1.38
PUTAT	Belum Masuk SK		RT002-RW003	3.15
PUTAT	Belum Masuk SK		RT002-RW004	1.91
PUTAT	Belum Masuk SK		RT002-RW008	2.12
PUTAT	Belum Masuk SK		RT003-RW004	3.20
PUTAT	Belum Masuk SK		RT005-RW001	2.24

Bangunan

- Ketidakteraturan Bangunan : 305 Unit
- Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis : 35 Unit

Jalan Lingkungan

- Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan : 200 meter
- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 1.270 meter

Air Minum

- Ketersediaan Akses aman Air Minum : 195 KK
- Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum : 135 KK

Drainase Lingkungan

- Kualitas Konstruksi Drainase : 2.860 meter

Air Limbah

- Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis : 47 KK
- Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 75 KK

Persampahan

- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 356 KK
- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar teknis : 255 KK

Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran : 244 Unit
- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 335 KK

Gambar 3. 17 Profil Desa Putat

DESA WARUKARANGANYAR



KONDISI EKSISTING



Luas Kumuh	GEOGRAFIS	
4.01 Ha	Koordinat	:
	Latitude	: -7,2744
	Longitude	: 110,4134

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (HA)	KEKUMUHAN	
DESA	RT/RW		NILAI	TINGKAT
WARUKARANGANYAR	RT005-RW003	1.63	32	Ringan
WARUKARANGANYAR	RT005-RW004	1.05	35	Ringan
WARUKARANGANYAR	RT006-RW005	1.33	46	Sedang

RIWAYAT PENANGANAN KUMUH

SK 2014			SK 2020	
KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
WARUKARANGANYAR	Belum Masuk SK		RT005-RW003	1.63
			RT005-RW004	1.05
			RT006-RW005	1.33

Gambaran Kelembagaan Lokal

Nama BKM	:	BKM SUMBER REJEKI
Alamat BKM	:	Desa Warukaranganyar, Kec. Purwodadi
Status Kelembagaan BKM	:	Mandiri
Legalitas BKM	:	AHU-0010804.AH.01.07.TAHUN 2017, Tanggal 21 Juli 2017, Notaris Hadi Suwignyo,SH.M.Kn MKn

Kategori Kumuh, Tipologi, dan Karakteristik Permukiman Kumuh

Kategori Kumuh	:	**KUMUH RINGAN**
Tipologi Kumuh	:	Dataran Rendah
Karakteristik	:	

Letak Desa Warukaranganyar berada pada lokasi permukiman pedesaan, banyak lahan persawahan dan ladang

PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan jalan yang rusak yang disebabkan usia bangunan yang sudah lama, sehingga sudah banyak jalan yang sudah berlubang. Selain usia bangungan yang sudah lama, Desa Warukaranganyar merupakan tanah labil, mudah bergerak dan bergeser, sehingga kontur tanah tidak stabil. Seringkali air menggenang di saat musim hujan, sehingga memperpendek usia bangunan. Hal yang perlu diperhatikan adalah drainase. Usia bangunan dan posisi sungai panjang sebagai pembuangan akhir yang sering meluap untuk menampung limpasan air hujan sehingga air menggenang membuat saluran lebih cepat rusak serta saluran kurang berfungsi dengan baik. Masyarakat pun masih membuang limbah rumah tangga dari mencuci maupun mandi ke saluran drainase, sehingga membuat lingkungan semakin kumuh. Kondisi pedesaan yang ketersediaan lahan yang ada di sekitar rumah masing-masing membuat mereka para penduduk di desa tersebut membuang sampah di sekitar rumah dengan membuat lubang atau membuang sampah di belakang rumah dan sungai.

Bangunan

- Ketidakteraturan Bangunan : 54 Unit
- Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis : 66 Unit

Jalan Lingkungan

- Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan : 650 meter
- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 435 meter

Air Minum

- Ketersediaan Akses aman Air Minum : 1 KK
- Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum : 130 KK

Drainase Lingkungan

- Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air : 1 Ha
- Ketidaktersediaan Drainase : 544 meter
- Kualitas Konstruksi Drainase : 1.042 meter

Air Limbah

- Sistem pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis : 5 KK
- Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 130 KK

Persampahan

- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 130 KK
- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar tekris : 130 KK

Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran : 88 Unit
- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 126 Unit

Gambar 3. 18 Profil Desa Warukaranganyar

Dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Kabupaten Grobogan memiliki dasar penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menjadi acuan. Penyusunan SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2020 yang menjadi acuan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan bagian tak terpisahkan dari SK Kumuh Tahun 2014. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan perjalanan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan. Perjalanan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan disajikan dalam tabel riwayat penanganan kumuh seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel III. 2 Riwayat Penanganan Kumuh Kabupaten Grobogan

NO	SK 2014			SK 2020	
	KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
1	CANDISARI	*Belum Masuk SK*		RT002-RW001	1.22
2				RT002-RW002	1.70
3				RT003-RW006	2.25
4				RT004-RW003	1.42
					6.59
5	CINGKRONG	*Belum Masuk SK*		RT002-RW007	2.86
					2.86
6	DANYANG	RT001-RW001	12.73	RT001-RW001	0.57
7		RT002-RW001		RT002-RW001	1.87
8		RT003-RW001		RT003-RW001	1.64
9		RT004-RW001		-	-
10		RT005-RW001		-	-
11		RT006-RW001		RT006-RW001	3.12
12		RT007-RW001		RT007-RW001	2.18
					9.38
13	GENUKSURAN	*Belum Masuk SK*		RT004-RW004	0.93
14				RT004-RW005	1.06
15				RT004-RW006	1.14
16				RT005-RW001	2.19
17				RT006-RW001	1.04
					6.36
18	KALONGAN	RT003-RW001	3.45	-	-
19		RT004-RW001		-	-
20		*Belum Masuk SK*		RT001-RW008	1.96
21		*Belum Masuk SK*		RT002-RW006	2.98
22		*Belum Masuk SK*		RT002-RW008	2.00
23		*Belum Masuk SK*		RT003-RW004	0.98
24		*Belum Masuk SK*		RT003-RW006	1.68
25		*Belum Masuk SK*		RT004-RW004	0.35
26		*Belum Masuk SK*		RT004-RW006	2.30

NO	SK 2014			SK 2020	
	KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
27		*Belum Masuk SK*		RT005-RW006	3.02
28		*Belum Masuk SK*		RT007-RW006	1.97
29		*Belum Masuk SK*		RT007-RW008	1.71
					18.95
30	KANDANGAN	*Belum Masuk SK*		RT002-RW007	2.08
					2.08
31	KARANGANYAR	Benteng Mati	18.72	-	-
32	KARANGANYAR	*Belum Masuk SK*		RT002-RW007	1.59
33	KARANGANYAR	*Belum Masuk SK*		RT006-RW007	2.13
					3.72
34	KEDUNGREJO	*Belum Masuk SK*		RT005-RW006	2.95
					2.95
35	KURIPAN	*Belum Masuk SK*		RT001-RW005	2.02
36	KURIPAN	*Belum Masuk SK*		RT001-RW007	1.08
37	KURIPAN	RT001-RW009	0.67	RT001-RW009	1.35
38	KURIPAN	*Belum Masuk SK*		RT002-RW006	0.55
39	KURIPAN	RT002-RW007	1.12	RT002-RW007	2.39
40	KURIPAN	RW 3 & 4	3.96	RT001-RW003	1.76
41				RT003-RW003	0.99
42				RT004-RW003	0.60
43				RT005-RW003	1.00
44				RT001-RW004	0.86
45				RT002-RW004	0.58
46				RT003-RW004	1.01
47	KURIPAN	*Belum Masuk SK*		RT003-RW005	0.90
48	KURIPAN	*Belum Masuk SK*		RT003-RW007	2.44
49	KURIPAN	*Belum Masuk SK*		RT003-RW018	1.83
50	KURIPAN	*Belum Masuk SK*		RT005-RW013	3.32
					22.68
51	NAMBUHAN	*Belum Masuk SK*		RT003-RW004	3.77
52	NAMBUHAN	*Belum Masuk SK*		RT003-RW005	2.42
53	NAMBUHAN	*Belum Masuk SK*		RT004-RW004	6.00
54	NAMBUHAN	*Belum Masuk SK*		RT005-RW002	3.28
					15.47
55	NGEMBAK	*Belum Masuk SK*		RT003-RW004	1.31
					1.31
56	NGLOBAR	*Belum Masuk SK*		RT006-RW002	1.74
					1.74
57	NGRAJI	*Belum Masuk SK*		RT005-RW004	1.20
58	NGRAJI	*Belum Masuk SK*		RT007-RW004	1.82

NO	SK 2014			SK 2020	
	KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
59	NGRAJI	*Belum Masuk SK*		RT009-RW004	1.69
60	NGRAJI	*Belum Masuk SK*		RT013-RW004	0.87
					5.58
61	PULOREJO	*Belum Masuk SK*		RT004-RW004	1.43
62	PULOREJO	*Belum Masuk SK*		RT005-RW004	1.39
63	PULOREJO	*Belum Masuk SK*		RT006-RW004	2.84
64	PULOREJO	*Belum Masuk SK*		RT007-RW004	0.63
65	PULOREJO	*Belum Masuk SK*		RT009-RW004	1.96
					8.25
66	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT001-RW017	2.43
67	PURWODADI	RT002-RW017	5.81	RT002-RW017	1.28
68	PURWODADI	RT003-RW017		-	-
69	PURWODADI	RT005-RW017		-	-
70	PURWODADI	RT006-RW017		-	-
71	PURWODADI	RT007-RW017		RT007-RW017	2.10
72	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT001-RW001	0.46
73	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT002-RW006	1.76
74	PURWODADI	RT004-RW016	1.27	RT004-RW016	1.90
75	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT005-RW016	0.98
76	PURWODADI	RT006-RW016	3.04	-	-
77	PURWODADI	RT007-RW016		-	-
78	PURWODADI	RT008-RW016		-	-
79	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT011-RW016	0.59
80	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT004-RW022	0.72
81	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT005-RW001	0.69
82	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT005-RW003	1.73
83	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT005-RW006	1.79
84	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT005-RW022	1.12
85	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT006-RW001	0.41
86	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT006-RW003	0.69
87	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT006-RW022	1.36
88	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT007-RW003	0.56
89	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT008-RW003	0.43
90	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT008-RW007	1.49
91	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT009-RW003	0.54
92	PURWODADI	*Belum Masuk SK*		RT009-RW007	1.17
					24.20
93	PUTAT	*Belum Masuk SK*		RT001-RW003	2.50
94	PUTAT	*Belum Masuk SK*		RT001-RW004	1.08
95	PUTAT	*Belum Masuk SK*		RT002-RW001	1.38

NO	SK 2014			SK 2020	
	KELURAHAN/DESA	RT/RW	LUAS (HA)	RT/RW	LUAS (HA)
96	PUTAT	*Belum Masuk SK*		RT002-RW003	3.15
97	PUTAT	*Belum Masuk SK*		RT002-RW004	1.91
98	PUTAT	*Belum Masuk SK*		RT002-RW008	2.12
99	PUTAT	*Belum Masuk SK*		RT003-RW004	3.20
100	PUTAT	*Belum Masuk SK*		RT005-RW001	2.24
					17.58
101	WARUKARANGANYAR	*Belum Masuk SK*		RT005-RW003	1.63
102				RT005-RW004	1.05
103				RT006-RW005	1.33
104	Godong	RT. 8, 9 10/ RW.2	4.22		4.01
105	Bugel	RT. 2/ RW.1	1.27	-	-
106	Ketitang	RT. 2/ RW.1	7.00	-	-
107	Gubug	RT. 2/ RW.10	3.22	-	-
108	Kuwaron	RT. 1/ RW. 7; RT. 2/ RW. 1	8.36	-	-
109	Pranten	RT. 3/ RW. 1	2.23	-	-
110	Kemiri	RT. 5/ RW. 2	3.14	-	-
111	Klampok	RT. 2/ RW. 3	3.09	-	-
112	Getasrejo	RT. 3, 7/ RW. 1	1.53	-	-
113	Getasrejo	RT. 10/ RW. 2	0.51	-	-
114	Menduran	RT. 2/ RW. 4	2.64	-	-
115	Menduran	RW. 1	8.48	-	-
116	Kunden	RT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8/ RW. 16	8.87	-	-
117	Wirosari	RT. 3/ RW. 4	1.99	-	-

Sumber: Olahan Data SK 2014 dan SK 2020

3.2.2 Profil Kawasan

Profil Kawasan merupakan profil untuk kawasan yang merupakan penggabungan beberapa desa/kelurahan. Terdapat 2 Kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan, yaitu:

1. Kawasan Purwodadi-Kuripan

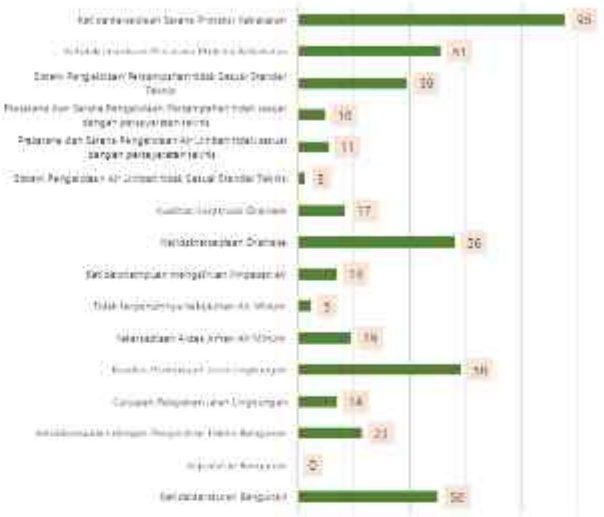
   Kawaan Purwodadi- Kuripan terletak di Kelurahan Purwodadi dan Kelurahan Kuripan, dengan luasan kumuh total sebesar 16,27 Ha, dengan tikngkat kekumuhan ringan. Lokasi Permukiman kumuh di kawasan ini cenderung bertumbuh kearah utara dengan lokai atara kawasan yang berdekatan serta terletak di pingiran aliran Sungai Lusi. Berikut ini merupakan detail persebaran dan permaalahan kumuh yang ada di kawaan Purwodadi- Kuripan.

LUAS KUMUH **16.27 Ha**

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

LINGKUP ADMINISTRATIF		LUAS (HA)	KEKUMUHAN	
DESA	RT/RW		NILAI	TINGKAT
KURIPAN	RT001-RW005	2.02	16	Ringan
	RT001-RW007	1.08	17	Ringan
	RT002-RW006	0.55	24	Ringan
	RT003-RW006	0.90	20	Ringan
PURWODADI	RT001-RW001	0.46	20	Ringan
	RT002 RW006	1.76	23	Ringan
	RT005-RW001	0.69	30	Ringan
	RT005-RW003	1.73	19	Ringan
	RT006-RW001	0.41	21	Ringan
	RT007-RW003	0.56	18	Ringan
	RT008-RW003	0.43	16	Ringan
	RT009-RW003	0.54	19	Ringan
	RT009 RW007	1.17	18	Ringan
	RT005 RW006	1.79	25	Ringan
	RT006-RW003	0.69	18	Ringan
	RT008-RW007	1.49	20	Ringan

GRAFIK PERMASALAHAN KUMUH



PERMASALAHAN 7 ASPEK KUMUH

Bangunan

- Ketidakteraturan Bangunan : 143 Unit
- Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis : 157 Unit

Jalan Lingkungan

- Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan : 1.310 meter
- Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan : 5.292 meter

Air Minum

- Ketersediaan Akses aman Air Minum : 138 KK
- Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum : 39 KK

Drainase Lingkungan

- Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air : 2 Ha
- Ketidaktersediaan Drainase : 900 meter
- Kualitas Konstruksi Drainase : 1.350 meter

Air Limbah

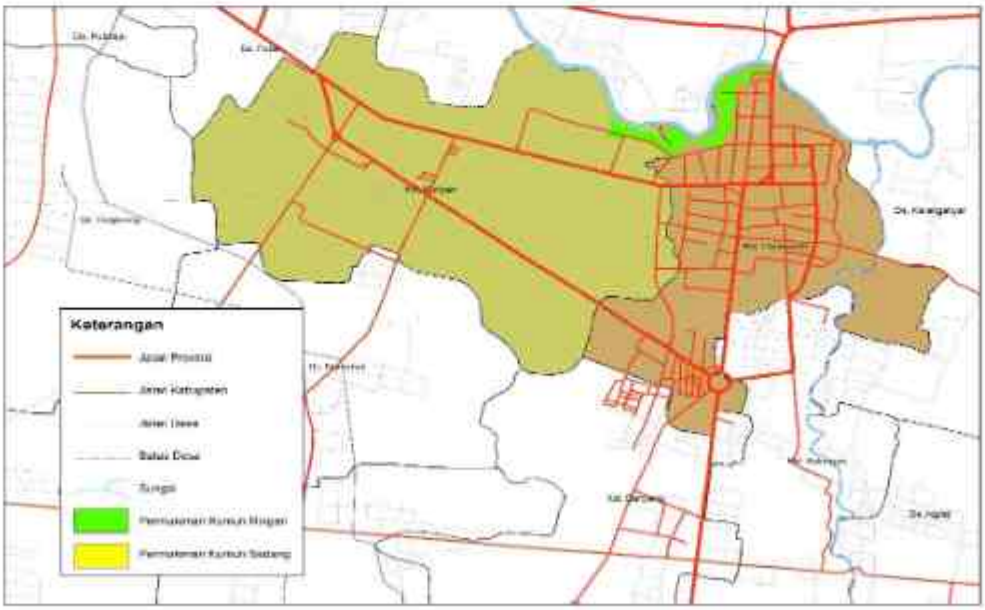
- Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis : 23 KK
- Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 83 KK

Persampahan

- Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis : 71 KK
- Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar teknis : 284 KK

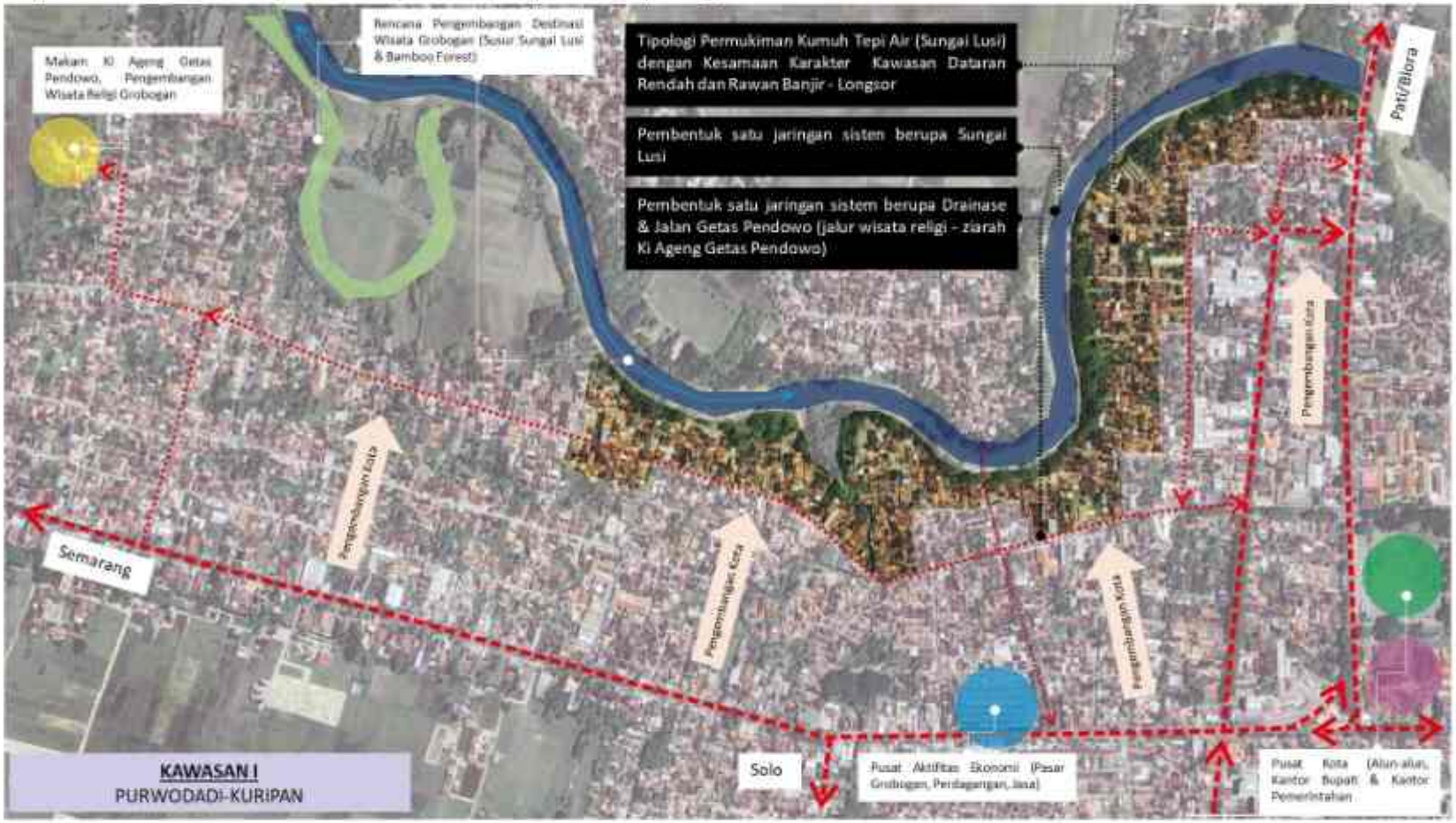
Proteksi Kebakaran

- Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran : 352 Unit
- Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran : 651 Unit



Gambar 3. 19 Profil Kawasan 1 (Purwodadi – Kuripan)

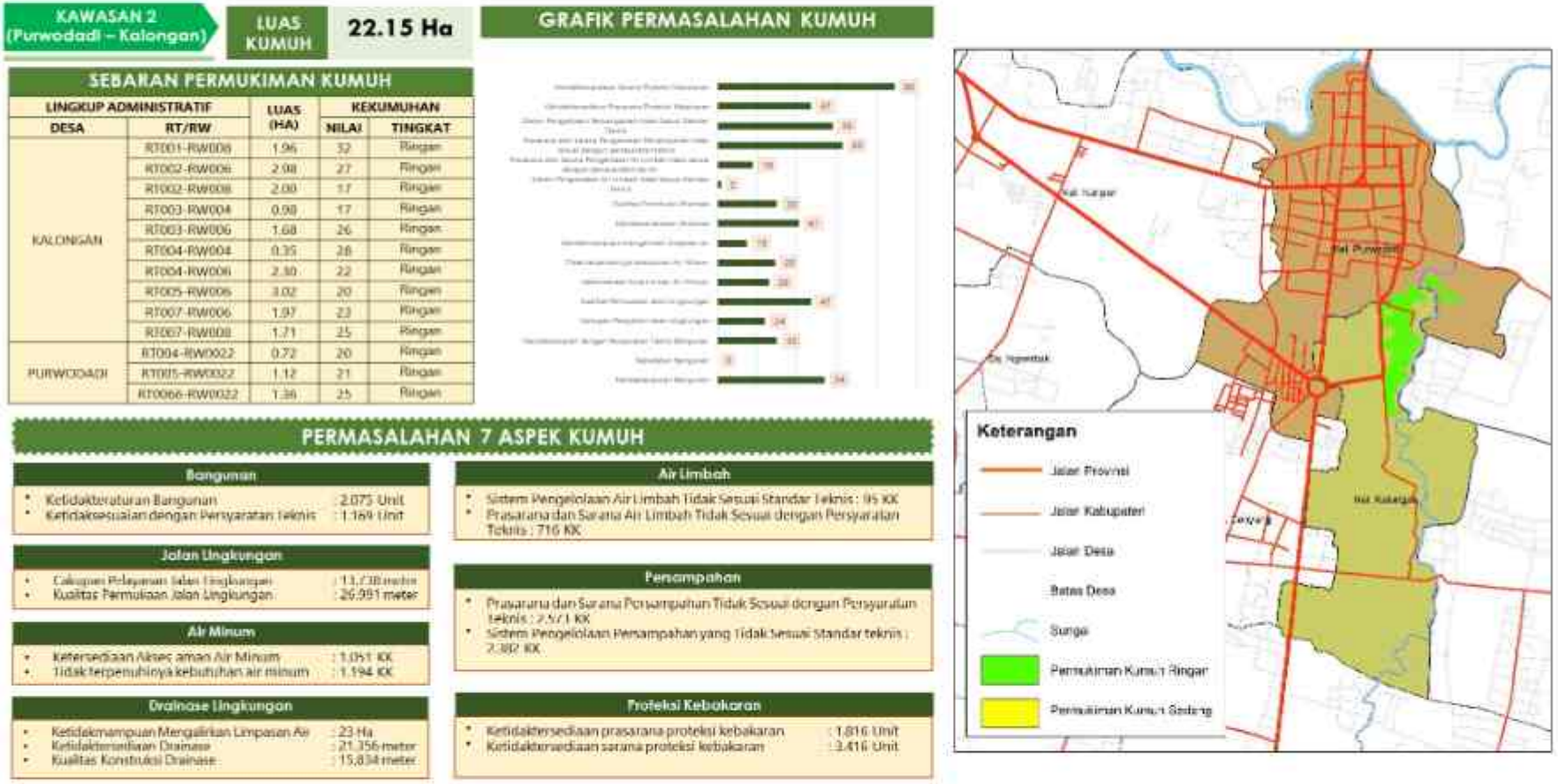
Pembentuk kawaan prioritas 1 (Purwodadi- Kuripan) mengacu pada kriteria pembentukan permukiman kumuh yang dilihat dari kesamaan tipologi kekumuhan, jarak antar lokasi kumuh, pembentukan jaringn infrasstruktur, keterpaduan kawasan penangganan, dan arah perkembangan kota. Adapun analisa pembentukan kawasan pada lokasi prioritas 1, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 20 Profil Pembentuk Kawasan 1 (Purwodadi – Kuripan)

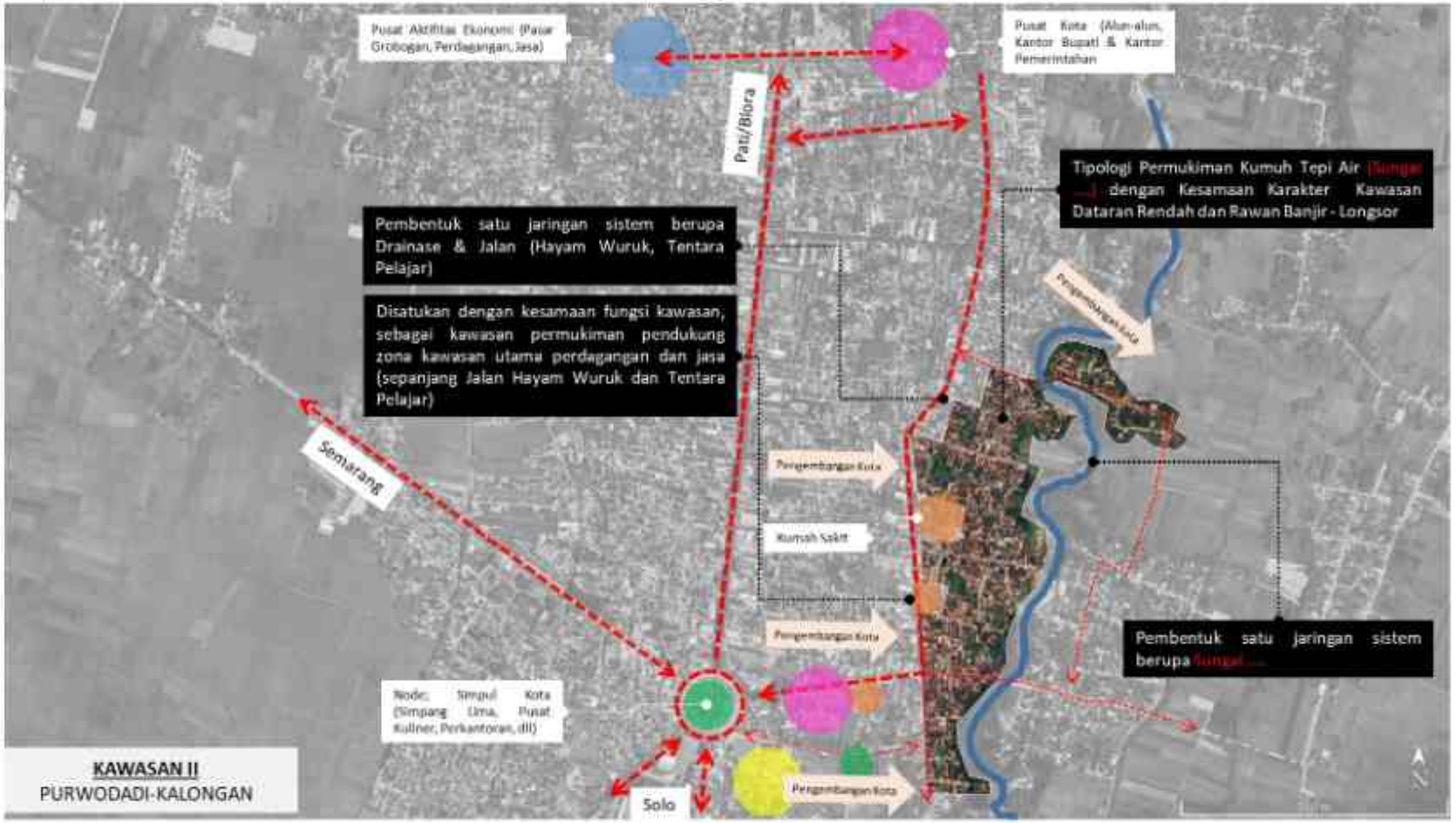
2. Kawasan Purowodadi-Kalongan

Kawaan Purwodadi- Kalongan terletak di Kelurahan Purwodadi dan Kelurahan Kalongan, dengan luasan kumuh total sebesar 22,15 Ha, dengan tikngkat kekumuhan ringan. Lokasi Permukiman kumuh di kawasan ini cenderung bertumbuh kearah timur dengan lokai atara kawasan yang berdekatan serta terletak di pingiran aliran Sungai Lusi. Berikut ini merupakan detail persebaran dan permaalahan kumuh yang ada di kawaan Purwodadi - Kalongan.



Gambar 3. 21 Profil Kawasan 2 (Purwodadi – Kalongan)

Pembentuk kawaan prioritas 2 (Purwodadi- Kalongan) mengacu pada kriteria pembentukan permukiman kumuh yang dilihat dari kesamaan tipologi kekumuhan, jarak antar lokasi kumuh, pembentukan jaringn infrasstruktur, keterpaduan kawasan penangganan, dan arah perkembangan kota. Adapun analisa pembentukan kawasan pada lokasi prioritas 2, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 22 Profil Pembentuk Kawasan 2 (Purwodadi – Kalongan)

3.3. Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Sesuai Cakupan Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan Dan Skala Lingkungan

Dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dibutuhkan keterpaduan berbagai program untuk mengurangi kekumuhan. Keterlibatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, serta *stakeholder* lainnya sangat diperlukan dalam penangana perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pola kontribusi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 3 Pola Kontribusi Penanganan Kumuh Kabupaten Grobogan

No	Kegiatan	Lokasi		Sumber Pendanaan	Tahun	OPD
		Desa/Kelurahan	RT/RW			
1	Bangunan Gedung	KALONGAN	RT002-RW008; RT005-RW006	APBN, CSR	2021	PUPR
		NAMBUHAN	RT003-RW004; RT003-RW005; RT004-RW004	APBN, APBD Kabupaten, CSR	2021	PUPR
		NGLOBAR	RT006-RW002	APBN, CSR	2021	PUPR
		PULOREJO	RT004-RW004; RT007-RW004; RT009-RW004	APBN, CSR	2021	PUPR
2	Jalan Lingkungan	KALONGAN	RT002-RW008; RT005-RW006	APBN, CSR	2021	PUPR DISPERAKIM
		KURIPAN	RT001-RW003; RT002-RW007; RT003-RW003; RT003-RW018; RT004-RW003	APBN, CSR	2021	PUPR DISPERAKIM
		NAMBUHAN	RT003-RW004; RT003-RW005; RT004-RW004	APBN, APBD Kabupaten, CSR	2021	PUPR DISPERAKIM
		PURWODADI	RT005-RW016; RT005-RW022; RT006-RW022	APBN, APBD Kabupaten, CSR	2021	PUPR DISPERAKIM
		DANYANG	RT007-RW001	APBD Kabupaten, CSR	2021	PUPR DISPERAKIM
		GENUKSURAN	RT004-RW004; RT004-RW005; RT005-RW001	APBN, CSR	2021	PUPR DISPERAKIM
		NGLOBAR	RT006-RW002	APBN, CSR	2021	PUPR DISPERAKIM
		PULOREJO	RT004-RW004; RT007-RW004; RT009-RW004	APBN, CSR	2021	PUPR DISPERAKIM
3	Air Minum	KALONGAN	RT002-RW008; RT005-RW006	APBN, CSR	2021	DISPERAKIM
		KURIPAN	RT001-RW003; RT002-RW007; RT003-RW003; RT003-RW018; RT004-RW003	APBN, CSR	2021	DISPERAKIM
		PURWODADI	RT005-RW016; RT005-RW022; RT006-RW022	APBN, APBD Kabupaten, CSR	2021	DISPERAKIM
		DANYANG	RT007-RW001	APBD Kabupaten, CSR	2021	DISPERAKIM
		GENUKSURAN	RT004-RW004; RT004-RW005; RT005-RW001	APBN, CSR	2021	DISPERAKIM
		NGLOBAR	RT006-RW002	APBN, CSR	2021	DISPERAKIM
4	Drainase	KALONGAN	RT002-RW008; RT005-RW006	APBN, CSR	2021	PUPR DISPERAKIM

No	Kegiatan	Lokasi		Sumber Pendanaan	Tahun	OPD
		Desa/Kelurahan	RT/RW			
		KURIPAN	RT001-RW003; RT002-RW007; RT003-RW003; RT003-RW018; RT004-RW003	APBN, CSR	2021	PUPR DISPERAKIM
		NAMBUHAN	RT003-RW004; RT003-RW005; RT004-RW004	APBN, APBD Kabupaten, CSR	2021	PUPR DISPERAKIM
		PURWODADI	RT005-RW016; RT005-RW022; RT006-RW022	APBN, APBD Kabupaten, CSR	2021	PUPR DISPERAKIM
		DANYANG	RT007-RW001	APBD Kabupaten, CSR	2021	PUPR DISPERAKIM
		GENUKSURAN	RT004-RW004; RT004-RW005; RT005-RW001	APBN, CSR	2021	PUPR DISPERAKIM
		NGLOBAR	RT006-RW002	APBN, CSR	2021	PUPR DISPERAKIM
		PULOREJO	RT004-RW004; RT007-RW004; RT009-RW004	APBN, CSR	2021	PUPR DISPERAKIM
5	Air Limbah	KURIPAN	RT001-RW003; RT002-RW007; RT003-RW003; RT003-RW018; RT004-RW003	APBN, CSR	2021	DISPERAKIM
		NAMBUHAN	RT003-RW004; RT003-RW005; RT004-RW004	APBN, APBD Kabupaten, CSR	2021	DISPERAKIM
		PURWODADI	RT005-RW016; RT005-RW022; RT006-RW022	APBN, APBD Kabupaten, CSR	2021	DISPERAKIM
		DANYANG	RT007-RW001	APBD Kabupaten, CSR	2021	DISPERAKIM
6	Persampahan	KURIPAN	RT001-RW003; RT002-RW007; RT003-RW003; RT003-RW018; RT004-RW003	APBN, CSR	2021	DLH
		NAMBUHAN	RT003-RW004; RT003-RW005; RT004-RW004	APBN, APBD Kabupaten, CSR	2021	DLH
		PURWODADI	RT005-RW016; RT005-RW022; RT006-RW022	APBN, APBD Kabupaten, CSR	2021	DLH
		PULOREJO	RT004-RW004; RT007-RW004; RT009-RW004	APBN, CSR	2021	DLH
7	Proteksi Kebakaran	KURIPAN	RT001-RW003; RT002-RW007; RT003-RW003; RT003-RW018; RT004-RW003	APBN, CSR	2021	DISPERAKIM
		NAMBUHAN	RT003-RW004; RT003-RW005; RT004-RW004	APBN, APBD Kabupaten, CSR	2021	DISPERAKIM
		GENUKSURAN	RT004-RW004; RT004-RW005; RT005-RW001	APBN, CSR	2021	DISPERAKIM
		NGLOBAR	RT006-RW002	APBN, CSR	2021	DISPERAKIM
		PULOREJO	RT004-RW004; RT007-RW004; RT009-RW004	APBN, CSR	2021	DISPERAKIM

Sumber: Analisis Penyusun, 2022





BAB 4
PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

4.1 Isu dan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Isu dan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan diantaranya adalah:

1. Munculnya kantong kekumuhan di perkotaan maupun perdesaan akibat ketidakteraturan bangunan

   Munculnya kantong kekumuhan di beberapa kawasan dengan ketidakteraturan bangunan tersebar di kawasan padat perkotaan maupun kawasan perdesaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan di perkotaan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keteraturan bangunan perumahan sehingga seringkali memanfatakan lahan sempit dan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai tempat bermukim. Rata-rata kondisi bangunan di seluruh perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Grobogan dari sisi ketidakteraturan bangunan adalah 46.24%.

2. Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni

   Ketidaksesuaian bangunan dengan persyaratan teknis bangunan ditunjukkan dengan belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni. Di tahun 2020, ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Grobogan sebesar 62,54% dan cakupan rumah layak huni yang terjangkau baru sebesar 16,66%. Sementara rata-rata kondisi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan, terdapat 39.53% ketidaksesuaian bangunan dengan persayaratan teknis.

3. Belum optimalnya penyelenggaraan jalan di Kabupaten Grobogan

   Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik baru mencapai 78,91% tahun 2020. Selain itu, terdapat kerusakan jalan seperti jalan berlubang, permukaan jalan bergelombang, jaringan jalan

yang tidak dilengkapi dengan drainase sehingga menyebabkan jalan tergenang ketika hujan. Kondisi jalan lingkungan di perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Grobogan adalah 27.06% cakupan terlayani jalan lingkungan dan 46.41% kualitas permukaan jalan lingkungan rusak sebesar 46.41%.

4. Cakupan pelayanan air minum belum optimal

   Cakupan pelayanan air minum yang belum optimal di tahun 2020 yakni sebesar 84,04%. Hal ini berarti masih terdapat 16,96% masyarakat Kabupaten Grobogan yang belum memperoleh layanan air minum baik melalui akses PDAM maupun pelayanan air minum lainnya. Di perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Grobogan, keidaktersediaan akses aman air minum sebesar 22.41 % dan jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum sebesar 48.53%.

5. Masih rendahnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

   Cakupan drainase lingkungan dalam kondisi baik di Kabupaten Grobogan baru mencapai 65,4% di tahun 2020 dan cakupan pelayanan sistem drainase baru mencapai 50% tahun 2020. Selain itu terdapat pula drainase yang tidak mampu mengalirkan limpasan air dan drainase yang tidak sesuai dengan standar teknis. Khususnya di perumahan kumuh dan permukiman kumuh, masih terdapat 16.53% lokasi yang tidak mampu mengalirkan limpasan air, 46.24% lokasi tidak terakses drainase, 28.12% drainase dengan kondisi rusak.

6. Belum seluruh rumah tangga terlayani sanitasi dan memiliki sarana prasarana ail limbah sesuai standar teknis

   Cakupan pelayanan sanitasi tahun 2020 sebesar 76,54%, hal ini berarti masih ada 23,46% masyarakat Kabupaten Grobogan yang memperoleh layanan sanitasi. Belum optimalnya cakupan pelayanan sanitasi disebabkan karena prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persayaratan teknis. Sementara di kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, terdapat 1.35% KK belum terakses sistem air limbah dan 17.42% KK dengan sarana prasarana air limbah tidak sesuai standar teknis.

7. Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan

   Persentase pengangkutan sampah tahun 2020 sebesar 40%. Kondisi ini disebabkan karena prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis, misalnya belum terpenuhinya tong/bak sampah rumah tangga dan masih adanya perilaku membuang sampah sembarangan. Selain itu, sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis turut mendorong belum optimalnya pengelolaan persampahan, misalnya belum optimalnya pengangkutan sampah ke TPS/TPA. Di kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, masih terdapat 74.88% KK dengan sarana prasarana tidak sesuai persayaratan teknis dan 78.47% KK dengan sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis.

8. Belum terpenuhinya cakupan pelayanan bencana kebakaran

   Sampai tahun 2020 cakupan pelayanan bencana kebakaran baru mencapai 79,11%. Ketidaktersediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran menjadi penyebab utama belum terpenuhinya cakupan pelayanan bencana kebakaran. Di kawasan perumahan kumuh dan

permukiman kumuh, masih terdapat 45.53% bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran dan 95.06% bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran.

Permasalahan kekumuhan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Kawasan 1 (Purwodadi – Kuripan)

Di Kawasan 1 (Purwodadi – Kuripan), ditemukan beberapa permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kawasan 1 (Purwodadi – Kuripan)

Aspek	Kriteria	Numerik	Satuan
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	343	Unit
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	157	Unit
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1310	Meter
	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	5292	Meter
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	138	KK
	Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	39	KK
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	2	Ha
	Ketidaktersediaan Drainase	3212	Meter
	Kualitas Konstruksi Drainase	977	Meter
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai Standar Teknis	23	KK
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan persayaratan teknis	83	KK
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan tidak sesuai dengan persayaratan teknis	71	KK
	Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Standar Teknis	284	KK
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	352	Unit
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	651	Unit

Sumber: Olahan data Baseline Kumuh Kab. Grobogan

2. Kawasan 2 (Purwodadi – Kalongan)

Di Kawasan 2 (Purwodadi – Kalongan), ditemukan beberapa permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai berikut:

Tabel IV. 2 Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kawasan 2 (Purwodadi – Kalongan)

Aspek	Kriteria	Numerik	Satuan
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	2075	Unit
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1169	Unit
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	13738	Meter
	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	26991	Meter

Aspek	Kriteria	Numerik	Satuan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1051	KK
	Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	1194	KK
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	23	Ha
	Ketidaktersediaan Drainase	21356	Meter
	Kualitas Konstruksi Drainase	15834	Meter
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai Standar Teknis	95	KK
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan persayaratan teknis	716	KK
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan tidak sesuai dengan persayaratan teknis	2573	KK
	Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Standar Teknis	2382	KK
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	1816	Unit
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	3416	Unit

Sumber: Olahan data Baseline Kumuh Kab. Grobogan

4.2 Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

Penentuan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/ Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel IV. 3 Kriteria dan Indikator Penentuan Prioritas

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
A	Identifikasi Kondisi Kekumuhan (Fisik)				
1	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	• Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas	76%-100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5
				51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3
				25%-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.		
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	• KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/ atau RTBL • KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/ atau RTBL; dan/ atau • Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu : - untuk kota metropolitan dan kota besar > 250 unit/Ha. - untuk kota sedang dan kota kecil ≥ 200 unit/Ha	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5
				51%-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3
				25%-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan : • Pengendalian dampak lingkungan • Pembangunan bangunan gedung di atas dan/ atau dibawah tanah, air dan/ atau prasarana/ sarana umum • Keselamatan bangunan gedung • Kesehatan bangunan gedung • Kenyamanan bangunan gedung • Kemudahan bangunan gedung	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5
				51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3
				25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
2	Kondisi Jalan Lingkungan	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5
				51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3
				25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1
		b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan dan permukiman	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5
				51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3
				25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5
				51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3
				25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1
		b. Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/ orang/ hari	76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5
				51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3
				25% - 50% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
4	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5
				51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3
				25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1
		b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	76% - 100% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5
				51% - 75% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3
				25% - 50% area terjadi genangan>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1
		c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5
				51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3
				25% - 50% area memiliki kualitas	1

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
				konstruksi drainase lingkungan buruk	
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kaskus/ kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/ domestik, komunal maupun terpusat	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5
				51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3
				25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1
		b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. Kakus/kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik. 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5
				51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3
				25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	3. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak memenuhi dengan persayaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle)pada skala lingkungan	76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5
				51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3
				25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			3. gerobak sampah dan/ atau truk sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan		
		4. Sistem Pengelolaan Persampahan tidak memenuhi Standar Teknis	Pengelolaan Persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5
				51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3
				25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi, dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5
				51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3
				25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1
		b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat pemadam Api Ringan (APAR); 2. Kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. Mobil tangga sesuai kebutuhan	76% - 100% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5
				51% - 75% Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3
				25% - 50% Populasi tidak terpenuhi	1

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
				kebutuhan air minum minimalnya	
B	Identifikasi Pertimbangan Lain				
1	Pertimbangan Lain	a. Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/ kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/ kota	Lokasi terletak pada fungsi strategis Kabupaten/ Kota	5
				lokasi tidak terletak pada fungsi strategis Kabupaten/ Kota	1
		b. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 - 200 jiwa/ ha 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 - 400 jiwa/ ha 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ ha	Untuk Metropolitan dan Kota Besar : - kepadatan penduduk pada lokasi sebesar > 400 jiwa/ ha. Untuk Kota Sedang & Kota Kecil: - Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar > 200 jiwa/ha.	5
				Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar 151 - 200 jiwa/ ha	3
				Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar <150 jiwa/ ha.	1
		c. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu	lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5
				Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
			yang dimiliki masyarakat setempat		
C	Identifikasi Legalitas Lahan				
1	Legalitas Lahan	1. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain.	(+)
				Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)
		2. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/ Kota (SKRK)	keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/ permukiman sesuai RTR	(+)
				sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/ permukiman sesuai RTR	(-)

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan formula penilaian tersebut, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel IV. 4 Formulasi Penentuan Skala Prioritas Penanganan

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
60 – 80	Kumuh Berat	x	x	x	x	x	x												
38 – 59	Kumuh Sedang							x	x	x	x	x	x						
16 – 37	Kumuh Ringan													x	x	x	x	x	x
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Pertimbangan Lain																			
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	x	x					x	x					x	x				
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang			x	x					x	x					x	x		
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah					x	x					x	x					x	x

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan berbagai klasifikasi di atas, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

Dengan menggunakan perhitungan formulasi tersebut, didapatkan perumusan prioritas Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

Tabel IV. 5 Perhitungan Prioritas Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Grobogan

NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS	
			RT/RW	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN/ DISTRIK	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT			
1	CANDISARI	1.22	RT002-RW001	CANDISARI	PURWODADI	25	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3	PRIORITAS 6
2	CANDISARI	1.7	RT002-RW002	CANDISARI	PURWODADI	26	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
3	CANDISARI	2.25	RT003-RW006	CANDISARI	PURWODADI	25	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
4	CANDISARI	1.42	RT004-RW003	CANDISARI	PURWODADI	29	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3	PRIORITAS 6
5	CINGKRONG	2.86	RT002-RW007	CINGKRONG	PURWODADI	31	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3	PRIORITAS 6
6	DANYANG	0.57	RT001-RW001	DANYANG	PURWODADI	22	KUMUH RINGAN	15	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
7	DANYANG	1.87	RT002-RW001	DANYANG	PURWODADI	27	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3	PRIORITAS 6
8	DANYANG	1.64	RT003-RW001	DANYANG	PURWODADI	16	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3	PRIORITAS 6
9	DANYANG	3.12	RT006-RW001	DANYANG	PURWODADI	21	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
10	DANYANG	2.18	RT007-RW001	DANYANG	PURWODADI	18	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
11	GENUKSURAN	0.93	RT004-RW004	GENUKSURAN	PURWODADI	25	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
12	GENUKSURAN	1.06	RT004-RW005	GENUKSURAN	PURWODADI	24	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
13	GENUKSURAN	1.14	RT004-RW006	GENUKSURAN	PURWODADI	32	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
14	GENUKSURAN	2.19	RT005-RW001	GENUKSURAN	PURWODADI	18	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
15	GENUKSURAN	1.04	RT006-RW001	GENUKSURAN	PURWODADI	21	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
16	KALONGAN	1.96	RT001-RW008	KALONGAN	PURWODADI	32	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3	PRIORITAS 6
17	KALONGAN	2.98	RT002-RW006	KALONGAN	PURWODADI	27	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
18	KALONGAN	2	RT002-RW008	KALONGAN	PURWODADI	17	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
19	KALONGAN	0.98	RT003-RW004	KALONGAN	PURWODADI	17	KUMUH RINGAN	15	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
20	KALONGAN	1.68	RT003-RW006	KALONGAN	PURWODADI	26	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
21	KALONGAN	0.35	RT004-RW004	KALONGAN	PURWODADI	28	KUMUH RINGAN	15	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
22	KALONGAN	2.3	RT004-RW006	KALONGAN	PURWODADI	22	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
23	KALONGAN	3.02	RT005-RW006	KALONGAN	PURWODADI	20	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
24	KALONGAN	1.97	RT007-RW006	KALONGAN	PURWODADI	23	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
25	KALONGAN	1.71	RT007-RW008	KALONGAN	PURWODADI	25	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
26	KANDANGAN	2.08	RT002-RW007	KANDANGAN	PURWODADI	35	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
27	KANDANGAN	1.59	RT002-RW007	KARANGANYAR	PURWODADI	31	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3

NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS	
			RT/RW	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN/ DISTRIK	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT			
28	KANDANGAN	2.13	RT006-RW007	KARANGANYAR	PURWODADI	29	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
29	KEDUNGREJO	2.95	RT005-RW006	KEDUNGREJO	PURWODADI	24	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3	PRIORITAS 6
30	KURIPAN	1.76	RT001-RW003	KURIPAN	PURWODADI	23	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
31	KURIPAN	0.86	RT001-RW004	KURIPAN	PURWODADI	29	KUMUH RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	C3	PRIORITAS 6
32	KURIPAN	2.02	RT001-RW005	KURIPAN	PURWODADI	16	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
33	KURIPAN	1.08	RT001-RW007	KURIPAN	PURWODADI	17	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
34	KURIPAN	1,35	RT001-RW009	KURIPAN	PURWODADI	16	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
35	KURIPAN	0.58	RT002-RW004	KURIPAN	PURWODADI	23	KUMUH RINGAN	5	RENDAH	LEGAL	C5	PRIORITAS 9
36	KURIPAN	0.55	RT002-RW006	KURIPAN	PURWODADI	24	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
37	KURIPAN	2.39	RT002-RW007	KURIPAN	PURWODADI	16	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
38	KURIPAN	0.99	RT003-RW003	KURIPAN	PURWODADI	33	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
39	KURIPAN	1.01	RT003-RW004	KURIPAN	PURWODADI	23	KUMUH RINGAN	3	RENDAH	LEGAL	C5	PRIORITAS 9
40	KURIPAN	0.9	RT003-RW005	KURIPAN	PURWODADI	20	KUMUH RINGAN	13	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
41	KURIPAN	2.44	RT003-RW007	KURIPAN	PURWODADI	16	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
42	KURIPAN	1,83	RT003-RW018	KURIPAN	PURWODADI	25	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
43	KURIPAN	0.6	RT004-RW003	KURIPAN	PURWODADI	18	KUMUH RINGAN	15	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
44	KURIPAN	1	RT005-RW003	KURIPAN	PURWODADI	24	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3	PRIORITAS 6
45	KURIPAN	3.32	RT005-RW013	KURIPAN	PURWODADI	17	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3	PRIORITAS 6
46	NAMBUHAN	3.77	RT003-RW004	NAMBUHAN	PURWODADI	30	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3	PRIORITAS 6
47	NAMBUHAN	2.42	RT003-RW005	NAMBUHAN	PURWODADI	30	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
48	NAMBUHAN	6	RT004-RW004	NAMBUHAN	PURWODADI	35	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3	PRIORITAS 6
49	NAMBUHAN	3.28	RT005-RW002	NAMBUHAN	PURWODADI	31	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3	PRIORITAS 6
50	NGEMBAK	1,31	RT003-RW004	NGEMBAK	PURWODADI	29	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
51	NGLOBAR	1.74	RT006-RW002	NGLOBAR	PURWODADI	34	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3	PRIORITAS 6
52	NGRAJI	1.2	RT005-RW004	NGRAJI	PURWODADI	42	KUMUH SEDANG	7	SEDANG	LEGAL	B3	PRIORITAS 5
53	NGRAJI	1,82	RT007-RW004	NGRAJI	PURWODADI	54	KUMUH SEDANG	11	TINGGI	LEGAL	B1	PRIORITAS 2
54	NGRAJI	1.69	RT009-RW004	NGRAJI	PURWODADI	51	KUMUH SEDANG	11	TINGGI	LEGAL	B1	PRIORITAS 2
55	NGRAJI	0.87	RT013-RW004	NGRAJI	PURWODADI	52	KUMUH SEDANG	13	TINGGI	LEGAL	B1	PRIORITAS 2

NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS	
			RT/RW	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN/ DISTRIK	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT			
56	PULOREJO	1.43	RT004-RW004	PULOREJO	PURWODADI	33	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
57	PULOREJO	1,39	RT005-RW004	PULOREJO	PURWODADI	40	KUMUH SEDANG	7	SEDANG	LEGAL	B3	PRIORITAS 5
58	PULOREJO	2.84	RT006-RW004	PULOREJO	PURWODADI	37	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
59	PULOREJO	0.63	RT007-RW004	PULOREJO	PURWODADI	28	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3	PRIORITAS 6
60	PULOREJO	1.96	RT009-RW004	PULOREJO	PURWODADI	32	KUMUH RINGAN	7	SEDANG	LEGAL	C3	PRIORITAS 6
61	PURWODADI	0.46	RT001-RW001	PURWODADI	PURWODADI	20	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
62	PURWODADI	2.43	RT001-RW017	PURWODADI	PURWODADI	22	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
63	PURWODADI	1.76	RT002-RW006	PURWODADI	PURWODADI	23	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
64	PURWODADI	1.28	RT002-RW017	PURWODADI	PURWODADI	19	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
65	PURWODADI	1.9	RT004-RW016	PURWODADI	PURWODADI	18	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
66	PURWODADI	0.72	RT004-RW022	PURWODADI	PURWODADI	20	KUMUH RINGAN	13	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
67	PURWODADI	0.69	RT005-RW001	PURWODADI	PURWODADI	30	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
68	PURWODADI	1.73	RT005-RW003	PURWODADI	PURWODADI	19	KUMUH RINGAN	15	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
69	PURWODADI	1.79	RT005-RW006	PURWODADI	PURWODADI	25	KUMUH RINGAN	13	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
70	PURWODADI	0.98	RT005-RW016	PURWODADI	PURWODADI	22	KUMUH RINGAN	15	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
71	PURWODADI	1.12	RT005-RW022	PURWODADI	PURWODADI	21	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
72	PURWODADI	0.41	RT006-RW001	PURWODADI	PURWODADI	21	KUMUH RINGAN	15	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
73	PURWODADI	0.69	RT006-RW003	PURWODADI	PURWODADI	18	KUMUH RINGAN	13	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
74	PURWODADI	1.36	RT006-RW022	PURWODADI	PURWODADI	25	KUMUH RINGAN	3	RENDAH	LEGAL	C5	PRIORITAS 9
75	PURWODADI	0.56	RT007-RW003	PURWODADI	PURWODADI	18	KUMUH RINGAN	15	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
76	PURWODADI	2.1	RT007-RW017	PURWODADI	PURWODADI	16	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
77	PURWODADI	0.43	RT008-RW003	PURWODADI	PURWODADI	16	KUMUH RINGAN	15	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
78	PURWODADI	1.49	RT008-RW007	PURWODADI	PURWODADI	20	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
79	PURWODADI	0.54	RT009-RW003	PURWODADI	PURWODADI	19	KUMUH RINGAN	15	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
80	PURWODADI	1.17	RT009-RW007	PURWODADI	PURWODADI	18	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1	PRIORITAS 3
81	PURWODADI	0.59	RT011-RW016	PURWODADI	PURWODADI	17	KUMUH RINGAN	9	SEDANG	LEGAL	C3	PRIORITAS 6
82	PUTAT	2.5	RT001-RW003	PUTAT	PURWODADI	32	KUMUH RINGAN	3	RENDAH	LEGAL	C5	PRIORITAS 9
83	PUTAT	1.08	RT001-RW004	PUTAT	PURWODADI	39	KUMUH SEDANG	3	RENDAH	LEGAL	B5	PRIORITAS 8

NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS	
			RT/RW	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN/ DISTRIK	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT			
84	PUTAT	1.38	RT002-RW001	PUTAT	PURWODADI	25	KUMUH RINGAN	3	RENDAH	LEGAL	C5	PRIORITAS 9
85	PUTAT	3.15	RT002-RW003	PUTAT	PURWODADI	32	KUMUH RINGAN	3	RENDAH	LEGAL	C5	PRIORITAS 9
86	PUTAT	1.91	RT002-RW004	PUTAT	PURWODADI	34	KUMUH RINGAN	3	RENDAH	LEGAL	C5	PRIORITAS 9
87	PUTAT	2.12	RT002-RW008	PUTAT	PURWODADI	28	KUMUH RINGAN	3	RENDAH	LEGAL	C5	PRIORITAS 9
88	PUTAT	3.2	RT003-RW004	PUTAT	PURWODADI	40	KUMUH SEDANG	3	RENDAH	LEGAL	B5	PRIORITAS 8
89	PUTAT	2.24	RT005-RW001	PUTAT	PURWODADI	25	KUMUH RINGAN	3	RENDAH	LEGAL	C5	PRIORITAS 9
90	WARUKARANGANYAR	1.63	RT005-RW003	WARUKARANGANYAR	PURWODADI	32	KUMUH RINGAN	3	RENDAH	LEGAL	C5	PRIORITAS 9
91	WARUKARANGANYAR	1.05	RT005-RW004	WARUKARANGANYAR	PURWODADI	35	KUMUH RINGAN	3	RENDAH	LEGAL	C5	PRIORITAS 9
92	WARUKARANGANYAR	1.33	RT006-RW005	WARUKARANGANYAR	PURWODADI	46	KUMUH SEDANG	3	RENDAH	LEGAL	B5	PRIORITAS 8

Sumber : SK Bupati Grobogan Nomor : 050/921/2020

4.3 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu Dan Permasalahan Permukiman Kumuh

Perumusan kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan dilakukan berdasarkan kondisi faktual dan isu strategis berbagai aspek yang menyebabkan kekumuhan. Kebutuhan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 6 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Grobogan dalam Skala Kota

NO	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	LOKASI	OVERVIEW KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENANGANAN	
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
1	Munculnya kantong kekumuhan di perkotaan maupun perdesaan akibat ketidakteraturan bangunan	Candisari, Cingkrong, Danyang, Genuksuran, Karanganyar, Kuripan, Nglobar, Ngraji, Pulorejo, Purwodadi, Putat, Warukaranganyar	Pemerataan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan peningkatan pembangunan jalan, jembatan, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta penataan kawasan kumuh.	1. Penegakan peraturan perizinan terkait peruntukan lahan 2. Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman	Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan
2	Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni	Cingkrong, Danyang, Nambuhan, Nglobar, Ngraji, Pulorejo, Warukaranganyar,	Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman	Sosialisasi, edukasi, dan penegakan aturan perizinan dan standar teknis bangunan gedung	Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis
3	Belum optimalnya penyelenggaraan jalan di Kabupaten Grobogan	17 Desa/Kelurahan	Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta infrastruktur SDA yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	1. Pembangunan jalan lingkungan baru 2. Perbaikan kualitas jalan rusak
4	Cakupan pelayanan air minum belum optimal	Cingkrong, Danyang, Genuksuran, Kandangan, Karanganyar, Kedungrejo, Kuripan, Nambuhan, Ngembak,	Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan serta infrastruktur SDA, infrastruktur pelayanan dasar air minum dan air limbah domestik	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur air minum	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih

NO	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	LOKASI	OVERVIEW PERMASALAH	KEBUTUHAN PENANGANAN	
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
		Nglobar, Ngraji, Pulorejo, Putat, Warukaranganyar	yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat		
5	Masih rendahnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	17 Desa/Kelurahan	Meningkatkan kondisi nfrastruktur yang mantap melalui pengembangan sistem jalan terintegrasi dengan drainase yang baik	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	1. Peningkatan kualitas drainase lingkungan 2. Penataan jaringan drainase agar terhubung dengan hirarki di atasnya
6	Belum seluruh rumah tangga terlayani sanitasi dan memiliki sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis	Candisari, Danyang, Genuksuran, Kuripan, Ngraji, Putat, Warukanganyar	Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah	1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga 2. Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis
7	Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan	Candisari, Cingkrong, Danyang, Genuksuran, Kalongan, Kandangan, Karanganyar, Kedungrejo, Kuripan, Nambuhan, Ngembak. Nglobar, Ngraji, Pulorejo, Putat, Warukaranganyar	Pengelolaan persampahan dengan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah (1 desa 1 bank sampah) dan PETSa (Pembangkit Energi Tenaga Sampah) yaitu gerakan ini mengkonversi sampah yang ada menjadi alternatif energi	1. Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga 2. Sosialisasi dan edukasi pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana persampahan

NO	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	LOKASI	OVERVIEW KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENANGANAN	
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
			(briket) yang nilai kalorunya 50% dari Batu Bara.		
8	Belum terpenuhinya cakupan pelayanan bencana kebakaran	17 Desa/Kelurahan	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kebakaran dan penanganan dini kebakaran	Peningkatan akses dan sarana prasarana proteksi kebakaran

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

Kebutuhan penanganan skala kawasan untuk Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan) dan Kawasan Purwodadi 2 (Purwodadi – Kalongan) adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 7 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan)

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN	
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	343	Unit	1. Penegakan peraturan perizinan terkait peruntukan lahan 2. Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman	Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan

ASPEK YANG DIKAJI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN	
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	157	Unit	Sosialisasi, edukasi, dan penegakan aturan perizinan dan standar teknis bangunan gedung	Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1310	Meter	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru
	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	5292	Meter		Peningkatan kualitas jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	138	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur air minum	Peningkatan pelayanan akses aman air minum
	Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	39	KK		Peningkatan cakupan pelayanan air bersih
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	2	Ha	Monitoring dan evaluasi kapasitas saluran drainase secara berkala	1. Peningkatan kapasitas volume drainase 2. Penataan drainase lingkungan agar terhubung dengan hirarki drainase di atasnya
	Ketidaktersediaan Drainase	3212	Meter	Penyusunan regulasi terkait dengan penyelenggaraan sistem drainase lingkungan	Penataan drainase lingkungan agar terhubung dengan hirarki drainase di atasnya
	Kualitas Konstruksi Drainase	977	Meter	1. Monitoring dan evaluasi kapasitas saluran drainase secara berkala 2. Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Perbaikan dan peningkatan kualitas drainase lingkungan
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai Standar Teknis	23	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah sesuai standar teknis

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN	
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan persayaratan teknis	83	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah	1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga 2. Peningkatan kualitas prasarana pengelolaan air limbah sesuai standar teknis
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan tidak sesuai dengan persayaratan teknis	71	KK	1. Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga 2. Sosialisasi dan edukasi pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis
	Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Standar Teknis	284	KK	1. Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga 2. Sosialisasi dan edukasi pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai standar teknis
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	352	Unit	1. Sosialisasi dan edukasi ketersediaan prasarana proteksi kebakaran 2. Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kebakaran dan penanganan dini kebakaran	Peningkatan prasarana proteksi kebakaran
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	651	Unit	1. Sosialisasi dan edukasi ketersediaan sarana proteksi kebakaran	Peningkatan ketersediaan sarana proteksi kebakaran

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN	
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
				2. Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kebakaran dan penanganan dini kebakaran	

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

Tabel IV. 8 Kebutuhan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kalongan)

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN	
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	2075	Unit	1. Penegakan peraturan perizinan terkait peruntukan lahan 2. Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman	Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1169	Unit	Sosialisasi, edukasi, dan penegakan aturan perizinan dan standar teknis bangunan gedung	Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	13738	Meter	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan baru
	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	26991	Meter		Peningkatan kualitas jalan lingkungan

ASPEK YANG DIKAJI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN	
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1051	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur air minum	Peningkatan pelayanan akses aman air minum
	Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	1194	KK		Peningkatan cakupan pelayanan air bersih
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	23	Ha	Monitoring dan evaluasi kapasitas saluran drainase secara berkala	1. Penyusunan Masterplan Drainase 2. Penataan drainase lingkungan agar terhubung dengan hirarki drainase di atasnya
	Ketidaktersediaan Drainase	21356	Meter	Penyusunan regulasi terkait dengan penyelenggaraan sistem drainase lingkungan	Penataan drainase lingkungan agar terhubung dengan hirarki drainase di atasnya
	Kualitas Konstruksi Drainase	15834	Meter	1. Monitoring dan evaluasi kapasitas saluran drainase secara berkala 2. Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Perbaikan dan peningkatan kualitas drainase lingkungan
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai Standar Teknis	95	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah sesuai standar teknis
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan persayaratan teknis	716	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah	1. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga 2. Peningkatan kualitas prasarana pengelolaan air limbah sesuai standar teknis

ASPEK YANG DIANALISIS	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN	
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH	PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan tidak sesuai dengan persayaratan teknis	2573	KK	1. Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga 2. Sosialisasi dan edukasi pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis
	Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Standar Teknis	2382	KK	1. Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga 2. Sosialisasi dan edukasi pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai standar teknis
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	1816	Unit	1. Sosialisasi dan edukasi ketersediaan prasarana proteksi kebakaran 2. Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kebakaran dan penanganan dini kebakaran	Peningkatan prasarana proteksi kebakaran
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	3416	Unit	1. Sosialisasi dan edukasi ketersediaan sarana proteksi kebakaran 2. Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kebakaran dan penanganan dini kebakaran	Peningkatan ketersediaan sarana proteksi kebakaran

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

BAB 5

KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

5.1 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Sampai Dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh Dalam Skala Kota

Konsep dan Strategi pencegahan dan peningkaytan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala Kota di Kabupaten Grobogan dilakukan dengan:

1. Pencegahan
   a. Permasalahan Ketidakteraturan bangunan
      Konsep : 1) Pengawasan dan Pengendalian dengan penegakan kesesuaian peruntukan lahan
      2) Pemberdayaan Masyarakat
      Strategi : 1) Melakukan Pengawasan pemanfaatan ruang dengan kesesuaian peruntukan lahan dalam RTRW
      2) Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pembangunan permukiman sesuai dengan peruntukan lahan
   b. Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
      Konsep : Pemberdayaan Masyarakat
      Strategi : Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pembangunan bangunan sesuai standar teknis
   c. Permasalahan penyelenggaraan jalan
      Konsep : Pemberdayaan Masyarakat

Strategi : Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pemanfaatan dan pemeliharaan jalan

d. Permasalahan cakupan pelayanan air minum

Konsep : Pemberdayaan Masyarakat

Strategi : 1) Mendorong masyarakat untuk memperhatikan standar kelayakan air minum

2) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sarana prasarana air bersih berbasis masyarakat

e. Permasalahan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

Konsep : 1) Pengawasan dan pengendalian

2) Pemberdayaan Masyarakat

Strategi : 1) Pemantauan dan pemeliharaan drainase di kawasan rawan bencana

2) Pemantauan garis sempadan bangunan

3) Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pemeliharaan drainase lingkungan agar dapat mengalirkan air

f. Permasalahan akses air limbah

Konsep : Pemberdayaan Masyarakat

Strategi : Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya memiliki jamban sehat

g. Permasalahan pengelolaan persampahan

Konsep : Pemberdayaan Masyarakat

Strategi : 1) Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pemilahan sampah dari sumber

2) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peluang pemanfaatan pemilahan sampah

h. Permasalahan cakupan pelayanan bencana kebakaran

Konsep : Pemberdayaan Masyarakat

Strategi : Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan bencana kebakaran

2. Peningkatan

a. Permasalahan Ketidakteraturan bangunan

Konsep : Pemugaran permukiman kumuh

Strategi : 1) Melakukan penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan

2) Meningkatkan kualitas permukiman kumuh

b. Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Konsep : Pemugaran rumah tidak layak huni

Strategi : Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni di permukiman kumuh

c. Permasalahan penyelenggaraan jalan

Konsep : Pemugaran

Strategi : 1) Meningkatkan cakupan pelayanan jalan lingkungan

2) Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai standar teknis

d. Permasalahan cakupan pelayanan air minum

Konsep : Pemugaran

Strategi : Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum

e. Permasalahan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

Konsep : Pemugaran

Strategi : 1) Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan

2) Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase

f. Permasalahan akses air limbah

Konsep : Pemugaran

Strategi : 1) Peningkatan jangkauan pelayanan air limbah

2) Peningkatan kualitas sarana prasarana air limbah

g. Permasalahan pengelolaan persampahan

Konsep : Pemugaran

Strategi : 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan persampahan

2) Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah.

h. Permasalahan cakupan pelayanan bencana kebakaran

Konsep : Pemugaran

Strategi : Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana

Matriks Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V. 1 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kota Kab. Grobogan

NO	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN					
		PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
		KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI
1	Munculnya kantong kekumuhan di perkotaan maupun perdesaan akibat ketidakteraturan bangunan	Penegakan peraturan perizinan terkait peruntukan lahan	Pengawasan dan Pengendalian dengan penegakan kesesuaian peruntukan lahan	Melakukan Pengawasan pemanfaatan ruang dengan kesesuaian peruntukan lahan dalam RTRW	Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan	Pemugaran permukiman kumuh	Melakukan penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan
		Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pembangunan permukiman sesuai dengan peruntukan lahan			Meningkatkan kualitas permukiman kumuh
2	Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni	Sosialisasi, edukasi, dan penegakan aturan perizinan dan standar teknis bangunan gedung	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pembangunan	Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis	Pemugaran rumah tidak layak huni	Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni di permukiman kumuh

NO	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN					
		PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
		KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI
				bangunan sesuai standar teknis			
3	Belum optimalnya penyelenggaraan jalan di Kabupaten Grobogan	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pemanfaatan dan pemeliharaan jalan	Pembangunan jalan lingkungan baru	Pemugaran jalan	Meningkatkan cakupan pelayanan jalan lingkungan
					Perbaikan kualitas jalan rusak		Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai standar teknis
4	Cakupan pelayanan air minum belum optimal	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur air minum	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan standar kelayakan air minum	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih	Pemugaran	Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum
				Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sarana prasarana air bersih berbasis masyarakat			
5	Masih rendahnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Pengawasan dan pengendalian	Pemantauan dan pemeliharaan drainase di kawasan rawan bencana	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	Pemugaran	Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan

NO	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN					
		PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
		KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI
				Pemantauan garis sempadan bangunan			kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan
			Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pemeliharaan drainase lingkungan agar dapat mengalirkan air	Penataan jaringan drainase agar terhubung dengan hirarki di atasnya		Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase
6	Belum seluruh rumah tangga terlayani sanitasi dan memiliki sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya memiliki jamban sehat	Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga	Pemugaran	Peningkatan jangkauan pelayanan air limbah
					Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis		Peningkatan kualitas sarana prasarana air limbah
7	Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana persampahan	Pemugaran	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan persampahan

NO	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN					
		PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
		KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI
				pentingnya pemilahan sampah dari sumber			
		Sosialisasi dan edukasi pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga		Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peluang pemanfaatan pemilahan sampah			Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah.
8	Belum terpenuhinya cakupan pelayanan bencana kebakaran	Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kebakaran dan penanganan dini kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan bencana kebakaran	Peningkatan akses dan sarana prasarana proteksi kebakaran	Peremajaan	Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

5.2 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan

Tabel V. 2 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi-Kuripan)

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN					
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	343	Unit	Penegakan peraturan perizinan terkait peruntukan lahan	Pengawasan dan Pengendalian	Melakukan Pengawasan pemanfaatan ruang dengan kesesuaian peruntukan lahan dalam RTRW	Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan	Pemugaran	Melakukan penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan
				Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pembangunan permukiman sesuai dengan peruntukan lahan			
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	157	Unit	Sosialisasi, edukasi, dan penegakan aturan perizinan dan standar teknis bangunan gedung	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pembangunan bangunan sesuai standar teknis	Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis		Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni di permukiman kumuh

ASPEK YANG DINILAI	KONDISI FAKTUAL DAN KLU TERKINI			KEBUTUHAN PENANGANAN					
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1310	Meter	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pemanfaatan dan pemeliharaan jalan	Pembangunan jalan lingkungan baru	Pemugaran	Meningkatkan cakupan pelayanan jalan lingkungan
	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	5292	Meter				Peningkatan kualitas jalan lingkungan		Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai standar teknis
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	138	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur air minum	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan standar kelayakan air minum	Peningkatan pelayanan akses aman air minum	Pemugaran	Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum
	Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	39	KK			Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sarana prasarana air bersih berbasis masyarakat	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih		
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	2	Ha	Monitoring dan evaluasi kapasitas saluran drainase secara berkala	Pengawasan dan Pengendalian	Pemantauan dan pemeliharaan pemanfaatan drainase lingkungan	Peningkatan kapasitas volume drainase	Pemugaran	Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal
					Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Penataan drainase lingkungan agar terhubung dengan hirarki drainase di atasnya		

ASPEK YANG DIKAJI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN					
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI
									dibangun/ disediakan
	Ketidaktersediaan Drainase	3212	Meter	Penyusunan regulasi terkait dengan penyelenggaraan sistem drainase lingkungan	Pengawasan dan Pengendalian	Pemantauan ketersediaan drainase lingkungan	Penataan drainase lingkungan agar terhubung dengan hirarki drainase di atasnya		Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase
	Kualitas Konstruksi Drainase	977	Meter	Monitoring dan evaluasi kapasitas saluran drainase secara berkala	Pengawasan dan Pengendalian	Pemantauan ketersediaan dan kualitas drainase lingkungan	Perbaikan dan peningkatan kualitas drainase lingkungan		Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan
				Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pemeliharaan drainase lingkungan agar dapat mengalirkan air			
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan persayaratan teknis	83	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah			Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga		Peningkatan kualitas sarana prasarana air limbah
							Peningkatan kualitas prasarana pengelolaan air		

ASPEK YANG DIKAJI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN					
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI
							limbah sesuai standar teknis		
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan tidak sesuai dengan persayaratan teknis	71	KK	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pemilahan sampah dari sumber	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis	Pemugaran	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan persampahan
				Sosialisasi dan edukasi pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga					
	Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Standar Teknis	284	KK	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga		Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peluang pemanfaatan pemilahan sampah	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai standar teknis		Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah.
				Sosialisasi dan edukasi pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga					
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	352	Unit	Sosialisasi dan edukasi ketersediaan prasarana proteksi kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan bencana kebakaran	Peningkatan prasarana proteksi kebakaran	Pemugaran	Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN					
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI
				Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kebakaran dan penanganan dini kebakaran					komponen sarana dan prasarana
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	651	Unit	Sosialisasi dan edukasi ketersediaan sarana proteksi kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat		Peningkatan ketersediaan sarana proteksi kebakaran		
				Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kebakaran dan penanganan dini kebakaran					

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

Tabel V. 3 Konsep Dan Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi-Kalongan)

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN					
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	2075	Unit	Penegakan peraturan perizinan	Pengawasan dan Pengendalian	Melakukan Pengawasan pemanfaatan ruang dengan kesesuaian	Penataan kawasan kumuh dengan	Pemugaran	Melakukan penataan kawasan kumuh dengan

ASPEK YANG DINILAI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN					
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI
				terkait peruntukan lahan		peruntukan lahan dalam RTRW	ketidakteraturan bangunan		ketidakteraturan bangunan
				Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pembangunan permukiman sesuai dengan peruntukan lahan			
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1169	Unit	Sosialisasi, edukasi, dan penegakan aturan perizinan dan standar teknis bangunan gedung	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pembangunan bangunan sesuai standar teknis	Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis		Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni di permukiman kumuh
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	13738	Meter	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pemanfaatan dan pemeliharaan jalan	Pembangunan jalan lingkungan baru	Pemugaran	Meningkatkan cakupan pelayanan jalan lingkungan
	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	26991	Meter				Peningkatan kualitas jalan lingkungan		Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai standar teknis
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1051	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan, pemeliharaan, dan	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan standar kelayakan air minum	Peningkatan pelayanan akses aman air minum	Pemugaran	Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum

ASPEK YANG DINILAI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN					
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI
	Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	1194	KK	pengelolaan infrastruktur air minum		Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sarana prasarana air bersih berbasis masyarakat	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih		
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	23	Ha	Monitoring dan evaluasi kapasitas saluran drainase secara berkala	Pengawasan dan Pengendalian	Pemantauan dan pemeliharaan pemanfaatan drainase lingkungan	Penyusunan Masterplan Drainase	Pemugaran	Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan
					Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Penataan drainase lingkungan agar terhubung dengan hirarki drainase di atasnya		
	Ketidaktersediaan Drainase	21356	Meter	Penyusunan regulasi terkait dengan penyelenggaraan sistem drainase lingkungan	Pengawasan dan Pengendalian	Pemantauan ketersediaan drainase lingkungan			
	Kualitas Konstruksi Drainase	15834	Meter	Monitoring dan evaluasi kapasitas saluran drainase secara berkala	Pengawasan dan Pengendalian	Pemantauan ketersediaan dan kualitas drainase lingkungan			
				Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya	Penataan drainase lingkungan agar terhubung dengan		Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase

ASPEK YANG DINILAI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN					
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI
				pemeliharaan drainase		pemeliharaan drainase lingkungan agar dapat mengalirkan air	hirarki drainase di atasnya		
							Perbaikan dan peningkatan kualitas drainase lingkungan		Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai Standar Teknis	95	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya memiliki jamban sehat	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah sesuai standar teknis	Pemugaran	Peningkatan jangkauan pelayanan air limbah
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan persayaratan teknis	716	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah			Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga		
							Peningkatan kualitas prasarana pengelolaan air limbah sesuai standar teknis		Peningkatan kualitas sarana prasarana air limbah
	Prasarana dan Sarana	2573	KK	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana	Pemugaran	

ASPEK YANG DINILAI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN					
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan tidak sesuai dengan persayaratan teknis			sampah rumah tangga		pentingnya pemilahan sampah dari sumber	prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis		Peningkatan kualitas sistem pengelolaan persampahan
				Sosialisasi dan edukasi pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga					
	Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Standar Teknis	2382	KK	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga		Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peluang pemanfaatan pemilahan sampah	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai standar teknis		Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah.
				Sosialisasi dan edukasi pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga					
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	1816	Unit	Sosialisasi dan edukasi ketersediaan prasarana proteksi kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan bencana kebakaran	Peningkatan prasarana proteksi kebakaran	Pemugaran	Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana
				Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kebakaran dan penanganan dini kebakaran					
		3416	Unit	Sosialisasi dan edukasi ketersediaan	Pemberdayaan Masyarakat				

ASPEK YANG DINILAI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN					
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH			PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran			sarana proteksi kebakaran			Peningkatan ketersediaan sarana proteksi kebakaran		
				Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kebakaran dan penanganan dini kebakaran					

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

BAB 6

RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

6.1 Program Dan Kegiatan Pencegahan Terhadap Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan berdasarkan konsep dan strategi untuk mengatasi permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Secara umum, program dan kegiatan dalam pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh disusun dengan menyesuaikan rencana tata ruang agar sesuai dengan peruntukannya. Penyusunan program dan kegiatan juga disusun dengan mensosialisasikan standar teknis sarana dan prasana permukiman. Selain itu, pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur juga menjadi perhatian khusus dalam penyusunan program dan kegiatan.

Program dan kegiatan pencegahan terhadapt tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

Tabel VI. 1 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota di Kabupaten Grobogan

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN				
		PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
		KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
1	Munculnya kantong kekumuhan di perkotaan maupun perdesaan akibat ketidakteraturan bangunan	Penegakan peraturan perizinan terkait peruntukan lahan	Pengawasan dan Pengendalian dengan penegakan kesesuaian peruntukan lahan	Melakukan Pengawasan pemanfaatan ruang dengan kesesuaian peruntukan lahan dalam RTRW	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Pengawasan, pengamanan, dan pengaturan pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana longsor
						Mitigasi pra bencana
						Sosialisasi bahaya yang akan terjadi
					Pengawasan kesesuaian peruntukan lahan bantaran sungai, lahan ilegal, kawasan rawan bencana	Penyusunan Peraturan Zonasi
						Pengendalian pertumbuhan pembanguan perumahan baru di kawasan bantaran sungai, lahan ilegal, dan rawan bencana
		Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pembangunan permukiman sesuai dengan peruntukan lahan	*Public campaign* mengenai pentingnya mendirikan permukiman di kawasan	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN				
		PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
		KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
					yang sesuai dengan peruntukannya	di peruntukan kawasan permukiman
2	Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni	Sosialisasi, edukasi, dan penegakan aturan perizinan dan standar teknis bangunan gedung	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pembangunan bangunan sesuai standar teknis	*Public campaign* mengenai pentingnya rumah layak huni	Sosialisasi pentingnya rumah layak huni
						Sosialisasi pentingnya IMB
3	Belum optimalnya penyelenggaraan jalan di Kabupaten Grobogan	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pemanfaatan dan pemeliharaan jalan	Pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) infrastruktur jalan	Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur jalan
						Melakukan penjadwalan pemeliharaan infrastruktur jalan dengan Kerja Bakti
4	Cakupan pelayanan air minum belum optimal	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur air minum	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan standar kelayakan air minum	Pendampingan dan pelayanan informasi standar kelayakan air minum	Sosialisasi mengenai standar air minum yang layak digunakan dan dimanfaatkan
				Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan	Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat pelayanan air minum

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN				
		PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
		KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
				sarana prasarana air bersih berbasis masyarakat		Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum
						Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum
5	Masih rendahnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Pengawasan dan pengendalian	Pemantauan dan pemeliharaan drainase di kawasan rawan bencana	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi jaringan drainase pada kawasan rawan bencana banjir
				Pemantauan garis sempadan bangunan	Pengawasan dan pengendalian dengan memantau garis sempadan bangunan yang berada di atas saluran drainase	Pemantauan terhadap bangunan yang berada di atas saluran drainase
			Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pemeliharaan drainase	Pembentukan Kelompok Pemanfaatan	Sosialisasi Pentingnya membuang sampah pada tempatnya

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN				
		PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
		KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
				lingkungan agar dapat mengalirkan air	dan Pemelihara (KPP) infrastruktur drainase	Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur drainase
						Melakukan penjadwalan pemeliharaan infrastruktur drainase dengan Kerja Bakti
6	Belum seluruh rumah tangga terlayani sanitasi dan memiliki sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya memiliki jamban sehat	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk tidak BABS (Buang Air Besar Sembarangan)
						Sosialiasai Pentingnya memiliki jamban sehat
7	Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pemilahan sampah dari sumber	Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Infrastruktur Persampahan	Sosialisasi Pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga
		Sosialisasi dan edukasi pemilahan dan		Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai		Inisiasi kegiatan Bank Sampah

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN				
		PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
		KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
		pemanfaatan sampah rumah tangga		peluang pemanfaatan pemilahan sampah	Pembentukan Kelompok Mandiri Sampah	Inisiasi kegiatan Daur Ulang sampah menjadi Kerajinan dan Pupuk Organik
						Pengelolaan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga (Jadwal Pengangkutan & Iuran)
8	Belum terpenuhinya cakupan pelayanan bencana kebakaran	Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kebakaran dan penanganan dini kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan bencana kebakaran	Pembentukan kelembagaan untuk pencegahan bencana kebakaran	Sosialisasi dan simulasi mitigasi kebakaran
						Mitigasi pra bencana

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

Program dan kegiatan skala kawasan diperlukan dalam penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar kekumuhan dapat tertangani secara komprehensif. Perumusan program dan kegiatan skala kawasan di Kabupaten Grobogan terdapat di Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan) dan Kawasan Purwodadi 2 (Purwodadi – Kalongan). Perumusan program dan kegiatan skala kawasan dilakukan sesuai dengan identifikasi permasalahan aspek kekumuhan di masing-masing kawasan.

Program dan kegiatan skala kawasan yang dilakukan di Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan) dan Kawasan Purwodadi 2 (Purwodadi – Kalongan) mengutamakan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur. Hal ini disebabkan karena masyarakat memegang peran utama dan merupakan pihak yang secara terus menerus memanfaatkan infrastruktur permukiman. Sehingga masyarakat memiliki peran sangat penting dalam penanganan kekumuhan.

Program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kabupaten Purwodadi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI. 2 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan)

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	343	Unit	Penegakan peraturan perizinan terkait peruntukan lahan	Pengawasan dan Pengendalian	Melakukan Pengawasan pemanfaatan ruang dengan kesesuaian peruntukan lahan dalam RTRW	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Pengawasan, pengamanan, dan pengaturan pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana longsor dan banjir
								Mitigasi pra bencana
							Pengawasan kesesuaian peruntukan lahan bantaran sungai, lahan ilegal,	Pengendalian pertumbuhan pembanguan perumahan baru di kawasan bantaran sungai, lahan ilegal, dan rawan bencana

ASPEK YANG DINILAI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
							kawasan rawan bencana	
				Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pembangunan permukiman sesuai dengan peruntukan lahan	Public campaign mengenai pentingnya mendirikan permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	157	Unit	Sosialisasi, edukasi, dan penegakan aturan perizinan dan standar teknis bangunan gedung	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pembangunan bangunan sesuai standar teknis	Public campaign mengenai pentingnya rumah layak huni	Sosialisasi pentingnya rumah layak huni
								Sosialisasi pentingnya IMB
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1310	Meter	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan	Pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan	Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur jalan
		5292	Meter					

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan			pemeliharaan jalan lingkungan		pemanfaatan dan pemeliharaan jalan	(KPP) infrastruktur jalan	Melakukan penjadwalan pemeliharaan infrastruktur jalan dengan Kerja Bakti
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	138	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur air minum	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan standar kelayakan air minum	Pendampingan dan pelayanan informasi standar kelayakan air minum	Sosialisasi mengenai standar air minum yang layak digunakan dan dimanfaatkan
	Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	39	KK			Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sarana prasarana air bersih berbasis masyarakat	Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat pelayanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum
								Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	2	Ha	Monitoring dan evaluasi kapasitas saluran drainase secara berkala	Pengawasan dan Pengendalian	Pemantauan dan pemeliharaan pemanfaatan drainase lingkungan	Pengawasan dan pengendalian dengan memantau garis sempadan bangunan yang	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi jaringan drainase

ASPEK YANG DIMAATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
							berada di atas saluran drainase	
					Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara drainase dengan baik	Sosialisasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya
	Ketidaktersediaan Drainase	3212	Meter	Penyusunan regulasi terkait dengan penyelenggaraan sistem drainase lingkungan	Pengawasan dan Pengendalian	Pemantauan ketersediaan drainase lingkungan	Pendataan ketersediaan dan kondisi jaringan drainase secara berkala	Pendataan panjang dan volume drainase lingkungan
	Kualitas Konstruksi Drainase	977	Meter	Monitoring dan evaluasi kapasitas saluran drainase secara berkala	Pengawasan dan Pengendalian	Pemantauan ketersediaan dan kualitas drainase lingkungan	Pendataan ketersediaan dan kondisi jaringan drainase secara berkala	Pendataan kondisi drainase serta intergasi sistem drainase
				Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan	Pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan	Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur drainase

ASPEK YANG DIMAATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
				pemeliharaan drainase		pentingnya pemeliharaan drainase lingkungan agar dapat mengalirkan air	Pemelihara (KPP) infrastruktur drainase	Melakukan penjadwalan pemeliharaan infrastruktur drainase dengan Kerja Bakti
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai Standar Teknis	23	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya memiliki jamban sehat	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk tidak BABS (Buang Air Besar Sembarangan)
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan persayaratan teknis	83	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah				Sosialiasai Pentingnya memiliki jamban sehat
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan tidak	71	KK	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya	Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)	Sosialisasi Pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan peran masyarakat dalam

ASPEK YANG DIMAATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	sesuai dengan persayaratan teknis			Sosialisasi dan edukasi pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga		pemilahan sampah dari sumber	Infrastruktur Persampahan	pengelolaan sampah rumah tangga
	Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Standar Teknis	284	KK	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga		Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peluang pemanfaatan pemilahan sampah	Pembentukan Kelompok Mandiri Sampah	Inisiasi kegiatan Bank Sampah
				Sosialisasi dan edukasi pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga				Inisiasi kegiatan Daur Ulang sampah menjadi Kerajinan dan Pupuk Organik
								Pengelolaan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga (Jadwal Pengangkutan & Iuran)
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	352	Unit	Sosialisasi dan edukasi ketersediaan prasarana proteksi kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan	Pembentukan kelembagaan untuk pencegahan bencana kebakaran	Sosialisasi dan simulasi mitigasi kebakaran
				Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kebakaran				Mitigasi pra bencana

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
				dan penanganan dini kebakaran		bencana kebakaran		
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	651	Unit	Sosialisasi dan edukasi ketersediaan sarana proteksi kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat			Sosialisasi penggunaan alat pemadam kebakaran sederhana
				Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kebakaran dan penanganan dini kebakaran				

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

Tabel VI. 3 Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kawasan Purwodadi 2 (Purwodadi – Kalongan)

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	2075	Unit	Penegakan peraturan perizinan terkait peruntukan lahan	Pengawasan dan Pengendalian	Melakukan Pengawasan pemanfaatan ruang dengan	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Pengawasan, pengamanan, dan pengaturan pemanfaatan lahan pada kawasan

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
						kesesuaian peruntukan lahan dalam RTRW		rawan bencana longsor dan banjir
								Mitigasi pra bencana
							Pengawasan kesesuaian peruntukan lahan bantaran sungai, lahan ilegal, kawasan rawan bencana	Pengendalian pertumbuhan pembanguan perumahan baru di kawasan bantaran sungai, lahan ilegal, dan rawan bencana
				Edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis pembangunan kawasan permukiman	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pembangunan permukiman sesuai dengan peruntukan lahan	Public campaign mengenai pentingnya mendirikan permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1169	Unit	Sosialisasi, edukasi, dan penegakan aturan perizinan dan standar teknis bangunan gedung	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pembangunan	Public campaign mengenai pentingnya rumah layak huni	Sosialisasi pentingnya rumah layak huni
								Sosialisasi pentingnya IMB

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
						bangunan sesuai standar teknis		
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	13738	Meter	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan jalan lingkungan	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pemanfaatan dan pemeliharaan jalan	Pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) infrastruktur jalan	Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur jalan
	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	26991	Meter					Melakukan penjadwalan pemeliharaan infrastruktur jalan dengan Kerja Bakti
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1051	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur air minum	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan standar kelayakan air minum	Pendampingan dan pelayanan informasi standar kelayakan air minum	Sosialisasi mengenai standar air minum yang layak digunakan dan dimanfaatkan
	Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	1194	KK			Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sarana prasarana air bersih berbasis masyarakat	Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat pelayanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum
								Membuat aturan bersama terkait

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
								pengelolaan infrastruktur air minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	23	Ha	Monitoring dan evaluasi kapasitas saluran drainase secara berkala	Pengawasan dan Pengendalian	Pemantauan dan pemeliharaan pemanfaatan drainase lingkungan	Pengawasan dan pengendalian dengan memantau garis sempadan bangunan yang berada di atas saluran drainase	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi jaringan drainase
					Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara drainase dengan baik	Sosialisasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya
	Ketidaktersediaan Drainase	21356	Meter	Penyusunan regulasi terkait dengan penyelenggaraan sistem drainase lingkungan	Pengawasan dan Pengendalian	Pemantauan ketersediaan drainase lingkungan	Pendataan ketersediaan dan kondisi jaringan drainase secara berkala	Pendataan panjang dan volume drainase lingkungan
	Kualitas Konstruksi Drainase	15834	Meter	Monitoring dan evaluasi kapasitas	Pengawasan dan Pengendalian	Pemantauan ketersediaan dan	Pendataan ketersediaan dan kondisi jaringan	Pendataan kondisi drainase serta intergasi sistem drainase

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
				saluran drainase secara berkala		kualitas drainase lingkungan	drainase secara berkala	
				Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan drainase	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pemeliharaan drainase lingkungan agar dapat mengalirkan air	Pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara (KPP) infrastruktur drainase	Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur drainase
								Melakukan penjadwalan pemeliharaan infrastruktur drainase dengan Kerja Bakti
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai Standar Teknis	95	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya memiliki jamban sehat	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk tidak BABS (Buang Air Besar Sembarangan)
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan	716	KK	Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air limbah				Sosialiasai Pentingnya memiliki jamban sehat

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	persayaratan teknis							
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan tidak sesuai dengan persayaratan teknis	2573	KK	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga	Pemberdayaan Masyarakat	Mendorong masyarakat untuk memperhatikan pentingnya pemilahan sampah dari sumber	Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Infrastruktur Persampahan	Sosialisasi Pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga
				Sosialisasi dan edukasi pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga				
	Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Standar Teknis	2382	KK	Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga		Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peluang pemanfaatan pemilahan sampah	Pembentukan Kelompok Mandiri Sampah	Inisiasi kegiatan Bank Sampah
				Sosialisasi dan edukasi pemilahan dan pemanfaatan sampah rumah tangga				Inisiasi kegiatan Daur Ulang sampah menjadi Kerajinan dan Pupuk Organik
								Pengelolaan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga (Jadwal Pengangkutan & Iuran)

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENCEGAHAN TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	1816	Unit	Sosialisasi dan edukasi ketersediaan prasarana proteksi kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan bencana kebakaran	Pembentukan kelembagaan untuk pencegahan bencana kebakaran	Sosialisasi dan simulasi mitigasi kebakaran
				Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kebakaran dan penanganan dini kebakaran				Mitigasi pra bencana
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	3416	Unit	Sosialisasi dan edukasi ketersediaan sarana proteksi kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat			Sosialisasi penggunaan alat pemadam kebakaran sederhana
				Sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana kebakaran dan penanganan dini kebakaran				

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

6.2 Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Rencana Aksi terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh berisi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Penyusunan rencana aksi membutuhkan peran aktif berbagai *stakeholder* untuk mencapai penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam rencana aksi juga dijabarkan menegai kebutuhan biaya, rencana tahun pelaksanaan, sumber pendanaan, dan pelaku dalan program dan kegiatan.

Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI. 4 Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota Kabupaten Grobogan

NO	ASPEK KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp.x 1000)	Total Biaya (Rp.x 1000)	Tahun				Sumber Pendanaan	Pelaku
								I	II	III	IV		
1	Bangunan Gedung	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Pengawasan, pengamanan, dan pengaturan pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana longsor	17	ls	100,000	1,700,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, BPBD, BPN
2			Mitigasi pra bencana	17	ls	100,000	1,700,000					APBD Kabupaten, CSR	Bappeda, DPRKP, BPBD, Swasta, Masyarakat
3			Sosialisasi bahaya yang akan terjadi	17	ls	20,000	340,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, BPBD
4		Pengawasan kesesuaian peruntukan lahan bantaran sungai, lahan ilegal, kawasan rawan bencana	Penyusunan Peraturan Zonasi	1	ls	250,000	250,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP
5			Pengendalian pertumbuhan pembanguan perumahan baru di kawasan bantaran sungai, lahan ilegal, dan rawan bencana	17	ls	100,000	1,700,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, BPBD

NO.	ASPEK PENANGANAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp.x 1000)	Total Biaya (Rp.x 1000)	Tahun				Sumber Pembiayaan	PIHAK
								I	II	III	IV		
6		Public campaign mengenai pentingnya mendirikan permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman	17	ls	50,000	850,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, BPN
7		Public campaign mengenai pentingnya rumah layak huni	Sosialisasi pentingnya rumah layak huni	17	ls	50,000	850,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP
8			Sosialisasi pentingnya IMB	17	ls	50,000	850,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, BPN
9	Air Minum	Pendampingan dan pelayanan informasi standar kelayakan air minum	Sosialisasi mengenai standar air minum yang layak digunakan dan dimanfaatkan	17	ls	50,000	850,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, Dinkes, PDAM
10	Drainase	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi jaringan drainase pada kawasan rawan bencana banjir	17	ls	200,000	3,400,000					APBD Kabupaten	DPRKP, Masyarakat
11		Pengawasan dan pengendalian dengan memantau garis sempadan bangunan yang	Pemantauan terhadap bangunan yang berada di atas saluran drainase	17	ls	300,000	5,100,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, BPN

NO.	ASPEK PENGEMBANGAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp.) x 1000	Total Biaya (Rp.) x 1000	TAHUN				SUMBER PEMBIAYAAN	PIHAK
								I	II	III	IV		
		berada di atas saluran drainase											
12		Pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara (KPP) infrastruktur drainase	Sosialisasi Pentingnya membuang sampah pada tempatnya	17	ls	50,000	850,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP
13	Air Limbah	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk tidak BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	17	ls	50,000	850,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, Dinkes
14			Sosialiasai Pentingnya memiliki jamban sehat	17	ls	50,000	850,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, Dinkes
15	Persampahan	Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Infrastruktur Persampahan	Sosialisasi Pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga	17	ls	50,000	850,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, DLH
16		Pembentukan Kelompok Mandiri Sampah	Inisiasi kegiatan Bank Sampah	17	ls	150,000	2,550,000					APBD Kabupaten, CSR	Bappeda, DPRKP, DLH, Swasta, Masyarakat
17			Inisiasi kegiatan Daur Ulang sampah menjadi Kerajinan dan Pupuk Organik	17	ls	100,000	1,700,000					APBD Kabupaten, CSR	Bappeda, DPRKP, DLH,

NO.	ASPEK KEBAKARAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun				Sumber Pembiayaan	PIHAK
								I	II	III	IV		
													Swasta, Masyarakat
18	Proteksi Kebakaran	Pembentukan kelembagaan untuk pencegahan bencana kebakaran	Sosialisasi dan simulasi mitigasi kebakaran	17	ls	50,000	850,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, BPBD
19			Mitigasi pra bencana	17	ls	100,000	1,700,000					APBD Kabupaten, CSR	Bappeda, DPRKP, BPBD, Swasta, Masyarakat

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI. 5 Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan)

NO	ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			PROGRAM	KEGIATAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun				Sumber Pembiayaan	PIHAK
											I	II	III	IV		
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	343	Unit	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Mitigasi pra bencana	1	ls	50,000	50,000					APBD Kabupaten, CSR	Bappeda, DPRKP, BPBD, Swasta, Masyarakat
2					Public campaign mengenai pentingnya mendirikan permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukkannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, BPN

NO	ASPEK YANG DINILAI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			PROGRAM	KEGIATAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun				Sumber Pendanaan	Ket.
											I	II	III	IV		
						di peruntukan kawasan permukiman										
3		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	157	Unit	Public campaign mengenai pentingnya rumah layak huni	Sosialisasi pentingnya rumah layak huni	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP
4						Sosialisasi pentingnya IMB	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, BPN
5	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1310	Meter	Pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) infrastruktur jalan	Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur jalan	1	ls	5,000	5,000					APBD Kabupaten	DPRKP, Masyarakat
6		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	5292	Meter		Melakukan penjadwalan pemeliharaan infrastruktur jalan dengan Kerja Bakti	1	ls	10,000	10,000					APBD Kabupaten	DPRKP, Masyarakat
7	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	138	KK	Pendampingan dan pelayanan informasi standar kelayakan air minum	Sosialisasi mengenai standar air minum yang layak digunakan dan dimanfaatkan	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, Dinkes, PDAM
8		Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	39	KK	Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat pelayanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, Dinkes, PDAM
9						Membuat aturan bersama terkait	1	ls	50,000	50,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, Dinkes, PDAM

NO	ASPEK YANG DIMAKSUD	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			PROGRAM	KEGIATAN	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun				Sumber Pendanaan	Ket
											I	II	III	IV		
						pengelolaan infrastruktur air minum										
10	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	2	Ha	Edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara drainase dengan baik	Sosialisasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP
11		Kualitas Konstruksi Drainase	977	Meter	Pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara (KPP) infrastruktur drainase	Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur drainase	1	ls	5,000	5,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, Masyarakat
12						Melakukan penjadwalan pemeliharaan infrastruktur drainase dengan Kerja Bakti	1	ls	10,000	10,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, Masyarakat
13	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai Standar Teknis	23	KK	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk tidak BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, Dinkes
14		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan persayaratan teknis	83	KK		Sosialiasai Pentingnya memiliki jamban sehat	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, Dinkes
15	Kondisi Pengelolaa	Prasarana dan Sarana	71	KK	Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan	Sosialisasi Pentingnya membuang sampah	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, DLH

NO	ASPEK YANG DINILAI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			PROGRAM	KEGIATAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun				Sumber Pendanaan	Ket.
											I	II	III	IV		
	n Persampah an	Pengelolaan Persampahan tidak sesuai dengan persayaratan teknis			Pemelihara (KPP) Infrastruktur Persampahan	pada tempatnya dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga										
16		Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Standar Teknis	284	KK	Pembentukan Kelompok Mandiri Sampah	Inisiasi kegiatan Bank Sampah	1	ls	30,000	30,000					APBD Kabupaten, CSR	Bappeda, DPRKP, DLH, Swasta, Masyarakat
17						Inisiasi kegiatan Daur Ulang sampah menjadi Kerajinan dan Pupuk Organik	1	ls	100,000	100,000					APBD Kabupaten, CSR	Bappeda, DPRKP, DLH, Swasta, Masyarakat
18						Pengelolaan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga (Jadwal Pengangkutan & Iuran)	1	ls	10,000	10,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, DLH, Masyarakat
19	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	352	Unit	Pembentukan kelembagaan untuk pencegahan bencana kebakaran	Sosialisasi dan simulasi mitigasi kebakaran	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, BPBD
20						Mitigasi pra bencana	1	ls	50,000	50,000					APBD Kabupaten, CSR	Bappeda, DPRKP, BPBD, Swasta, Masyarakat
21		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	651	Unit		Sosialisasi penggunaan alat pemadam kebakaran sederhana	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten, CSR	Bappeda, DPRKP, BPBD, Swasta, Masyarakat

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

Rencana aksi program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kawasan Purwodadi 2 (Purwodadi – Kalongan) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI. 6 Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kawasan Purwodadi 2 (Purwodadi – Kalongan)

NO	ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI EKSISTING/ DAYA DUKUNG STRATEGIS			PROGRAM	KEGIATAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun				Sumber Pendanaan	PIHAK
											I	II	III	IV		
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	2075	Unit	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Mitigasi pra bencana	1	ls	50,000	50,000					APBD Kabupaten, CSR	Bappeda, DPRKP, BPBD, Swasta, Masyarakat
2					Public campaign mengenai pentingnya mendirikan permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, BPN
3		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1169	Unit	Public campaign mengenai pentingnya rumah layak huni	Sosialisasi pentingnya rumah layak huni	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP
4						Sosialisasi pentingnya IMB	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, BPN
5	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	13738	Meter	Pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) infrastruktur jalan	Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur jalan	1	ls	5,000	5,000					APBD Kabupaten	DPRKP, Masyarakat
6		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	26991	Meter		Melakukan penjadwalan pemeliharaan infrastruktur jalan dengan Kerja Bakti	1	ls	10,000	10,000					APBD Kabupaten	DPRKP, Masyarakat
7		Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1051	KK	Pendampingan dan pelayanan informasi	Sosialisasi mengenai standar air minum	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, Dinkes, PDAM

NO	ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN DU TRATEGI			PROGRAM	KEGIATAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp.x 1000)	Total Harga Rp.x 1000	Tahun				Sumber Pendanaan	Pelaku
											I	II	III	IV		
	Kondisi Penyediaan				standar kelayakan air minum	yang layak digunakan dan dimanfaatkan										
8	Air Minum	Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	1194	KK	Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat pelayanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, Dinkes, PDAM
9						Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum	1	ls	50,000	50,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, Dinkes, PDAM
10	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	23	Ha	Edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara drainase dengan baik	Sosialisasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP
11		Kualitas Konstruksi Drainase	15834	Meter	Pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara (KPP) infrastruktur drainase	Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur drainase	1	ls	5,000	5,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, Masyarakat
12						Melakukan penjadwalan pemeliharaan infrastruktur drainase dengan Kerja Bakti	1	ls	10,000	10,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, Masyarakat

NO	ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN DU TRATEGI			PROGRAM	KEGIATAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp.x 1000)	Total Harga Rp.x 1000	Tahun				Sumber Pendanaan	Pelaku
											I	II	III	IV		
13	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai Standar Teknis	95	KK	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk tidak BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, Dinkes
14		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan persayaratan teknis	716	KK		Sosialiasai Pentingnya memiliki jamban sehat	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, Dinkes
15	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan tidak sesuai dengan persayaratan teknis	2573	KK	Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Infrastruktur Persampahan	Sosialisasi Pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, DLH
16		Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Standar Teknis	2382	KK	Pembentukan Kelompok Mandiri Sampah	Inisiasi kegiatan Bank Sampah	1	ls	30,000	30,000					APBD Kabupaten, CSR	Bappeda, DPRKP, DLH, Swasta, Masyarakat
17						Inisiasi kegiatan Daur Ulang sampah menjadi Kerajinan dan Pupuk Organik	1	ls	100,000	100,000					APBD Kabupaten, CSR	Bappeda, DPRKP, DLH, Swasta, Masyarakat
18						Pengelolaan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga (Jadwal Pengangkutan & Iuran)	1	ls	10,000	10,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, DLH, Masyarakat

NO	ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN DU TRATEGI			PROGRAM	KEGIATAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun				Sumber Pendanaan	Pelaku
											I	II	III	IV		
19	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	1816	Unit	Pembentukan kelembagaan untuk pencegahan bencana kebakaran	Sosialisasi dan simulasi mitigasi kebakaran	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten	Bappeda, DPRKP, BPBD
20						Mitigasi pra bencana	1	ls	50,000	50,000					APBD Kabupaten, CSR	Bappeda, DPRKP, BPBD, Swasta, Masyarakat
21		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	3416	Unit		Sosialisasi penggunaan alat pemadam kebakaran sederhana	1	ls	20,000	20,000					APBD Kabupaten, CSR	Bappeda, DPRKP, BPBD, Swasta, Masyarakat

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

6.3 Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Memorandum keterpaduan program skala kabupaten/kota dan skala kawasan disususn berdasarkan pada hasil perumusan kebutuhan pencegahan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan juga penerjemahan dari rencana penanganan kawasan permukiman prioritas yang telah disusun pada tahap sebelumnya ke dalam bentuk rancangan/desain teknis untuk diimplementasikan.

Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI. 7 Memorandum Program Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Perkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Aspek Keterpaduan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Biaya (Rp x 1000)				Sumber Pendanaan				Penanggung Jawab
								2021	2022	2023	2024	APBD	APBD Prov	APBD Kab	Lainnya	
SKALA KOTA																

Aspek Kelembagaan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (dalam Rp.000)	Total Biaya (Rp.x 1000)	Indikasi Kebutuhan Biaya (Rp.x 1000)				Sumber Pembiayaan				Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
Bangunan Gedung	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Pengawasan, pengamanan, dan pengaturan pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana longsor	17 desa/ kelurahan	17	ls	100,000	1,700,000	350,000	350,000	350,000	650,000			1,700,000		Bappeda, DPRKP, BPBD, BPN
		Mitigasi pra bencana	17 desa/ kelurahan	17	ls	100,000	1,700,000	350,000	350,000	350,000	650,000			1,500,000	200,000	Bappeda, DPRKP, BPBD, Swasta, Masyarakat
		Sosialisasi bahaya yang akan terjadi	17 desa/ kelurahan	17	ls	20,000	340,000	200,000	140,000					340,000		Bappeda, DPRKP, BPBD
	Pengawasan kesesuaian peruntukan lahan bantaran sungai, lahan ilegal, kawasan rawan bencana	Penyusunan Peraturan Zonasi	17 desa/ kelurahan	1	ls	250,000	250,000		150,000	100,000				250,000		Bappeda, DPRKP
		Pengendalian pertumbuhan pembanguan perumahan baru di kawasan bantaran sungai, lahan ilegal, dan rawan bencana	17 desa/ kelurahan	17	ls	100,000	1,700,000	350,000	350,000	350,000	650,000			1,700,000		Bappeda, DPRKP, BPBD

Aspek Kekumuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (ribu Rp)	Total Biaya (ribu Rp)	Indikasi Kebutuhan Biaya (ribu Rp)				Sumber Pembiayaan				Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
	Public campaign mengenai pentingnya mendirikan permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya , yaitu di peruntukan kawasan permukiman	17 desa/ kelurahan	17	ls	50,000	850,000	500,000	350,000					850,000		Bappeda, DPRKP, BPN
	Public campaign mengenai pentingnya rumah layak huni	Sosialisasi pentingnya rumah layak huni	17 desa/ kelurahan	17	ls	50,000	850,000	500,000	350,000					850,000		Bappeda, DPRKP
		Sosialisasi pentingnya IMB	17 desa/ kelurahan	17	ls	50,000	850,000	500,000	350,000					850,000		Bappeda, DPRKP, BPN
Air Minum	Pendampingan dan pelayanan informasi standar kelayakan air minum	Sosialisasi mengenai standar air minum yang layak digunakan dan dimanfaatkan	17 desa/ kelurahan	17	ls	50,000	850,000	500,000	350,000					850,000		Bappeda, DPRKP, Dinkes, PDAM
Drainase	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi jaringan drainase pada kawasan rawan bencana banjir	17 desa/ kelurahan	17	ls	200,000	3,400,000	700,000	700,000	700,000	1.300,000			3,400,000		DPRKP, Masyarakat

Aspek Pelayanan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (ribu rupiah)	Total Biaya (ribu rupiah)	Indikasi Kebutuhan Biaya (ribu rupiah)				Sumber Pembiayaan				Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
	Pengawasan dan pengendalian dengan memantau garis sempadan bangunan yang berada di atas saluran drainase	Pemantauan terhadap bangunan yang berada di atas saluran drainase	17 desa/ kelurahan	17	ls	300,000	5,100,000	1,100,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000			5,100,000		Bappeda, DPRKP, BPN
	Pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara (KPP) infrastruktur drainase	Sosialisasi Pentingnya membuang sampah pada tempatnya	17 desa/ kelurahan	17	ls	50,000	850,000	500,000	350,000					850,000		Bappeda, DPRKP
Air Limbah	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk tidak BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	17 desa/ kelurahan	17	ls	50,000	850,000	500,000	350,000					850,000		Bappeda, DPRKP, Dinkes
		Sosialiasai Pentingnya memiliki jamban sehat	17 desa/ kelurahan	17	ls	50,000	850,000	500,000	350,000					850,000		Bappeda, DPRKP, Dinkes

Aspek Kekumuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (ribu rupiah)	Total Biaya (ribu rupiah)	Indikasi Kebutuhan Biaya (Rp x 1000)				Sumber Pembiayaan				Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
Persampahan	Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Infrastruktur Persampahan	Sosialisasi Pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga	17 desa/ kelurahan	17	ls	50,000	850,000	500,000	350,000					850,000		Bappeda, DPRKP, DLH
	Pembentukan Kelompok Mandiri Sampah	Inisiasi kegiatan Bank Sampah	17 desa/ kelurahan	17	ls	150,000	2,550,000		650,000	650,000	1,250,000			2,250,000	300,000	Bappeda, DPRKP, DLH, Swasta, Masyarakat
		Inisiasi kegiatan Daur Ulang sampah menjadi Kerajinan dan Pupuk Organik	17 desa/ kelurahan	17	ls	100,000	1,700,000		500,000	400,000	800,000			1,500,000	200,000	Bappeda, DPRKP, DLH, Swasta, Masyarakat
Proteksi Kebakaran	Pembentukan kelembagaan untuk pencegahan bencana kebakaran	Sosialisasi dan simulasi mitigasi kebakaran	17 desa/ kelurahan	17	ls	50,000	850,000	500,000	350,000					850,000		Bappeda, DPRKP, BPBD
		Mitigasi pra bencana	17 desa/ kelurahan	17	ls	100,000	1,700,000	350,000	350,000	350,000	650,000			1,500,000	200,000	Bappeda, DPRKP, BPBD, Swasta, Masyarakat

Aspek Kekumuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Biaya (Rp x 1000)				Sumber Pendanaan				Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
SKALA KAWASAN (KAWASAN PURWODADI 1)																
Kondisi Bangunan Gedung	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Mitigasi pra bencana	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	50,000	50,000	10,000	10,000	10,000	20,000			40,000	10,000	Bappeda, DPRKP, BPBD, Swasta, Masyarakat
	Public campaign mengenai pentingnya mendirikan permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya , yaitu di peruntukan kawasan permukiman	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP, BPN
	Public campaign mengenai pentingnya rumah layak huni	Sosialisasi pentingnya rumah layak huni	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP
		Sosialisasi pentingnya IMB	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP, BPN
Kondisi Jalan Lingkungan	Pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan	Membuat aturan bersama terkait pengelolaan	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000	2,000			5,000		DPRKP, Masyarakat

Aspek Kekumuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (ribu Rp)	Total Biaya (ribu Rp)	Indikasi Kebutuhan Biaya (ribu Rp)				Sumber Pembiayaan				Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
	Pemeliharaan (KPP) infrastruktur jalan	infrastruktur jalan														
		Melakukan penjadwalan pemeliharaan infrastruktur jalan dengan Kerja Bakti	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	4,000			10,000		DPRKP, Masyarakat
Kondisi Penyediaan Air Minum	Pendampingan dan pelayanan informasi standar kelayakan air minum	Sosialisasi mengenai standar air minum yang layak digunakan dan dimanfaatkan	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP, Dinkes, PDAM
	Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat pelayanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP, Dinkes, PDAM
		Membuat aturan bersama terkait	Kel. Purwoda	1	ls	50,000	50,000	10,000	10,000	10,000	20,000			50,000		Bappeda, DPRKP,

Aspek Kekumuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (ribu Rp)	Total Biaya (ribu Rp)	Indikasi Kebutuhan Biaya (Rp x 1000)				Sumber Pembiayaan				Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
		pengelolaan infrastruktur air minum	di & Kel. Kuripan													Dinkes, PDAM
Kondisi Drainase Lingkungan	Edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara drainase dengan baik	Sosialisasi pentingnya membuang sampah pada tempatnya	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP
	Pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara (KPP) infrastruktur drainase	Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur drainase	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000	2,000			5,000		Bappeda, DPRKP, Masyarakat
		Melakukan penjadwalan pemeliharaan infrastruktur drainase dengan Kerja Bakti	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	4,000			10,000		Bappeda, DPRKP, Masyarakat
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal	Sosialisasi untuk tidak BABS (Buang Air	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP, Dinkes

Aspek Kekumuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (ribu rupiah)	Total Biaya (ribu rupiah)	Indikasi Kebutuhan Biaya (Rp x 1000)				Sumber Pembiayaan				Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
	maupun Terpusat	Besar Sembarangan)														
		Sosialiasai Pentingnya memiliki jamban sehat	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP, Dinkes
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Infrastruktur Persampahan	Sosialisasi Pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP, DLH
	Pembentukan Kelompok Mandiri Sampah	Inisiasi kegiatan Bank Sampah	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	30,000	30,000		7,500	7,500	15,000			20,000	10,000	Bappeda, DPRKP, DLH, Swasta, Masyarakat
		Inisiasi kegiatan Daur Ulang sampah menjadi Kerajinan dan Pupuk Organik	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	100,000	100,000		25,000	25,000	50,000			80,000	20,000	Bappeda, DPRKP, DLH, Swasta, Masyarakat

Aspek Rekomendasi	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (dalam ribuan)	Total Biaya (dalam ribuan)	Indikasi Kebutuhan Biaya (Rp x 1000)				Sumber Pendanaan				Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
		Pengelolaan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga (Jadwal Pengangkutan & Iuran)	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	10,000	10,000		2,500	2,500	5,000			10,000		Bappeda, DPRKP, DLH, Masyarakat
Kondisi Proteksi Kebakaran	Pembentukan kelembagaan untuk pencegahan bencana kebakaran	Sosialisasi dan simulasi mitigasi kebakaran	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP, BPBD
		Mitigasi pra bencana	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	50,000	50,000	10,000	10,000	10,000	20,000			40,000	10,000	Bappeda, DPRKP, BPBD, Swasta, Masyarakat
		Sosialisasi penggunaan alat pemadam kebakaran sederhana	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					15,000	5,000	Bappeda, DPRKP, BPBD, Swasta, Masyarakat
SKALA KAWASAN (KAWASAN PURWODADI 2)																
Kondisi Bangunan Gedung	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Mitigasi pra bencana	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	50,000	50,000	10,000	10,000	10,000	20,000			40,000	10,000	Bappeda, DPRKP, BPBD, Swasta, Masyarakat

Aspek Kekumuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (ribu Rp)	Total Biaya (ribu Rp)	Indikasi Kebutuhan Biaya (ribu Rp)				Sumber Pembiayaan				Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
	Public campaign mengenai pentingnya mendirikan permukiman di kawasan yang sesuai dengan peruntukannya	Sosialisasi Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya, yaitu di peruntukan kawasan permukiman	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP, BPN
	Public campaign mengenai pentingnya rumah layak huni	Sosialisasi pentingnya rumah layak huni	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP
		Sosialisasi pentingnya IMB	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP, BPN
Kondisi Jalan Lingkungan	Pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) infrastruktur jalan	Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur jalan	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000	2,000			5,000		DPRKP, Masyarakat
		Melakukan penjadwalan pemeliharaan infrastruktur	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	4,000			10,000		DPRKP, Masyarakat

Aspek Kekumuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (ribu Rp)	Total Biaya (ribu Rp)	Indikasi Kebutuhan Biaya (ribu Rp)				Sumber Pembiayaan				Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
		jalan dengan Kerja Bakti														
Kondisi Penyediaan Air Minum	Pendampingan dan pelayanan informasi standar kelayakan air minum	Sosialisasi mengenai standar air minum yang layak digunakan dan dimanfaatkan	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP, Dinkes, PDAM
	Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat pelayanan air minum Non PDAM untuk melakukan koordinasi dan pengelolaan air minum	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP, Dinkes, PDAM
		Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur air minum	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	50,000	50,000	10,000	10,000	10,000	20,000			50,000		Bappeda, DPRKP, Dinkes, PDAM
Kondisi Drainase	Edukasi kepada masyarakat	Sosialisasi pentingnya membuang	Kel. Purwoda	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP

Aspek Kekumuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (ribu rupiah)	Total Biaya (ribu rupiah)	Indikasi Kebutuhan Biaya (ribu rupiah)				Sumber Pembiayaan				Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
Lingkungan	untuk memanfaatkan dan memelihara drainase dengan baik	sampah pada tempatnya	di & Kel. Kalongan													
	Pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara (KPP) infrastruktur drainase	Membuat aturan bersama terkait pengelolaan infrastruktur drainase	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000	2,000			5,000		Bappeda, DPRKP, Masyarakat
		Melakukan penjadwalan pemeliharaan infrastruktur drainase dengan Kerja Bakti	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	4,000			10,000		Bappeda, DPRKP, Masyarakat
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal maupun Terpusat	Sosialisasi untuk tidak BABS (Buang Air Besar Sembarangan)	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP, Dinkes
		Sosialiasai Pentingnya memiliki jamban sehat	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP, Dinkes

Aspek Pengembangan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (ribu Rp)	Total Biaya (ribu Rp)	Indikasi Kebutuhan Biaya (ribu Rp)				Sumber Pembiayaan				Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Infrastruktur Persampahan	Sosialisasi Pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP, DLH
	Pembentukan Kelompok Mandiri Sampah	Inisiasi kegiatan Bank Sampah	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	30,000	30,000		7,500	7,500	15,000			20,000	10,000	Bappeda, DPRKP, DLH, Swasta, Masyarakat
		Inisiasi kegiatan Daur Ulang sampah menjadi Kerajinan dan Pupuk Organik	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	100,000	100,000		25,000	25,000	50,000			80,000	20,000	Bappeda, DPRKP, DLH, Swasta, Masyarakat
		Pengelolaan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga (Jadwal Pengangkutan & Iuran)	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	10,000	10,000		2,500	2,500	5,000			10,000		Bappeda, DPRKP, DLH, Masyarakat

Aspek Kelembahan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (ribu Rp)	Total Biaya (ribu Rp)	Indikasi Kebutuhan Biaya (ribu Rp)				Sumber Pembiayaan				Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
Kondisi Proteksi Kebakaran	Pembentukan kelembagaan untuk pencegahan bencana kebakaran	Sosialisasi dan simulasi mitigasi kebakaran	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					20,000		Bappeda, DPRKP, BPBD
		Mitigasi pra bencana	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	50,000	50,000	10,000	10,000	10,000	20,000			40,000	10,000	Bappeda, DPRKP, BPBD, Swasta, Masyarakat
		Sosialisasi penggunaan alat pemadam kebakaran sederhana	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	20,000	20,000	10,000	10,000					15,000	5,000	Bappeda, DPRKP, BPBD, Swasta, Masyarakat

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

BAB

7

RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

7.1 Program Dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota di Kabupaten Grobogan dirumuskan berdasarkan konsep dan strategi untuk menangani permasalahan kekumuhan. Konsep peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kota di Kabupaten Grobogan berupa pemugaran dan peremajaan.

Secara umum, program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan dilakukan dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh beserta infrastrukturnya. Namun di beberapa kasus, disusun kegiatan pembangunan baru untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman.

Matriks program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kota di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VII. 1 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kota Kabupaten Grobogan

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
		KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
1	Munculnya kantong kekumuhan di perkotaan maupun perdesaan akibat ketidakteraturan bangunan	Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan	Pemugaran permukiman kumuh	Melakukan penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan	Penataan muka bangunan bantaran/ kawasan ilegal	Penataan garis sempadan bangunan
					Pengelolaan kawasan sekitar sungai	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar sungai
						Penataan kawasan sekitar sungai
						Penertiban bangunan di sekitar sungai
				Meningkatkan kualitas permukiman kumuh	Pengembangan kawasan permukiman	Penataan kawasan permukiman padat dan kumuh
						Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
2	Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni	Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis	Pemugaran rumah tidak layak huni	Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni di permukiman kumuh	Peningkatan kualitas bangunan rumah	Pengembangan Rumah Layak Huni
						Peningkatan kualitas RTLH
3	Belum optimalnya penyelenggaraan jalan di Kabupaten Grobogan	Pembangunan jalan lingkungan baru	Pemugaran jalan	Meningkatkan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru
		Perbaikan kualitas jalan rusak			Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan jalan rusak (berlubang/bergelombang/tergenang)

NO	KONDISI FACTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN				
		PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
		KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
				Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai standar teknis		Pembangunan dan peningkatan jalan dilengkapi drainase pada sisi kanan-kiri jalan
4	Cakupan pelayanan air minum belum optimal	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih	Pemugaran	Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum
					Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perpipaan dan non perpipaan	Pembangunan SIPAS (Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana)
						Pembuatan Hidran Umum
5	Masih rendahnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	Pemugaran	Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Perbaikan struktur drainase
						Penggantian komponen gorong-gorong
		Penataan jaringan drainase agar terhubung dengan hirarki di atasnya		Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase	Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Peningkatan kapasitas volume drainase
						Menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung.
						Normalisasi Sungai

NO	KONDISI FACTUAL DAN ISU STRATEGIS	KEBUTUHAN PENANGANAN				
		PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
		KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
6	Belum seluruh rumah tangga terlayani sanitasi dan memiliki sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis	Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga	Pemugaran	Peningkatan jangkauan pelayanan air limbah	Peningkatan cakupan pelayanan air limbah	Pembangunan jamban Rumah Tangga
		Pengembangan sarana prasarana air limbah sesuai standar teknis		Peningkatan kualitas sarana prasarana air limbah		Pembangunan septic tank komunal
						Pembangunan MCK Umum
7	Belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana persampahan	Pemugaran	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga
				Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah.		Pengadaan Motor Sampah/ Armada Pengangkutan Sampah
						Pembangunan TPS/ TPS 3R
8	Belum terpenuhinya cakupan pelayanan bencana kebakaran	Peningkatan akses dan sarana prasarana proteksi kebakaran	Pemugaran	Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana	Peningkatan cakupan pelayanan proteksi kebakaran	Peningkatan akses motor/mobil pemadam kebakaran
						Penyediaan alat pemadam api sederhana

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

7.2 Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas

Program dan kegiatan kawasan prioritas diperlukan dalam penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar kekumuhan dapat tertangani secara komprehensif. Perumusan program dan kegiatan skala kawasan di Kabupaten Grobogan terdapat di Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan) dan Kawasan Purwodadi 2 (Purwodadi – Kalongan). Perumusan program dan kegiatan skala kawasan dilakukan sesuai dengan identifikasi permasalahan aspek kekumuhan di masing-masing kawasan. Khusus untuk Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan) sesuai masukan pada FGD akan dikembangkan terintegrasi dengan pengembangan wisata.

Program dan kegiatan skala kawasan yang dilakukan di Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan) dan Kawasan Purwodadi 2 (Purwodadi – Kalongan) mengutamakan peningkatan kualitas sarana prasarana dasar dengan melakukan perbaikan infrastruktur yang sudah ada. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang belum terpenuhi, dilakukan pembangunan baru seperti pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan. Kemudian untuk sarana prasarana yang tersistem, dilakukan upaya integrasi agar kebutuhan infrastruktur berjalan sebagaimana mestinya. Pada Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan) pengembangannya terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan wisata yaitu wisata religi Getas Pendowo dan wisata tepi Sungai Lusi. Beberapa kebutuhan pengembangan wisata tersebut antara lain : pembangunan RTH, peningkatan dan pembangunan jalan inspeksi, pembangunan tanggul sungai, dan pembangunan drainase.

Program dan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kabupaten Purwodadi dapat dilihat pada tabel berikut:

TAMBAHKAN LOKASI GETAS PENDOWO TERKAIT DENGAN WISATA RELIGI.

Tabel VII. 2 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan di Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan)

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	343	Unit	Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan	Pemugaran	Melakukan penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan	Penataan muka bangunan bantaran/ kawasan ilegal	Penataan garis sempadan bangunan
							Pengelolaan kawasan sekitar sungai	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar sungai
								Penataan kawasan sekitar sungai

ASPEK YANG DINILAI	KONDISI FAKTUAL DAN GU TEATEGI			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
								Penertiban bangunan di sekitar sungai
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	157	Unit	Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis		Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni di permukiman kumuh	Pengembangan kawasan permukiman	Pengembangan Rumah Layak Huni
								Peningkatan kualitas RTLH
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	1310	Meter	Pembangunan jalan lingkungan baru	Pemugaran	Meningkatkan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru
	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	5292	Meter	Peningkatan kualitas jalan lingkungan		Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai standar teknis	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan jalan rusak (berlubang/bergelombang/tergenang)
								Pembangunan dan peningkatan jalan dilengkapi drainase pada sisi kanan-kiri jalan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	138	KK	Peningkatan pelayanan akses aman air minum	Pemugaran	Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum
	Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	39	KK	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih			Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perpipaan dan non perpipaan	Pembangunan SIPAS (Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana)
								Pembuatan Hidran Umum
		2	Ha	Peningkatan kapasitas volume drainase	Pemugaran	Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk		Perbaikan struktur drainase

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN GU TEATEGI			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air			Penataan drainase lingkungan agar terhubung dengan hirarki drainase di atasnya		mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Penggantian komponen gorong-gorong
								Menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum terhubung
								Peningkatan kapasitas volume drainase
	Ketidaktersediaan Drainase	3212	Meter	Penataan drainase lingkungan agar terhubung dengan hirarki drainase di atasnya		Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase	Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Pembangunan saluran drainase lingkungan baru
	Kualitas Konstruksi Drainase	977	Meter	Perbaikan dan peningkatan kualitas drainase lingkungan		Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Perbaikan struktur drainase
								Penggantian komponen gorong-gorong
								Menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum terhubung
								Peningkatan kapasitas volume drainase
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai Standar Teknis	23	KK	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah sesuai standar teknis	Pemugaran	Peningkatan Jangkauan pelayanan air limbah	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sarana prasarana air limbah	Pembangunan Jamban Rumah Tangga
								Pembangunan septic tank komunal

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN GU TEATEGI			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan persayaratan teknis	83	KK	Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga		Peningkatan kualitas sarana prasarana air limbah		
				Peningkatan kualitas prasarana pengelolaan air limbah sesuai standar teknis				Pembangunan MCK Umum
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan tidak sesuai dengan persayaratan teknis	71	KK	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis	Pemugaran	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan persampahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan	Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga
								Pengadaan Motor Sampah/ Armada Pengangkutan Sampah
	Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Standar Teknis	284	KK	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai standar teknis		Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah.		Pembangunan TPS/ TPS 3R
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	352	Unit	Peningkatan prasarana proteksi kebakaran	Pemugaran	Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana	Peningkatan cakupan pelayanan proteksi kebakaran	Peningkatan akses motor/mobil pemadam kebakaran
								Penyediaan alat pemadam api ringan
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	651	Unit	Peningkatan ketersediaan sarana proteksi kebakaran				Penyediaan alat pemadam api sederhana

ASPEK YANG DIMAATI	KONDISI FAKTUAL DAN GU TEATEGI			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
Pengembangan Wisata	RTH	1	lokasi	Pembangunan RTH Publik	Pemugaran	Peningkatan penyediaan RTH publik	Pengembangan RTH Publik	Pembangunan RTH publik
	Jalan	1500	Meter	Pembangunan Jalan Inspeksi		peningkatan cakupan pelayanan jalan inspeksi	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru
	Drainase	1500	Meter	Pembangunan drainase di sepanjang jalan inspeksi yang terhubung dengan sistem drainase kota		Peningkatan cakupan pelayanan jaringan drainase	Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Pembangunan saluran drainase lingkungan baru di sepanjang jalan inspeksi
	Tanggul sungai	1500	Meter	Pembangunan tanggul Sungai Lusi		Peningkatan keandalan dan keamanan sempadan Sungai	Pengembangan bangunan pengaman sempadan sungai	Pembangunan tanggul Sungai Lusi

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

Tabel VII. 3 Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan di Kawasan Purwodadi 2 (Purwodadi – Kalongan)

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	2075	Unit	Penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan	Pemugaran	Melakukan penataan kawasan kumuh dengan ketidakteraturan bangunan	Penataan muka bangunan bantaran/ kawasan ilegal	Penataan garis sempadan bangunan
							Pengelolaan kawasan sekitar sungai	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar sungai
								Penataan kawasan sekitar sungai
								Penertiban bangunan di sekitar sungai
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	1169	Unit	Peningkatan kualitas bangunan dengan fasilitasi pembagunan sesuai standar teknis		Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni di permukiman kumuh	Pengembangan kawasan permukiman	Pengembangan Rumah Layak Huni
								Peningkatan kualitas RTLH
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	13738	Meter	Pembangunan jalan lingkungan baru	Pemugaran	Meningkatkan cakupan pelayanan jalan lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru
	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	26991	Meter	Peningkatan kualitas jalan lingkungan		Meningkatkan kualitas jalan lingkungan sesuai standar teknis	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan jalan rusak (berlubang/bergelombang/tergenang)
								Pembangunan dan peningkatan jalan dilengkapi drainase pada sisi kanan-kiri jalan

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1051	KK	Peningkatan pelayanan akses aman air minum	Pemugaran	Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum
	Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	1194	KK	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih			Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perpipaan dan non perpipaan	Pembangunan SIPAS (Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana)
								Pembuatan Hidran Umum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	23	Ha	Penyusunan Masterplan Drainas	Pemugaran	Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Perbaikan struktur drainase
				Penataan drainase lingkungan agar terhubung dengan hirarki drainase di atasnya				Penggantian komponen gorong-gorong
	Ketidaktersediaan Drainase	21356	Meter					Menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum terhubung
	Kualitas Konstruksi Drainase	15834	Meter					Peningkatan kapasitas volume drainase
				Penataan drainase lingkungan agar terhubung dengan hirarki drainase di atasnya		Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase	Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Pembangunan saluran drainase lingkungan baru
				Perbaikan dan peningkatan kualitas drainase lingkungan		Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Perbaikan struktur drainase
								Penggantian komponen gorong-gorong

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI AKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
						kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/ disediakan		Menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum terhubung
								Peningkatan kapasitas volume drainase
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak Sesuai Standar Teknis	95	KK	Pengembangan sistem pengelolaan air limbah sesuai standar teknis	Pemugaran	Peningkatan jangkauan pelayanan air limbah	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sarana prasarana air limbah	Pembangunan jamban Rumah Tangga
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan persayaratan teknis	716	KK	Peningkatan cakupan pelayanan air limbah rumah tangga				Pembangunan septic tank komunal
				Peningkatan kualitas prasarana pengelolaan air limbah sesuai standar teknis		Peningkatan kualitas sarana prasarana air limbah		Pembangunan MCK Umum
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan tidak sesuai dengan persayaratan teknis	2573	KK	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis	Pemugaran	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan persampahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan	Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga
								Pengadaan Motor Sampah/ Armada Pengangkutan Sampah

ASPEK YANG DIAMATI	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS			KEBUTUHAN PENANGANAN				
				PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH				
				KEBUTUHAN PENANGANAN	KONSEP	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN
	Sistem Pengelolaan Persampahan tidak Sesuai Standar Teknis	2382	KK	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan persampahan sesuai standar teknis		Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah.		Pembangunan TPS/ TPS 3R
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	1816	Unit	Peningkatan prasarana proteksi kebakaran	Pemugaran	Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana	Peningkatan cakupan pelayanan proteksi kebakaran	Peningkatan akses motor/mobil pemadam kebakaran
								Penyediaan alat pemadam api ringan
	Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	3416	Unit	Peningkatan ketersediaan sarana proteksi kebakaran				Penyediaan alat pemadam api sederhana

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

7.3 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Rencana Aksi program peningkatas kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berisi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Penyusunan rencana aksi membutuhkan peran aktif berbagai *stakeholder* untuk mencapai penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam rencana aksi juga dijabarkan menegai kebutuhan biaya, rencana tahun pelaksanaan, sumber pendanaan, dan pelaku dalan program dan kegiatan.

Rencana aksi program peningkatas kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VII. 4 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kota Kabupaten Grobogan

NO.	ASPEK KEKUMUHAN	PROGRAM	KEGIATAN	Vol	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun				Sumber Pembiayaan	Pelaku
								I	II	III	IV		
1	Bangunan Gedung	Penataan muka bangunan bantaran/ kawasan ilegal	Penataan garis sempadan bangunan	17	ls	1,000,000	17,000,000					APBD Kabupaten	DPRKP, BPBD, BPN
2		Pengelolaan kawasan sekitar sungai	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar sungai	17	ls	1,000,000	17,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPU
3			Penataan kawasan sekitar sungai	17	ls	1,000,000	17,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPU
4			Penertiban bangunan di sekitar sungai	17	ls	1,000,000	17,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPU
5		Pengembangan kawasan permukiman	Penataan kawasan permukiman padat dan kumuh	17	ls	1,000,000	17,000,000					APBN, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, DPRKP
6			Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	17	ls	1,000,000	17,000,000					APBN, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, DPRKP

NO	ASPEK KEWENANGAN	PROGRAM	KEGIATAN	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun				Sumber Pendanaan	Pelaku
								I	II	III	IV		
7		Peningkatan kualitas bangunan rumah	Pengembangan Rumah Layak Huni	1,000	Unit	17,500	17,500,000					APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP
8			Peningkatan kualitas RTLH	1,000	Unit	17,500	17,500,000					APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP
9	Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru	1,000	m	1,000	1,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
10		Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan jalan rusak (berlubang/bergelombang/tergenang)	5,000	m	1,000	5,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
11			Pembangunan dan peningkatan jalan dilengkapi drainase pada sisi kanan-kiri jalan	3,000	m	1,000	3,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
12	Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	17	ls	200,000	3,400,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP

NO	ASPEK PENGEMBANGAN	PROGRAM	KEGIATAN	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun				Sumber Pendanaan	Pelaku
								I	II	III	IV		
13		Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perpipaan dan non perpipaan	Pembangunan SIPAS (Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana)	17	ls	150,000	2,550,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
14			Pembuatan Hidran Umum	17	ls	100,000	1,700,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
15	Drainase	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Perbaikan struktur drainase	1,000	m	1,000	1,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
16			Penggantian komponen gorong-gorong	500	m	1,000	500,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
17		Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Peningkatan kapasitas volume drainase	1,000	m	1,000	1,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
18			Menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung.	2,000	m	1,000	2,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
19			Normalisasi Sungai	17	ls	1,000,000	17,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
20	Air Limbah	Peningkatan cakupan pelayanan air limbah	Pembangunan jamban Rumah Tangga	17	ls	750	12,750					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP

NO	ASPEK KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun				Sumber Pendanaan	Pelaku
								I	II	III	IV		
21			Pembangunan septic tank komunal	17	Unit	300,000	5,100,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
22			Pembangunan MCK Umum	17	Unit	300,000	5,100,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
23	Persampahan	Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga	2,000	Unit	300	600,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
24			Pengadaan Motor Sampah/ Armada Pengangkutan Sampah	34	Unit	40,000	1,360,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
25			Pembangunan TPS/ TPS 3R	17	ls	1,000,000	17,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
26	Proteksi Kebakaran	Peningkatan cakupan pelayanan proteksi kebakaran	Peningkatan akses motor/mobil pemadam kebakaran	17	ls	300,000	5,100,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
27			Penyediaan alat pemadam api ringan	400	Unit	500	200,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP, Damkar

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

Rencana aksi program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VII. 5 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan di Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan)

NO	ASPEK YANG DIMASUKI	PROGRAM	KEGIATAN	VOL	SAT	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun				Sumber Pembiayaan	PIHAK
								I	II	III	IV		
1	Kondisi Bangunan Gedung	Pengembangan kawasan permukiman	Pengembangan Rumah Layak Huni	157	Unit	17,500	2,747,500					APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP
2			Peningkatan kualitas RTLH	157	Unit	17,500	2,747,500					APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP
3	Kondisi Jalan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru	1310	m	1,000	1,310,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
4		Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan jalan rusak (berlubang/bergelombang/tergenang)	5292	m	1,000	5,292,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
5			Pembangunan dan peningkatan jalan dilengkapi drainase pada sisi kanan-kiri jalan	5292	m	1,000	5,292,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
6	Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perpipaan dan non perpipaan	Pembangunan SIPAS (Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana)	1	Unit	150,000	150,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
7			Pembuatan Hidran Umum	2	Unit	100,000	200,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP

NO	ASPEK YANG DIMASUKI	PROGRAM	KEGIATAN	Vol	Sat	Harga Satuan (Juta RIDR)	Total Biaya (Rp. 1.000)	Tahun				Sumber Pendanaan	Pelaku
								I	II	III	IV		
8	Kondisi Drainase Lingkungan	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum terhubung	1	ls	2,000,000	2,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
9			Peningkatan kapasitas volume drainase	1	ls	2,000,000	2,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
10		Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Pembangunan saluran drainase lingkungan baru	3212	m	1,000	3,212,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
11		Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Perbaikan struktur drainase	977	m	1,000	977,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
12			Penggantian komponen gorong-gorong	977	m	1,000	977,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
13	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sarana prasarana air limbah	Pembangunan jamban Rumah Tangga	23	Unit	750	17,250					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
14			Pembangunan septic tank komunal	1	Unit	300,000	300,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
15			Pembangunan MCK Umum	3	Unit	300,000	900,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
16	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan	Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga	71	Unit	300	21,300					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
17			Pengadaan Motor Sampah/ Armada Pengangkutan Sampah	1	Unit	40,000	40,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
18			Pembangunan TPS/ TPS 3R	1	Unit	1,000,000	1,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
19	Kondisi Proteksi Kebakaran	Peningkatan cakupan pelayanan proteksi kebakaran	Penyediaan alat pemadam api ringan	7	Unit	500	3,500					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP, Damkar

NO	ASPEK YANG DIAMATI	PROGRAM	KEGIATAN	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun				Sumber Pendanaan	Pelaku
								I	II	III	IV		
20			Penyediaan alat pemadam api sederhana	6	Unit	50,000	300,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
21	Pengembangan Wisata	Pengembangan RTH Publik	Pembangunan RTH publik	1	lokasi	1.000.000	1.000.000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
22		Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru	1.500	mtr	1.000	1.500.000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
23		Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Pembangunan saluran drainase lingkungan baru di sepanjang jalan inspeksi	1.500	mtr	1.000	1.500.000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
24		Pengembangan bangunan pengaman sempadan sungai	Pembangunan tanggul Sungai Lusi	1.500	mtr	2.000	3.000.000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUPR

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

Rencana aksi program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kawasan di Kawasan Purwodadi 2 (Purwodadi – Kalongan) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VII. 6 Rencana Aksi Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan di Kawasan Purwodadi 2 (Purwodadi – Kalongan)

NO	ASPEK YANG DIAMATI	PROGRAM	KEGIATAN	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun				Sumber Pendanaan	Pelaku
								I	II	III	IV		
1	Kondisi Bangunan Gedung	Pengembangan kawasan permukiman	Pengembangan Rumah Layak Huni	1,169	Unit	17,500	20,457,500					APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementerian PUPR, Disperakim

NO.	ASPEK YANG DIAMATI	PROGRAM	KEGIATAN	Vol	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun				Sumber Pendanaan	Pelaku
								I	II	III	IV		
												Kabupaten, Swasta	Provinsi, DPRKP
2			Peningkatan kualitas RTLH	1,169	Unit	17,500	20,457,500					APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP
3	Kondisi Jalan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru	13,738	m	1,000	13,738,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
4		Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan jalan rusak (berlubang/bergelombang/tergenang)	26,991	m	1,000	26,991,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
5			Pembangunan dan peningkatan jalan dilengkapi drainase pada sisi kanan-kiri jalan	26,991	m	1,000	26,991,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
6	Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perpipaan dan non perpipaan	Pembangunan SIPAS (Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana)	5	Unit	150,000	750,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
7			Pembuatan Hidran Umum	50	Unit	100,000	5,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
8	Kondisi Drainase Lingkungan	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum terhubung	1	ls	5,000,000	5,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
9			Peningkatan kapasitas volume drainase	1	ls	5,000,000	5,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP

NO.	ASPEK YANG DIAMATI	PROGRAM	KEGIATAN	Vol	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun				Sumber Pendanaan	Pelaku
								I	II	III	IV		
10		Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Pembangunan saluran drainase lingkungan baru	21,356	m	1,000	21,356,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
11		Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Perbaikan struktur drainase	15,834	m	1,000	15,834,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
12			Penggantian komponen gorong-gorong	15,834	m	1,000	15,834,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
13	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sarana prasarana air limbah	Pembangunan jamban Rumah Tangga	95	Unit	750	71,250					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
14			Pembangunan septic tank komunal	20	Unit	300,000	6,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
15			Pembangunan MCK Umum	20	Unit	300,000	6,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
16	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan	Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga	2,573	Unit	300	771,900					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
17			Pengadaan Motor Sampah/ Armada Pengangkutan Sampah	5	Unit	40,000	200,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
18			Pembangunan TPS/ TPS 3R	2	Unit	1,000,000	2,000,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
19	Kondisi Proteksi Kebakaran	Peningkatan cakupan pelayanan proteksi kebakaran	Penyediaan alat pemadam api ringan	35	Unit	500	17,500					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP, Damkar
20			Penyediaan alat pemadam api sederhana	34	Unit	50,000	1,700,000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

7.4 Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Memorandum keterpaduan program skala kabupaten/kota dan skala kawasan disususn berdasarkan pada hasil perumusan kebutuhan pencegahan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dan juga penerjemahan dari rencana penanganan kawasan permukiman prioritas yang telah disusun pada tahap sebelumnya ke dalam bentuk rancangan/desain teknis untuk diimplementasikan.

Memorandum Program peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VII. 7 Memorandum Progam Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Grobogan

Aspek Kebutuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Indikasi Kebutuhan Biaya (Rp x 1000)				Sumber Pendanaan				Penanggung jawab
								2023	2024	2025	2026	APBD	APBD Prov	APBD Kab	Swasta	
SKALA KOTA																
Bangunan Gedung	Penataan muka bangunan bantaran/ kawasan ilegal	Penataan garis sempadan bangunan	17 desa/ kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000		6,000,000	6,000,000	5,000,000			17,000,000		DPRKP, BPBD, BPN
	Pengelolaan kawasan sekitar sungai	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar sungai	17 desa/ kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000		6,000,000	6,000,000	5,000,000	10,000,000		7,000,000		Kementerian PUPR, DPU
		Penataan kawasan sekitar sungai	17 desa/ kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000		6,000,000	6,000,000	5,000,000	10,000,000		7,000,000		Kementerian PUPR, DPU
		Penertiban bangunan di sekitar sungai	17 desa/ kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000		6,000,000	6,000,000	5,000,000	10,000,000		7,000,000		Kementerian PUPR, DPU

Aspek Kebutuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Rencana Kebutuhan Biaya (Rp x 1000)				Sumber Pembiayaan				Penanggung jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
	Pengembangan kawasan permukiman	Penataan kawasan permukiman padat dan kumuh	17 desa/ kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	6,500,000	8,000,000		5,000,000	4,000,000	Kementerian PUPR, DPRKP
		Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	17 desa/ kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	6,500,000	8,000,000		5,000,000	4,000,000	Kementerian PUPR, DPRKP
	Peningkatan kualitas bangunan rumah	Pengembangan Rumah Layak Huni	17 desa/ kelurahan	1,000	Unit	17,500	17,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	7,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,500,000	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP
		Peningkatan kualitas RTLH	17 desa/ kelurahan	1,000	Unit	17,500	17,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	7,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,500,000	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP
Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru	17 desa/ kelurahan	1,000	m	1,000	1,000,000	200,000	200,000	200,000	400,000	500,000		500,000		Kementerian PUPR, DPRKP
	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan jalan rusak (berlubang/bergelombang/tergenang)	17 desa/ kelurahan	5,000	m	1,000	5,000,000		1,250,000	1,250,000	2,500,000	2,000,000		3,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP

Aspek Kebutuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahapan Kebutuhan Biaya (Rp x 1000)				Sumber Pembiayaan				Penanggung jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
		Pembangunan dan peningkatan jalan dilengkapi drainase pada sisi kanan-kiri jalan	17 desa/ kelurahan	3,000	m	1,000	3,000,000		750,000	750,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000		Kementerian PUPR, DPRKP
Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	17 desa/ kelurahan	17	ls	200,000	3,400,000			1,200,000	2,200,000	2,000,000		1,400,000		Kementerian PUPR, DPRKP
	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perpipaan dan non perpipaan	Pembangunan SIPAS (Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana)	17 desa/ kelurahan	17	ls	150,000	2,550,000	1,550,000	1,000,000			1,550,000		1,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP
		Pembuatan Hidran Umum	17 desa/ kelurahan	17	ls	100,000	1,700,000	1,000,000	700,000			1,000,000		700,000		Kementerian PUPR, DPRKP
Drainase	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Perbaikan struktur drainase	17 desa/ kelurahan	1,000	m	1,000	1,000,000		250,000	250,000	500,000	600,000		400,000		Kementerian PUPR, DPRKP
		Penggantian komponen gorong-gorong	17 desa/ kelurahan	500	m	1,000	500,000		125,000	125,000	250,000	250,000		250,000		Kementerian PUPR, DPRKP
	Pengembangan sistem drainase	Peningkatan kapasitas volume drainase	17 desa/ kelurahan	1,000	m	1,000	1,000,000		250,000	250,000	500,000	600,000		400,000		Kementerian PUPR, DPRKP

Aspek Kebutuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 1.000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahapan Kebutuhan Biaya (Rp x 1000)				Sumber Pembiayaan				Penanggung jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
	yang terintegrasi dengan baik	Menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung.	17 desa/ kelurahan	2,000	m	1,000	2,000,000	400,000	400,000	400,000	800,000	1,000,000		1,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP
		Normalisasi Sungai	17 desa/ kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000	6,000,000	6,000,000	5,000,000		10,000,000		7,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP
Air Limbah	Peningkatan cakupan pelayanan air limbah	Pembangunan jamban Rumah Tangga	17 desa/ kelurahan	17	ls	750	12,750			4,500	8,250	6,000		6,750		Kementerian PUPR, DPRKP
		Pembangunan septic tank komunal	17 desa/ kelurahan	17	Unit	300,000	5,100,000		1,700,000	1,700,000	1,700,000	3,000,000		2,100,000		Kementerian PUPR, DPRKP
		Pembangunan MCK Umum	17 desa/ kelurahan	17	Unit	300,000	5,100,000		1,700,000	1,700,000	1,700,000	3,000,000		2,100,000		Kementerian PUPR, DPRKP
Persampahan	Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga	17 desa/ kelurahan	2,000	Unit	300	600,000		150,000	150,000	300,000	300,000		300,000		Kementerian PUPR, DPRKP
		Pengadaan Motor Sampah/ Armada Pengangkutan Sampah	17 desa/ kelurahan	34	Unit	40,000	1,360,000		700,000	660,000		700,000		660,000		Kementerian PUPR, DPRKP
		Pembangunan TPS/ TPS 3R	17 desa/ kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000		10,000,000	7,000,000		10,000,000		7,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP
Proteksi Kebakaran	Peningkatan cakupan pelayanan	Peningkatan akses motor/mobil	17 desa/ kelurahan	17	ls	300,000	5,100,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000		3,000,000		2,100,000		Kementerian PUPR, DPRKP

Aspek Kebutuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga satuan (Rp x 1.000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Rencana Kebutuhan Biaya (Rp x 1000)				Sumber Pembiayaan				Penanggung jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
	proteksi kebakaran	pemadam kebakaran														
		Penyediaan alat pemadam api ringan	17 desa/ kelurahan	400	Unit	500	200,000			70,000	130,000	100,000		100,000		Kementerian PUPR, DPRKP, Damkar
SKALA KAWASAN (KAWASAN PURWODADI 1)																
Kondisi Bangunan Gedung	Pengembangan kawasan permukiman	Pengembangan Rumah Layak Huni	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	157	Unit	17,500	2,747,500	549,500	549,500	549,500	1,099,000	700,000	700,000	700,000	647,500	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP
		Peningkatan kualitas RTLH	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	157	Unit	17,500	2,747,500	549,500	549,500	549,500	1,099,000	700,000	700,000	700,000	647,500	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP
Kondisi Jalan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1310	m	1,000	1,310,000	262,000	262,000	262,000	524,000	700,000		610,000		Kementerian PUPR, DPRKP
	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan jalan rusak (berlubang/bergelombang/tergenang)	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	5292	m	1,000	5,292,000		1,323,000	1,323,000	2,646,000	3,000,000		2,292,000		Kementerian PUPR, DPRKP

Aspek Kebutuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 1.000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Rencana Kebutuhan Biaya (Rp x 1000)				Sumber Pembiayaan				Penanggung jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
		Pembangunan dan peningkatan jalan dilengkapi drainase pada sisi kanan-kiri jalan	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	5292	m	1,000	5,292,000		1,323,000	1,323,000	2,646,000	3,000,000		2,292,000		Kementerian PUPR, DPRKP
Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perpipaan dan non perpipaan	Pembangunan SIPAS (Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana)	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	Unit	150,000	150,000			50,000	100,000	100,000		50,000		Kementerian PUPR, DPRKP
		Pembuatan Hidran Umum	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	2	Unit	100,000	200,000	100,000	100,000			100,000		100,000		Kementerian PUPR, DPRKP
Kondisi Drainase Lingkungan	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum terhubung	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		1,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP
		Peningkatan kapasitas volume drainase	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	2,000,000	2,000,000		500,000	500,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP
	Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Pembangunan saluran drainase lingkungan baru	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	3212	m	1,000	3,212,000		803,000	803,000	1,606,000	2,000,000		1,212,000		Kementerian PUPR, DPRKP
	Peningkatan kualitas drainase	Perbaikan struktur drainase	Kel. Purwodad	977	m	1,000	977,000		244,250	244,250	488,500	500,000		477,000		Kementerian PUPR, DPRKP

Aspek Kebutuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Rencana Kebutuhan Biaya (Rp x 1000)				Sumber Pembiayaan				Penanggung jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
	sesuai dengan pola aliran		i & Kel. Kuripan													
		Penggantian komponen gorong-gorong	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	977	m	1,000	977,000	195,400	195,400	195,400	390,800	500,000		477,000		Kementerian PUPR, DPRKP
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sarana prasarana air limbah	Pembangunan jamban Rumah Tangga	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	23	Unit	750	17,250			5,750	11,500	2,250		15,000		Kementerian PUPR, DPRKP
		Pembangunan septic tank komunal	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	Unit	300,000	300,000		100,000	100,000	100,000	150,000		150,000		Kementerian PUPR, DPRKP
		Pembangunan MCK Umum	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	3	Unit	300,000	900,000		300,000	300,000	300,000	500,000		400,000		Kementerian PUPR, DPRKP
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan	Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	71	Unit	300	21,300		5,325	5,325	10,650	10,000		11,300		Kementerian PUPR, DPRKP
		Pengadaan Motor Sampah/ Armada Pengangkutan Sampah	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	Unit	40,000	40,000		20,000	20,000		20,000		20,000		Kementerian PUPR, DPRKP
		Pembangunan TPS/ TPS 3R	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	Unit	1,000,000	1,000,000		500,000	500,000		500,000		500,000		Kementerian PUPR, DPRKP

Aspek Kebutuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga satuan (Rp x 1.000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Rencana Kebutuhan Biaya (Rp x 1000)				Sumber Pembiayaan				Penanggung jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov	APBD Kab	Swasta	
Kondisi Proteksi Kebakaran	Peningkatan cakupan pelayanan proteksi kebakaran	Penyediaan alat pemadam api ringan	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	7	Unit	500	3,500	1,500	1,000	1,000		2,000		1,500		Kementerian PUPR, DPRKP, Damkar
		Penyediaan alat pemadam api sederhana	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	6	Unit	50,000	300,000			100,000	200,000	150,000		150,000		Kementerian PUPR, DPRKP
Pengembangan Wisata	Pengembangan RTH Publik	Pembangunan RTH publik	Kel Kuripan	1	lokasi	1.000.000	1.000.000			1.000.000		900.000		100.000		Kementerian PUPR, DPRKP
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru	Kel Kuripan	1.500	mtr	1.000	1.500.000			750.000	750.000	1.350.000		150.000		Kementerian PUPR, DPRKP
	Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Pembangunan saluran drainase lingkungan baru di sepanjang jalan inspeksi	Kel Kuripan	1.500	mtr	1.000	1.500.000			750.000	750.000	1.350.000		150.000		Kementerian PUPR, DPRKP
	Pengembangan bangunan pengaman sempadan sungai	Pembangunan tanggul Sungai Lusi	Kel Kuripan	1.500	mtr	2.000	3.000.000			1.500.000	1.500.000	2.850.000		150.000		Kementerian PUPR, DPUPR

Aspek Kebutuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahapan Kebutuhan Biaya (Rp x 1000)				Sumber Pembiayaan				Penanggung jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
SKALA KAWASAN (KAWASAN PURWODADI 2)																
Kondisi Bangunan Gedung	Pengembangan kawasan permukiman	Pengembangan Rumah Layak Huni	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1,169	Unit	17,500	20,457,500	4,091,500	4,091,500	4,091,500	8,183,000	6,000,000	5,000,000	4,457,500	5,000,000	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP
		Peningkatan kualitas RTLH	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1,169	Unit	17,500	20,457,500	4,091,500	4,091,500	4,091,500	8,183,000	6,000,000	5,000,000	4,457,500	5,000,000	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP
Kondisi Jalan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	13,738	m	1,000	13,738,000	2,747,600	2,747,600	2,747,600	5,495,200	8,000,000		5,738,000		Kementerian PUPR, DPRKP
	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan jalan rusak (berlubang/bergelombang/tergenang)	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	26,991	m	1,000	26,991,000		6,747,750	6,747,750	13,495,500	15,000,000		11,991,000		Kementerian PUPR, DPRKP
		Pembangunan dan peningkatan jalan dilengkapi drainase pada sisi kanan-kiri jalan	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	26,991	m	1,000	26,991,000		6,747,750	6,747,750	13,495,500	15,000,000		11,991,000		Kementerian PUPR, DPRKP
Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perpipaan	Pembangunan SIPAS (Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana)	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	5	Unit	150,000	750,000			250,000	500,000	400,000		350,000		Kementerian PUPR, DPRKP

Aspek Kebutuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 1.000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Rencana Kebutuhan Biaya (Rp x 1000)				Sumber Pembiayaan				Penanggung jawab
								2024	2025	2026	2027	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
	dan non perpipaan	Pembuatan Hidran Umum	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	50	Unit	100,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000			2,500,000		2,500,000		Kementerian PUPR, DPRKP
Kondisi Drainase Lingkungan	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum terhubung	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	5,000,000	5,000,000	2,500,000	2,500,000			2,500,000		2,500,000		Kementerian PUPR, DPRKP
		Peningkatan kapasitas volume drainase	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	5,000,000	5,000,000		1,250,000	1,250,000	2,500,000	2,500,000		2,500,000		Kementerian PUPR, DPRKP
	Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Pembangunan saluran drainase lingkungan baru	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	21,356	m	1,000	21,356,000		5,339,000	5,339,000	10,678,000	12,000,000		9,356,000		Kementerian PUPR, DPRKP
	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Perbaikan struktur drainase	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	15,834	m	1,000	15,834,000		3,958,500	3,958,500	7,917,000	8,000,000		7,834,000		Kementerian PUPR, DPRKP
		Penggantian komponen gorong-gorong	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	15,834	m	1,000	15,834,000	3,166,800	3,166,800	3,166,800	6,333,600	8,000,000		7,834,000		Kementerian PUPR, DPRKP
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sarana	Pembangunan jamban Rumah Tangga	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	95	Unit	750	71,250			25,000	46,250	50,000		21,250		Kementerian PUPR, DPRKP

Aspek Kebutuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 1.000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Rencana Kebutuhan Biaya (Rp x 1000)				Sumber Pembiayaan				Penanggung Jawab
								2023	2024	2025	2026	APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta	
	prasarana air limbah	Pembangunan septic tank komunal	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	20	Unit	300,000	6,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000		3,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP
		Pembangunan MCK Umum	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	20	Unit	300,000	6,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000		3,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan	Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	2,573	Unit	300	771,900		200,000	200,000	371,900	400,000		371,900		Kementerian PUPR, DPRKP
		Pengadaan Motor Sampah/ Armada Pengangkutan Sampah	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	5	Unit	40,000	200,000		100,000	100,000		100,000		100,000		Kementerian PUPR, DPRKP
		Pembangunan TPS/ TPS 3R	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	2	Unit	1,000,000	2,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000		1,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP
Kondisi Proteksi Kebakaran	Peningkatan cakupan pelayanan proteksi kebakaran	Penyediaan alat pemadam api ringan	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	35	Unit	500	17,500	6,000	6,000	5,500		10,000		7,500		Kementerian PUPR, DPRKP, Damkar
		Penyediaan alat pemadam api sederhana	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	34	Unit	50,000	1,700,000			600,000	1,100,000	1,000,000		700,000		Kementerian PUPR, DPRKP

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

7.5 Indikasi Program Dan Kegiatan Penigkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas

Indikasi program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh berisi mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama di kawasan prioritas. Prioritas penanganan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Grobogan adalah di Kawasan Putwodadi 1 (Purwodadi – Kuripan) khususnya di Kuripan.

Perumusan program dan kegiatan yang dilakukan di Kel. Kuripan didahului dengan melakukan identifikasi lokasi untuk mendapatkan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Berikut adalah identifikasi lokasi yang akan ditangani di Kel. Kuripan:

1. Lokasi SK Kumuh 2020
   a) RT. 02/ RW. 07



Gambar 7. 1 Lokasi Penanganan RT. 02/ RW. 07 Kuripan

Keterangan:

a : Jalan berupa paving yang mengalami penurunan di beberapa bagian

b : Jalan berupa tanah, tidak tersedia drainase, beberapa bagian berupa semak belukar dan kubangan air

c : Jalan berupa paving dan tanah di beberapa bagian, drainase belum sesuai standar teknis

b) RT. 01/ RW. 04



Gambar 7. 2 Lokasi Penanganan RT. 01/ RW. 04 Kuripan

Keterangan:

a : belum tersedia drainase

b : Jalan berupa semak belukar dan belum terdapat badan jalan

c) RT. 01/ RW. 05



Gambar 7. 3 Lokasi Penanganan RT. 01/ RW. 05 Kuripan

Keterangan:

a : belum tersedia drainase

b : belum tersedia drainase, terdapat badan jalan yang berupa tanah

d) RT. 01/ RW. 07



Gambar 7. 4 Lokasi Penanganan RT. 01/ RW. 07 Kuripan

Keterangan:

a : belum tersedia drainase

b : belum tersedia drainase

c : belum tersedia drainase dan badan jalan rusak

d : belum tersedia drainase dan badan jalan rusak

e) RT. 03/ RW. 07



Gambar 7. 5 Lokasi Penanganan RT. 03/ RW. 07 Kuripan

Keterangan:

a : belum tersedia drainase dan belum tersedia badan jalan

b : belum tersedia drainase dan belum tersedia badan jalan di beberapa bagian

c : Jalan paving; drainase tersumbat

d : Jalan berupa semak belukar; belum terdapat drainase; belum terdapat badan jalan

f) RT. 05/ RW. 13



Gambar 7. 6 Lokasi Penanganan RT. 05/ RW. 13 Kuripan

Keterangan:

a : jalan berupa tanah; belum tersedia drainase

b : badan jalan kondisi rusak; belum tersedia drainase

c : jalan berupa tanah; belum tersedia drainase

g) RT. 03/ RW. 18



Gambar 7. 7 Lokasi Penanganan RT. 03/ RW. 18 Kuripan

Keterangan:

a : jalan berupa tanah

2. Lokasi Non SK Kumuh 2020

a) RT. 04/ RW. 02



Gambar 7. 8 Lokasi Penanganan RT. 04/ RW. 02 Kuripan

Keterangan:

a : jalan berupa tanah

b) RT. 05/ RW. 02



Gambar 7. 9 Lokasi Penanganan RT. 05/ RW. 02 Kuripan

Keterangan:

a : jalan berupa tanah; belum tersedia drainase

b : drainase belum memadai

c : drainase belum memadai

c) RT. 02/ RW. 05



Gambar 7. 10 Lokasi Penanganan RT. 02/ RW. 05 Kuripan

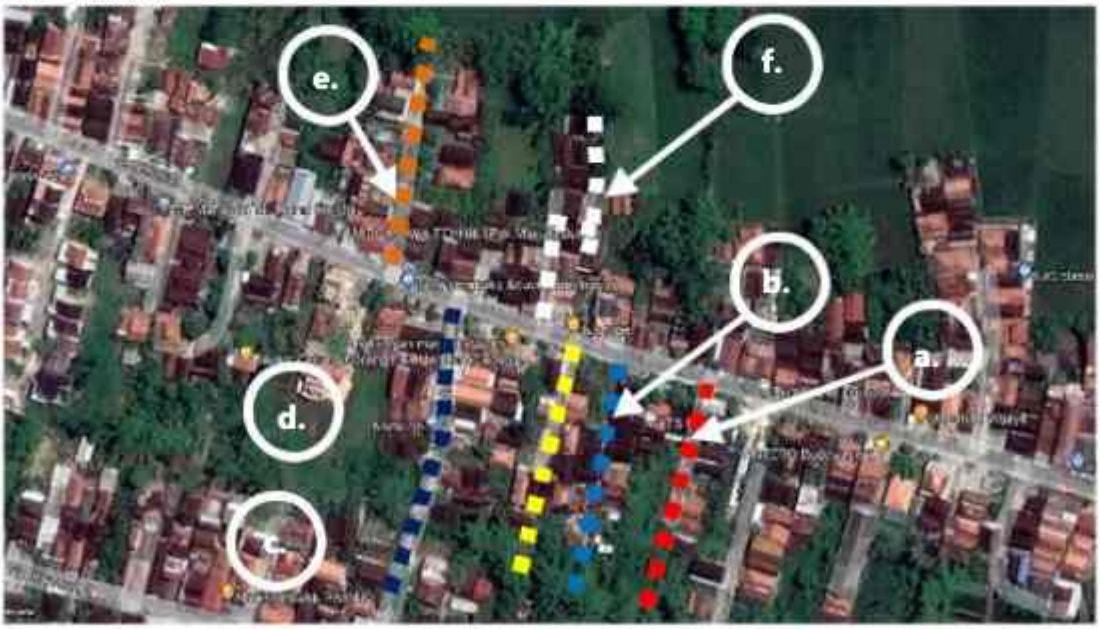
Keterangan:

a : belum tersedia drainase

b : belum tersedia drainase

c : belum tersedia drainase

d) RT. 04/ RW. 07



Gambar 7. 11 Lokasi Penanganan RT. 04/ RW. 07 Kuripan

Keterangan:

a : belum tersedia drainase di beberapa bagian; belum tersedia badan jalan di beberapa bagian

b : belum tersedia drainase di beberapa bagian; belum tersedia badan jalan di beberapa bagian

c : belum tersedia drainase di beberapa bagian; belum tersedia badan jalan di beberapa bagian

d : belum tersedia drainase

e : badan jalan mengalami kerusakan

f : jalan berupa paving; belum tersedia drainase di beberapa bagian; belum tersedia badan jalan di beberapa bagian

e) RT. 01/ RW. 12



Gambar 7. 12 Lokasi Penanganan RT. 01/ RW. 12 Kuripan

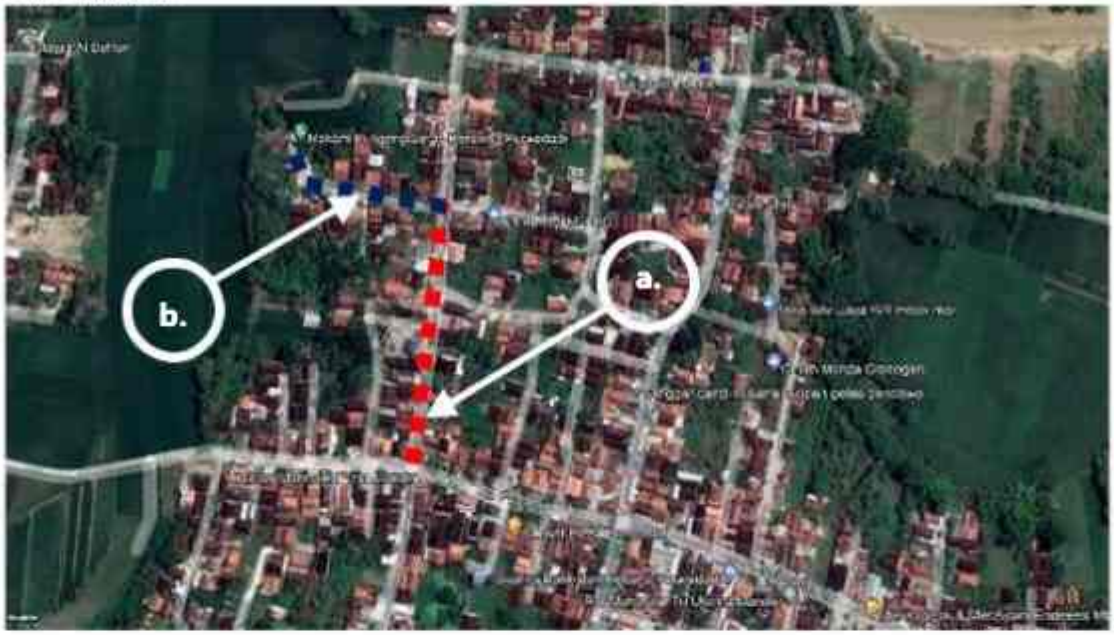
Keterangan:

a : belum tersedia drainase; badan jalan mengalami kerusakan

b : belum tersedia drainase; badan jalan berupa tanah dan bebatuan

c : belum tersedia drainase

f) RT. 04/ RW. 12



Gambar 7. 13 Lokasi Penanganan RT. 04/ RW. 12 Kuripan

Keterangan:

a : beberapa bagian badan jalan mengalami kerusakan

b : beberapa bagian badan jalan mengalami kerusakan

g) RT. 02/ RW. 13



Gambar 7. 14 Lokasi Penanganan RT. 02/ RW. 13 Kuripan

Keterangan:

a : jalan paving; drainase tergenang

b : jalan paving; drainase tergenang

h) RT. 03/ RW. 13



Gambar 7. 15 Lokasi Penanganan RT. 02/ RW. 13 Kuripan

Keterangan:

a : beberapa bagian jalan berupa tanah dan jalan setapak; drainase tergenang

i) RT. 04/ RW. 13



Gambar 7. 16 Lokasi Penanganan RT. 04/ RW. 13 Kuripan

Keterangan:

a : badan jalan rusak; beberapa bagian drainase mengalami kerusakan

j) RT. 01/ RW. 15



Gambar 7. 17 Lokasi Penanganan RT. 01/ RW. 15 Kuripan

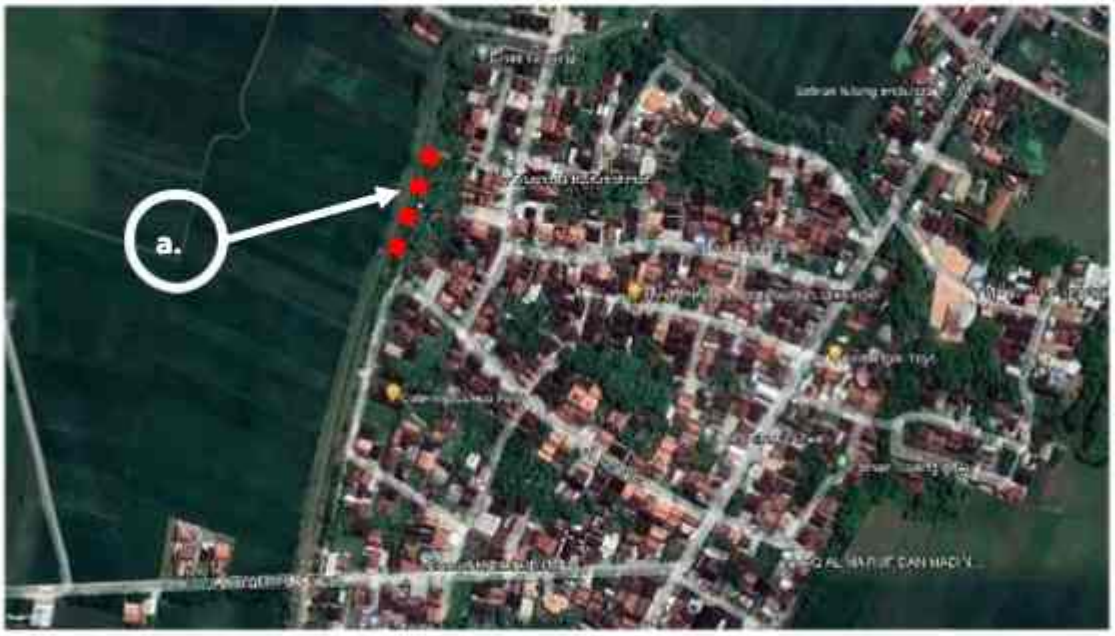
Keterangan:

a : drainase belum memadai

b : badan jalan rusak; belum tersedia drainase

c : badan jalan rusak; belum tersedia drainase

k) RT. 01/ RW. 16

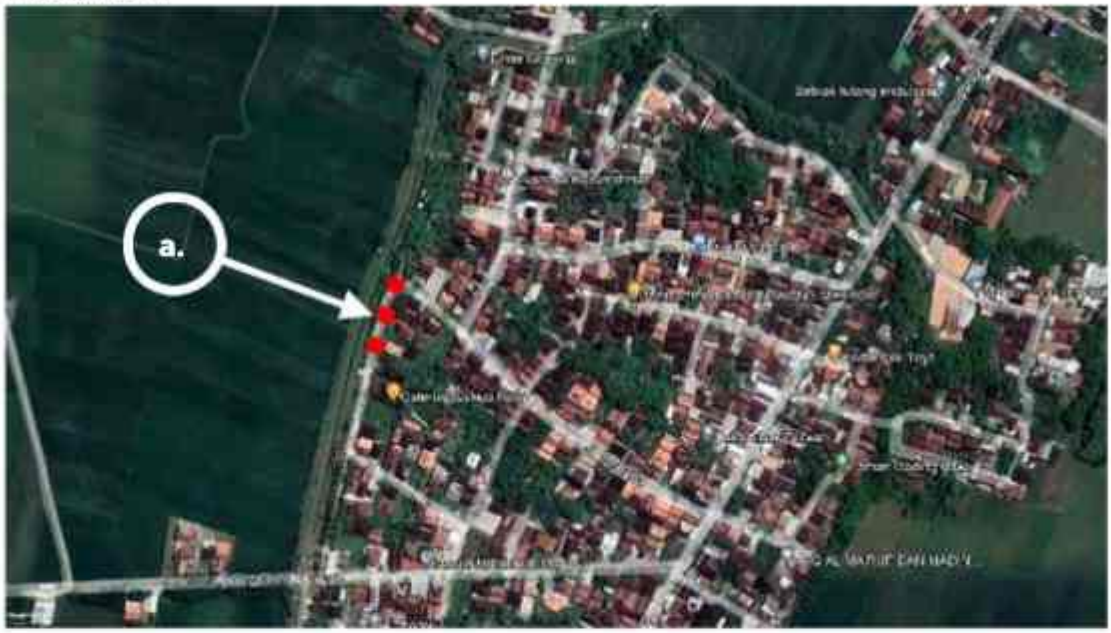


Gambar 7. 18 Lokasi Penanganan RT. 04/ RW. 16 Kuripan

Keterangan:

a : belum tersedia badan jalan

l) RT. 03/ RW. 17

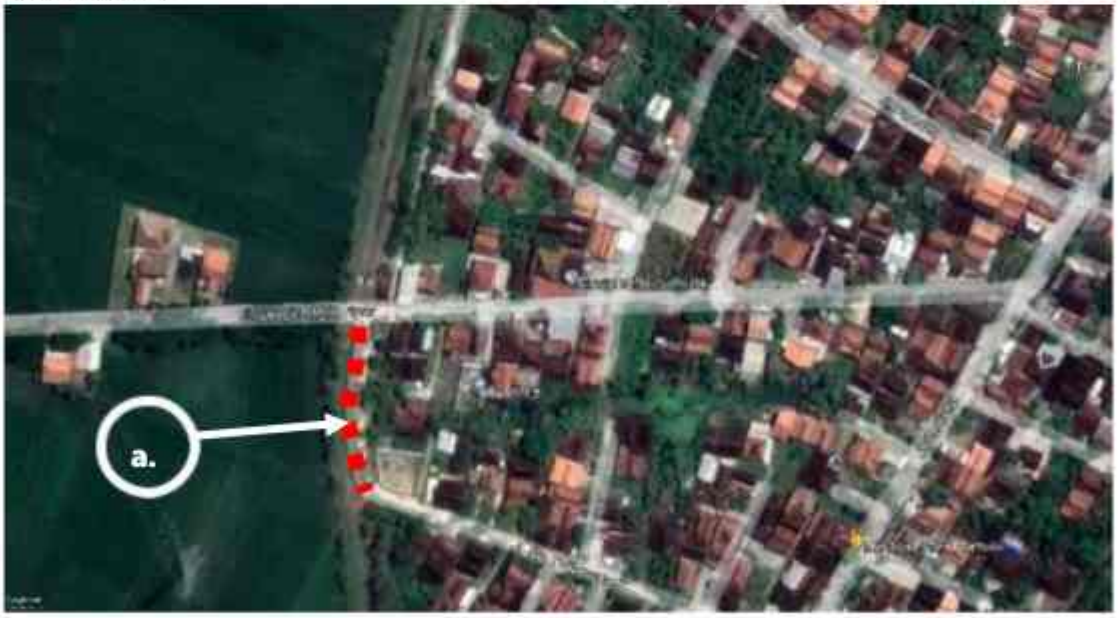


Gambar 7. 19 Lokasi Penanganan RT. 03/ RW. 17 Kuripan

Keterangan:

a : belum tersedia badan jalan

m) RT. 02/ RW. 18



Gambar 7. 20 Lokasi Penanganan RT. 02/ RW. 18 Kuripan

Keterangan:

a : belum tersedia badan jalan

Kegiatan yang akan dilakukan di Kelurahan Kuripan adalah sebagai berikut:

Tabel VII. 8 Rencana Kegiatan di Kelurahan Kuripan

No.		Locus	Koordinat				Kegiatan
			Titik awal		Titik Akhir		
			Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	
1		RT002-RW007					
	a.		7.079089	110.905593	7.079892	110.905347	Peningkatan jalan lebar 2,7meter sepanjang 93,5 meter
			7.079089	110.905593	7.079892	110.905347	Pengadaan drainasesepanjang 15 meter satu sisi
	b.		7.080541	110.905200	7.079704	110.904726	Pengadaan drainase sepanjang 20 m
			7.080541	110.905200	7.079704	110.904726	Peningkatan jalan dengan lebar 2 meter sepanjang 25 meter
			7.080541	110.905200	7.079704	110.904726	Pengadaan drainase sepanjang 25 meter satu sisi
			7.080541	110.905200	7.079704,	110.904726	Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 30 meter
			7.080541	110.905200	7.079704	110.904726	Pengadaan jalan dengan lebar 2 meter sepanjang 30 meter
			7.080541,	110.905200	7.079704,	110.904726	Pengadaan drainase sepanjang 30 meter dua sisi
	c.		-7.078898	110.904965	-7.079796	110.904676	Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 30 meter
			-7.078898	110.904965	-7.079796	110.904676	Peningkatan jalan dengan lebar 1,6 meter sepanjang 90 meter
			-7.078898	110.904965	-7.079796	110.904676	Peningkatan drainase sepanjang 90 meter dua sisi
			-7.078898	110.904965	-7.079796	110.904676	Pengadaan jalan dengan lebar 1,6 meter sepanjang 30 meter

No.		Lokasi	Koordinat				Keterangan
			Titik awal		Titik Akhir		
			Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	
			-7.078898	110.904965	-7.079796	110.904676	Pengadaan drainase sepanjang 30 meter dua sisi
2.		RT001-RW004					
	a.		-7.084168	110.906260	-7.084099	110.905970	Pengadaan drainase sepanjang 31 meter dua sisi
	b.		-7.084096	110.905977	-7.083212	110.906189	Pengadaan jalan lebar 2 meter sepanjang 30 meter
			-7.084096	110.905977	-7.083212	110.906189	Pengadaan drainase tengah sepanjang 30 meter
			-7.084096	110.905977	-7.083212	110.906189	Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 65 meter
			-7.084096	110.905977	-7.083212	110.906189	Pengadaan badan jalan lebar 2 meter sepanjang 65 meter
			-7.084096	110.905977	-7.083212	110.906189	Pengadaan drainase sepanjang 65 meter
3.		RT001-RW005					
	a.		-7.080193	110.909019	-7.084099	110.905970	Pengadaan drainase sepanjang 55 meter dua sisi
	b.		-7.080035	110.908750	-7.079208	110.908889	Pengadaan drainase sepanjang 90 meter dua sisi
			-7.080035	110.908750	-7.079208	110.908889	Pengadaan jalan dengan lebar 2 meter dan drainase sepanjang 8,5 meter
4.		RT001-RW007					
	a.		-7.079369,	110.906777	-7.078787	110.907033	Pengadaan drainase sepanjang 70 meter satu sisi
	b.		-7.079263	110.906463	-7.078575	110.906683	Pengadaan drainase sepanjang sepanjang 28 meter satu sisi dan 52 meter dua sisi

No.		Lokasi	Koordinat				Keterangan
			Titik awal		Titik Akhir		
			Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	
	c.		-7.079143	110.906125	-7.078355	110.906353	Pengadaan drainase sepanjang 102 meter satu sisi
	d.		-7.079178	110.905980	-7.079610	110.905896	Pengadaan badan jalan lebar 2,35 meter sepanjang 45 meter
5.		RT003-RW007					
	a.		-7.078793,	110.904627	-7.079629	110.904440	Pengadaan badan jalan lebar 2 meter sepanjang 37 meter
							Pengadaan drainase sepanjang 37 meter satu sisi
							Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 60 meter
							Pengadaan pengadaan jalan lebar 2 meter sepanjang 60 meter
							Pengadaan drainase sepanjang 60 meter satu sisi
	b.		-7.078589	110.903947	-7.079425	110.903783	Pengadaan drainase sepanjang 52 meter
							Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 46 meter
							Pengadaan pengadaan jalan lebar 2 meter sepanjang 46 meter
							Pengadaan drainase sepanjang 46 meter dua sisi
	c.		-7.078533	110.903735	-7.079360	110.903501	Peningkatan jalan lebar 2 meter sepanjang 93 meter
							Normalisasi dan peningkatan drainase sepanjang 93 meter
	d.		-7.079360	110.90350	-7.079703	110.904712	Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 140 meter

No.		Lokasi	Koordinat				Keterangan
			Titik awal		Titik Akhir		
			Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	
							Pengadaan badan jalan lebar 2 meter sepanjang 140 meter
							Pengadaan drainase sepanjang 140 meter dua sisi
6.		RT005-RW013					
	a.		-7.081343	110.898753	-7.081111	110.898040	Pengadaan badan jalan lebar 3 meter sepanjang 83 meter
							Pengadaan drainase sepanjang 83 meter dua sisi
	b.		-7.080930	110.898556	-7.081199	110.898453	Peningkatan badan jalan lebar 5 meter sepanjang 36 meter
							Pengadaan drainase sepanjang 36 meter dua sisi
	c.		-7.081108	110.898031	-7.080852	110.897657	Pengadaan badan jalan lebar 3 meter sepanjang 60 meter
							Pengadaan drainase sepanjang 60 meter dua sisi
7.		RT003-RW018					
	a.		-7.084074	110.882242	-7.083608	110.882354	Pengadaan badan jalan lebar 3 meter dan drainase sepanjang 50 meter
8.		RT.004-RW.002					
	a.		-7.085130	110.907052	-7.084961	110.906228	Pengadaan drainase sepanjang 93 meter dua sisi
9.		RT.005-RW.002					
	a.		-7.085599	110.905539	-7.086091	110.905418	Pengadaan jalan lebar 2 meter sepanjang 60 meter
							Pengadaan drainase sepanjang 60 meter dua sisi

No.		Lokasi	Koordinat				Keterangan
			Titik awal		Titik Akhir		
			Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	
	b.		7.085536	110.905546	-7.084100	110.905959	Pengadaan drainase sepanjang 160 meter dua sisi
	c.		-7.084498	110.905479	-7.084684	110.906262	Pengadaan drainase sepanjang 92 meter dua sisi
10.		RT.002-RW.005					
	a.		-7.080042	110.908693	-7.086091	110.905418	Pengadaan drainase sepanjang 120 meter dua sisi
	b.		-7.080042	110.908693	-7.086091	110.905418	Pengadaan drainase sepanjang 35 meter dua sisi
	c.		-7.080252	110.908987	-7.080537	110.908889	Pengadaan drainase sepanjang 37 meter dua sisi
11.		RT.004-RW.007					
	a.		-7.078438	110.903448	-7.079267	110.903214	Pengadaan drainase sepanjang 60 meter dua sisi
							Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 35 meter
							Pengadaan jalan lebar 1,70 meter sepanjang 35 meter
							Pengadaan drainase sepanjang 35 meter dua sis
	b.		-7.078363	110.903125	-7.079187	110.902929	Pengadaan drainase sepanjang 82 meter dua sisi
							Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 11,5 meter
							Pengadaan jalan lebar 1,50 meter sepanjang 11,5 meter
							Pengadaan drainase sepanjang 11,5 meter dua sisi
	c.		-7.078310	110.902944	-7.079111	110.902752	Pengadaan drainase sepanjang 64,5 meter dua sisi

No.		Lokasi	Koordinat				Keterangan
			Titik awal		Titik Akhir		
			Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	
							Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 25,5 meter
							Pengadaan jalan lebar 1,50 meter sepanjang 25,5 meter
							Pengadaan drainase sepanjang 25,5 meter dua sisi
	d.		-7.078164	110.902508	-7.079241	110.902260	Pengadaan drainase sepanjang 122 meter dua aw2`sisi
	e.		-7.078010	110.902216	-7.077111	110.902413	Pengadaan jalan lebar 2,25 meter sepanjang 100 meter
	f.		-7.078219	110.902823	-7.077399	110.903029	Pengadaan drainase sepanjang 130 meter dua sisi
							Peningkatan jalan lebar 1,80 meter sepanjang 65 meter
							Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 65 meter
							Pengadaan jalan lebar 1,80 meter sepanjang 65 meter
12.		RT.001-RW.012					
	a.		-7.077844	110.900311	-7.077981	110.900945	Peningkatan jalan lebar 2,25 meter sepanjang 70 meter
							Pengadaan drainase sepanjang 70 meter dua sisi
	b.		-7.077594	110.901106	-7.078521	110.900849	Pengadaan jalan lebar 2,85 meter sepanjang 105 meter
							Pengadaan drainase sepanjang 105 meter dua sisi
	c.		-7.077841	110.901711	-7.078288	110.901455	Pengadaan drainase sepanjang 55 meter satu sisi
13.		RT.004-RW.012					

No.		Lokasi	Koordinat				Keterangan
			Titik awal		Titik Akhir		
			Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	
	a.		-7.076973	110.899119	-7.075343	110.899282	Perbaikan jalan lebar 3,00 meter sepanjang 185 meter
	b.		-7.075343	110.899282	-7.074926	110.898311	Perbaikan jalan lebar 3,75 meter sepanjang 125 meter
14.		RT.002-RW.013					
	a.		-7.077701	110.899020	-7.078645	110.898774	Peningkatan jalan lebar 2,8 meter sepanjang 110 meter
							Normalisasi dan perbaikan drainase sepanjang 110 meter dua sisi
	b.		-7.078645	110.898774	-7.078562	110.898208	Peningkatan jalan lebar 2,85 meter sepanjang 60 meter
							Normalisasi dan perbaikan drainase sepanjang 60 meter dua sisi
15.		RT.003-RW.013					
	a.		-7.077701	110.899020	-7.078645	110.898774	Pengadaan dan peningkatan jalan lebar 2,9 meter sepanjang 106 meter
							Normalisasi dan perbaikan drainase dua sisi
16.		RT.004-RW.013					
	a.		-7.080297	110.901950	-7.079503	110.902187	Pengadaan dan peningkatan jalan lebar 3 meter sepanjang 92 meter
							Perbaikan drainase
17.		RT.001-RW.015					

No.		Lokasi	Koordinat				Keterangan
			Titik awal		Titik Akhir		
			Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	
	a.		-7.078100	110.891013	-7.077034	110.890879	Pengadaan drainase sepanjang 140 meter
	b.		-7.078334	110.891094	-7.078783	110.890974	Pengadaan dan peningkatan jalan lebar 1,5 meter sepanjang 50 meter
							Pengadaan drainase sepanjang 50 meter
	c.		-7.077968	110.890310	-7.078369	110.890117	Pengadaan dan peningkatan jalan lebar 1,5 meter sepanjang 55 meter
							Pengadaan drainase sepanjang 55 meter
18.		RT.001-RW.016					
	a.		-7.082010	110.882787	-7.080367	110.883171	Pengadaan jalan lebar 4 meter sepanjang 95 meter
19.		RT.003-RW.017					
	a.		-7.082575	110.882593	-7.082069	110.882765	Pengadaan jalan lebar 4 meter sepanjang 62 meter
20.		RT.002-RW.018					
	a.		-7.084135	110.882256	-7.084823	110.882190	Pengadaan jalan lebar 2,25 meter sepanjang 75 meter

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

Tabel VII. 9 Indikasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas Purwodadi 1 dan Penyusunan DED Kawasan Prioritas

No	Lokasi	Kegiatan	Indikator	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 000)	Total Biaya (Rp x 000)	Tahun Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	RT002-RW007	Peningkatan jalan lebar 2,7meter sepanjang 93,5 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	252,45	m	1,000	252.450	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
2		Pengadaan drainase sepanjang 15 meter satu sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	15	m	1,000	15.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
3		Pengadaan drainase sepanjang 20 m	Terbangunnya drainase lingkungan	20	m	1,000	20.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
4		Peningkatan jalan dengan lebar 2 meter sepanjang 25 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	50	m	1,000	50.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
5		Pengadaan drainase sepanjang 25 meter satu sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	25	m	1,000	25.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
6		Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 30 meter	Kesiapan lahan untuk pembangunan	60	M2	100	6.000	2025-2027	DPRKP
7		Pengadaan jalan dengan lebar 2 meter sepanjang 30 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	60	m	1,000	60.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
8		Pengadaan drainase sepanjang 30 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	60	m	1,000	60.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
9		Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 30 meter	Kesiapan lahan untuk pembangunan	60	M2	100	6.000	2025-2027	DPRKP
10		Peningkatan jalan dengan lebar 1,6 meter sepanjang 90 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	144	m	1,000	144.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
11		Peningkatan drainase sepanjang 90 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	180	m	1,000	180.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
12		Pengadaan jalan dengan lebar 1,6 meter sepanjang 30 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	48	m	1,000	48.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
13		Pengadaan drainase sepanjang 30 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	30	m	1,000	30.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT001-RW004	Pengadaan drainase sepanjang 31 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	62	m	1,000	62.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP

No	Lokasi	Kegiatan	Indikator	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun Pelaksanaan	Penanggung jawab
2		Pengadaan jalan lebar 2 meter sepanjang 30 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	60	m	1,000	60.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
3		Pengadaan drainase tengah sepanjang 30 meter	Terbangunnya drainase lingkungan	30	m	1,000	30.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
4		Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 65 meter	Kesiapan lahan untuk pembangunan	130	M2	100	13.000	2025-2027	DPRKP
5		Pengadaan badan jalan lebar 2 meter sepanjang 65 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	130	m	1,000	130.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
6		Pengadaan drainase sepanjang 65 meter	Terbangunnya drainase lingkungan	65	m	1,000	65.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT001-RW005	Pengadaan drainase sepanjang 55 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	110	m	1,000	110.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
2		Pengadaan drainase sepanjang 90 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	180	m	1,000	180.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
3		Pengadaan jalan dengan lebar 2 meter dan drainase sepanjang 8,5 meter	Terbangunnya jalan dan drainase lingkungan	34	m	1,000	34.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT001-RW007	Pengadaan drainase sepanjang 70 meter satu sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	70	m	1,000	70.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPUPR
2		Pengadaan drainase sepanjang sepanjang 28 meter satu sisi dan 52 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	132	m	1,000	132.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
3		Pengadaan drainase sepanjang 102 meter satu sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	102	m	1,000	102.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
4		Pengadaan badan jalan lebar 2,35 meter sepanjang 45 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	105,75	m	1,000	105.750	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT003-RW007	Pengadaan badan jalan lebar 2 meter sepanjang 37 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	74	m	1,000	74.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
2		Pengadaan drainase sepanjang 37 meter satu sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	37	m	1,000	37.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP

No	Lokasi	Kegiatan	Indikator	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun Pelaksanaan	Penanggung jawab
3		Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 60 meter	Kesiapan lahan untuk pembangunan	120	M2	100	12.000	2025-2027	DPRKP
4		Pengadaan pengadaan jalan lebar 2 meter sepanjang 60 Meter	Terbangunnya jalan lingkungan	120	m	1,000	120.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
5		Pengadaan drainase sepanjang 60 meter satu sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	60	m	1,000	60.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
6		Pengadaan drainase sepanjang 52 meter	Terbangunnya drainase lingkungan	52	m	1,000	52.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
7		Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 46 meter	Kesiapan lahan untuk pembangunan	92	M2	100	9.200	2025-2027	DPRKP
8		Pengadaan pengadaan jalan lebar 2 meter sepanjang 46 Meter	Terbangunnya jalan lingkungan	92	m	1,000	92.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
9		Pengadaan drainase sepanjang 46 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	92	m	1,000	92.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
10		Peningkatan jalan lebar 2 meter sepanjang 93 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	186	m	1,000	186.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
11		Normalisasi dan peningkatan drainase sepanjang 93 meter	Terbangunnya drainase lingkungan	93	m	1,000	93.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
12		Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 140 meter	Kesiapan lahan untuk pembangunan	280	M2	100	28.000	2025-2027	DPRKP
13		Pengadaan badan jalan lebar 2 meter sepanjang 140 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	280	m	1,000	280.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
14		Pengadaan drainase sepanjang 140 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	280	m	1,000	280.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT005-RW013	Pengadaan badan jalan lebar 3 meter sepanjang 83 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	249	m	1,000	249.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
2		Pengadaan drainase sepanjang 83 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	166	m	1,000	166.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP

No	Lokasi	Kegiatan	Indikator	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 000)	Total Biaya (Rp x 000)	Tahun Pelaksanaan	Penanggung jawab
3		Peningkatan badan jalan lebar 5 meter sepanjang 36 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	180	m	1,000	180.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
4		Pengadaan drainase sepanjang 36 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	72	m	1,000	72.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
5		Pengadaan badan jalan lebar 3 meter sepanjang 60 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	180	m	1,000	180.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
6		Pengadaan drainase sepanjang 60 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	120	m	1,000	120.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT003-RW018	Pengadaan badan jalan lebar 3 meter dan drainase sepanjang 50 meter	Terbangunnya jalan dan drainase lingkungan	200	m	1,000	200.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT004-RW002	Pengadaan drainase sepanjang 93 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	186	m	1,000	186.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT005-RW002	Pengadaan jalan lebar 2 meter sepanjang 60 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	120	m	1,000	120.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
2		Pengadaan drainase sepanjang 60 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	120	m	1,000	120.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
3		Pengadaan drainase sepanjang 160 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	320	m	1,000	320.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
4		Pengadaan drainase sepanjang 92 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	184	m	1,000	184.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT002-RW005	Pengadaan drainase sepanjang 120 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	240	m	1,000	240.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
2		Pengadaan drainase sepanjang 35 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	70	m	1,000	70.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
3		Pengadaan drainase sepanjang 37 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	74	m	1,000	74.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT004-RW007	Pengadaan drainase sepanjang 60 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	120	m	1,000	120.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP

No	Lokasi	Kegiatan	Indikator	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun Pelaksanaan	Penanggung jawab
2		Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 35 meter	Kesiapan lahan untuk pembangunan	59,5	M2	100	5.950	2025-2027	DPRKP
3		Pengadaan jalan lebar 1,70 meter sepanjang 35 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	59,5	m	1,000	59.500	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
4		Pengadaan drainase sepanjang 35 meter dua sis	Terbangunnya drainase lingkungan	70	m	1,000	70.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
5		Pengadaan drainase sepanjang 82 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	164	m	1,000	164.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
6		Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 11,5 meter	Kesiapan lahan untuk pembangunan	17,25	M2	100	1.725	2025-2027	DPRKP
7		Pengadaan jalan lebar 1,50 meter sepanjang 11,5 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	17,25	m	1,000	17.250	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
8		Pengadaan drainase sepanjang 11,5 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	23	m	1,000	23.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
9		Pengadaan drainase sepanjang 64,5 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	129	m	1,000	129.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
10		Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 25,5 meter	Kesiapan lahan untuk pembangunan	38,25	M2	100	3.825	2025-2027	DPRKP
11		Pengadaan jalan lebar 1,50 meter sepanjang 25,5 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	38,25	m	1,000	38.250	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
12		Pengadaan drainase sepanjang 25,5 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	51	m	1,000	51.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
13		Pengadaan drainase sepanjang 122 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	244	m	1,000	244.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
14		Pengadaan jalan lebar 2,25 meter sepanjang 100 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	225	m	1,000	225.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
15		Pengadaan drainase sepanjang 130 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	260	m	1,000	260.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
16		Peningkatan jalan lebar 1,80 meter sepanjang 65 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	117	m	1,000	117.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP

No	Lokasi	Kegiatan	Indikator	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun Pelaksanaan	Penanggung jawab
17		Pembersihan dan pematangan lahan sepanjang 65 meter	Kesiapan lahan untuk pembangunan	117	M2	100	11.700	2025-2027	DPRKP
18		Pengadaan jalan lebar 1,80 meter sepanjang 65 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	117	m	1,000	117.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT.001-RW.012	Peningkatan jalan lebar 2,25 meter sepanjang 70 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	157,5	m	1,000	157.500	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
2		Pengadaan drainase sepanjang 70 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	140	m	1,000	140.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
3		Pengadaan jalan lebar 2,85 meter sepanjang 105 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	299,25	m	1,000	299.250	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
4		Pengadaan drainase sepanjang 105 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	210	m	1,000	210.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
5		Pengadaan drainase sepanjang 55 meter satu sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	55	m	1,000	55.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT.004-RW012	Perbaikan jalan lebar 3,00 meter sepanjang 185 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	555	m	1,000	555.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
2		Perbaikan jalan lebar 3,75 meter sepanjang 125 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	468,75	m	1,000	468.750	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT.002-RW013	Peningkatan jalan lebar 2,8 meter sepanjang 110 meter	Terbangunnya drainase lingkungan	308	m	1,000	308.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
2		Normalisasi dan perbaikan drainase sepanjang 110 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	220	m	1,000	220.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
3		Peningkatan jalan lebar 2,85 meter sepanjang 60 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	171	m	1,000	171.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
4		Normalisasi dan perbaikan drainase sepanjang 60 meter dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	120	m	1,000	120.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT.003-RW013	Pengadaan dan peningkatan jalan lebar 2,9 meter sepanjang 106 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	307,4	m	1,000	307.400	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
2		Normalisasi dan perbaikan drainase dua sisi	Terbangunnya drainase lingkungan	106	m	1,000	106.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP

No	Lokasi	Kegiatan	Indikator	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Tahun Pelaksanaan	Penanggung jawab
1	RT.004-RW013	Pengadaan dan peningkatan jalan lebar 3 meter sepanjang 92 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	276	m	1,000	276.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
2		Perbaikan drainase	Terbangunnya drainase lingkungan	276	m	1,000	276.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT.001-RW.015	Pengadaan drainase sepanjang 140 meter	Terbangunnya drainase lingkungan	140	m	1,000	140.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
2		Pengadaan dan peningkatan jalan lebar 1,5 meter sepanjang 50 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	75	m	1,000	75.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
3		Pengadaan drainase sepanjang 50 meter	Terbangunnya drainase lingkungan	50	m	1,000	50.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
4		Pengadaan dan peningkatan jalan lebar 1,5 meter sepanjang 55 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	82,5	m	1,000	82.500	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
5		Pengadaan drainase sepanjang 55 meter	Terbangunnya drainase lingkungan	55	m	1,000	55.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT001-RW.016	Pengadaan jalan lebar 4 meter sepanjang 95 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	380	m	1,000	380.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT003-RW017	Pengadaan jalan lebar 4 meter sepanjang 62 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	248	m	1,000	248.000	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP
1	RT002-RW018	Pengadaan jalan lebar 2,25 meter sepanjang 75 meter	Terbangunnya jalan lingkungan	168,75	m	1,000	168.750	2025-2027	Kementerian PUPR, DPRKP

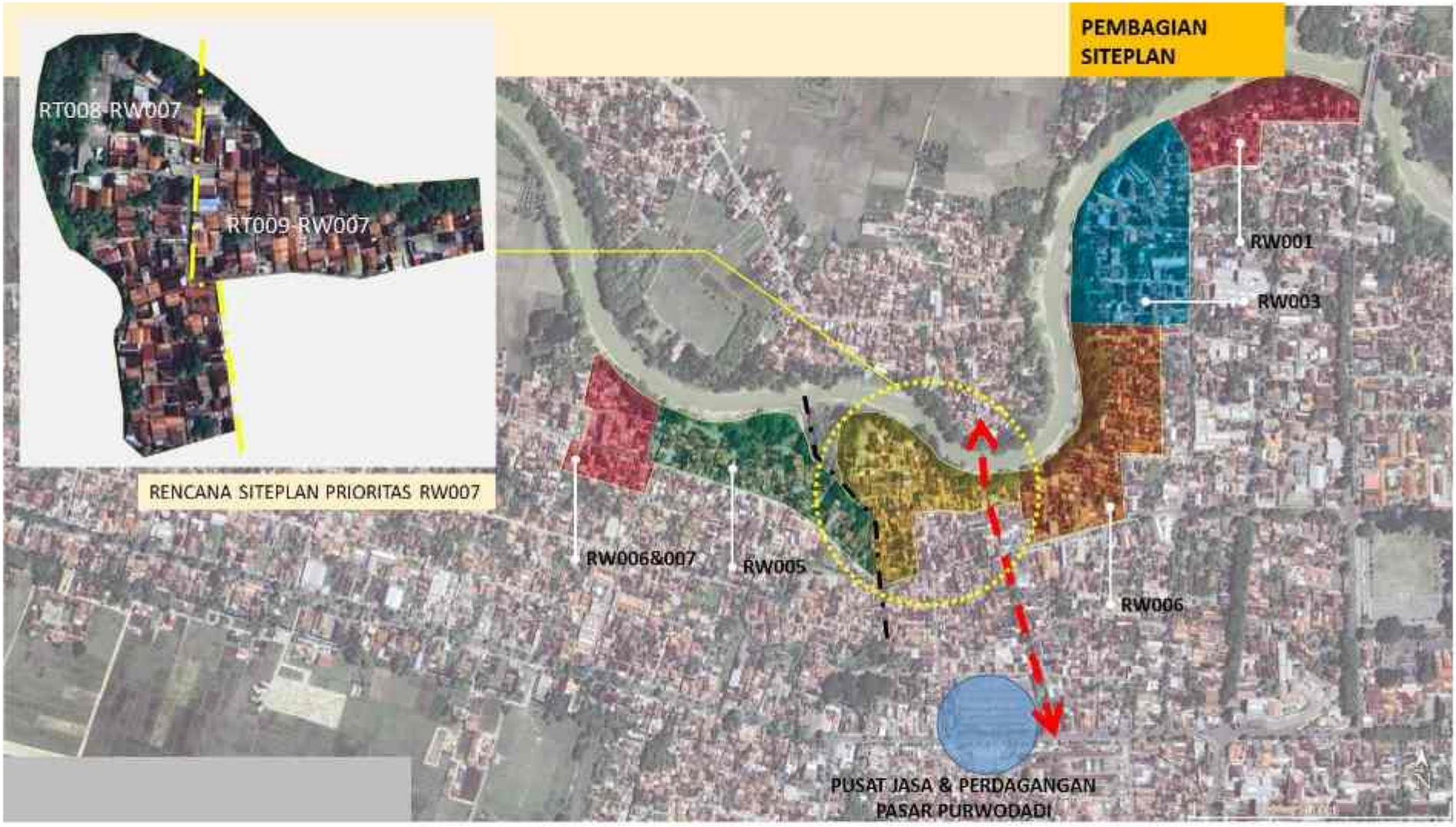
Sumber: Analisis Penyusun, 2022

Dari rumusan program dan kegiatan diatas, maka selanjutnya akan disajikan konsep desain di kawasan prioritas Purwodadi 1 sebagai berikut.

OVERVIEW LETAK KAWASAN I TERHADAP KOTA GROBOGAN




KONSEP PENATAAN KAWASAN I
PENATAAN SEMPADAN SUNGAI
PENATAAN KORIDOR JALAN


PEMBAGIAN SITEPLAN
RT008-RW007
RT009-RW007
RENCANA SITEPLAN PRIORITAS RW007
RW001
RW003
RW006&007
RW005
RW006
PUSAT JASA & PERDAGANGAN
PASAR PURWODADI

NUMERIK SKOR KUMUH SITEPLAN PRIORITAS I

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN
AHSIK/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS

Provinsi : JAWA TENGAH
Kab/Kota : GROBOGAN
Kecamatan : PURWODADI
Kelurahan : PURWODADI

RT006-RW007

Luas Plot	1,03	Ha
Luas Verifikasi	1,03	Ha
Jumlah Bangunan	46	Unit
Jumlah Penduduk	178	Jiwa
Jumlah KK	46	KK

RT009-RW007

Luas Plot	1,17	Ha
Luas Verifikasi	1,17	Ha
Jumlah Bangunan	45	Unit
Jumlah Penduduk	183	Jiwa
Jumlah KK	45	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Kelaikfantasian Bangunan	-	-	0,00%	0	3600	-	17,78%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0	-	Ha	0,00%	0
	c. Kelengkapan dengan Perlengkapan Kebakaran	22,22	-	66,67%	2	31,00	-	68,89%	2
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				22,22%				42,22%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan		Meter	0,00%	0		Meter	0,00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	930,00	Meter	100,00%	3	990,00	Meter	75,19%	2
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				50,00%				37,59%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Kelancaran dan Kualitas Air Minum	46,00	KK	100,00%	3	45,00	KK	100,00%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata kondisi penyediaan air minum		-		50,00%		-		50,00%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Kemampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,00	Ha	0,00%	0	0,00	Ha	0,00%	0
	b. Ketersediaan Saluran Drainase	200,00	Meter	40,00%	1	200,00	Meter	40,00%	1
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	150,00	Meter	30,00%	1	-	Meter	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				23,33%				13,33%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah				0,00%				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai standar Teknis	-	KK	0,00%	0	-	KK	0,00%	0
Rata-rata kondisi pengelolaan				0,00%				0,00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	46,00	Unit	100,00%	3	45,00	Unit	100,00%	3
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50,00%				50,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN					
30 - 30 : KUMUH BERAT	TOTAL NILAI	20		TOTAL NILAI	18
26 - 29 : KUMUH SEDANG	TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN		TINGKAT KEKUMUHAN	KUMUH RINGAN
18 - 25 KUMUH RINGAN	RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	22,22%		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL	24,72%
< 18 : BELUM TERMASUK KUMUH	KONTRIBUSI PENANGANAN	11,11%		KONTRIBUSI PENANGANAN	11,11%



7.6 Rencana Aksi Masyarakat/ *Community Action Plan* (Cap) Dan Prioritas Kebutuhan Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Penyusunan rencana aksi program dilaksanakan dengan metode *Community Action Plan* (CAP). Adapun CAP ini pada dasarnya telah dilaksanakan sejak proses awal penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Grobogan ini. Dimulai dari kegiatan survey di lapangan, serta perumusan rencana aksi program yang dilaksanakan pada forum *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan OPD terkait di Kabupaten Grobogan. (OPD Apa Saja?)



Gambar 7. 21 Penentuan Masterplan dan Tematik Masyarakat

Rencana aksi program dilaksanakan dengan metode *Community Action Plan* (CAP) ini dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan penanganan indikator kekumuhan yang ada di setiap kawasan prioritas, dengan kegiatan ini diharapkan program yang akan dilaksanakan pada kawasan tersebut akan sesuai dengan kebutuhan penanganan kekumuhan yang ada. Adapun rencana aksi masyarakat dan prioritas kebutuhan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan antara lain:

Tabel VII. 9 Rencana Aksi Masyarakat/ *Community Action Plan* [CAP] Dan Prioritas Kebutuhan Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Aspek Kekumuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Lokasi Pelaksanaan				Penanggung Jawab	Sumber Pendanaan
								2023	2024	2025	2026		
SKALA KOTA													
Bangunan Gedung	Penataan muka bangunan bantaran/ kawasan ilegal	Penataan garis sempadan bangunan	17 desa/ kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000					DPRKP, BPBD, BPN	APBD Kab, Swadaya Mayarakat
	Pengelolaan kawasan sekitar sungai	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar sungai	17 desa/ kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000					Kementerian PUPR, DPU	APBN, APBD Kab, Mayarakat
		Penataan kawasan sekitar sungai	17 desa/ kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000					Kementerian PUPR, DPU	
		Penertiban bangunan di sekitar sungai	17 desa/ kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000					Kementerian PUPR, DPU	
	Pengembangan kawasan permukiman	Penataan kawasan permukiman padat dan kumuh	17 desa/ kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swasta, Swadaya Mayarakat
		Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	17 desa/ kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
	Peningkatan kualitas bangunan rumah	Pengembangan Rumah Layak Huni	17 desa/ kelurahan	1,000	Unit	17,500	17,500,000					Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Swadaya Mayarakat
		Peningkatan kualitas RTLH	17 desa/ kelurahan	1,000	Unit	17,500	17,500,000					Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP	
Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru	17 desa/ kelurahan	1,000	m	1,000	1,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat

Aspek Keterkaitan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp.x 1000)	Total Biaya (Rp.x 1000)	Tahun Pelaksanaan				Penanggung jawab	Sumber Pendanaan
								2023	2024	2025	2026		
	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan jalan rusak (berlubang/bergelombang/tergenang)	17 desa/ kelurahan	5,000	m	1,000	5,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
		Pembangunan dan peningkatan jalan dilengkapi drainase pada sisi kanan-kiri jalan	17 desa/ kelurahan	3,000	m	1,000	3,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	17 desa/ kelurahan	17	ls	200,000	3,400,000					Kementerian PUPR, DPRKP	APBD Kab, APBN, Swadaya Mayarakat
	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perpipaan dan non perpipaan	Pembangunan SIPAS (Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana)	17 desa/ kelurahan	17	ls	150,000	2,550,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
		Pembuatan Hidran Umum	17 desa/ kelurahan	17	ls	100,000	1,700,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
Drainase	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Perbaikan struktur drainase	17 desa/ kelurahan	1,000	m	1,000	1,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
		Penggantian komponen gorong-gorong	17 desa/ kelurahan	500	m	1,000	500,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
	Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Peningkatan kapasitas volume drainase	17 desa/ kelurahan	1,000	m	1,000	1,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
		Menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama tapi belum tersambung.	17 desa/ kelurahan	2,000	m	1,000	2,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
		Normalisasi Sungai	17 desa/ kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	

Aspek Keterkaitan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp.x 1000)	Total Biaya (Rp.x 1000)	Tahun Pelaksanaan				Penanggung jawab	Sumber Pendanaan
								2023	2024	2025	2026		
Air Limbah	Peningkatan cakupan pelayanan air limbah	Pembangunan jamban Rumah Tangga	17 desa/ kelurahan	17	ls	750	12,750					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
		Pembangunan septic tank komunal	17 desa/ kelurahan	17	Unit	300,000	5,100,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
		Pembangunan MCK Umum	17 desa/ kelurahan	17	Unit	300,000	5,100,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
Persampah an	Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga	17 desa/ kelurahan	2,000	Unit	300	600,000					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
		Pengadaan Motor Sampah/ Armada Pengangkutan Sampah	17 desa/ kelurahan	34	Unit	40,000	1,360,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
		Pembangunan TPS/ TPS 3R	17 desa/ kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
Proteksi Kebakaran	Peningkatan cakupan pelayanan proteksi kebakaran	Peningkatan akses motor/mobil pemadam kebakaran	17 desa/ kelurahan	17	ls	300,000	5,100,000					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
		Penyediaan alat pemadam api ringan	17 desa/ kelurahan	400	Unit	500	200,000					Kementerian PUPR, DPRKP, Damkar	
SKALA KAWASAN (KAWASAN PURWODADI 1)													
Kondisi Bangunan Gedung	Pengembangan kawasan permukiman	Pengembangan Rumah Layak Huni	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	157	Unit	17,500	2,747,500					Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Swadaya Mayarakat
		Peningkatan kualitas RTLH	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	157	Unit	17,500	2,747,500					Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP	

Aspek Keberlanjutan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp.x 1000)	Total Biaya (Rp.x 1000)	Tahun Pelaksanaan				Penanggung jawab	Sumber Pendanaan
								2023	2024	2025	2026		
Kondisi Jalan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1310	m	1,000	1,310,000					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan jalan rusak (berlubang/bergelombang/tergenang)	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	5292	m	1,000	5,292,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
		Pembangunan dan peningkatan jalan dilengkapi drainase pada sisi kanan-kiri jalan	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	5292	m	1,000	5,292,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perpipaan dan non perpipaan	Pembangunan SIPAS (Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana)	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	Unit	150,000	150,000					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
		Pembuatan Hidran Umum	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	2	Unit	100,000	200,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
Kondisi Drainase Lingkungan	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama tapi belum terhubung	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	2,000,000	2,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
		Peningkatan kapasitas volume drainase	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	2,000,000	2,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
	Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Pembangunan saluran drainase lingkungan baru	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	3212	m	1,000	3,212,000					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
	Peningkatan kualitas	Perbaikan struktur drainase	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	977	m	1,000	977,000					Kementerian PUPR, DPRKP	

Aspek Keberlanjutan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp.x 1000)	Total Biaya (Rp.x 1000)	Tahun Pelaksanaan				Penanggung jawab	Sumber Pendanaan
								2023	2024	2025	2026		
	drainase sesuai dengan pola aliran	Penggantian komponen gorong-gorong	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	977	m	1,000	977,000					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sarana prasarana air limbah	Pembangunan jamban Rumah Tangga	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	23	Unit	750	17,250					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
		Pembangunan septic tank komunal	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	Unit	300,000	300,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
		Pembangunan MCK Umum	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	3	Unit	300,000	900,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan	Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	71	Unit	300	21,300					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
		Pengadaan Motor Sampah/ Armada Pengangkutan Sampah	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	Unit	40,000	40,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
		Pembangunan TPS/ TPS 3R	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	Unit	1,000,000	1,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
Kondisi Proteksi Kebakaran	Peningkatan cakupan pelayanan proteksi kebakaran	Penyediaan alat pemadam api ringan	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	7	Unit	500	3,500					Kementerian PUPR, DPRKP, Damkar	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
		Penyediaan alat pemadam api sederhana	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	6	Unit	50,000	300,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
Pengembangan Wisata	Pengembangan RTH Publik	Pembangunan RTH publik	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	lokasi	1.000.000	1.000.000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1.500	m	1.000	1.500.000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP
	Pengembangan sistem drainase	Pembangunan saluran drainase lingkungan	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1.500	m	1.000	1.500.000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPRKP

Aspek Keterkaitan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp.x 1000)	Total Biaya (Rp.x 1000)	Tahun Pelaksanaan				Penanggung jawab	Sumber Pendanaan
								2023	2024	2025	2026		
	yang terintegrasi dengan baik	baru di sepanjang jalan inspeksi											
	Pengembangan bangunan pengaman sempadan sungai	Pembangunan tanggul Sungai Lusi	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1.500	m	2.000	3.000.000					APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUPR
SKALA KAWASAN (KAWASAN PURWODADI 2)													
Kondisi Bangunan Gedung	Pengembangan kawasan permukiman	Pengembangan Rumah Layak Huni	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1,169	Unit	17,500	20,457,500					Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Swadaya Mayarakat
		Peningkatan kualitas RTLH	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1,169	Unit	17,500	20,457,500					Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP	
Kondisi Jalan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	13,738	m	1,000	13,738,000					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan jalan rusak (berlubang/bergelombang/tergenang)	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	26,991	m	1,000	26,991,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
		Pembangunan dan peningkatan jalan dilengkapi drainase pada sisi kanan-kiri jalan	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	26,991	m	1,000	26,991,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air	Pembangunan SIPAS (Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana)	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	5	Unit	150,000	750,000					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat

Aspek Keterkaitan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp.x 1000)	Total Biaya (Rp.x 1000)	Tahun Pelaksanaan				Penanggung jawab	Sumber Pendanaan
								2023	2024	2025	2026		
	bersih perpipaan dan non perpipaan	Pembuatan Hidran Umum	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	50	Unit	100,000	5,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
Kondisi Drainase Lingkungan	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama tapi belum terhubung	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	5,000,000	5,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
		Peningkatan kapasitas volume drainase	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	5,000,000	5,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
	Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Pembangunan saluran drainase lingkungan baru	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	21,356	m	1,000	21,356,000					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Perbaikan struktur drainase	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	15,834	m	1,000	15,834,000					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
		Penggantian komponen gorong-gorong	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	15,834	m	1,000	15,834,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sarana prasarana air limbah	Pembangunan jamban Rumah Tangga	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	95	Unit	750	71,250					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
		Pembangunan septic tank komunal	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	20	Unit	300,000	6,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
		Pembangunan MCK Umum	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	20	Unit	300,000	6,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan	Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	2,573	Unit	300	771,900					Kementerian PUPR, DPRKP	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
		Pengadaan Motor Sampah/ Armada Pengangkutan Sampah	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	5	Unit	40,000	200,000					Kementerian PUPR, DPRKP	

Aspek Keberlanjutan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp.x 1000)	Total Biaya (Rp.x 1000)	Waktu Pelaksanaan				Penanggung jawab	Sumber Pendanaan
								2023	2024	2025	2026		
		Pembangunan TPS/ TPS 3R	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	2	Unit	1,000,000	2,000,000					Kementerian PUPR, DPRKP	
Kondisi Proteksi Kebakaran	Peningkatan cakupan pelayanan proteksi kebakaran	Penyediaan alat pemadam api ringan	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	35	Unit	500	17,500					Kementerian PUPR, DPRKP, Damkar	APBN, APBD Kab, Swadaya Mayarakat
		Penyediaan alat pemadam api sederhana	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	34	Unit	50,000	1,700,000					Kementerian PUPR, DPRKP	

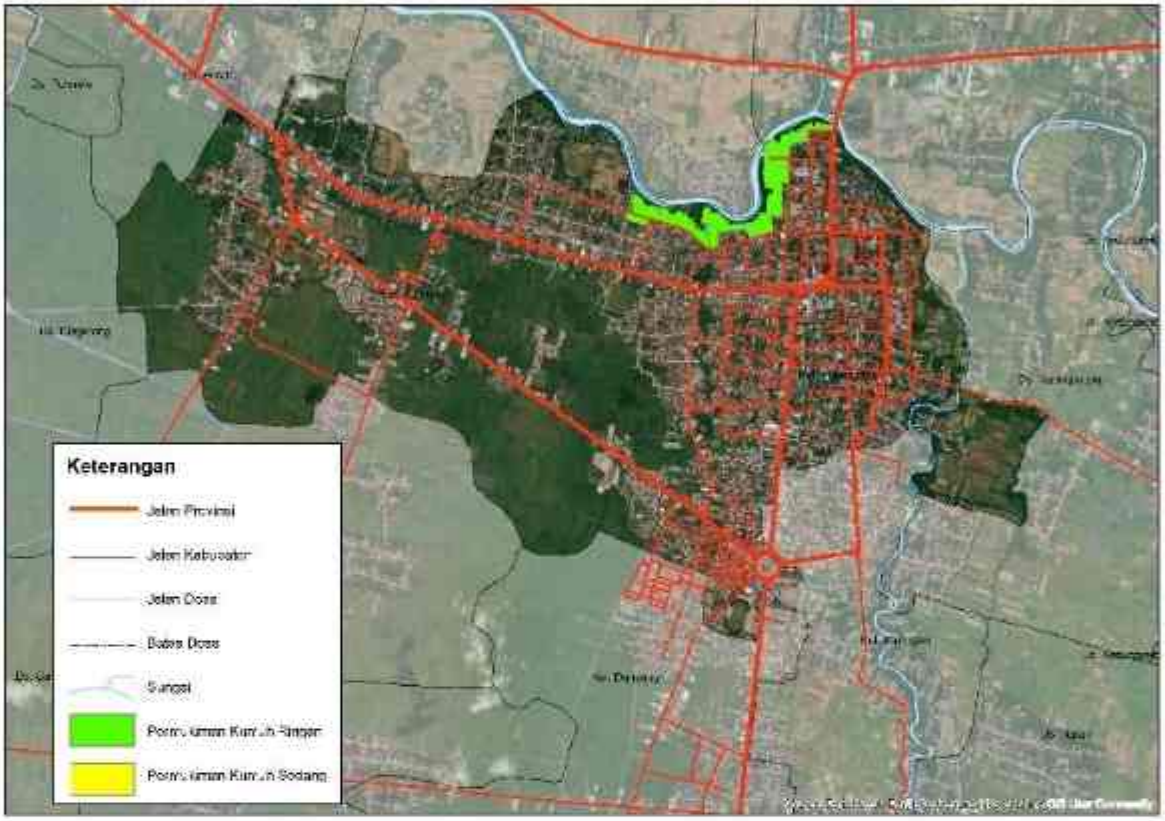
Sumber: Analisis Penyusun, 2022

7.7 Rencana Detail Konsep Desain Kawasan Penanganan Prioritas (RAB dan DED)

7.7.1 Rencana Detail Konsep Desain DED Kawaan Penanganan Prioritas

Penyusunan rencana detail design (DED) kawaan prioritas RP2KPKPK Kabupaten Grobogan ini dibagi menjadi 2 kawaan yaitu Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi- Kuripan), dan Kawasan Purwodadi 2 (Purwodadi- Kalongan).

A. Kawasan Purwodadi 1 (Purwodadi- Kuripan)



Gambar 7. 22 Lokasi Penanganan Kawasan Prioritas Purwodadi 1

Kawasan Purwodadi 1 terletak di Kelurahan Purwodadi, dan Keluran Kuripan. Lokasi kawasan prioritas Purwodadi 1 ini tersebar dilokasi sebagai berikut ini:

Kelurahan Purwodadi:

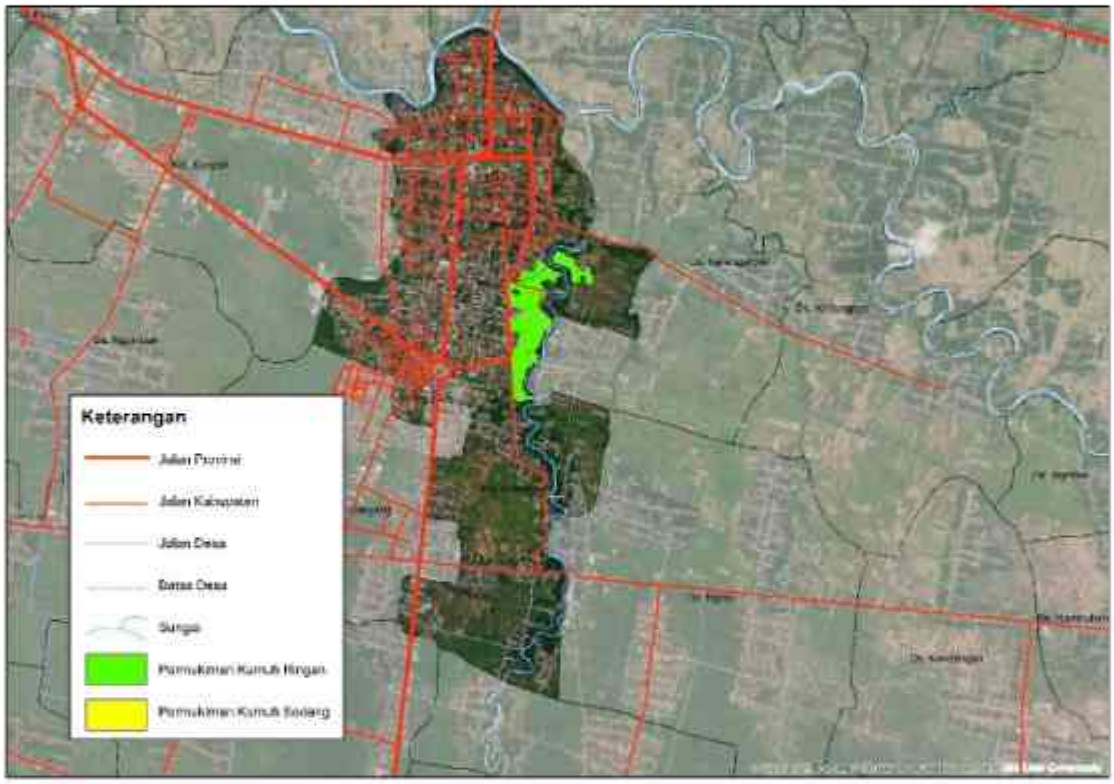
1. RT.01/RW01
2. RT.02/RW.06
3. RT.05/RW.01
4. RT.05/RW.03
5. RT.06/RW.01
6. RT.07/RW.03
7. RT.08/RW.03
8. RT.09/RW.03
9. RT.09/RW.07
10. RT.05/RW.06
11. RT.0/6RW.03

12. RT.08/RW.07

Kelurahan Kuripan:
1. RT.01/RW.05
2. RT.01/RW.07
3. RT.02/RW.06
4. RT.03/RW.06

Kawasan prioritas penanganan kumuh Purwodadi 1 dari gambar 7.22 dapat dilihat bahwa persebaran kawasan tersebar disekitar pinggiran aliran Sungai Lusi.

B. Kawasan Purwodadi 2 (Purwodadi-Kalongan)



Gambar 7. 23 Lokasi Penanganan Kawasan Prioritas Purwodadi 2

Kawasan Purwodadi 1 terletak di Kelurahan Purwodadi, dan Keluran Kalongan. Lokasi kawasan prioritas Purwodadi 1 ini tersebar dilokasi sebagai berikut ini:

Kelurahan Purwodadi:
1. RT.04/RW.22
2. RT.05/RW.22
3. RT.66/RW.22

Kelurahan Kalongan:
1. RT.01/RW08
2. RT.02/RW.06
3. RT.02/RW.08
4. RT.03/RW.04
5. RT.03/RW.06
6. RT.04/RW.04

7. RT.04/RW.06
8. RT.05/RW.06
9. RT.07/RW.06
10. RT.07/RW.08

Kawasan prioritas penanganan kumuh Purwodadi 2 dari gambar 7.23 dapat dilihat bahwa persebaran kawasan tersebar disekitar pinggiran aliran Sungai Lusi.

Program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan RP2KPKPK pada tahun perencanaan yang diprioritaskan adalah Kawasan Purwodadi 1 dan 2 yang tersebar sebagaimana penjelasan dihalaman sebelumnya. Prioritas ini sesuai dengan hasil analisis dan penilaian berdasarkan indikator kekumuhan serta kesepakatan. Untuk lebih jelasnya mengenai program pembangunan adalah sebagai :

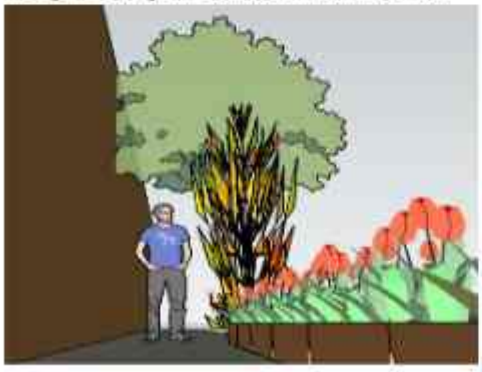
1. Bangunan Gedung
2. Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Jalan Lingkungan Permukiman
3. Sarana Air Minum
4. Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Drainase
5. Sanitasi
6. Persampahan
7. Proteksi Kabakaran

Dari dua kawaan prioritas yang telah direncanakan, berikut ini merupakan konsep awal rencana pembangunan penanganan permukiman.



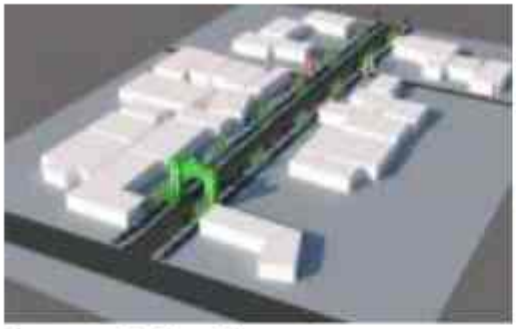
Pengembangan kawaan permukiman, yang memiliki konsep penyediaan rumah layak huni dengan pemugaran rumah, dengan memperhatikan aspek teknis seperti rumah dengan dengan struktur tahan gempa, sirkulasi udara dalam ruang, memenuhi aspek estetika.

Pengembangan Kawasan Permukiman



Peningkatan kualitas kawaan permukiman berupa pengadaan trottoar dengan lebar 1,5m dihiyasi dengan taman kecil membuat sirkulasi di lingkungan permukiman lebih nyaman dan tertata, sehingga dapat memberikan efektifitas mobilitas mayarakat.

Peningkatan Kualita Lingkungan Permukiman



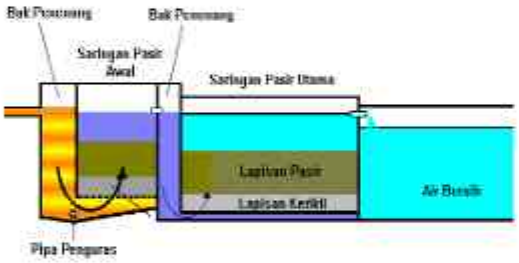
Penataan Koridor Jalan

Penataan koridor jalan berupa pengadaan dan peningkatan jalan lingkungan pada kawasan permukiman direncanakan untuk memperlancar mobilitas mayarakat, sekaligun mengubah citra suatau kawaan menjadi lebuh tertata.



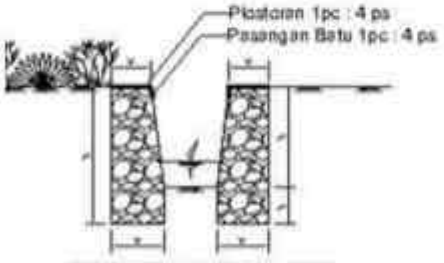
Pengadaan Hidran Umum

Pengadaan hidran umum dibeberapa lokasi yang ada didalam kawasan prioritas kumuh, diharap dapat mempermudah masyarakat jika nantinya terjadi kondisi darurat seperti kebakaran yang susah dijangkau oleh mobil tangkin pemadam kebakaran, selain itu dengan adanya hidran umum ini bisa menjadi cadangan air bersih warga diaat kondisi darurat .



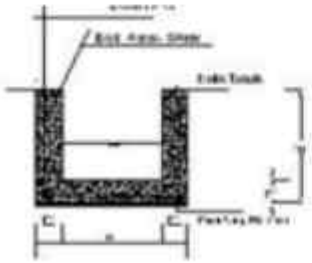
Pengadaan SIPAS

Pengadaan SISPAS (Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana) dibeberapa lokasi yang ada didalam kawasan prioritas kumuh, diharap dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh air berirsih yang layak .



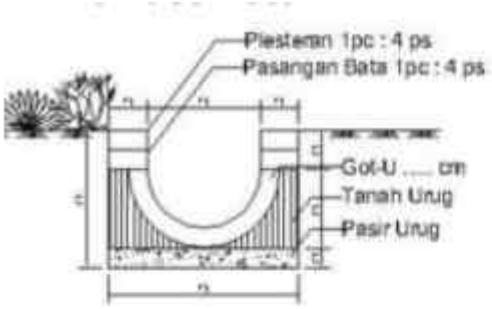
Drainase Pas Batu

Konsep penanganan drainase lingkungan menggunakan drainase pasangan batu, dipilih pengerjaan dan pemeliharaan lebih mudah dan murah dapat dikerjakan oleh masyarakat, lingkungan terlihat lebih rapih.



Drainase Beton

Konsep penanganan drainase lingkungan menggunakan drainase beton, dipilih struktur kuat dan tahan lama, lingkungan terlihat lebih rapih.



Konsep penanganan drainase lingkungan menggunakan drainase got -u, dipilih pengerajan dan pemeliharaan mudah , untuk lokasi yang relatif lebih datar, lingkungan terlihat lebih rapih.

Drainase Got-U



Program jambanisasi yaitu pembanggunan jamban rumah tangga, pengedaan septic tank komunal, dan pembanggunan mck umum, untuk meniadakan BABS pada area-area kumuh.

Jambanisasi



Pengadaan sarana dan prasarana persampahan dilokasi permukiman kumuh berupa pegadaan tempat sampah, pembanggunan TPS3R, dan pengadaan sarana pengankutan, mengusung konsep eco frendly, yang diharapkan dapat menata citra kota dikawasan tersebut.

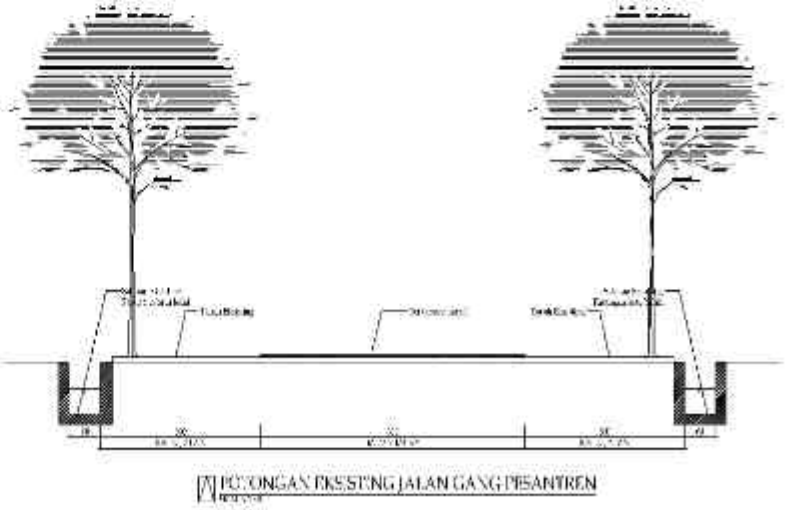
Sarana dan Prasarana Persampahan

Selain konsep awal rencana pembangunan penanganan permukiman yang telah dijabarkan, berikut ini merupakan beberapa gambar pra desain di kawasan prioritas telah direncanakan.

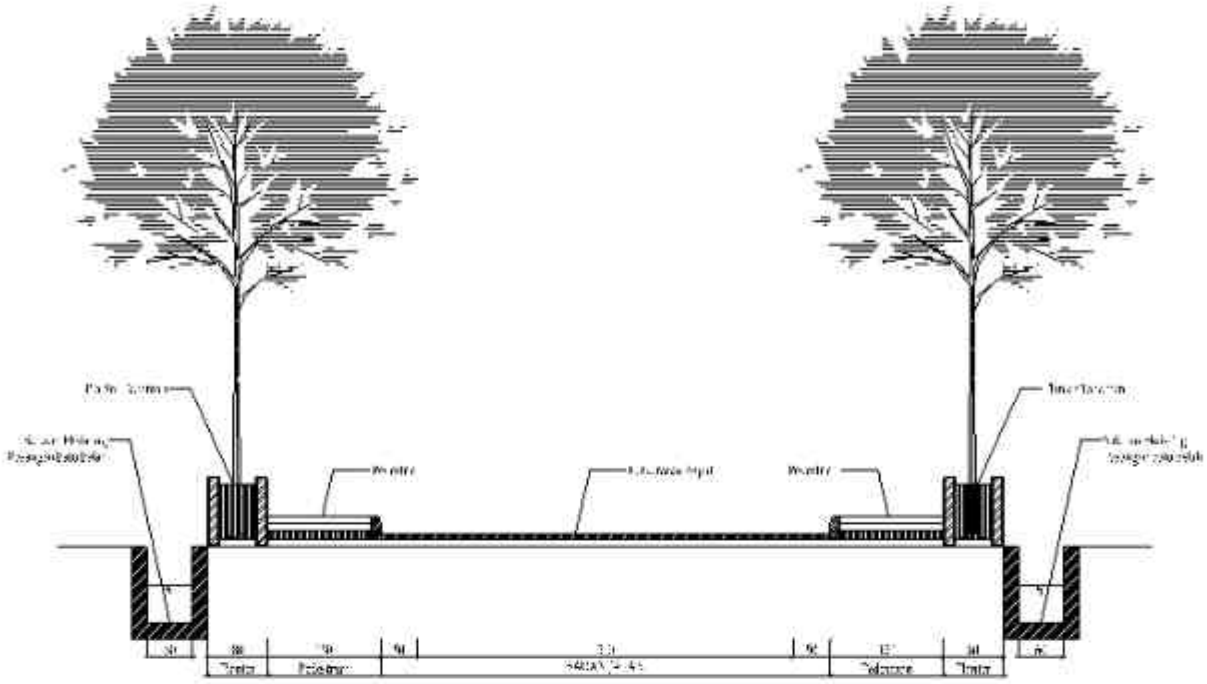
1. Pra Desain Koridor Jalan Pesantren



SITE EKSISTING



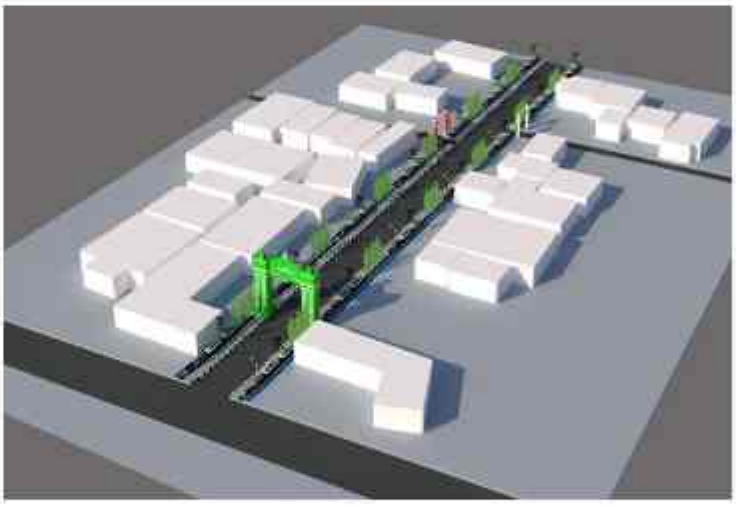
POTONGAN EKSISTING JALAN GANG PESANTREN

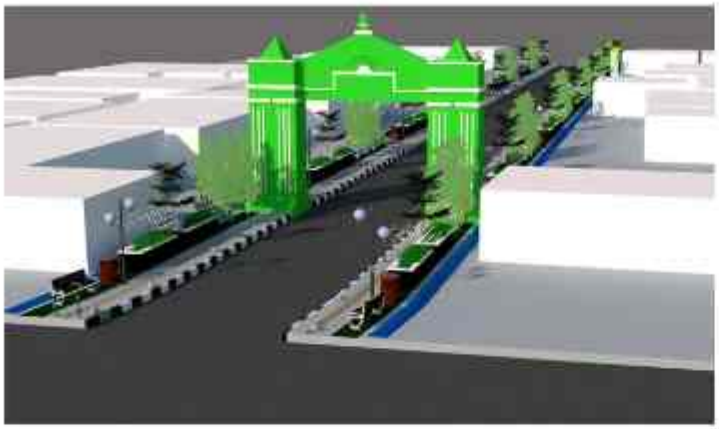


POTONGAN RENCANA JALAN GANG PESANTREN

BLOCKPLAN

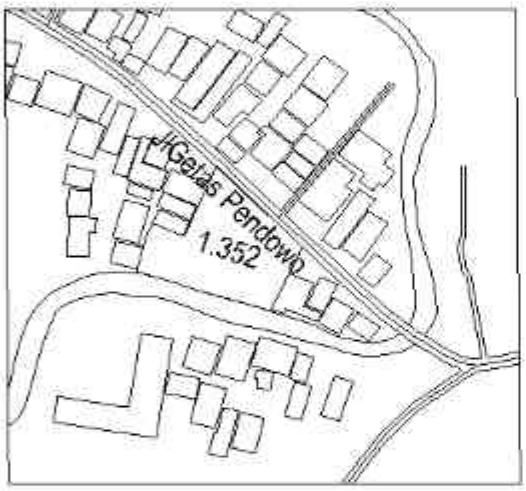




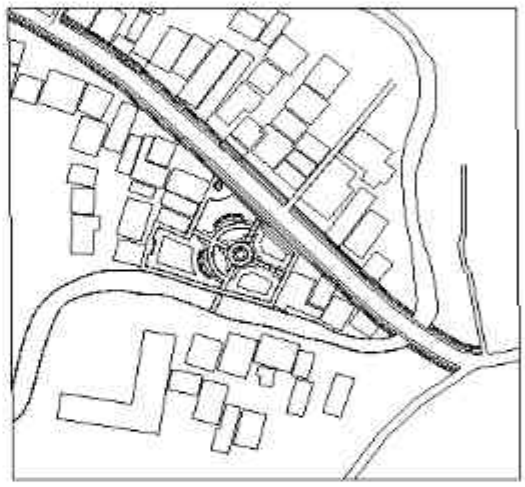




2. Pra Desain Taman Getas Pendowo



SITE EKSISTING



SITE PLAN



KAWASAN TAMAN DAN
JALAN GETAS PENDOWO



TAMAN GETAS PENDOWO



TAMAN GETAS PENDOWO

3. Pra Desain Koridor Jalan Getas Pendowo



KAWASAN TAMAN DAN JALAN GETAS PENDOWO

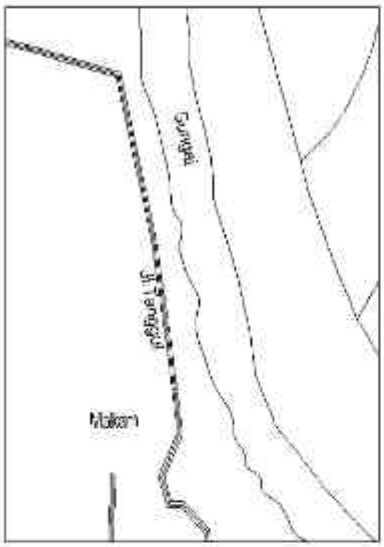


JALAN GETAS PENDOWO

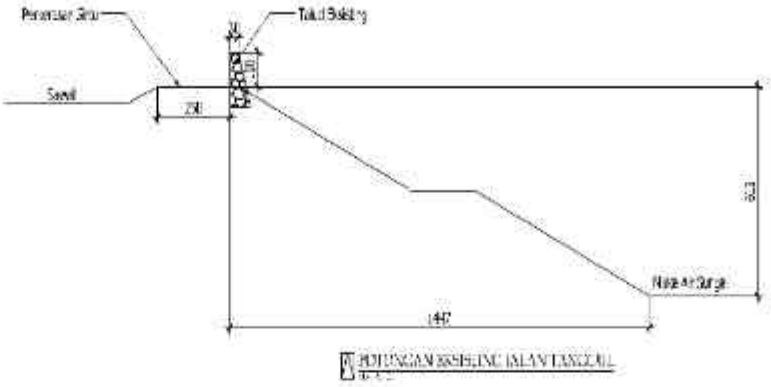


JALAN GETAS PENDOWO

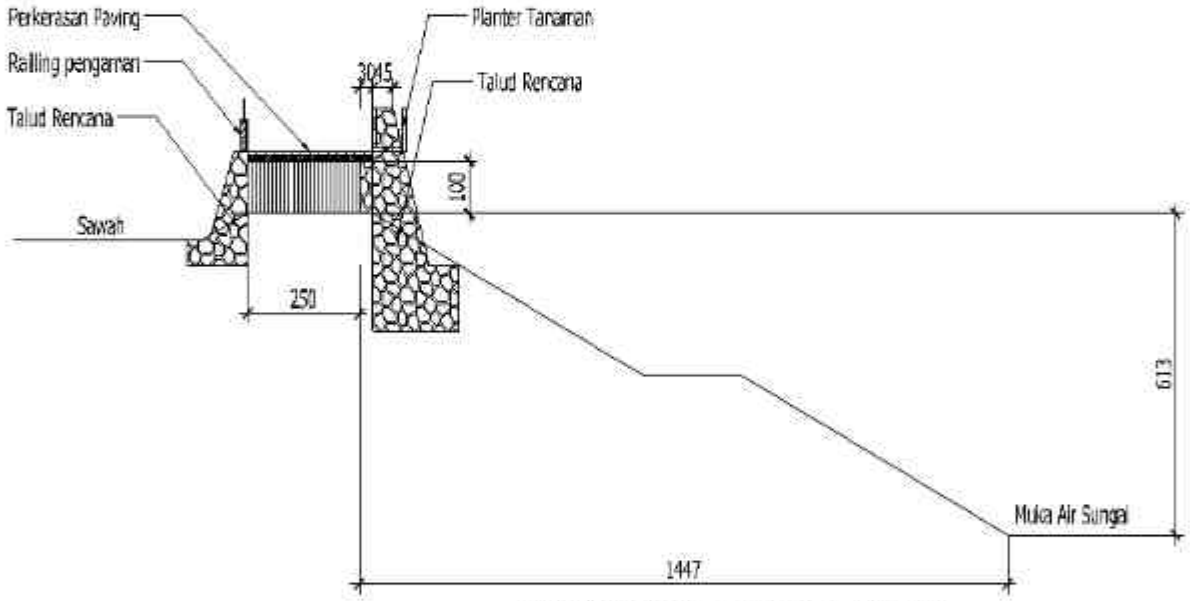
4. Pra Desain Koridor Jalan Tanggul



SITE EKSISTING



POTONGAN EKSISTING



POTONGAN RENCANA JALAN TANGGUL

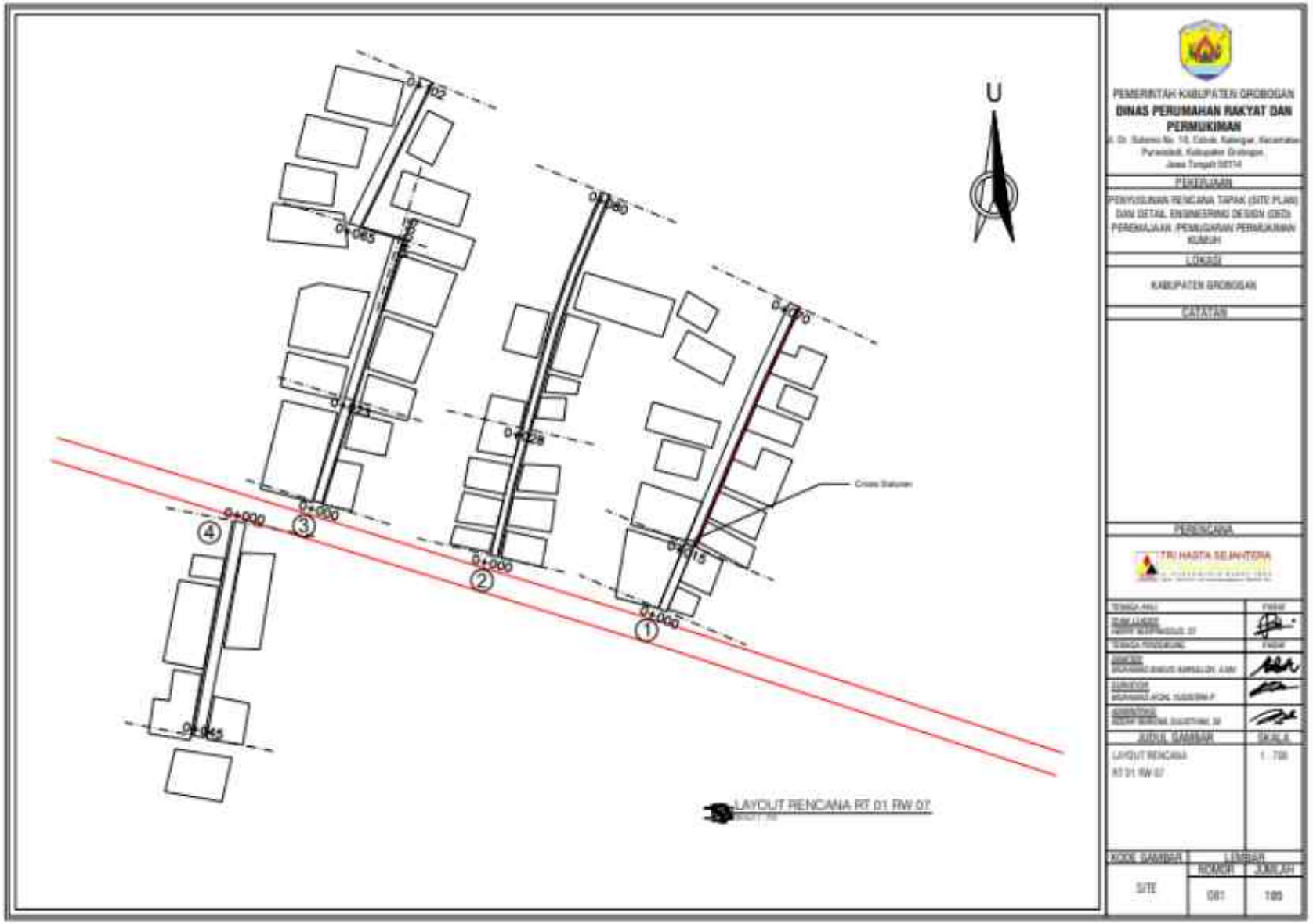
POTONGAN RENCANA

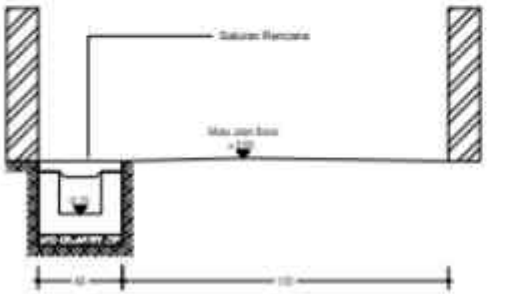




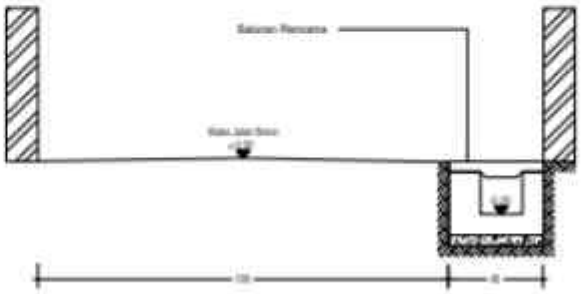



Selain konsep awal dan gambar pra desain rencana pembangunan penanganan permukiman yang telah dijabarkan, berikut ini merupakan beberapa sampel DED yang telah direncanakan pada kawasan prioritas yang ada. Untuk dokumen DED dan RAB lengkapnya terlampir pada dokumen ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

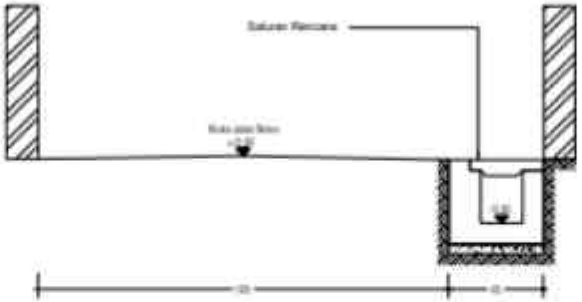

U
0+000
0+045
0+085
0+102
0+080
0+028
0+015
0+000
0+000
0+000
Cross Saluran
LAYOUT RENCANA RT 01 RW 07
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
PENERJUAN
PENYUSUNAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PEREMAJAAN /PENINGKATAN PERMUKIMAN KUMUH
LOKASI
KABUPATEN GROBOGAN
CATATAN
PERENCANA
TRI HASTA SEJAHTERA
JUDUL GAMBAR
SKALA
LAYOUT RENCANA
RT 01 RW 07
1 : 700
KODE GAMBAR
LEMBAR
NOMOR
JUMLAH
SITE
001
1/85



TIPIKAL POTONGAN RENCANA STA 0+000 LOKASI 1



TIPIKAL POTONGAN RENCANA STA 0+015 LOKASI 1



TIPIKAL POTONGAN RENCANA STA 0+070 LOKASI 1

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Jl. Dr. Sutomo No. 10, Cabira, Kalangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58114

PEKERJAAN

PENYUSUNAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PERBAIKAN /PEMUGARAN PERMUKIMAN KUMUH

LOKASI

KABUPATEN GROBOGAN

CATATAN

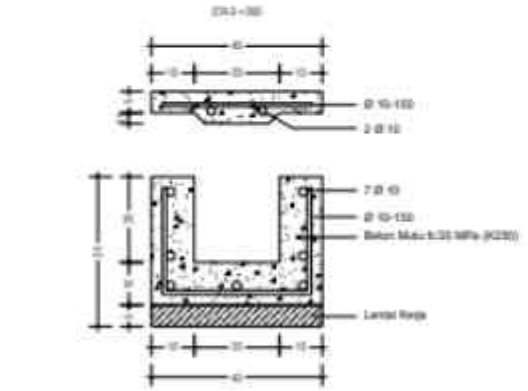
PERENCANA

TRI HASTA SEJAHTERA

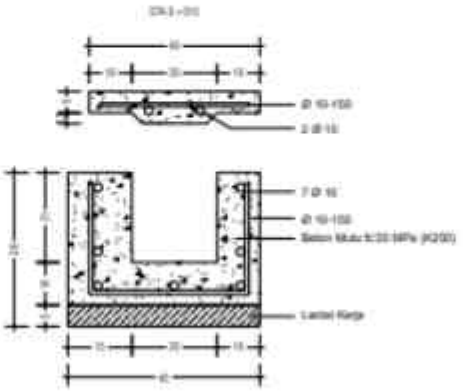
TENAGA AHLI	PARAF
PJM (AHLI)	
TENAGA PENDUKUNG	PARAF
ARSITEK	
SURVEYOR	
ADMINISTRASI	

JUDUL GAMBAR	SKALA
TIPIKAL POTONGAN RENCANA STA 0+000 LOKASI 1 STA 0+015 LOKASI 1 STA 0+070 LOKASI 1	1 : 20

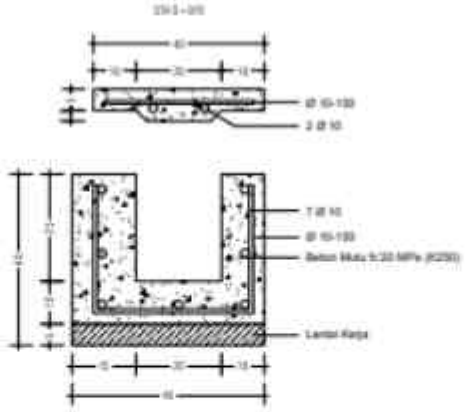
KODE GAMBAR	LEMBAR	
	NOMOR	JUMLAH
TPR	082	185



DETAIL TIPIKAL SALURAN LOKASI 1 RT 01 RW 07



DETAIL TIPIKAL SALURAN LOKASI 1 RT 01 RW 07



DETAIL TIPIKAL SALURAN LOKASI 1 RT 01 RW 07

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Jl. Dr. Sabirin No. 10, Cokrik, Kalangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58114

PEKERJAAN

PENYUSUNAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PEREMAJAAN /PEMUGARAN PERMUKIMAN KUMUH

LOKASI

KABUPATEN GROBOGAN

CATATAN

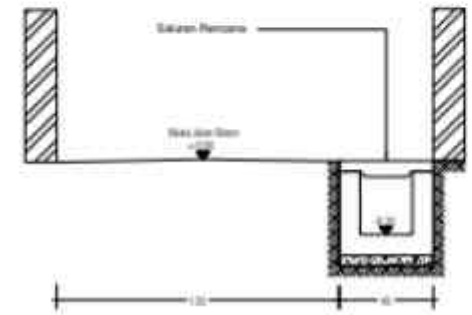
PERENCANA

TRI HASTA SEJAHTERA

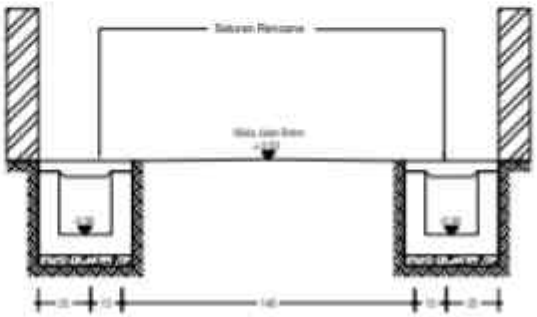
TENAGA AHLI	PARAF
[illegible]	
TENAGA PENDUKUNG	PARAF
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL TIPIKAL SALURAN LOKASI 1 RT 01 RW 07	1 : 10

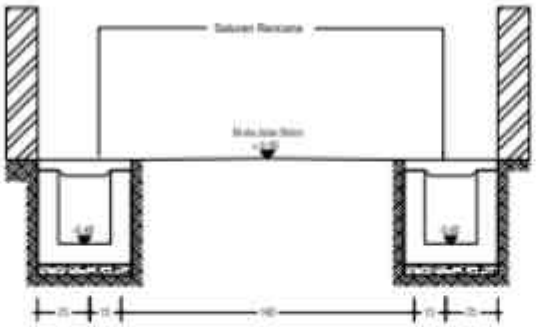
KODE GAMBAR	LEMBAR NOMOR	LEMBAR JUMLAH
DET	083	185



TIPIKAL POTONGAN RENCANA STA 0+000 LOKASI 2



TIPIKAL POTONGAN RENCANA STA 0+028 LOKASI 2



TIPIKAL POTONGAN RENCANA STA 0+080 LOKASI 2

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Jl. Dr. Sutomo No. 10, Cobrik, Kalangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58714

PEKERJAAN

PENYUSUNAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PEREMAJAAN /PEMUGARAN PERMUKIMAN KUMUH

LOKASI

KABUPATEN GROBOGAN

CATATAN

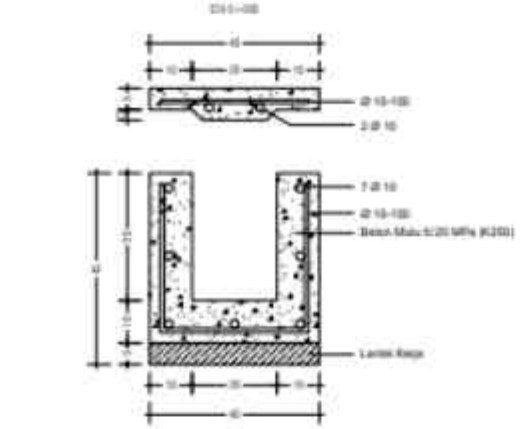
PERENCANA

TRI HASTA SEJAHTERA

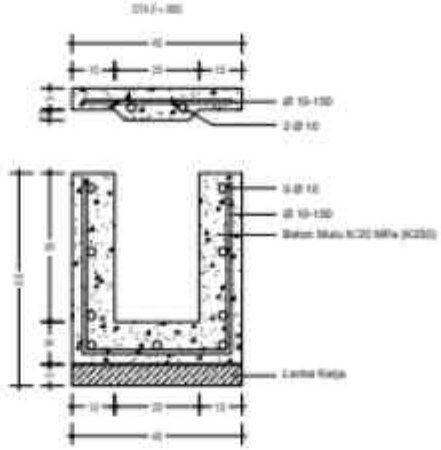
TENAGA AHLI	PARAF
[illegible]	
TENAGA PENDUKUNG	PARAF
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

JUDUL GAMBAR	SKALA
TIPIKAL POTONGAN RENCANA STA 0 + 000 LOKASI 2 STA 0 + 028 LOKASI 2 STA 0 + 080 LOKASI 2	1 : 20

KODE GAMBAR	LEMBAR	
	NOMOR	JUMLAH
TPR	084	185



DETAIL TIPIKAL SALURAN LOKASI 2 RT 01 RW 07



DETAIL TIPIKAL SALURAN LOKASI 2 RT 01 RW 07

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Jl. Dr. Sutomo No. 10, Cetlok, Kalangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58114

PEKERJAAN

PENYUSUNAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PEREMAJAAN /PENINGKATAN PERMUKIMAN KUMUH

LOKASI

KABUPATEN GROBOGAN

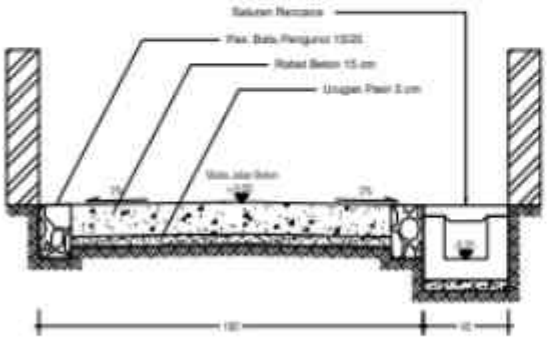
CATATAN

PERENCANA

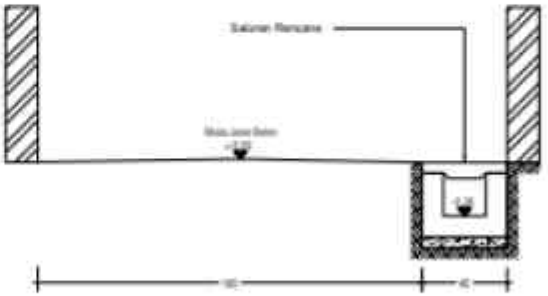
TRI HASTA SEJAHTERA

TENAGA AHLI	PARAF
TENAGA PENDUKUNG	PARAF
JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL TIPIKAL SALURAN LOKASI 2 RT 01 RW 07	1 : 10

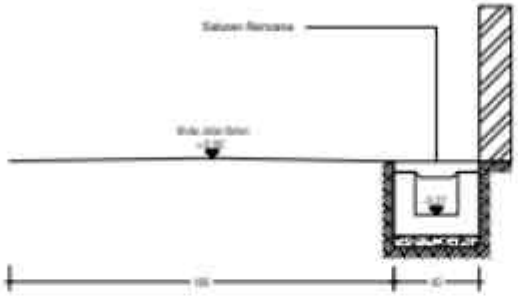
KODE GAMBAR	LEMBAR	
	NOMOR	JUMLAH
DET	085	185



TIPIKAL POTONGAN RENCANA STA 0+000 LOKASI 3



TIPIKAL POTONGAN RENCANA STA 0+029 LOKASI 3



TIPIKAL POTONGAN RENCANA STA 0+055 LOKASI 3

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Jl. Dr. Sutomo No. 10, Cabuk, Kalangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58114

PEKERJAAN

PENYUSUNAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PEREMAJAAN /PEMUGARAN PERMUKIMAN KUMUH

LOKASI

KABUPATEN GROBOGAN

CATATAN

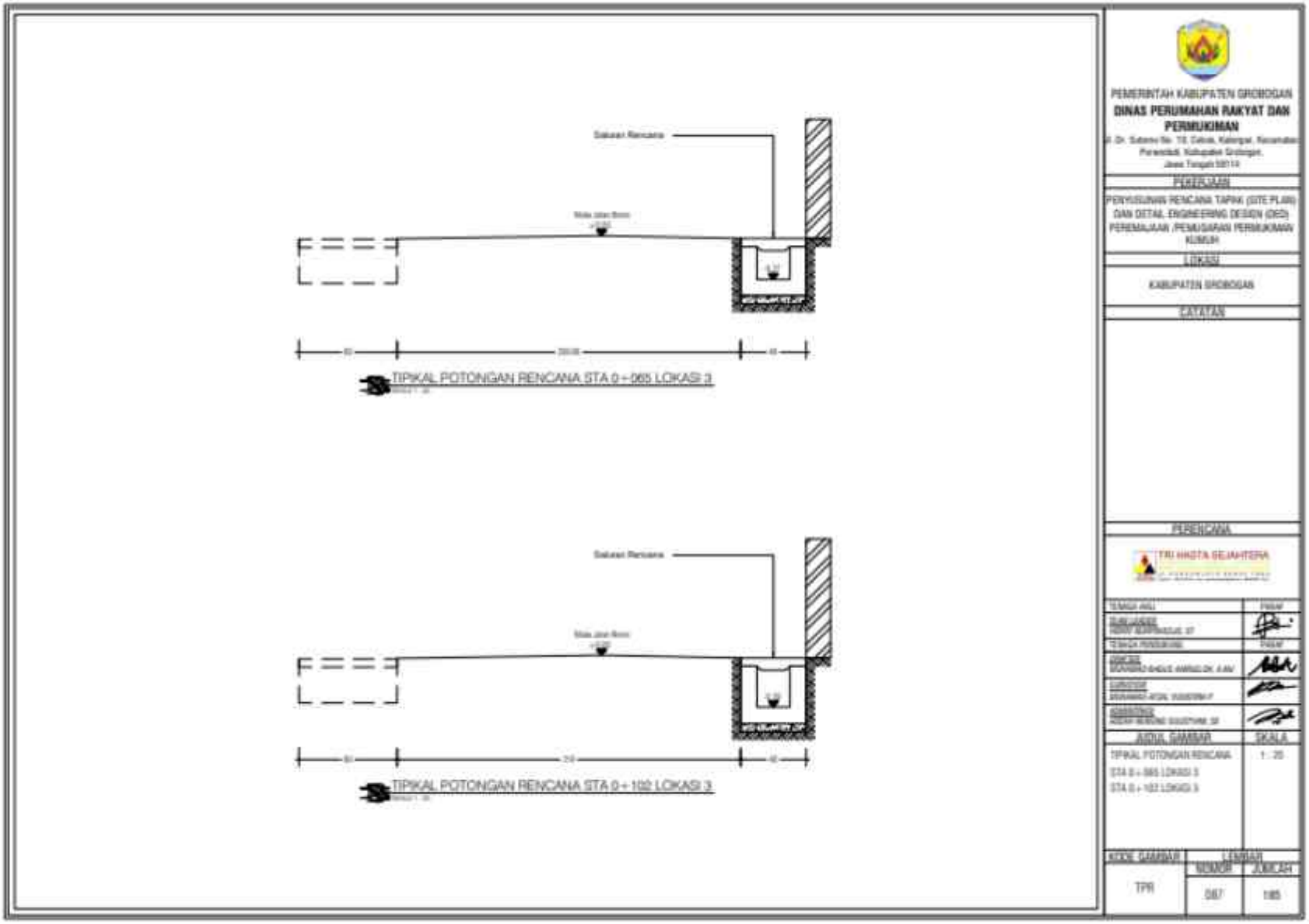
PERENCANA

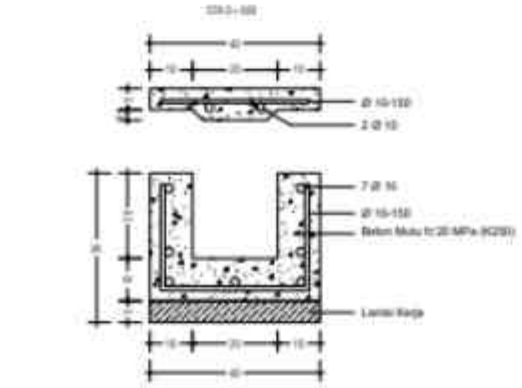
TRI HASTA SEJAHTERA

TENAGA AHLI	PARAF
[illegible]	
TENAGA PENDUKUNG	PARAF
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

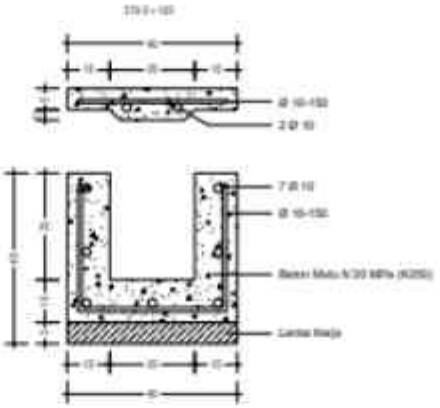
JUDUL GAMBAR	SKALA
TIPIKAL POTONGAN RENCANA STA 0 + 000 LOKASI 3 STA 0 + 029 LOKASI 3 STA 0 + 055 LOKASI 3	1 : 20

KODE GAMBAR	LEMBAR	
	NOMOR	JUMLAH
TPS	086	185


Saluran Rencana
TIPIKAL POTONGAN RENCANA STA 0 + 065 LOKASI 3
Saluran Rencana
TIPIKAL POTONGAN RENCANA STA 0 + 102 LOKASI 3
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
PEKERJAAN
PENYUSUNAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PEREMAJAAN /PEMUGARAN PERMUKIMAN KUMUH
LOKASI
KABUPATEN GROBOGAN
CATATAN
PERENCANA
TRI HASTA SEJAHTERA
JUDUL GAMBAR
TIPIKAL POTONGAN RENCANA
STA 0 + 065 LOKASI 3
STA 0 + 102 LOKASI 3
SKALA
1 : 20
KODE GAMBAR
TPR
LEMBAR
NOMOR
087
JUMLAH
185



DETAIL TIPIKAL SALURAN LOKASI 1 RT 01 RW 07



DETAIL TIPIKAL SALURAN LOKASI 1 RT 01 RW 07

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Jl. Dr. Sukiman No. 10, Dukuh, Kadengan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58114

PEKERJAAN

PENYUSUNAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PEREMAJAAN /PENGUGARAN PERMUKIMAN KUMUH

LOKASI

KABUPATEN GROBOGAN

CATATAN

PERENCANA

TRI HASTA SEJAHTERA

TENAGA AHLI	PARAF
TENAGA PENDUKUNG	PARAF

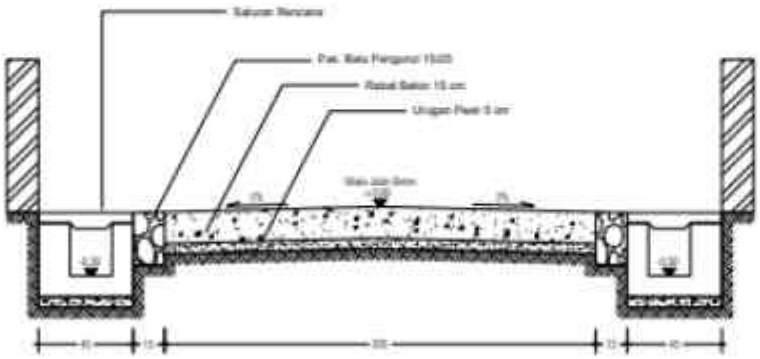
JUDUL GAMBAR

DETAIL TIPIKAL SALURAN LOKASI 3 RT 01 RW 07

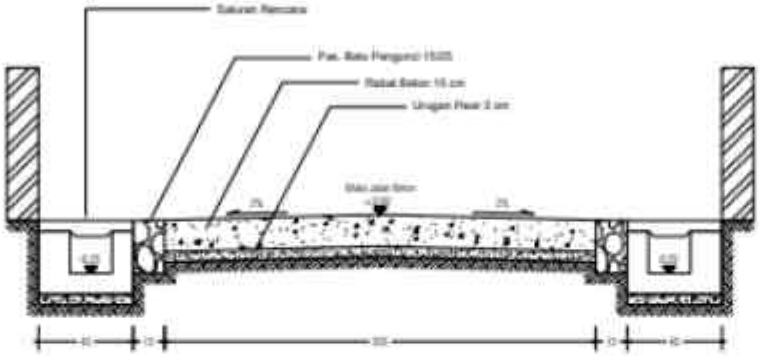
SKALA

1 : 10

KODE GAMBAR	LEMBAR	
	NOMOR	JUMLAH
DET	088	189



TIPIKAL POTONGAN RENCANA STA 0+000 LOKASI 4



TIPIKAL POTONGAN RENCANA STA 0+045 LOKASI 4

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Jl. Dr. Soetomo No. 10, Cabluk, Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58114

PEKERJAAN

PENYUSUNAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PEREMAJAAN /PEMUGARAN PERMUKIMAN KUMUH

LOKASI

KABUPATEN GROBOGAN

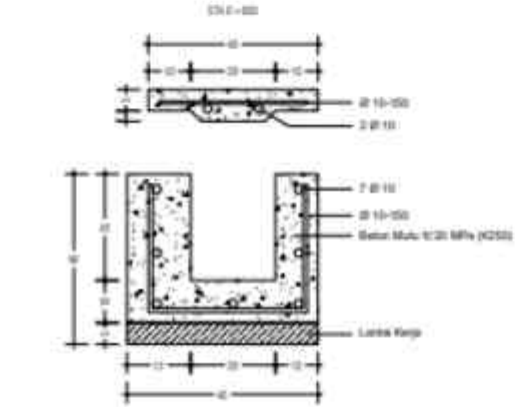
CATATAN

PERENCANA

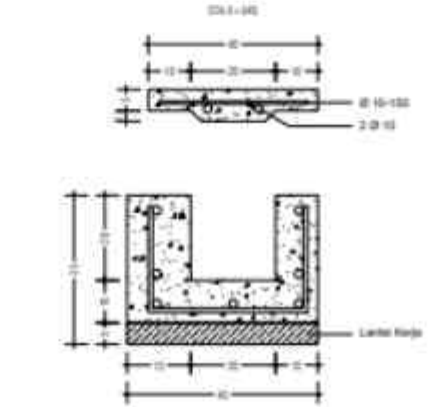
TRI HASTA SEJAHTERA

TENAGA AHLI	PARAF
TENAGA PENDUKUNG	PARAF
JUDUL GAMBAR	SKALA
TIPIKAL POTONGAN RENCANA STA 0 + 000 LOKASI 4 STA 0 + 045 LOKASI 4	1 : 20

KODE GAMBAR	LEMBAR	
	NOMOR	JUMLAH
TPR	089	185



DETAIL TIPIKAL SALURAN LOKASI 4 RT 01 RW 07



DETAIL TIPIKAL SALURAN LOKASI 4 RT 01 RW 07

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Jl. Dr. Sutomo No. 10, Cebok, Kadangan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58114

PEKERJAAN

PENYUSUNAN RENCANA TAPAK (SITE PLAN) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PERMUKIMAN /PENINGKATAN PERMUKIMAN KUMUH

LOKASI

KABUPATEN GROBOGAN

CATATAN

PERENCANA

TRI HASTA SEJAHTERA

TENAGA AHLI	PARAF
PEMBUATAN	
TENAGA PENDUKUNG	PARAF
DIREKSI	
KONTRAKTOR	
ASSISTANT	

JUDUL GAMBAR	SKALA
DETAIL TIPIKAL SALURAN LOKASI 4 RT 01 RW 07	1 : 10

KODE GAMBAR	LEMBAR	
	NOMOR	JUMLAH
DET	090	185

7.7.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kawasan Penanganan Prioritas

Penyusunan rencana angaran biaya (RAB) ini pada dasarnya telah dilaksanakan sejak proses awal penyusunan RP2KPKPK Kabupaten Grobogan. Berikut ini merupakan rincian RAB Penysunan Rencana Tapak (*Site Plan*) dan Detail Engennering Desaign (DED) tahun anggaran 2022.

Pekerjaan	:	Penysunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engennering Desaign (DED)
	:	Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
Lokasi	:	Kab. Grobogan
TA	:	2022

Tabel VII. 10 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No.	ITEM PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	**Pekerjaan Persiapan**				
	- Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Ls	2.500.000,00	2.775.000,00
	- Pengukuran pra dan pasca konstruksi	1,00	Ls	2.000.000,00	2.220.000,00
II	**KELURAHAN KURIPAN**				
a.	***RT 02 RW 07***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	ls	700.000,00	700.000,00
2	Galian Biasa	22,78	M3	59.226,20	1.349.069,19
3	Pembongkaran Pavingblock	291,60	M2	46.532,00	13.568.731,20
4	Pembongkaran Beton	17,12	M3	381.273,25	6.527.080,36
5	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Saluran	51,36	M3	1.208.714,72	62.076.566,01
6	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Jalan	24,57	M3	1.208.714,72	29.698.120,56
7	Lantai Kerja Beton f'c 10 Mpa	4,53	M3	899.296,20	4.069.315,30
8	Tulangan	3.616,14	Kg	16.216,98	58.642.799,44
9	Pasangan Batu dg Finishing Plester + Aci	52,66	M3	733.364,52	38.619.782,35
10	Timbunan Biasa dari sumber galian	118,71	M3	140.346,51	16.661.025,71
11	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)/ Timbunan Pasir	31,52	M3	129.040,54	4.066.777,01
12	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Natural tebal 8cm	291,60	M2	132.720,00	38.701.152,00
b.	***RT 01 RW 04***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	ls	1.250.000,00	1.250.000,00
2	Galian Biasa	10,23	M3	59.226,20	605.697,46
3	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Saluran	34,09	M3	1.208.714,72	41.204.480,30
4	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Jalan	9,00	M3	1.208.714,72	10.882.058,58
5	Lantai Kerja Beton f'c 10 Mpa	4,09	M3	899.296,20	3.678.121,46
6	Tulangan	2.400,28	Kg	16.216,98	38.925.253,59
7	Pasangan Batu dg Finishing Plester + Aci	7,13	M3	733.364,52	5.225.222,21
8	Timbunan Biasa dari sumber galian	25,36	M3	140.346,51	3.558.556,00

No.	ITEM PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
9	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)/ Timbunan Pasir	4,43	M3	129.040,54	571.262,45
c.	***RT 01 RW 05***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	ls	1.400.000,00	1.400.000,00
2	Galian Biasa	15,44	M3	59.226,20	914.218,58
3	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Saluran	28,49	M3	1.208.714,72	34.441.721,46
4	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Jalan	22,96	M3	1.208.714,72	27.750.881,16
5	Lantai Kerja Beton f'c 10 Mpa	7,88	M3	899.296,20	7.081.957,57
6	Tulangan	2.006,33	Kg	16.216,98	32.536.576,91
d.	***RT 01 RW 07***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	ls	500.000,00	500.000,00
2	Galian Biasa	20,89	M3	59.226,20	1.237.073,04
3	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Saluran	50,61	M3	1.208.714,72	61.169.667,35
4	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Jalan	19,02	M3	1.208.714,72	22.986.127,75
5	Lantai Kerja Beton f'c 10 Mpa	8,64	M3	899.296,20	7.772.167,41
6	Tulangan	3.563,31	Kg	16.216,98	57.786.065,90
7	Pasangan Batu dg Finishing Plester + Aci	5,13	M3	733.364,52	3.765.093,45
8	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)/ Timbunan Pasir	4,61	M3	129.040,54	595.199,47
e.	***RT 03 RW 07***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	ls	500.000,00	500.000,00
2	Galian Biasa	16,32	M3	59.226,20	966.598,24
3	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Saluran	26,13	M3	1.208.714,72	31.586.495,56
4	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Jalan	28,27	M3	1.208.714,72	34.169.398,04
5	Lantai Kerja Beton f'c 10 Mpa	4,87	M3	899.296,20	4.375.076,01
6	Tulangan	1.840,00	Kg	16.216,98	29.839.287,89
7	Pasangan Batu dg Finishing Plester + Aci	45,77	M3	733.364,52	33.567.854,18
8	Timbunan Biasa dari sumber galian	98,30	M3	140.346,51	13.796.272,69
9	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)/ Timbunan Pasir	9,42	M3	129.040,54	1.215.561,85
f.	***RT 05 RW 13***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	ls	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Galian Biasa	51,44	M3	59.226,20	3.046.299,60
3	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Saluran	112,73	M3	1.208.714,72	136.263.244,75
4	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Jalan	58,72	M3	1.208.714,72	70.970.893,24
5	Lantai Kerja Beton f'c 10 Mpa	14,05	M3	899.296,20	12.631.514,42
6	Tulangan	7.937,72	Kg	16.216,98	128.725.840,46

No.	ITEM PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
7	Pasangan Batu dg Finishing Plester + Aci	6,27	M3	733.364,52	4.601.715,69
8	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)/ Timbunan Pasir	19,57	M3	129.040,54	2.525.323,29
9	Laston Lapis Aus (AC-WC)	20,70	Ton	1.211.454,48	25.077.107,65
10	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	27,00	Liter	13.853,69	374.049,51
11	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	31,32	Ton	1.175.176,69	36.806.534,02
12	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	180,00	Liter	13.930,20	2.507.436,54
g.	***RT 03 RW 18***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	Is	500.000,00	500.000,00
2	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Saluran	8,75	M3	1.208.714,72	10.576.253,76
3	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Jalan	22,50	M3	1.208.714,72	27.196.081,10
4	Lantai Kerja Beton f'c 10 Mpa	1,88	M3	899.296,20	1.686.180,37
5	Tulangan	616,10	Kg	16.216,98	9.991.228,06
6	Pasangan Batu dg Finishing Plester + Aci	14,00	M3	733.364,52	10.263.436,47
7	Timbunan Biasa dari sumber galian	5,63	M3	140.346,51	789.449,13
8	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)/ Timbunan Pasir	7,50	M3	129.040,54	967.804,02
h.	***RT 04 RW 02***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	Is	900.000,00	900.000,00
2	Galian Biasa	6,14	M3	59.226,20	363.530,42
3	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Saluran	20,46	M3	1.208.714,72	24.730.303,08
4	Lantai Kerja Beton f'c 10 Mpa	4,65	M3	899.296,20	4.181.727,33
5	Tulangan	1.440,61	Kg	16.216,98	23.362.345,84
i.	***RT 05 RW 02***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	Is	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Galian Biasa	30,39	M3	59.226,20	1.800.168,50
3	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Saluran	83,31	M3	1.208.714,72	100.698.022,96
4	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Jalan	18,01	M3	1.208.714,72	21.764.117,17
5	Lantai Kerja Beton f'c 10 Mpa	15,91	M3	899.296,20	14.307.802,54
6	Tulangan	5.865,94	Kg	16.216,98	95.127.909,67
7	Pasangan Batu dg Finishing Plester + Aci	4,54	M3	733.364,52	3.330.941,65
j.	***RT 02 RW 05***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	Is	500.000,00	500.000,00
2	Galian Biasa	9,91	M3	59.226,20	587.064,31
3	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Saluran	33,04	M3	1.208.714,72	39.936.901,17
4	Lantai Kerja Beton f'c 10 Mpa	6,06	M3	899.296,20	5.449.734,97

No.	ITEM PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
5	Tulangan	2.326,44	Kg	16.216,98	37.727.790,64
k.	***RT 04 RW 07***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	Is	700.000,00	700.000,00
2	Galian Biasa	48,98	M3	59.226,20	2.900.958,50
3	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Saluran	71,15	M3	1.208.714,72	86.000.414,63
4	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Jalan	92,12	M3	1.208.714,72	111.346.436,99
5	Lantai Kerja Beton f'c 10 Mpa	9,08	M3	899.296,20	8.165.609,50
6	Tulangan	5.009,77	Kg	16.216,98	81.243.299,86
7	Pasangan Batu dg Finishing Plester + Aci	78,98	M3	733.364,52	57.918.416,39
8	Timbunan Biasa dari sumber galian	171,69	M3	140.346,51	24.095.390,99
9	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)/ Timbunan Pasir	30,60	M3	129.040,54	3.947.995,19
l.	***RT 01 RW 12***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	Is	700.000,00	700.000,00
2	Galian Biasa	41,38	M3	59.226,20	2.450.756,47
3	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Saluran	72,56	M3	1.208.714,72	87.698.900,55
4	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Jalan	65,38	M3	1.208.714,72	79.021.537,60
5	Lantai Kerja Beton f'c 10 Mpa	13,53	M3	899.296,20	12.162.981,10
6	Tulangan	5.108,71	Kg	16.216,98	82.847.834,00
7	Pasangan Batu dg Finishing Plester + Aci	13,18	M3	733.364,52	9.663.910,97
8	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)/ Timbunan Pasir	24,94	M3	129.040,54	3.217.948,36
m.	***RT 04 RW 12***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	Is	500.000,00	500.000,00
2	Laston Lapis Aus (AC-WC)	102,64	Ton	1.211.454,48	124.340.658,76
3	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	133,88	Liter	13.853,69	1.854.662,16
n.	***RT 02 RW 13***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	Is	700.000,00	700.000,00
2	Galian Biasa	13,16	M3	59.226,20	779.173,96
3	Pembongkaran Pavingblock	479,00	M2	46.532,00	22.288.828,00
4	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Saluran	43,85	M3	1.208.714,72	53.005.766,42
5	Tulangan	3.087,74	Kg	16.216,98	50.073.751,32
6	Timbunan Biasa dari sumber galian	39,18	M3	140.346,51	5.498.776,36
7	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)/ Timbunan Pasir	38,32	M3	129.040,54	4.944.833,33
8	Pemasangan 1 m2 Pavingblock Lama	479,00	M2	132.720,00	63.572.880,00
o.	***RT 03 RW 13***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	Is	500.000,00	500.000,00

No.	ITEM PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
2	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Jalan	17,40	M3	1.208.714,72	21.031.636,05
3	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)/ Timbunan Pasir	5,80	M3	129.040,54	748.435,11
4	Pasangan Batu dg Finishing Plester + Aci	2,26	M3	733.364,52	1.658.870,55
p.	***RT 04 RW 13***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	ls	500.000,00	500.000,00
2	Galian Biasa	13,50	M3	59.226,20	799.539,49
3	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Saluran	3,59	M3	1.208.714,72	4.339.285,83
4	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Jalan	41,41	M3	1.208.714,72	50.051.909,40
5	Tulangan	252,78	Kg	16.216,98	4.099.258,14
6	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)/ Timbunan Pasir	13,80	M3	129.040,54	1.780.759,39
q.	***RT 01 RW 15***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	ls	700.000,00	700.000,00
2	Galian Biasa	30,64	M3	59.226,20	1.814.755,92
3	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Saluran	84,81	M3	1.208.714,72	102.513.512,46
4	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Jalan	17,33	M3	1.208.714,72	20.940.982,45
5	Lantai Kerja Beton f'c 10 Mpa	11,55	M3	899.296,20	10.386.871,11
6	Tulangan	5.971,70	Kg	16.216,98	96.842.975,33
7	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)/ Timbunan Pasir	5,78	M3	129.040,54	745.209,09
r.	***RT 01 RW 16***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	ls	700.000,00	700.000,00
2	Galian Biasa	25,57	M3	59.226,20	1.514.683,41
3	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Saluran	29,45	M3	1.208.714,72	35.590.604,80
4	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Jalan	55,80	M3	1.208.714,72	67.450.511,63
5	Lantai Kerja Beton f'c 10 Mpa	5,66	M3	899.296,20	5.092.264,73
6	Tulangan	2.073,25	Kg	16.216,98	33.621.909,74
7	Pasangan Batu dg Finishing Plester + Aci	93,97	M3	733.364,52	68.916.537,43
8	Timbunan Biasa dari sumber galian	54,19	M3	140.346,51	7.605.026,64
9	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)/ Timbunan Pasir	18,60	M3	129.040,54	2.400.605,61
s.	***RT 03 RW 17***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	ls	500.000,00	500.000,00
2	Galian Biasa	13,21	M3	59.226,20	782.141,20
3	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Saluran	11,47	M3	1.208.714,72	13.863.957,79
4	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Jalan	32,55	M3	1.208.714,72	39.343.663,99
5	Lantai Kerja Beton f'c 10 Mpa	2,33	M3	899.296,20	2.090.863,66

No.	ITEM PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
6	Tulangan	807,61	Kg	16.216,98	13.097.072,67
7	Pasangan Batu dg Finishing Plester + Aci	18,43	M3	733.364,52	13.517.814,86
8	Timbunan Biasa dari sumber galian	6,98	M3	140.346,51	978.916,92
9	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)/ Timbunan Pasir	10,85	M3	129.040,54	1.400.089,81
t.	***RT 02 RW 18***				
1	Pengkuran Topografi dg Theodolit	1,00	ls	500.000,00	500.000,00
2	Beton strukur, fc'20 MPa untuk Jalan	25,31	M3	1.208.714,72	30.595.591,24
3	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)/ Timbunan Pasir	8,44	M3	129.040,54	1.088.779,52
TOTAL					3.301.544.875,40

BAB 8

RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Pelaksanaan pengadaan tanah didasarkan pada peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia yang terkait, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
3. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Prinsip umum pengadaan tanah dan pemukiman Kembali yang dapat diterapkan dalam peningkatan kualitas permukiman maupun pembangunan infrastruktur sebagai berikut :

1. Pengadaan tanah dan pemukiman kembali dilakukan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dan dilakukan agar masyarakat mendapatkan tempat berhuni yang layak dan Warga Terdampak Proyek (WTP) memperoleh manfaat dari kegiatan proyek.
2. Masyarakat dalam hal ini WTP harus dibantu dalam upaya meningkatkan mata pencaharian dan memulihkan mata pencaharian mereka setidaknya sama atau setara dengan kondisi sebelum pengadaan tanah. Diharapkan dari kegiatan ini kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadaan tanah untuk penataan kawasan permukiman dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah;
2. Warga yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya sebagai akibat pengadaan tanah untuk kegiatan program harus segera menerima ganti rugi secara adil;
3. Warga Terdampak yang harus pindah ke lokasi lain sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk kegiatan program, maka harus mendapatkan:
    a. Informasi tentang pilihan dan hak mereka terkait dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali;
    b. Informasi terkait pilihan-pilihan penggantian kompensasi atau kerugian dan mendapatkan pilihan pemukiman kembali yang layak huni;
    c. Kompensasi yang cepat dan efektif dengan penggantian penuh atas kerugian aset yang terkena proyek secara langsung;
    d. Bantuan-bantuan (seperti tunjangan hidup) selama proses relokasi; e. Bantuan perumahan atau lokasi perumahan sesuai yang disetujui bersama oleh para WTP yang setidaknya setara dengan kondisi dilokasi sebelumnya bahkan jika memungkinkan lebih baik;
    e. Dukungan pemulihan mata pencaharian WTP setelah perpindahan dan pada masa transisi berdasarkan kesepakatan bersama; dan
    f. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan relokasi.
4. WTP yang direlokasi, baik untuk permanen maupun untuk sementara, maka perlu diperhatikan lokasi barunya, kemungkinan akan kehilangan mata pencaharian/ pendapatan, kemungkinan berkurangnya akses terhadap fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan, serta keharmonisan dengan warga dilokasi relokasi; dan
5. Jika WTP memutuskan untuk memberikan tanahnya secara sukarela (hibah) atau memberikan izin pakai atau izin untuk dilewati kegiatan proyek, maka harus tercatat sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Penyediaan Tanah merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan pemukiman kembali. Dalam rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Grobogan tidak terdapat rencana peremajaan dan permukiman kembali, namun pemerintah Kabupaten Grobogan tetap berupaya menjamin kesiapan lahan dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh. Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui:

1. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
2. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;

3. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
4. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.

Penyediaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Rencana penyediaan tanah dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman di Kabupaten Grobogan adalah dalam konteks alokasi tempat untuk prasarana dan sarana :

1. Jalan Lingkungan
    a. Pembangunan jalan baru
    b. Perbaikan jalan rusak
    c. Pembangunan dan peningkatan jalan dilengkapi drainase pada sisi kanan-kiri jalan
2. Air Minum
    a. Pembangunan SIPAS (Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana)
    b. Pembuatan Hidran Umum
3. Drainase Lingkungan
    a. Pembangunan saluran drainase lingkungan baru
    b. Perbaikan struktur drainase
4. Air Limbah
    a. Pembangunan septic tank komunal
    b. Pembangunan MCK Umum
5. Persampahan
    a. Pembangunan TPS/ TPS 3R
6. Proteksi Kebakaran
7. RTH Publik

BAB 9

RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Rencana Investasi dan Pembiayaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh merupakan bagian yang akan memuat rumusan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh. Perumusan Rencana Investasi dan Pembiayaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pendanaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Sumber pendanaan dapat berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
   Sumber dana APBN dapat diperoleh untuk pembiayaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan menggunaan anggaran APBN dilakukan dalam program dan kegiatanSkala Kota maupun SKala Kawasan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
   Sumber dana APBD untuk pembiayaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
3. Sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   Sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pembiayaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman

kumuh di Kabupaten Grobogan antara lain melalui CSR swasta. Sumber dana dari CSR ini bisa berkolaborasi dengan sumber dana APBN dan APBD agar penanganan permukiman kumuh dapat tuntas.

Dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan, sumber pendanaan dirumuskan dengan kolaborasi dari berbagai sumber. Dengan demikian, penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh diharapkan dapat mengurangi kekumuhan bahkan menuntaskan kekumuhan. Terdapat beberapa kegiatan yang direkomendasikan ditangani dari berbagai sumber, baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, maupun CSR melalui pihak Swasata.

Rencana investasi dan pembiayaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IX. 1 Rencana Investasi dan Pembiayaan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Grobogan

Aspek Kekumuhan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Sumber Pembiayaan				Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan			
								APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta		I	II	III	IV
SKALA KOTA																
Bangunan Gedung	Penataan muka bangunan bantaran/ kawasan ilegal	Penataan garis sempadan bangunan	17 desa/kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000			17,000,000		DPRKP, BPBD, BPN				
	Pengelolaan kawasan sekitar sungai	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar sungai	17 desa/kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000	10,000,000		7,000,000		Kementerian PUPR, DPU				
		Penataan kawasan sekitar sungai	17 desa/kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000	10,000,000		7,000,000		Kementerian PUPR, DPU				
		Penertiban bangunan di sekitar sungai	17 desa/kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000	10,000,000		7,000,000		Kementerian PUPR, DPU				
	Pengembangan kawasan permukiman	Penataan kawasan permukiman padat dan kumuh	17 desa/kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000	8,000,000		5,000,000	4,000,000	Kementerian PUPR, DPRKP				
		Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	17 desa/kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000	8,000,000		5,000,000	4,000,000	Kementerian PUPR, DPRKP				

Aspek Sekunder	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Sumber Pendanaan				Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan			
								APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta		I	II	III	IV
	Peningkatan kualitas bangunan rumah	Pengembangan Rumah Layak Huni	17 desa/kelurahan	1,000	Unit	17,500	17,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,500,000	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP				
		Peningkatan kualitas RTLH	17 desa/kelurahan	1,000	Unit	17,500	17,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2,500,000	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP				
Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru	17 desa/kelurahan	1,000	m	1,000	1,000,000	500,000		500,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan jalan rusak (berlubang/bergelombang/tergenang)	17 desa/kelurahan	5,000	m	1,000	5,000,000	2,000,000		3,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pembangunan dan peningkatan jalan dilengkapi drainase pada sisi kanan-kiri jalan	17 desa/kelurahan	3,000	m	1,000	3,000,000	1,500,000		1,500,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
Air Minum	Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum	Rehabilitasi unit penyediaan air minum	17 desa/kelurahan	17	Is	200,000	3,400,000	2,000,000		1,400,000		Kementerian PUPR, DPRKP				

Aspek Sekunder	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Sumber Pendanaan				Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan			
								APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta		I	II	III	IV
	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perpipaan dan non perpipaan	Pembangunan SIPAS (Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana)	17 desa/kelurahan	17	ls	150,000	2,550,000	1,550,000		1,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pembuatan Hidran Umum	17 desa/kelurahan	17	ls	100,000	1,700,000	1,000,000		700,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
Drainase	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Perbaikan struktur drainase	17 desa/kelurahan	1,000	m	1,000	1,000,000	600,000		400,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Penggantian komponen gorong-gorong	17 desa/kelurahan	500	m	1,000	500,000	250,000		250,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
	Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Peningkatan kapasitas volume drainase	17 desa/kelurahan	1,000	m	1,000	1,000,000	600,000		400,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung.	17 desa/kelurahan	2,000	m	1,000	2,000,000	1,000,000		1,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Normalisasi Sungai	17 desa/kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000	10,000,000		7,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP				

Aspek Pelayanan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Sumber Pendanaan				Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan			
								APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta		I	II	III	IV
Air Limbah	Peningkatan cakupan pelayanan air limbah	Pembangunan jamban Rumah Tangga	17 desa/kelurahan	17	ls	750	12,750	6,000		6,750		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pembangunan septic tank komunal	17 desa/kelurahan	17	Unit	300,000	5,100,000	3,000,000		2,100,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pembangunan MCK Umum	17 desa/kelurahan	17	Unit	300,000	5,100,000	3,000,000		2,100,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
Persampahan	Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga	17 desa/kelurahan	2,000	Unit	300	600,000	300,000		300,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pengadaan Motor Sampah/ Armada Pengangkutan Sampah	17 desa/kelurahan	34	Unit	40,000	1,360,000	700,000		660,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pembangunan TPS/ TPS 3R	17 desa/kelurahan	17	ls	1,000,000	17,000,000	10,000,000		7,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
Proteksi Kebakaran	Peningkatan cakupan pelayanan proteksi kebakaran	Peningkatan akses motor/mobil pemadam kebakaran	17 desa/kelurahan	17	ls	300,000	5,100,000	3,000,000		2,100,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Penyediaan alat pemadam api ringan	17 desa/kelurahan	400	Unit	500	200,000	100,000		100,000		Kementerian PUPR, DPRKP, Damkar				

Aspek Sekunder	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Sumber Pendanaan				Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan			
								APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta		I	II	III	IV
Kondisi Bangunan Gedung	Pengembangan kawasan permukiman	Pengembangan Rumah Layak Huni	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	157	Unit	17,500	2,747,500	700,000	700,000	700,000	647,500	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP				
		Peningkatan kualitas RTLH	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	157	Unit	17,500	2,747,500	700,000	700,000	700,000	647,500	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP				
Kondisi Jalan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1310	m	1,000	1,310,000	700,000		610,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan jalan rusak (berlubang/bergelombang/tergenang)	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	5292	m	1,000	5,292,000	3,000,000		2,292,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pembangunan dan peningkatan jalan dilengkapi drainase pada sisi kanan-kiri jalan	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	5292	m	1,000	5,292,000	3,000,000		2,292,000		Kementerian PUPR, DPRKP				

Aspek Pelayanan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Sumber Pendanaan				Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan			
								APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta		I	II	III	IV
Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perpipaan dan non perpipaan	Pembangunan SIPAS (Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana)	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	Unit	150,000	150,000	100,000		50,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pembuatan Hidran Umum	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	2	Unit	100,000	200,000	100,000		100,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
Kondisi Drainase Lingkungan	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum terhubung	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	2,000,000	2,000,000	1,000,000		1,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Peningkatan kapasitas volume drainase	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	ls	2,000,000	2,000,000	1,000,000		1,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
	Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Pembangunan saluran drainase lingkungan baru	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	3212	m	1,000	3,212,000	2,000,000		1,212,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Perbaikan struktur drainase	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	977	m	1,000	977,000	500,000		477,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Penggantian komponen gorong-gorong	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	977	m	1,000	977,000	500,000		477,000		Kementerian PUPR, DPRKP				

Aspek Pengembangan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Sumber Pendanaan				Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan			
								APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta		I	II	III	IV
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sarana prasarana air limbah	Pembangunan jamban Rumah Tangga	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	23	Unit	750	17,250	2,250		15,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pembangunan septic tank komunal	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	Unit	300,000	300,000	150,000		150,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pembangunan MCK Umum	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	3	Unit	300,000	900,000	500,000		400,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan	Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	71	Unit	300	21,300	10,000		11,300		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pengadaan Motor Sampah/ Armada Pengangkutan Sampah	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	Unit	40,000	40,000	20,000		20,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pembangunan TPS/ TPS 3R	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	Unit	1,000,000	1,000,000	500,000		500,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
Kondisi Proteksi Kebakaran	Peningkatan cakupan pelayanan proteksi kebakaran	Penyediaan alat pemadam api ringan	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	7	Unit	500	3,500	2,000		1,500		Kementerian PUPR, DPRKP, Damkar				
		Penyediaan alat pemadam api sederhana	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	6	Unit	50,000	300,000	150,000		150,000		Kementerian PUPR, DPRKP				

Aspek Sekunder	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Sumber Pendanaan				Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan			
								APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta		I	II	III	IV
Pengembangan Wisata	Pengembangan RTH Publik	Pembangunan RTH publik	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1	lokasi	1.000.000	1.000.000	900.000		100.000		Kementerian PUPR, DPRKP				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1.500	m	1.000	1.500.000	1.350.000		150.000		Kementerian PUPR, DPRKP				
	Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Pembangunan saluran drainase lingkungan baru di sepanjang jalan inspeksi	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1.500	m	1.000	1.500.000	1.350.000		150.000		Kementerian PUPR, DPRKP				
	Pengembangan bangunan pengaman sempadan sungai	Pembangunan tanggul Sungai Lusi	Kel. Purwodadi & Kel. Kuripan	1.500	m	2.000	3.000.000	2.850.000		150.000		Kementerian PUPR, DPUPR				
Kondisi Bangunan Gedung	Pengembangan kawasan permukiman	Pengembangan Rumah Layak Huni	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1,169	Unit	17,500	20,457,500	6,000,000	5,000,000	4,457,500	5,000,000	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP				
		Peningkatan kualitas RTLH	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1,169	Unit	17,500	20,457,500	6,000,000	5,000,000	4,457,500	5,000,000	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, DPRKP				
Kondisi Jalan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan baru	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	13,738	m	1,000	13,738,000	8,000,000		5,738,000		Kementerian PUPR, DPRKP				

Aspek Pelayanan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Sumber Pendanaan				Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan			
								APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta		I	II	III	IV
	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	Perbaikan jalan rusak (berlubang/bergelombang/tergenang)	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	26,991	m	1,000	26,991,000	15,000,000		11,991,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pembangunan dan peningkatan jalan dilengkapi drainase pada sisi kanan-kiri jalan	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	26,991	m	1,000	26,991,000	15,000,000		11,991,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
Kondisi Penyediaan Air Minum	Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perpipaan dan non perpipaan	Pembangunan SIPAS (Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana)	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	5	Unit	150,000	750,000	400,000		350,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pembuatan Hidran Umum	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	50	Unit	100,000	5,000,000	2,500,000		2,500,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
Kondisi Drainase Lingkungan	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum terhubung	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	5,000,000	5,000,000	2,500,000		2,500,000		Kementerian PUPR, DPRKP				

Aspek Pengembangan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Sumber Pendanaan				Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan			
								APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta		I	II	III	IV
		Peningkatan kapasitas volume drainase	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	1	ls	5,000,000	5,000,000	2,500,000		2,500,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
	Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan baik	Pembangunan saluran drainase lingkungan baru	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	21,356	m	1,000	21,356,000	12,000,000		9,356,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
	Peningkatan kualitas drainase sesuai dengan pola aliran	Perbaikan struktur drainase	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	15,834	m	1,000	15,834,000	8,000,000		7,834,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Penggantian komponen gorong-gorong	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	15,834	m	1,000	15,834,000	8,000,000		7,834,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sarana prasarana air limbah	Pembangunan jamban Rumah Tangga	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	95	Unit	750	71,250	50,000		21,250		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pembangunan septic tank komunal	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	20	Unit	300,000	6,000,000	3,000,000		3,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pembangunan MCK Umum	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	20	Unit	300,000	6,000,000	3,000,000		3,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP				

Aspek Pengembangan	Program	Kegiatan	Lokasi	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp x 1000)	Total Biaya (Rp x 1000)	Sumber Pendanaan				Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan			
								APBN	APBD Prov.	APBD Kab.	Swasta		I	II	III	IV
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan	Pengadaan Tong Sampah Rumah Tangga	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	2,573	Unit	300	771,900	400,000		371,900		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pengadaan Motor Sampah/ Armada Pengangkutan Sampah	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	5	Unit	40,000	200,000	100,000		100,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
		Pembangunan TPS/ TPS 3R	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	2	Unit	1,000,000	2,000,000	1,000,000		1,000,000		Kementerian PUPR, DPRKP				
Kondisi Proteksi Kebakaran	Peningkatan cakupan pelayanan proteksi kebakaran	Penyediaan alat pemadam api ringan	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	35	Unit	500	17,500	10,000		7,500		Kementerian PUPR, DPRKP, Damkar				
		Penyediaan alat pemadam api sederhana	Kel. Purwodadi & Kel. Kalongan	34	Unit	50,000	1,700,000	1,000,000		700,000		Kementerian PUPR, DPRKP				

Sumber: Analisis Penyusun, 2022

BAB 10

RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Dalam upaya mewujudkan kota untuk semua diperlukan keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas filantropi, komunitas, organisasi masyarakat, akademisi/perguruan tinggi, maupun lembaga internasional yang memiliki peran penting untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Indikasi pembagian peran antar aktor pembangunan untuk mewujudkan perumahan dan sarana-prasarana dasar perkotaan dalam hal penanganan kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan terhadap permukiman informal;
b. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan
c. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh.

Selain itu, peran pelaku pembangunan perkotaan juga didorong dengan adanya kemitraan secara vertikal dan horizontal (multi level dan multi aktor) dalam merencanakan, membangun, dan mengelola perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebelum membagi peran antar aktor untuk mengimplementasikan NUA, UN-Habitat telah mengidentifikasi beberapa hal yang dibutuhkan sebagai prasyarat untuk mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan bagi semua, mulai dari kebijakan perkotaan nasional, peraturan perundang- undangan terkait perkotaan, perencanaan dan desain perkotaan, ekonomi dan pembiayaan perkotaan, dan pembangunan fisik perkotaan. Dengan memperhatikan kebutuhan akan lima hal di atas dalam mengimplementasikan pembangunan kota yang berkelanjutan, maka masing- masing aktor dapat mengambil peran. Sebagai perbandingan, dokumen NUA tidak secara spesifik menjabarkan hal-hal apa saja yang menjadi tugas dan wewenang dari masing-masing aktor,

karena bentuk sistem pemerintahan tiap- tiap negara berbeda-beda. Berikut adalah pembahasan singkat mengenai peran apa saja yang diambil oleh para pelaku pembangunan di Indonesia.

Tabel X. 1 Peran Para Pelaku dalam Pembangunan yang Berkelanjutan sesuai Prinsip NUA dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Pemangku Kepentingan		Peran
Pemerintah	Pemetintah Pusat	a. Menyusun kebijakan perkotaan nasional yang mengakomodasi NUA dan SDGs b. Mengkoordinasikan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan pembangunan lintas daerah c. Mendorong terwujudnya kerja sama multi pihak dan multi level pemerintahan untuk mewujudkan NUA
	Pemerintah Provinsi	a. Memperkuat mekanisme kerja sama antar kabupaten/kota b. Bersama dengan pemerintah pusat, mendorong terlaksananya kebijakan perkotaan nasional (jika sudah berlandaskan hukum) di tingkat daerah
	Pemerintah Kabupaten/Kota	a. Menjalankan wewenang dan fungsi pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Memetakan keterkaitan NUA dengan RPJMD c. Mendorong kerja sama dengan badan usaha
	Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan (Seluruh OPD yang ada di Kabupaten Grobogan)	a. Melakanakan koordinai dan singkronisai kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan perumahan dan kawaan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah maupun pelaku lainya b. Melaksanakan koordinasi serta singkronisasi kebijakan dan strategi program naional, dan program penprov di wilayah Kabupaten Grobogan c. Mendukung pengarusutamaan pengembangan perumahan dan kawaan permukiman dalam agenda pembngunan

Pemangku Kepentingan		Peran
		d. Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan forum perumahan dan kawasan permukiman
Non-Pemerintah	Sektor Swasta dan Komunitas Filantropi	a. Menggiatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Corporate Shared Value* (CSV) b. Mendorong KPBU untuk membantu pemenuhan kebutuhan pembangunan perkotaan
	Akademisi dan Perguruan Tinggi	Menyediakan *evidence-based research* sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan perkotaan
	Komunitas dan Organisasi Masyarakat	a. Terlibat aktif dalam berbagai forum pembangunan kota b. Mendorong aspirasi masyarakat terkait pembangunan perkotaan
	Media	a. Memantau perkembangan pembangunan kota secara objektif b. Mengadvokasi isu-isu pembangunan perkotaan yang tengah ramai di masyarakat

Sumber: New Urban Agenda, 2016

Keterlibatan para pemangku kepentingan seperti yang telah disebutkan di dalam Tabel di atas tentu masih banyak yang bisa dilakukan. Namun, yang paling penting adalah mendorong terciptanya kolaborasi dan kemitraan antara para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan NUA. Pendekatan kolaboratif dan kemitraan ini pun sangat didorong di dalam NUA, terlebih karena adanya keterbatasan peran dan kapasitas dari masing-masing aktor pembangunan, termasuk dari segi alternatif pendanaan pembangunan.

Seluruh kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk ikut berkontribusi dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan, termasuk pria dan perempuan, anak-anak dan pemuda, penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas, penduduk asli dan masyarakat lokal, pengungsi, pengungsi internal dan para migran, terlepas dari status migrasi mereka, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, etnis, ataupun status sosial ekonomi. Beberapa upaya dapat dilakukan guna meningkatkan peran aktif seluruh aktor pembangunan, antara lain:

a. Menguatkan peran pemimpin daerah untuk mewujudkan tata kelola yang partisipatif Kondisi tata kelola suatu daerah akan sangat bergantung pada keinginan dari pemimpin daerah tersebut (political will), termasuk dalam hal tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan. Oleh karena itu, peran dari pemimpin di masing-masing daerah perlu diperkuat dalam mewujudkan tata kelola yang partisipatif.

b. Memperkuat keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan perkotaan Perguruan tinggi merupakan pihak yang erat dengan perkembangan ilmu, termasuk ilmu-ilmu yang terkait dengan pembangunan perkotaan. Pelibatan akademisi dalam pembangunan perkotaan dapat memberikan mereka ruang untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang selama ini diajarkan.

Harapan akan keterlibatan seluruh aktor dalam proses pembangunan perkotaan berimplikasi pada keharusan untuk menyediakan mekanisme yang dapat memberdayakan semua pemangku kepentingan. Penguatan kapasitas, khususnya kapasitas pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, perlu dilakukan secara berkala agar dapat meningkatkan kemampuan bekerja bersama dalam membentuk proses tata kelola yang diharapkan.

Terdapat beberapa cara yang dapat dipilih sebagai suatu langkah untuk meningkatkan kapasitas aktor pembangunan, diantaranya adalah:

a. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pelatihan terhadap para aktor pembangunan dilakukan sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Pendidikan dan pelatihan juga sangat penting dilakukan kepada aparatur pemerintah untuk memperkuat lembaga-lembaga nasional, provinsi, dan kabupaten. Pendidikan dan pelatihan ini lebih bersifat formal.
b. Melaksanakan program pembelajaran antar rekan sederajat (peer-to-peer learning) Pembelajaran antar rekan sederajat menjadi salah satu cara yang dapat dipilih dalam mengembangkan kapasitas para aktor pembangunan. Terdapat beragam mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran antar rekan sederajat ini, dapat melalui kegiatan diskusi ataupun dikemas dalam bentuk lainnya.
c. Melaksanakan kegiatan pertukaran informasi dan pengetahuan Pertukaran informasi dan pengetahuan dapat memperbaiki proses pembangunan perkotaan yang sedang atau akan dilakukan. Pertukaran ini akan memberikan kesempatan para aktor untuk saling melengkapi pemahaman yang mereka miliki.
d. Memberikan dukungan teknis kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat Dukungan teknis dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat berupa pendampingan-pendampingan teknis dalam menjalankan program-program pembangunan. Pemerintah pusat, dalam beberapa hal, memiliki kapasitas yang lebih baik sehingga perlu melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
e. Memberikan dukungan teknis kepada masyarakat dari pemerintah Pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga perlu memberikan dukungan teknis yang salah satunya dapat berupa pendampingan, kepada masyarakat, khususnya pada pelaksanaan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
f. Menyamakan pemahaman anggota dewan mengenai isu dan kebijakan perkotaan DPR dan DPRD merupakan bagian penting dari proses penyusunan kebijakan, khususnya dalam hal legislasi karena program-program dan kebijakan pembangunan perkotaan akan membutuhkan persetujuan dari para anggota dewan. Oleh karena itu, pandangan dan pemahaman antara anggota dewan dan pemerintah terkait isu perkotaan yang berkembang perlu disamakan dan diselaraskan.

b. Melibatkan aktor-aktor kunci dalam komunitas dalam mencari solusi bersama Aktor-aktor kunci dalam dembangunan perkotaan, seperti perencana kota, perancang kota, dan lainnya, juga tetap pertu peningkatan kapasitas. Begitu pula dengan aktor-aktor kunci di dalam komunitas, seperti ketua RT , ketua RW, ketua BKM, ataupun organisasi lainnya di tingkat masyarakat.

h. Mendorong BPS menyediakan data yang sesuai dengan kebutuhan NUA Salah satu aktor kunci lainnya Jalam proses pembangunan perkotaan adalah Badan Pusat Statistik (BPS). BPS memiliki peran yang sangat besar karena BPS merupakan lembaga utama penyedia data dan informasi. Seluruh kebijakan dan program pembangunan sangat membutuhkan data dan informasi dalam perencanaan dan evaluasinya.

BUPATI GROBOGAN

TTD

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006